

BUNGA RAMPAI SEJARAH

Dari Pendidikan Islam
Hingga Pelaksanaan Haji

ktorat
yaan

BPSNT Padang
Press

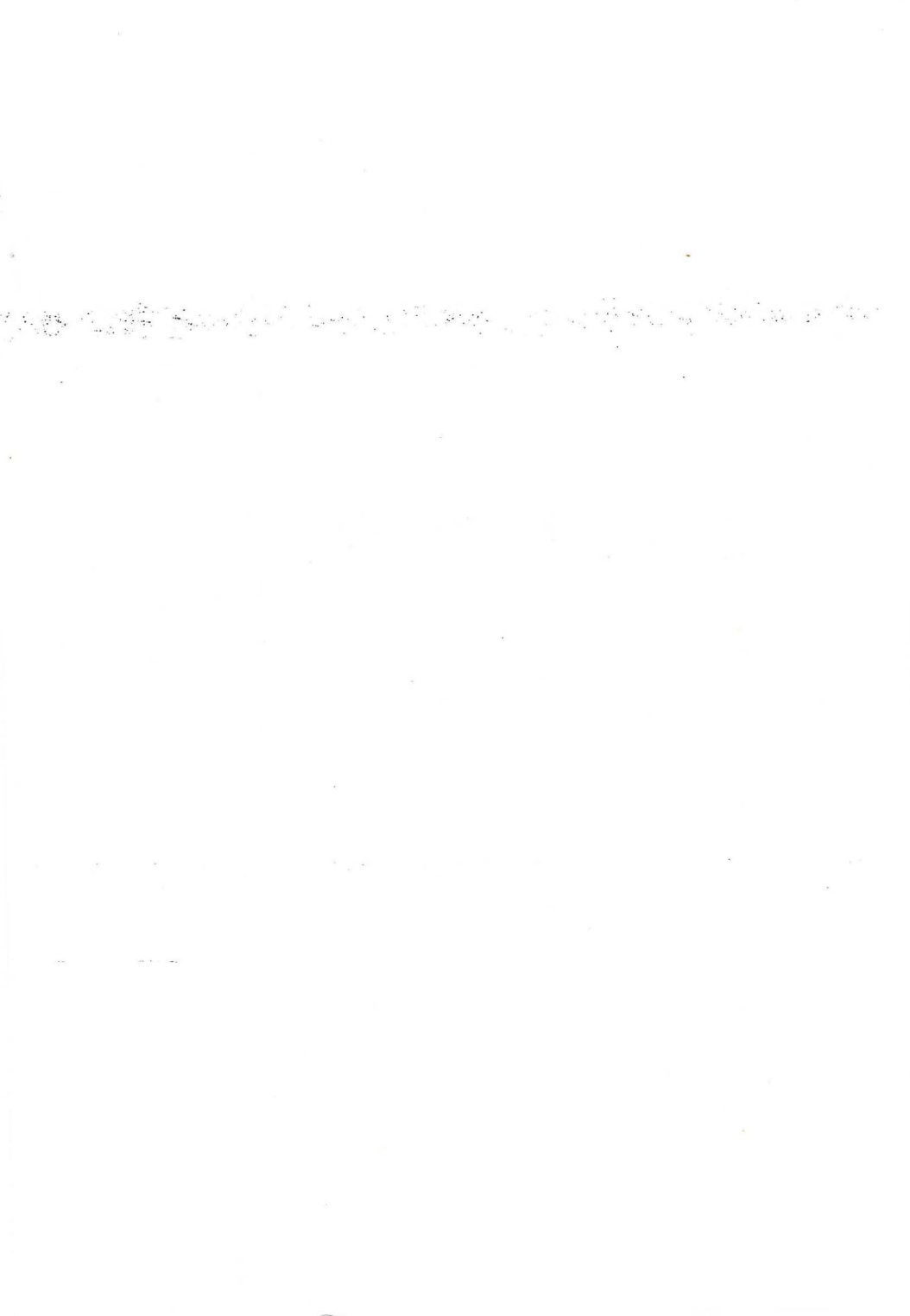


Editor:
Dr. M. Nur, MS

370.9 NUR 6

PERPUSTAKAAN
DIT. NILAI SEJARAH

**Bunga Rampai Sejarah
Dari Pendidikan Islam
Hingga Pelaksanaan Haji**



Bunga Rampai Sejarah
Dari Pendidikan Islam
Hingga Pelaksanaan Haji

Zusnelli Zubir, Jumhari, Ajisman,
Seno, Efrianto



BPNST PadangPress 2010
Zusnelli Zubir, Jumhari, Ajisman,
Seno, Efrianto

Bunga Rampai Sejarah: Dari Pendidikan Islam
Hingga Pelaksanaan Haji

©2010 BPNST PadangPress
Cetakan Pertama: Oktober 2010

Hak Penerbitan pada BPNST PadangPress
*Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau
memperbayak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)*

Editor

Dr. M. Nur

Desain cover

R.L. Arios

Lay-out

CV. FAURA ABADI

Percetakan

CV. FAURA ABADI

I S B N

978-602-8742-26-9

Penerbit:

BPNST PadangPress

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang
Sumatra Barat

Telp/ faks: 0751-496181 www.bpsnt-padang.info

**SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya buku bunga rampai hasil penelitian para peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang dapat dihadirkan ke tangan pembaca.

Buku bunga rampai ini terdiri dari 5 judul yakni *pertama* Keberadaan Pendidikan di Sumatra Selatan pada Zaman Belanda (1910-1942) oleh Seno. *Kedua* Dinamika Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Lahat oleh Efrianto.A. *Ketiga* Pelaksanaan Haji pada Masyarakat Melayu Palembang oleh Zusneli Zubir. *Keempat* Pendidikan Nasionalisme Keturunan Arab di Palembang pada Awal Abad ke-20 sampai Berakhirnya Kekuasaan Kolonial ; Suatu Tinjauan Sejarah oleh Jumhari. *Kelima* SYAFEI IBRAHIM ; Dinamika Perjuangan dan Pengabdian oleh Ajisman.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penerbitan bunga rampai ini, dengan segala kerendahan hati kami terbuka akan kritikan dan saran guna penyempurnaan dalam penerbitan bunga rampai di masa yang akan datang. Semoga buku bungai rampai ini ada manfaatnya dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya daerah di tengah-tengah masyarakat.


Jakarta, Oktober 2010
Direktur Tradisi

Dra. Ropy Savitri
NIP. 19591115 198703 2 001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
* Keberadaan Pendidikan di Sumatera Selatan pada Zaman Belanda (1910-1942) Oleh : Seno.....	1
* Dinamika Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Lahat Oleh : Efrianto.A	44
* Pelaksanaan Haji Pada Masyarakat Melayu Palembang Oleh : Zusneli Zubir.....	87
* Pendidikan Nasionalisme Keturunan Arab di Palembang pada Awal Abad ke-20 Sampai Berakhirnya Kekuasaan Kolonial : Suatu Tinjauan Sejarah. Oleh : Jumhari.....	164
* SYAFEI IBRAHIM Dinamika Perjuangan dan Pengabdian Oleh : Ajisman.....	223

KEBERADAAN PENDIDIKAN DI SUMATERA SELATAN PADA ZAMAN BELANDA (1910 -1942)

Oleh : Seno

A. Pendahuluan

Provinsi Sumatera Selatan terletak pada 102⁰ dan 108⁰ Bujur Timur dan antara 1⁰ 30' dan 4⁰ Lintang Selatan dengan dilintasi Bujur Timur 105⁰. Di sebelah utara daerah ini dibatasi oleh Provinsi Jambi dan Laut Cina Selatan, di sebelah Timur oleh Selat Karimata dan Laut Jawa. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Pada zaman dahulu daerah ini pernah menjadi pusat perdagangan dalam dan luar negeri, setelah munculnya Kerajaan Sriwijaya sebagai suatu *talasokrasi* (suatu kekuatan laut) pada akhir abad ke- VII Masehi. Sebagai suatu kerajaan maritim yang mempunyai armada angkatan laut yang kuat dalam rangka penguasaan Selat Malaka dan Selat Sunda, Sriwijaya juga merupakan pusat studi agama Budha¹. Tetapi kemudian ia berangsur-angsur menjadi lemah pada awal abad ke-XI. Bahkan pada zaman Singasari ketika Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu tahun 1275 dan Sumpah amukti Palapa Gajah Mada telah mengakhiri Kerajaan Sriwijaya di Palembang pada tahun 1377 Masehi.

Setelah Majapahit runtuh, pada tahun 1521 muncul kembali bandar Palembang sebagai pusat penguasa tunggal yang pernah memegang peranan penting di Asia Tenggara. Palembang sebagai tanah asal Raden Fatah berkembang menjadi pusat politik, ekonomi dan kebudayaan dengan Islam sebagai motor penggerak.

¹ Satyawati Suleiman, *Concise Ancient History of Indonesia*, (Jakarta : Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1977), hal. 17.

Ketika zaman Kesultanan Palembang, sebelum Pemerintah Kolonial menguasai daerah ini pada awal abad XIX, secara geografis nama "Sumatera Selatan" mencakup seluruh wilayah bagian selatan Sumatera termasuk Bangka, Belitung. Tetapi setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, daerah ini yang terdiri dari karesidenan-karesidenan, secara bertahap mulai ada usaha ke arah otonomi yang terlepas dari Palembang sebagai ibukota provinsi dan pada tahun 1968 daerah Bengkulu melepaskan diri dari Sumatera Selatan.

Setelah Sumatera Selatan dikuasai Belanda, kemudian dibagi-bagi dalam bentuk karesidenan, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Residen. Masing-masing karesidenan dibagi-bagi lagi menjadi *Afdeling* yang masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Residen. *Afdeling* kemudian dibagi lagi menjadi beberapa *Onder Afdeling* yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Kontreleur (Binenlansche Bestuur Amtenaren)* dengan dibantu oleh Perabot Desa yang terdiri dari *Kerio, Punggawa, dan Khotib*.

Pendidikan di Sumatera Selatan telah mengalami proses yang panjang. Pendidikan, dalam pengertian secara umum, yaitu proses transmisi pengetahuan dari satu orang kepada orang lainnya atau dari satu generasi ke generasi lainnya, telah berlangsung setua umur manusia itu sendiri. Sebab, ketika seseorang mengetahui sesuatu kemudian ia memberitahukan apa yang diketahuinya tersebut, atau suatu generasi menstransmisikan suatu nilai, keyakinan, pandangan hidup, atau pola-pola merekayasa, dan lain-lain kepada generasi berikutnya dapat dikatakan sebagai telah terjadi proses pendidikan.

Proses pendidikan sering terjadi dalam sebuah lembaga. Dan lembaga pendidikan telah mengalami perkembangan, dari bentuknya yang paling sederhana, asasi dan primitif yakni keluarga dan masyarakat sampai yang modern, berbentuk lembaga pendidikan berbasis sekolah.

Kedua lembaga pendidikan ini telah menjalankan fungsi pendidikan dengan setia menyediakan sarana pembelajaran yang sedikit banyak telah mengeluarkan lulusan-lulusannya sendiri. Sementara itu, lembaga pendidikan modern telah sebagiannya mengambil alih tugas pendidikan keluarga dan masyarakat. Karena sekolah memberikan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan seseorang ketika dia harus menjalani hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Lembaga pendidikan sekolah di Sumatera Selatan hingga saat ini terus mengalami perubahan, Dengan perubahan tersebut, sekolah mampu memperkokoh dirinya sebagai lembaga pendidikan yang terpenting. Dengan demikian, sekolah menghegemoni kehidupan masyarakat. Sampai-sampai sekolah hampir mewakili seluruh konsep pendidikan itu sendiri. Sehingga dikatakan orang yang terdidik adalah orang yang bersekolah; orang yang pintar adalah orang yang sekolah; sekolah dapat mencetak orang yang baik dan bermoral; orang intelek, ilmuwan, profesor hanya lahir dari bangku sekolah; dan seterusnya.

Walaupun tidak menafikan banyak ilmuwan, tokoh panutan, orang cerdas lahir di luar bangku sekolah. Sekolah dalam pengertian ini menjalankan fungsi pemberdayaan kemampuan, terutama otak manusia. Karena optimalisasi otak ini, hampir semua kemajuan dalam sektor kehidupan banyak mengalami perubahan-perubahan yang berarti. Sains dan teknologi menjadi ciri penanda dari sebuah pencapaian yang spektakuler.

Kemajuan pendidikan mencapai puncak kegemilangan dengan pecahnya revolusi ilmiah yang menandai kejayaan ilmu pengetahuan. Pengetahuan sebagai simbol tertinggi pencapaian akal manusia segera menyebar ke seluruh dunia. Pada saat ini akal mengalami pendaya-gunaan yang signifikan setelah sebelumnya otak manusia mengalami kejumudan (stagnasi). Dengan semangat empirisme dan

rasionalisme manusia dapat memperoleh kemajuan-kemajuan yang sangat berarti. Aspek kemajuan yang menunjang tercapainya kepentingan-kepentingan manusia relatif terpenuhi. Dengan semangat ilmu untuk ilmu, segala macam segi-segi yang menyangkut hajat manusia tidak luput dari kehalusan akal manusia untuk dijelajahi seluruhnya. Temuan demi temuan dan kemajuan demi kemajuan dari ilmu pengetahuan mengantarkan manusia kepada kecenderungan antroposentrisme yang diindikasikan dengan anti-teologis, rasionalistis dan bersemangat utilitarian.

Senada dengan hal di atas adalah seperti apa yang dikatakan oleh Alexis Carrel ketika menyatakan :

Ilmu pengetahuan yang telah mengubah dunia materi, memberi manusia kekuatan untuk mentransformasikan dirinya. Ilmu pengetahuan telah menyingkapkan beberapa mekanisme rahasia hidup manusia dan telah pula memperlihatkan kepada manusia bagaimana cara mengubah gerak mekanisme itu, cara mencetak tubuh dan jiwanya menurut pola-pola yang terlahir dari keinginan-keinginannya. Untuk pertama kali dalam sejarah, umat manusia dengan bantuan ilmu pengetahuan telah menjadi pengatur nasibnya sendiri".²

Puncak penaklukan akal manusia ini disebarkan dari individu ke individu lainnya melalui apa yang disebut pendidikan. Perwujudannya dapat dilihat dari proses transmisi pengetahuan melalui lembaga-lembaga non-formal, informal dan terutama jalur formal. Proses transmisi pengetahuan berhasil dengan relatif sukses sehingga akusisi pengetahuan oleh generasi penerus menjadi sebuah kemustian. Di sinilah

² Alexis Carrel, *Man, The Unknown*, alih bahasa Kania Roesli, (Bandung : Remadja Karya, 1987), hal. 244.

proses – meminjam istilah Arthur Bestor³ pelatihan intelektual menjadi ciri khusus bagi pendidikan secara umum.

Agen pelatihan intelektual menjadi sebuah kunci untuk memahami mengapa manusia masih merasa kehilangan sesuatu. Ternyata sebenarnya sebuah kecerdasan intelektual hanyalah merupakan sebagian kecil dari misteri keajaiban manusia. Manusia masih mempunyai potensi kecerdasan lain seperti yang diistilahkan oleh Howard Gardner dengan kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Dalam terminologi psikologi humanistik, khususnya psikologi intrapersonal dinyatakan bahwa ternyata manusia mempunyai dimensi fisik, psikis, dan neotik. Fenomena neotik dipertegas dengan konsep Got-spot-nya Jean Paul Sartre.⁴

Dengan demikian, pendidikan sebagai agen pelatihan intelektual di sini diharapkan tidak hanya berhenti pada akuisisi semangat revolusi ilmiah abad ke XVII dan sampai abad ke XX (melejitnya ilmu-ilmu sosial yang mengangkat kajian atas masyarakat kontemporer) yang mengantarkan manusia pada arogansi humanisme yang berujung pada antroposentrisme akan tetapi juga diarahkan pada semangat yang dirintis semenjak abad ke XX yang juga mencoba menumbangkan semangat anti teologis dengan mengembalikan teologi ke kampus-kampus sehingga mengakuisisi semangat teosentrisme.

Teosentrisme mengasumsikan sebuah eksistensi kekuatan lain yang di luar diri manusia. Kekuatan yang mengarah kepada sebuah kekuatan yang Maha Dahsyat yang bisa didiskusikan secara ilmiah. Ini sebagai langkah reaktif atas, seperti ungkapan Alexis Carrel, penaklukan dunia materi, yang terus menerus menyerap perhatian dan minat

³ Arthur Bestor, "Dasar-Dasar Pendidikan", dalam *Menggugat Pendidikan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hal. 206-207.

⁴ Abdullatif, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hal. 3.

manusia, telah menyebabkan dunia organik dan spiritual sama sekali terlupakan.

Pada dasarnya pendidikan secara umum mempunyai tugas suci dan mulia, yaitu memberdayakan ummat manusia sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya secara penuh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Pendidikan memegang tugas mentransformasikan individu-individu menjadi manusia sejati, yakni manusia sempurna yang mampu menggali kecerdasan-kecerdasannya untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Kecerdasan-kecerdasan di sini mengasumsikan berbagai jenis kecerdasan yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berjiwa yang berbeda dengan makhluk lainnya. Banyak ahli yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpotensi untuk menjadi rasional, sosial dan spiritual.

Sebagai makhluk rasional adalah makhluk yang memiliki akal yang bisa mengabstraksikan bukan hanya realitas empiris bahkan juga realitas non-empiris. Realitas empiris adalah dunia yang kualitas dan kuantitasnya bisa diamati oleh indera manusia, dengan ruang dan waktu sebagai pengukurnya. Sementara itu, realitas non-empiris mengandaikan sebuah realitas yang kualitasnya hanya bisa diukur dengan cara merasakan.⁵

Sebagai makhluk sosial adalah bahwa manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki dimensi kebersamaan dengan orang lain. Teori psikoanalisa misalnya, menyatakan bahwa manusia mempunyai pertimbangan moral sosial (superego) ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan berperilaku. Sedangkan ilmu humaniora menjelaskan realitas sosial sebagai sebuah organisme hidup dalam bentuk teori-teori sosial tentang kehidupan manusia dalam bentuk masyarakat.

⁵ Abdullatif, *Ibid.*, hal. 4.

Sebagai makhluk spiritual adalah makhluk yang mempunyai keyakinan terhadap suatu kenyataan tentang adanya sesuatu yang melampaui segala sesuatu, bahkan pengetahuan. Sesuatu yang, di satu sisi, secara konseptual bahkan dapat menguras pikiran manusia dalam bentuk berjilid-jilid buku, tanpa bersiap untuk mengatakan bahwa segi-seginya telah selesai dibahas. Namun di sisi lain, itu adalah sesuatu yang secara sederhana dan praktis bisa dirasakan dalam diri setiap orang. Dari bentuknya yang paling irasional dan rasional manusia telah mencoba untuk mengenali dan mengakui adanya Yang Maha Segalanya. Dalam hal ini, agama menjadi simbol pengakuan secara sistematis tentang keberadaan Tuhan.

Sejarah pendidikan Indonesia telah mengalami banyak dinamikanya sendiri seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia itu sendiri. Kadang dapat diukur kualitas kemampuan dan watak bangsa dengan melihat kecenderungan pendidikannya. Kualitas pendidikan yang relatif baik bisa menghasilkan *output* yang relatif baik pula. Demikian sebaliknya, pendidikan yang relatif kurang baik akan menghasilkan *output* yang kurang memadai.

Inferensi yang demikian bisa dibuat dengan mengasumsikan pendidikan sebagai *social engeneering* (rekayasa sosial) untuk memproduksi individu-individu dan akhirnya membentuk suatu masyarakat sesuai dengan yang diinginkannya. Konsekuensinya, masyarakat yang relatif baik akan menjelma menjadi suatu bangsa yang secara keseluruhan dianggap relatif baik pula.

Selain tujuan politik, ekonomi dan sosial, pendidikan sering dianggap sebagai wahana untuk mewarnai suatu bangsa. Banyak orang berandai-andai, jika pendidikan di Indonesia mendapatkan perhatian semestinya, mungkin bangsa ini akan bisa berdiri tegak dan sejajar dengan bangsa lain dan mempunyai peradaban yang agung. Begitu pun

ketika banyak sekali terjadi ketidak teraturan atau ketimpangan sosial, dekadensi atau imoralitas, sering kali pendidikan dianggap sebagai pihak pertama yang harus disalahkan.

Dengan mengambil hikmah dari kemungkinan adanya kekurangan dalam bidang pendidikan, mungkin lebih baik jika semua pihak mencoba menggagas kembali pemikiran-pemikiran dan selanjutnya mengeluarkannya dari sekolah-sekolah atau kampus-kampus sehingga menjadi kesadaran bersama, kesadaran masyarakat, bahwa walaupun pendidikan bukanlah satu-satunya sebab kesalahan, namun pendidikan harus diamati kembali kinerjanya baik dalam ranah teoritis maupun praktis.

Pendidikan sebagai mesin yang memproduksi pengetahuan akan menguji kembali epistemologi pengetahuan itu sendiri dalam ranah teoritis yang bersifat kognitif dan juga aksiologi nilai yang diaplikasikan dalam perilaku aktual dalam ranah praktis yang bersifat afektif. Dalam hal ini, pengetahuan-pengetahuan yang sarat dengan nilai-nilai normatif perlu mendapatkan telaah yang substansial dan komprehensif.

B. Pendidikan Pemerintah Belanda

1. Pengaruh Politik Etika

Sejak awal abad ke xx di seluruh dunia terdapat perkembangan dan pembaharuan, khususnya pada bidang politik, ekonomi dan idil dan demikian pula di Indonesia. Perusahaan-perusahaan Eropa di Indonesia mengalami kemajuan pesat dan berkembang dengan cepat. Dengan demikian mereka membutuhkan pekerja-pekerja yang terdidik dan ahli. Selain itu, penduduk Bumiputera sendiri mulai bangkit dan menyadari dirinya sendiri.

Namun secara menyeluruh bagi rakyat pada umumnya tidak dirasakan adanya perbaikan sosial. Di kalangan orang-orang Belanda sendiri timbul aliran-aliran untuk memberikan kepada penduduk asli bagian dari keuntungan yang diperoleh orang-orang Eropa (Belanda) selama mereka menguasai Indonesia. Aliran ini berpendapat bahwa orang-orang Bumiputera harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan Barat yang telah menjadikan Belanda bangsa yang besar. Aliran atau faham ini dikenal sebagai Politik Etis (*Etische Politiek*).

Gagasan mengenai politik etis (*Etische Politiek*) ini dicetuskan oleh Van Deventer pada tahun 1899 dengan mottonya "Hutang Kehormatan" (*de Ereschuld*). Politik Etis ini diarahkan untuk kepentingan penduduk Bumiputera dengan cara memajukan penduduk asli secepat-cepatnya via pendidikan secara Barat.

Langkah politik baru ini menjadi lebih terkenal dengan slogannya Pendidikan, Irigasi dan Transmigrasi. Oleh karena itu, dalam dua dasawarsa semenjak tahun 1900 Pemerintah Belanda banyak mendirikan sekolah yang berorientasi pada cara berfikir orang Barat. Berbeda dengan Snouck Hurgronje yang mendukung pemberian pendidikan kepada golongan Aristokrat Bumiputera, maka Van deventer menganjurkan pendidikan Barat kepada orang-orang golongan bawah atau rakyat biasa.

Tokoh ini tidak secara tegas menyatakan bahwa orang-orang dari golongan rakyat biasa harus didahulukan, tetapi ia menganjurkan supaya rakyat biasa tidak diabaikan, dan oleh karena itu banyak didirikan sekolah-sekolah Desa yang berbahasa pengantar bahasa daerah, di samping sekolah – sekolah yang berorientasi Barat dan berbahasa

pengantar bahasa Belanda.⁶ Sehubungan dengan “arah Etis” (*Etische Koers*), yang menjadi dasar landasan dari langkah-langkah dalam pendidikan di Hindia Belanda maka Pemerintah mendasarkan kebijaksanaannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk Bumiputera, dan untuk itu bahasa Belanda diharapkan menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
2. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Atas dasar itu pulalah, maka corak dan sistem pendidikan dan persekolahan di Hindia Belanda pada abad ke- XX dapat ditempuh melalui dua jalur. Di satu pihak melalui jalur pertama diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur-unsur dari lapisan atas serta tenaga terdidik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan ekonomi. Di pihak lain, terpenuhi kebutuhan tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan.⁷

Berdirinya sekolah Desa (Sekolah Angka tiga) dapat dihubungkan dengan pasal 1 Surat Keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*) tertanggal 28 September 1892 Nomor 44 (Lembaran Negara 1893 Nomor 125) yang membagi sekolah Negeri Bumiputera di Hindia Belanda dalam dua kategori yaitu Sekolah Kelas Satu dan Sekolah Kelas Dua.⁸ Sekolah Desa atau Angka Tiga diperuntukkan bagi penduduk Bumiputera pada umumnya, sehingga rencana pelajarannya sangat sederhana (hanya sampai kelas tiga) dan lama pendidikannya

⁶ *Pendidikan di Indonesiaa Dari Zaman ke Zaman*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979, hal. 63.

⁷ *Ibid.*, hal. 63-64.

⁸ *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hal. 5-6.

tiga tahun saja. Itulah sebabnya disebut dengan istilah "Sekolah Angka Tiga" atau lazim dikenal dengan nama "Sekolah Desa" yang dalam bahasa Belanda disebut *Volks School*) dengan bahasa pengantarnya bahasa daerah. Sesuai dengan tujuannya yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan tenaga terdidik bagi keperluan administrasi pemerintah tingkat rendah (Marga), maka jumlah sekolah yang dibuka waktu itu sangat terbatas dan hanya terdapat pada tingkat Distrik atau Marga saja. Baru pada tahun 1900 ada sekolah yang dikenal dengan Sekolah angka Tiga yang lama pendidikannya tiga tahun. Tetapi kemudian dalam perkembangannya Sekolah Angka Tiga tersebut ditambah dengan dua tahun lagi, yang dikenal dengan nama "Sekolah Sambungan" (*Vervolgsschool*) di ibukota Marga saja. Sedangkan Sekolah Angka Tiga hanya dibuka di desa-desa yang dianggap perlu.

2. Pendidikan Sekolah Dasar

2.1. ELS (*Europesche Lagere School*)

Pendidikan bagi anak-anak pegawai Pamong Praja (*Binenlands Bestuur Amtenaren*) termasuk anak-anak Residen, Asisten Residen dan Kontrolir. Sekolah tersebut hanya terdapat di tempat di mana penguasa-penguasa tersebut berdomisili, yang lama pendidikannya tujuh tahun.

Menurut keterangan M.Z. Oemar dan M. Toha,⁹ bahwa ELS sudah ada sebelum HIS didirikan di Sumatera Selatan. Di kota Palembang hanya ada sebuah ELS yang terletak di Jalan Gubah yang sekarang ditempati SMP Negeri XIII Palembang. Sedangkan di luar kota Palembang hanya terdapat di kota

⁹ MZ Oemar adalah seorang pensiunan pegawai Perwakilan Dep. P dan K Sumatera Selatan dan M. Toha adalah pensionan PSK Dinas P dan K Kabupaten Lahat, wawancara dilakukan pada tanggal 23 April 2010 di Palembang.

Lihat sebuah di mana gedungnya sekarang ditempati oleh Taman Kanak-Kanak Persit.

2.2. HCS (*Hollandsch Chinese School*)

Seperti halnya di Jawa, Pemerintah Hindia Belanda tidak hanya memperhatikan pendidikan anak-anak Bumiputera saja, melainkan juga terhadap anak-anak Timur Asing, khususnya bangsa China. Untuk kebutuhan itu, didirikan HCS (*Hollandsch Chinese School*) dengan bahasa pengantarnya bahasa Belanda dan lama pendidikannya 7 tahun. Berdirinya HCS di Palembang tidak jauh berbeda waktunya dengan berdirinya HIS (*Hollandsch Inlandsche School*), yaitu pada tahun 1920. Di kota Palembang sendiri hanya terdapat sebuah HCS, yang pada tahun 1930 dipimpin oleh Yohanes Hendricus Antonius Wiederhooff.¹⁰ Mengenai tempat sekolah itu menurut keterangan Pastor van Gisbergen SCJ berada di 7 Ulu Palembang. Di samping itu selain di Palembang, sekolah semacam itu juga terdapat di Prabumulih, Muara Enim dan Tanjung Enim.

2.3. HIS (*Hollandsch Inlansche School*)

Sekolah ini adalah Sekolah Rendah untuk golongan penduduk keturunan Indonesia Asli (Bumiputera), yang lama pendidikannya 7 tahun, berbahasa pengantar bahasa Belanda. Berdirinya HIS di Karesidenan Palembang ada hubungannya dengan usaha Pemerintah Belanda di daerah ini dalam perluasan pemakaian bahasa Belanda di kalangan penduduk Bumiputera, dan sesuai dengan Surat Keputusan

¹⁰ Akte Notaris Yayasan Xaverius Palembang Nomor 11 tanggal 5 Mei 1930. (Notaris Christian Maatuis).

Ratu tertanggal 16 Februari 1914 No. 23 (Lembaran Negara 1914 Nomor 762).¹¹

Minat masyarakat agar anak-anaknya bersekolah di HIS cukup besar. Tetapi ada beberapa hal yang membatasi minat tersebut, di antaranya yaitu adanya surat rahasia Direktur PAK lama bernama MS. Kaster tertanggal 29 Oktober 1910 Nomor 235 yang menyatakan : penerimaan murid pada sekolah Bumiputera Kelas 1 (HIS) pertama-tama harus dipertimbangkan dahulu anak-anak dari orang bangsawan, terkemuka dan berada (kaya).¹² Oleh karena itu, yang dapat diterima sebagai murid HIS diutamakan anak-anak Pasirah, Pembarap, Demang dan pegawai-pegawai Pemerintah. Itupun harus melalui seleksi yang ketat.

Kota Palembang baru didirikan HIS pada tahun 1920. Dalam perkembangannya ada dua buah HIS, yaitu HIS I dan HIS II, yang keduanya berlokasi di Jalan Kebun Duku.

Berdirinya HIS di luar kota Palembang disebabkan adanya desakan masyarakat setempat, sehingga terpaksa Pemerintah Belanda mendirikan HIS Martapura, Baturaja, Muara Enim, Lahat dan Tanjung Pandan (Belitung). Di Tobali (Bangka) pernah juga didirikan HIS, tetapi karena beberapa hal terpaksa ditutup pada tahun 1940.¹³

HIS Baturaja didirikan pada tahun 1938 dan merupakan salah satu HIS yang dipimpin oleh orang Bumiputera yaitu Abdullah Nawawi dari sekian banyak HIS yang kesemuanya dikepalai oleh orang Belanda, dan salah seorang gurunya disebut Nuronil Adil. Sedangkan HIS Lahat dikepalai oleh Van Zijl dan sekolah ini berlokasi di Jalan Talang Jawa yang sekarang ditempati SD Negeri 3 Lahat.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hal. 211.

¹² *Ibid.*, hal. 169.

¹³ *Kementerian Penerangan Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan*, (Palembang : 1954), hal. 269.

2.4. Sekolah Kelas Dua

Sekolah ini merupakan Sekolah Rendah untuk Bumiputera, yang masa pendidikannya selama lima tahun berbahasa pengantar bahasa daerah. Sesuai dengan susunan Pemerintah Hindia pada waktu itu, di mana daerah ini dibagi atas *afdeling*, *Onderafdeling*, *Distrik*, *Onderdistrik*, Marga dan Dusun, maka di setiap daerah *Onderafdeling* yang dikepalai oleh *Controleur* didirikan Sekolah Kelas Dua, kecuali di Gunung Megang yang bukan merupakan tempat kedudukan *Controleur*.

Dengan dibukanya Sekolah Kelas Dua ditempat tersebut, merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat setempat. (Gunung Megang), yang pernah menjadi Kepala Sekolah di sana adalah Adnan dan AR Rahman. Sedangkan di kota Palembang yang terbagi dua oleh Sungai Musi menjadi wilayah Seberang Ulu dan Seberang Ilir, masing-masing ada sebuah Sekolah Kelas Dua. Untuk Seberang Ilir sekolah tersebut terletak di Jalan Segaran 11 Ilir Palembang dan sekarang ditempati oleh dua SD Negeri, yaitu SD No. 3 dan SD No. 39. Di Seberang Ulu sekolah tersebut terletak di 8 Ulu. Dalam perkembangan selanjutnya di wilayah Kotamadya Palembang terdapat lima buah Sekolah Kelas Dua, yaitu terletak di 11 Ilir, Boom Baru, Bukit Kecil Tangga Buntung dan 8 Ulu. Pada umumnya guru-guru Sekolah Kelas Dua ini merupakan produk *Normaal Cursus* di Palembang.

2.5. Volks School

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda dalam pengembangan pendidikan bagi penduduk Bumiputera didasarkan pada pokok pikiran tentang memberikan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Perbedaan kehidupan dan penghidupan antara kota

dan desa menjadikan pola perbedaan dan corak pendidikan yang diberikan. Penduduk desa membutuhkan pendidikan rakyat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu yang berkaitan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk desa. Oleh karena itu, pelajaran yang diberikan mempunyai arti yang penting bagi perjuangan hidupnya yaitu :

1. Memperbaiki pengertian tentang pertanian dan perkebunan buah-buahan.
2. Memberi pengertian sehat tentang peternakan.
3. Mengembangkan ketrampilan dan rasa seni dalam mengerjakan kain dan bahan yang diketemukan di daerah di mana ia bertempat tinggal.¹⁴

Sesuai dengan susunan Pemerintahan seperti tersebut di atas, Sekolah Desa (*Volks School*) ini hanya terdapat di marga-marga dan dusun-dusun. Dalam soal pembiayaan merupakan atanggung jawab Marga setempat. Perlu diketahui bahwa Pesirah di sini yang merupakan penguasa tradisional, jauh lebih kaya dari pada seorang Demang (Wedana), karena ia mempunyai hak untuk memungut pajak serta mengumpulkan hasil daerah yang langsung dikuasainya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap Marga berusaha mendirikan sekolah-sekolah tersebut.

Senada dengan Surat Direktur MS. Koster kepada Gubernur Jenderal Van Heutz tertanggal 23 Nopember 1908 Nomor 17036 yang tetap mempertahankan hidupnya sekolah-sekolah rakyat yang sederhana meskipun pada tiap-tiap Controleur ada Sekolah Kelas Dua.¹⁵ *Volks School* ini terus ada sampai berakhirnya kekuasaan Kolonial Belanda dengan datangnya tentara pendudukan Jepang di Sumatera Selatan.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. cit.*, hal. 31.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 115.

2.6. *Vervolg School*

Gagasan mendirikan sekolah *Vervolg School* dalam rangka pengembangan pendidikan bagi penduduk Bumiputera, didasarkan pada suatu pendapat bahwa tidaklah cukup hanya mengandalkan kepada perluasan Sekolah Desa Tiga tahun saja, karena pengetahuan yang didapatkan sangat minim. Tipe sekolah ini hanya dapat diterima dalam kerangka fase pertama pemberantasan buta huruf, karena secara edukatif sangat kecil artinya.

Pernyataan ini tidak mengimplikasikan untuk memperkecil nilai paedagogis Sekolah Desa, jika menghargai kegunaan dalam lingkungan di mana sama sekali tidak ada sekolah. Menurut pengalaman, meskipun hasilnya kecil secara murni edukatif, namun mempunyai arti sosial yang penting. Tetapi Sekolah Desa baru benar-benar sekolah, apabila membuka pintu untuk memasuki Sekolah Rendah yang lebih sempurna. Untuk itu harus juga secara relatif disediakan kesempatan. Jadi di samping perluasan Sekolah Desa, harus diadakan penyebaran Sekolah *Vervolg* secara lebih luas. Untuk sementara diperkirakan perbandingan jumlah Sekolah *Vervolg* dengan Sekolah Desa di luar Jawa dan Madura sebagai perbandingan 20 : 1.

Baik susunan pemerintahan tradisional di Sumatera Selatan maupun penyebaran penduduknya yang berbeda dengan keadaan di Jawa. Sekolah *Vervolg* yang merupakan Sekolah Sambungan dari Sekolah Desa Tiga tahun, yang terdiri dari kelas empat dan kelas lima, jumlahnya tidak banyak. Lain halnya dengan Sekolah Desa yang pembiayaannya ditanggung oleh Marga. Sekolah *Vervolg* ini oleh Pemerintah didirikan di ibukota Marga pada umumnya. Baik *Volks School* maupun *Vervolg School* tenaga guru-gurunya dikenal sebagai guru bantu atau magang tamatan *Kweekeling* atau CVO (*Cursus Volks Onderwijzer*). Di kota Palembang tidak terdapat Sekolah *Vervolg* karena Pemerintah

mendirikan Sekolah Kelas Dua, yang lengkap dari kelas satu sampai kelas lima.

2.7. Schakel School

Dalam menghadapi kritik yang datang dari berbagai pihak terhadap sistem pendidikan rendah untuk orang Bumiputera, bahwa HIS walaupun dalam arti yang sebenarnya bukan Sekolah Ningrat, terutama disediakan untuk anak-anak dari kaum paling terkemuka dalam masyarakat Indonesia, dan bahwa anak-anak yang masuk di Sekolah Kelas Dua, relatif mempunyai sedikit kemungkinan untuk melanjutkan belajar.

Kedua masalah tersebut telah dibahas dalam pidato pada tanggal 21 Juli 1918 di Dewan Rakyat mengenai keseluruhan politik pendidikan dan di dalam pidato itu diuraikan, bahwa ada kemungkinan untuk mengatasi kedua persoalan tersebut. Dalam usaha mencari perbaikan yang diadakan oleh Direktur Pendidikan dan Agama K.F. Greutzberg dalam pembicaraan dengan Inspektur Pendidikan HIS yang bernama Hellwing mengenai kemungkinan mempersiapkan siswa-siswa yang sangat pandai dari kelas empat atau lima di Sekolah Kelas Dua Bumiputera untuk melalui semacam Sekolah Peralihan dapat melanjutkan belajar di MULO (*meer Uitgebreid Leger Onderwijs*). Sudah barang tentu di sekolah tipe baru ini harus diajarkan bahasa Belanda dengan intensif. Baik Dewan Hindia maupun Dewan Rakyat tidak berkeberatan dan ternyata gagasan K.F. Creutzberg tersebut di atas disetujui oleh Pemerintah, sehingga pada tahun 1921 dibuka Sekolah Peralihan yang pertama di Bandung dan Padangpanjang.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hal. 60-61.

Sekolah peralihan semacam ini di daerah Sumatera Selatan hanya ada satu buah dan didirikan pada tahun 1930. Murid-muridnya berasal dari Sekolah Kelas Dua yang telah menyelesaikan pelajaran di Kelas Tiga dengan melalui saringan yang ketat. Dengan kata lain murid-murid yang dapat diterima adalah mereka yang terpandai. Lama pendidikan lima tahun dan bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Mereka yang menyelesaikan di Sekolah Peralihan ini dapat disamakan dengan murid-murid lulusan HIS dan dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, misalnya MULO. Sekolah Peralihan (*Schakel School*) ini meskipun hanya ada satu buah saja di Sumatera Selatan, tetapi jumlah muridnya tidak banyak dan rata-rata 30 orang murid pada tiap kelas. Di antara guru-gurunya adalah Sutan Takdir alisyahbana, Saaduddin Djambek, M. Hutasoit dan MS. Oemar. Sekolah yang terkenal dengan nama *Openbare Schakel School* ini berlokasi di 15 Ilir, yang sekarang ini ditempati oleh SD No. 2 dan No. 24 Palembang.

3. Pendidikan Menengah Umum

MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*)

Sekolah ini merupakan satu jenis sekolah lanjutan yang menurut sistem persekolahan Belanda digolongkan dalam Sekolah Dasar, yaitu Sekolah Dasar yang lebih luas, kelanjutan dari Sekolah Dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. Lama pendidikan antara tiga sampai empat tahun. Sekolah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) didirikan untuk pertama kalinya pada tahun 1914 dan diperuntukkan bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing.¹⁷

¹⁷ BP3K, *Pendidikan di Indonesia 1900 – 1974*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976, hal. 38.

Di Sumatera Selatan menurut keterangan Zainal Abiddin Ahmad, hanya ada sebuah MULO yang didirikan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1930. Gedungnya terletak di Jalan Talang Semut Lama, yang sekarang ditempati oleh SMP Negeri 1 Palembang. Jumlah kelas setelah dalam perkembangannya menjadi 8 kelas yang terbagi atas dua kelas persiapan (*voor klas*), 2 kelas satu, 1 kelas dua bagian A, 1 kelas dua bagian B, 1 kelas tiga bagian A dan 1 kelas tiga bagian B. Sekolah ini memperoleh siswanya dari tamatan dua buah HIS dan HCS yang ada di kota Palembang. Oleh karena melalui saringan yang cukup ketat, maka MULO tersebut tidak banyak siswanya, dan diperkirakan rata-rata per kelasnya hanya 30 orang siswa, dan salah satu di antara guru-gurunya yang berkebangsaan Indonesia adalah RHA Rani.

4. Pendidikan Kejuruan

Sekolah Guru (*Kweekschool*)

Lembaga pendidikan keguruan ini adalah lembaga yang tertua dan sudah ada sejak awal abad ke-XIX. Mula-mula yang mendirikan lembaga ini adalah kalangan Zending dan Missi dalam bentuk kursus-kursus. Sekolah Guru Negeri yang pertama didirikan pada tahun 1851 di Surakarta. Sedangkan sebelum itu, Pemerintah Belanda telah menyelenggarakan kursus-kursus guru yang bernama *Normal Cursus* yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru-guru Sekolah Dasar. Pada awal abad XX sejalan dengan perkembangan dan kemajuan di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pendidikan Guru juga mengalami perubahan dan akhirnya terdapat tiga macam yaitu :

- a. *Normaalschool*, Sekolah Guru dengan masa pendidikan empat tahun dan menerima lulusan Sekolah Dasar lima tahun, berbahasa pengantar bahasa Melayu.

- b. *Kweekschool*, Sekolah Guru Empat tahun yang menerima lulusan Sekolah Dasar berbahasa pengantar bahasa Belanda.
- c. *Hollandsch Inlandsche Kweekschool*, Sekolah Guru Enam tahun berbahasa pengantar bahasa Belanda untuk guru-guru HIS/HCS.

Di samping sekolah tersebut di atas, masih terdapat kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Swasta terutama lembaga keagamaan. Lama kursus bervariasi antara dua sampai empat tahun dengan dengan macam penamaan dan istilah.¹⁸

Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintaqh Hindia Belanda, dalam pengembangan pemakaian bahasa Belanda di kalangan masyarakat Bumiputera, maka pada tahun 1920 bersamaan waktu dengan dibukanya HIS di Palembang, di Lahat dibuka sebuah Sekolah Guru (*Kweekschool*) untuk menghasilkan tenaga pendidik bagi Sekolah Rendah. Sekolah tersebut kemudian dipindahkan ke Muara Enim, bahkan pada tahun 1927 terpaksa ditutup dan siswa-siswanya ditampung oleh *Kweekschool* Medan dan Bukit Tinggi. Satu tahun kemudian *Kweekschool* Medan ditutup juga, sehingga untuk seluruh Sumatera hanya tinggal satu buah *Kweekschool* yaitu di Bukit Tinggi. Penutupan *Kweekschool* di Lahat dan Muara Enim tahun 1927 dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan Pemerintah Belanda dalam pembaharuan Sekolah Pendidikan Guru untuk Sekolah Dasar dengan bahasa Belanda melalui organisasi *Kweekschool*. Faktor lain yang menyebabkan penutupan sekolah tersebut, karena dianggap oleh Pemerintah Belanda sebagai tempat kegiatan aktivis untuk menanamkan rasa nasionalisme.¹⁹ Akhirnya dari 12

¹⁸ *Ibid.*, hal. 40.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Buku II, *Op.cit.*, hal. 99.

Kweekschool Negeri 5 buah diubah menjadi HIK (*Hollands Inlandsche Kweekschool*) dan lainnya ditutup/dihapus.

C. Pendidikan Pergerakan Nasional

1. Motivasi Nasional dan Kebangsaan.

Dalam dua dasa warsa pertama abad ke-XX, Pendidikan Dasar di Hindia Belanda mengalami kemajuan yang sangat pesat. Demikian pesatnya seakan-akan pendidikan yang sudah berlangsung sebelumnya (pendidikan tradisional) belum banyak mempunyai arti. Oleh karena itu Pemerintah Belanda berusaha menciptakan suatu sistem yang umum bagi sekian banyak golongan penduduk yang beraneka ragam.

Secara umum sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan didasarkan atas golongan penduduk menurut keturunan atau stratifikasi sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku pada waktu itu.²⁰ Akan tetapi pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak selalu memenuhi kebutuhan semua golongan dalam masyarakat. Pada umumnya pendidikan Pemerintah Belanda hanya dapat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang oleh masyarakat dirasakan dan ini pada umumnya terletak di bidang intelektual, yaitu mengenai berbagai pengetahuan yang perlu dimiliki oleh setiap orang untuk dapat memajukan hidup dan penghidupannya dalam masyarakat, agar dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan. Dengan kata lain, bahwa pendidikan oleh Pemerintah Belanda adalah netral, dalam arti tidak mencampuri urusan-urusan mengenai agama.²¹ Oleh karena itu, orang-orang yang menginginkan pendidikan agama

²⁰ BP3K, *Op. cit.*, hal. 37.

²¹ Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Jakarta : Gunung Agung, 1970), hal. 206.

bagi anak-anaknya mengadakan usaha khusus, yaitu mendirikan sekolah-sekolah di mana unsur agama mendapat tempatnya.

Meskipun oleh pihak golongan Islam yang sejak dulu sudah menyelenggarakan pendidikan sendiri dalam bentuk Pesantren dan Madrasah-madrasah, secara teoritis tidak termasuk dalam perhatian Pemerintah Belanda, karena Pemerintah dalam ahali ini mengambil kebijaksanaan menjalankan apa yang disebut "*Politik van Onthouding*" (Politik tidak campur tangan). Tetapi dalam prakteknya, dengan melalui Dewan Ulama, lembaga-lembaga pendidikan Islam dikeluarkannya *Goeroe Ordonantie* (Staatsblad No. 219).

Lain halnya dengan sekolah-sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh golongan Khatolik dan Kristen, atas dasar suatu peraturan subsidi diberi bantuan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya dengan syarat-syarat yang menjamin ketertiban umum dan mutu pendidikan.²²

Perasaan Nasional yang mulai berkembang di kalangan kaum terpelajar memandang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu mereka ingin mengubah sistem pendidikan yang kurang tepat tersebut.

Disertai pula dengan kesadaran berorganisasi yang diliputi oleh rasa Nasionalisme yang murni, paedagogis dan kultural melahirkan perkembangan baru di lapangan pendidikan dan pengajaran. Mereka insyaf bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional harus segera dimasukkan ke dalam program perjuangan, yaitu mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Atas

²² *Ibid.*, hal. 206.

dasar itu pulalah maka lahirilah perguruan-perguruan yang bersifat nasional atau sekolah-sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh perintis-perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah tersebut yang diselenggarakan sesuai dengan tuntutan agama ialah :

1. Sekolah-sekolah Sarikat Islam.
2. Sekolah-sekolah Muhammadiyah.
3. Sumatera Thawalib di Padangpanjang.
4. Sekolah-sekolah Nahdhatul Ulama.
5. Sekolah-sekolah Persatuan Ummat Islam (PUI) dan lain-lain.²³

Sedangkan sekolah-sekolah yang diselenggarakan sesuai dengan tuntutan Nasional ialah :

1. Taman Siswa, yang pada awalnya didirikan di Yogyakarta.
2. Sekolah Sarikat Rakyat di Semarang yang berhaluan Komunis.
3. Kesatrian Institut yang didirikan oleh Dr. Douwes Dekker (Dr. Setiabudi) di Bandung.²⁴

2. Kelembagaan

a. Taman Siswa

Sebelum membicarakan tentang Perguruan Taman Siswa cabang Palembang dan sekitarnya, perlu diungkapkan lebih dulu sejarah lahirnya lembaga di Yogyakarta. Sebagai organisasi dan sistem pendidikan Nasional Indonesia murni

²³ Djumhur dan Danusaputra, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung : CV Ilmu, 1976), hal. 149.

²⁴ *Ibid.*, hal. 149.

yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara, awalnya bernama "*Nasional Onderwijs Instituut Taman Siswa Yogyakarta*".

Sistem pendidikannya berdasarkan atas Kebudayaan Nasional dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Intelektualisme harus dijaui dan dipraktikkan sistem *among*, yang menyokong kodrat anak-anak. Hal ini berarti tidak melalui perintah paksaan, tetapi dengan melalui tuntunan agar berkembang hidup lahir batin menurut kodratnya sendiri-sendiri dan terkenal dengan semboyan "*Tut wuri handayani*". Adapun sistem *among* itu mengemukakan dua dasar, yaitu :

1. Kemerdekaan, sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin, hingga dapat merdeka dalam arti dapat berdiri sendiri.
2. Kodrat alam, sebagai syarat untuk untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya.²⁵

Meskipun pada saat berdirinya Taman Siswa baru dimulai dengan *Kindergarten* (Taman Kanak-Kanak) yang di kalangan Taman Siswa disebut Taman Indria dan Kursus Guru, tetapi karena dasar pendidikan tersebut telah berhasil menyentuh hati nurani bangsa Indonesia, maka Taman Siswa cepat meluas dan berkembang ke seluruh pelosok tanah air sesuai dengan kondisi, tempat dan waktu. Pemerintah Hindia Belanda sendiri merasa khawatir akan perkembangan lembaga itu yang begitu pesatnya, sehingga pada tahun 1931 timbul pendapat di kalangan Pemerintah Hindia Belanda, bahwa jika pengajaran di sekolah-sekolah Pemerintah tidak selekasnya diperbaharui, maka dalam waktu 10 tahun Taman

²⁵ Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, (Semarang : CV Toha Putera, 1975), hal. 43-44.

Siswa akan menguasai seluruh bidang pendidikan dan pengajaran partikelir.²⁶

Sejalan dengan kekhawatiran tersebut, Pemerintah Belanda menciptakan sebagai sarana preventif, dengan dikeluarkannya Ordonansi Pengawasan Pendidikan Partikelir yang tidak bersubsidi pada tanggal 1 Oktober 1932, yang dikenal dengan nama *Wilde Scholen Ordonnantie*.²⁷ Meskipun mengalami banyak rintangan terutama dari Pemerintah Hindia Belanda, namun dasar demokrasi yang lebih mengutamakan perluasan pendidikan secara horisontal dari pada secara vertikal. Dengan kata lain, lebih mendahulukan pendidikan untuk rakyat banyak dari pada pendidikan untuk sebagian kecil rakyat (*the privileged few*).²⁸ Lagi pula tuntutan Nasional yang senada dengan lahir dan berkembangnya Nasionalisme menempatkan lembaga Tamansiswa sebagai lembaga pendidikan yang dapat diterima di seluruh tanah air.

Perguruan Taman Siswa Cabang Palembang didirikan pada tanggal 3 Juli 1932, yang mana Akte pendiriannya termasuk dalam Perguruan Tamansiswa Pusat (Yogyakarta) tanggal 1 September 1951 yang tercatat dalam daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 Maret 1953 Nomor 03/1953.²⁹

Berdirinya Tamansiswa di Palembang untuk pertama kali dirintis oleh Ki Hanung (tokoh Taman Siswa Pusat), Bapak R.A. Nadjamuddin dan Bapak Raden Mad yang keduanya merupakan putera Palembang. Ternyata berdirinya perguruan ini mendapat simpati masyarakat, dan sebagai langkah pertama dibuka sebuah Sekolah Rendah berbahasa Belanda,

²⁶ Ensiklopedia Umum, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1973), hal. 287.

²⁷ *Ibid.*, hal. 287.

²⁸ Soegarda Poerbatjaraka, *Op.cit.*, hal. 219.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Bachtiar, mantan Ketua Perguruan Tamansiswa cabang Palembang, tanggal 23 April 2010.

yang dalam istilah Tamansiswa disebut "Taman Muda" yang sejajar dengan HIS. Sekolah ini pada awalnya berlokasi di sekitar Hotel Haji Nangling Jalan Cek Syeh sekarang. Pada umumnya murid-muridnya berasal dari mereka yang tidak mendapat kesempatan mengikuti pendidikan yang diusahakan oleh Pemerintah. Untuk menampung pendidikan lanjutannya, maka pada tahun 1938 didirikan MULO Tamansiswa (Taman Dewasa). Setelah pada tahun 1934 Tamansiswa mampu mendirikan gedung sendiri di Kompleks Tamansiswa sekarang ini. Sangat disayangkan bahwa MULO Tamansiswa harus menghentikan kegiatannya setelah Jepang masuk Palembang.

b. Serikat Islam.

Perkembangan pendidikan di daerah Sumatera Selatan sekitar tahun tigapuluhan boleh dikatakan masih ketinggalan jika dibandingkan dengan di Jawa. Pada umumnya sekolah-sekolah yang ada diselenggarakan oleh lembaga-lembaga keagamaan di samping sekolah-sekolah yang diusahakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Seperti telah dipaparkan di atas bahwa baru pada tahun 1920 Pemerintah mendirikan HIS di Sumatera Selatan.

Di antara sekolah-sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh agama Islam ialah Pendidikan Islam Air Itam yang terletak di daerah Musi Ilir. Sekolah ini didirikan pada tahun 1937 oleh H.A. Hamid, dan pada tahun yang bersamaan Pendidikan Islam Air Itam berkembang sampai ke Sungai Rotan dan Empat Petulai Curup, yang kedua-duanya terletak di daerah LIOT sekarang. Mengingat sekolah di Air Itam itu mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitarnya dan dalam perkembangannya kemudian menjadi lebih pesat, sekolah tersebut sengaja dikunjungi oleh de Boer sebagai Asisten Residen Afdeling Palembang Ilir untuk melihat dari

dekati. De Boer beranggapan bahwa Sekolah Air Itam itu akan menjadi lawan yang gigih terhadap Pemerintah Belanda.

Pada tahun 1938 pendidikan Islam di Air Itam menggabungkan diri dalam kegiatan politik Serikat Islam (PSII), sehingga semua sekolah yang didirikan berada dalam naungan Perguruan PSII. Hingga tahun 1940 di daerah cabang Air Itam terdapat lebih dari 10 buah Sekolah PSII. Di Dusun Air Itam sendiri terdapat satu sekolah yang terdiri dari 6 lokal dan pada tingkat-tingkat tertinggi diajarkan pula bahasa Inggris. Melihat pesatnya kemajuan sekolah-sekolah PSII, maka pada tahun 1941 Pemerintah Belanda mendirikan *Schakelschool* di Air Itam sebagai saingan, mengambil tempat di bawah kolong rumah seorang penduduk dengan dua orang guru dan 15-20 orang murid. Salah seorang di antara guru itu adalah H. Asnawi Mangkualam sampai sekolah itu ditutup segera setelah Jepang masuk Sumatera Selatan pada tahun 1942.³⁰

c. Muhammadiyah

Pada awal abad ke-XX merupakan ajang lahirnya partai-partai dan organisasi-organisasi sebagai pengaruh kesadaran nasional. Sejalan dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 dan bersamaan dengan datangnya gelombang pembaharuan di bidang agama yang datang dari Mesir, Arab dan India, maka KHA Dahlan yang telah mempelajari pembaharuan itu kemudian mendirikan organisasi "Muhammadiyah". Perkumpulan tersebut dapat dianggap sebagai pelopor pembaharuan dalam mengajarkan agama Islam di Indonesia. Muhammadiyah pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1912 oleh KHA Dahlan.

³⁰ *Perintis Kemerdekaan Indonesia*, (Palembang : Dinas Sosial Daerah Tk. I Sumsel, 1978), hal. 20-22.

Perkumpulan ini bertujuan meluaskan dan mempertinggi pendidikan ajaran Islam secara modern serta memperteguh keyakinan tentang agama Islam. Untuk mencapai tujuan itu Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah di bawah Majelis Pengajaran. Usaha-usaha lain adalah memperluas pengajian-pengajian di bawah bimbingan Majelis Tabligh³¹ dan mendirikan panti-panti asuhan, rumah sakit dan poliklinik di bawah PKU (Majelis Pembinaan Kesejahteraan dan Ummat).

Perkumpulan Muhammadiyah masuk ke Sumatera Selatan sekitar tahun 1928/1929. Baru pada tahun 1932 dibentuk Daerah Muhammadiyah Lampung – Palembang dengan Zainal Abiddin Djambek sebagai Konsul yang kemudian digantikan oleh R.Z. Fanani.³² Adapun yang membawa Muhammadiyah ke Palembang dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Haji Ridwan yang berasal dari Kota Gede Yogyakarta. Ia datang di Palembang sebagai pedagang batik sambil melakukan da'wah Islam. Da'wah yang disampaikan itu dalam waktu singkat mendapat sambutan dan dukungan dari rekan-rekannya sesama pedagang di Pasar Ilir. Mereka itu antara lain yaitu Haji Anang bin H. Saleh, Mgs. Ahmad, Haji Abdul Halim, Haji Muhammad, Abdul Karim, Abdul Kasim dan H. Djamal.
2. Rusli yang berasal dari Padang, pegawai Kantor Pos Palembang yang kemudian menggabungkan diri dalam kegiatan pengajian yang diasuh oleh Haji Ridwan.

³¹ *Ibid.*, hal. 22.

³² KHA Dahlan, *Zaman Penjajahan Belanda dan Riwayat Mulai Berdirinya serta Tenaga Orang yang Mendirikan*, (Yakarta : hal. 33).

3. Raden Subono Purwowiyoto, seorang terpelajar lulusan Klein Ambtenaar Bogor, berasal dari Semarang dan tiba di Palembang pada tahun 1929 sebagai pegawai Kas Negeri Palembang. Di Palembang ia menggabungkan diri dalam kelompok pengajian yang diasuh oleh Haji Ridwan. Sewaktu masih di Brebes Jawa Tengah, ia berkenalan dengan organisasi tersebut, bahkan menjadi salah seorang pemimpin Muhammadiyah setempat.
4. Zainal Abiddin Djambek, berasal dari Padang. Ia bekerja pada BPM Plaju, yang ikut bergabung pada pengajian yang diasuh H. Ridwan.³³

Keempat pendatang tersebut, maka semakin semaraklah pengajian yang mereka selenggarakan dan pesertanyapun semakin bertambah.. Setelah pengajian itu berjalan beberapa lama dan pengertian pesertanya terhadap tugas mereka sebagai Muslim dan sebagai anggota organisasi, maka mulailah untuk menggerakkan amal bhakti serta usaha guna mengikuti kemajuan zaman, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada awalnya mereka mendirikan ranting dan cabang Muhammadiyah dalam kota Palembang. Hasil susunan pengurus mereka laporkan kepada Pengurus Besar Muhammadiyah di Yogyakarta.³⁴

Ranting Muhammadiyah yang mula-mula didirikan ialah Ranting Talang Jawa, Seberang Ulu dan 24 Ilir. Ketiga ranting inilah yang kemudian menjadi cabang Muhammadiyah yang diresmikan pada tahun 1930. Kemudian pada tahun 1931 di Plaju berdiri Cabang Muhammadiyah dengan ketuanya bernama Abdullah Siddik. Setelah itu berdiri pula cabang organisasi itu di Baturaja berkat usaha Kyai H. Bakri

³³ Bulletin Muhammadiyah Sumatera Selatan, No. 3, Maret 1980, hal. 5-7.

³⁴ *Ibid.*, hal. 7.

dan demikianlah seterusnya menyebar ke daerah-daerah pedalaman.

Sekolah Muhammadiyah (Sekolah Dasar) resmi didirikan pada tahun 1932, yaitu SD Muhammadiyah di 4 Ulu, SD Muhammadiyah di Jalan Mayor Ruslan dan HIS Muhammadiyah di 24 Ilir Palembang. Empat tahun kemudian dibuka SD Muhammadiyah di Kertapati dan pada tahun 1938 didirikan HIS Muhammadiyah dan Schakel School Muhammadiyah di 4 Ilu Palembang. Kemudian MULO Muhammadiyah dibangun pada tahun 1938. Pada zaman Jepang, sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Muhammadiyah banyak yang tidak beroperasi. Sekolah Muhammadiyah yang bertahan adalah SD Muhammadiyah 4 Ulu, SD Muhammadiyah di Jalan Mayor Ruslan, SD Muhammadiyah Plaju dan SD Muhammadiyah di Bukit Kecil.

Situasi Muhammadiyah di Sumatera Selatan digambarkan sebagai berikut : "Menurut susunan pada zaman Belanda Konsul daerah Palembang itu memimpin dua daerah yaitu Palembang dan Lampung. Pernah juga dicoba memasukkan daerah Bangka dan Blitung. Nasib Muhammadiyah dalam daerah-daerah itu pada zaman Jepang sangat menyedihkan. Konsul daerah Palembang RZ Fanani tidak sanggup mempertahankan, sehingga Muhammadiyah Daerah Palembang terpaksa dibubarkan, sehingga selama pendudukan Jepang hilanglah suara Muhammadiyah.

Pemimpin-pemimpin Muhammadiyah di luar kota Palembang masih tetap menjaga hak milik dan wakaf Muhammadiyah dan ada juga yang melanjutkan amalnya meskipun nama Muhammadiyah dilarang disebut-sebut.

d. Madrasah-Madrasah di Sumatera Selatan

Lembaga pendidikan sekolah agama di Sumatera Selatan pada umumnya diselenggarakan oleh orang-orang

pribumi yang baru pulang dari menunaikan ibadah Haji. Mengingat tingkat pengetahuan mereka tidak terlalu mendalam mengenai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu Fikh, maka yang diajarkan kepada murid-murid hanyalah berkisar pada cara membaca Al Quran dan peraturan-peraturan tentang sembahyang lima waktu.

Biasanya pendidikan dilakukan secara perorangan dengan biaya yang ditanggung oleh murid-murid. Tempat pendidikan berada di bawah rumah (rumah-rumah tradisional di daerah Sumatera Selatan adalah rumah panggung). Waktu belajarpun tidak tentu dan tidak teratur, mengingat kondisi rakyat setrempat. Bahkan kadang-kadang ditutup sementara sedang panen atau menabur bibit padi di sawah.

Sekolah yang tidak teratur itu kemudian disempurnakan oleh orang-orang pribumi yang telah belajar ke Mekkah selama beberapa tahun. Setelah pulang mereka memperbaharui pendidikan yang kurang sempurna tersebut menjadi madrasah. Pada umumnya sekolah madrasah tersebut setingkat dengan Sekolah Rendah yang kemudian dikenal dengan nama "Ibtidaiyah".

Hanya ada beberapa daerah yang dapat menyelenggarakan sekolah madrasah tingkat Tsanawiyah, yaitu jika ada terdapat beberapa orang haji yang telah mendapat pelajaran di Mekkah yang dikenal dengan sebutan Darul Ulum. Orang-orang itu di daerah MUBA antara lain yaitu H. Rasyid Siddiq dan H. Amir Hamzah. Untuk daerah OKU tokoh-tokohnya yaitu Kiyai Haji Zainal Fikri dan KH Daud Rusdi.

Sebagai mana diketahui bahwa agama Islam masuk ke Sumatera Selatan ada yang dari jurusan Selatan (Jawa Barat), sehingga pendidikan Islam di daerah ini banyak yang mengikuti pendidikan islam di Jawa.

Demikian pula mengenai pondok pesantren atau madrasah di daerah ini hampir sama sistemnya dan kitab-kitabnya yang dipakai di Jawa. Di antara sekian banyak Pondok Pesantren dan Madrasah yang tertua dan terkenal di Sumatera Selatan yaitu :

1. Pondok Pesantren di Marga Madang Suku II. Didirikan pada tahun 1656 oleh Haji Juwana yang berasal dari Banten.
2. Madrasah Al Quranyah didirikan oleh KH Muhammad Yunus pada tahun 1920 di Palembang. Madrasah ini terdiri dari tingkat Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Pada masa jayanya muridnya mencapai 400 orang.
3. Sekolah Ahliyah Diniyah didirikan oleh Kyai Massagus Haji Nanang Misri pada tahun 1920 di Palembang yang terdiri dari tingkat Ibtidaiyah dan Tsanawiyah.
4. Madraqsah Narulfalah didirikan oleh KH Abubakar Al-Bastari pada tahun 1934 di Palembang, terdiri dari Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 5 tahun. Tingkat Tsanawiyah lama pendidikan 3 tahun dan tingkat Aliyah lama pendidikan 2 tahun. Muridnya pernah mencapai 600 orang.
5. Madrasah Darul Farun didirikan oleh KH Ibrahim pada tahun 1938 di Palembang. Madrasah ini terdiri dari tingkat Ibtidaiyah dan tingkat Tsanawiyah.³⁵

Lain dari pada itu banyak lagi madrasah di Sumatera Selatan, mulai dari daerah kota sampai ke desa-desa, seperti Madrasah Salathyah, Dinyah, Tarbyah Islamiah, Nurul Huda dan sebagainya.

³⁵ Muhammad Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Mutiara, 1979), hal. 211-213.

e. Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung

Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung ini berlokasi di daerah OKI (Tanjung Batu). Adapun yang mendirikan pondok pesantren ini adalah Kyai Haji Anwar bin Haji Kumpul pada tanggal 1 Nopember 1932 M (2 Rajab 1351 H). Latar belakang berdirinya pesantren ini, adanya dorongan masyarakat setempat yang menghendaki pendidikan Islam berbentuk sekolah dan dukungan dari Pemerintah setempat.

Adapun tujuannya adalah untuk mendidik dan membimbing serta membawa para santri agar menjadi manusia Muslim yang berilmu, beriman, beramal saleh dan berakhlak mulia serta nantinya dapat menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna, berbakti terhadap agama, tanah air dan bangsa dengan jiwa ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.. Pada awalnya hanya terdapat tingkat Ibtidayah untuk putra saja, dan salah satu di antara lembaga pendidikan Islam yang dapat bertahan pada zaman Jepang.

f. Lembaga Pendidikan Katholik dan Kristen

1. Pengaruh Katholik

Wilayah Propinsi Sumatera Selatan terdapat dua buah Keuskupan, yaitu Keuskupan Palembang dan Keuskupan Pangkal Pinang. Masing-masing keuskupan tersebut berbeda ordonya, sehingga cara kerjanya para imam juga berbeda. Ordo SCJ di wilayah Palembang dan Ordo SSCC di wilayah Pangkal Pinang. Dengan demikian berdirinya sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Katholik tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan Ordo-Ordo tersebut.

1.1. Keuskupan Palembang (Perguruan Xaverius)

Imam-imam Ordo SCJ tiba di Palembang pada bulan September 1924. Pos pertamanya berada di Tanjungsakti. Sebelum kedatangan mereka itu telah bekerja di tempat

Pastor J. Van Meurs S.J. sejak tahun 1887 dengan membuka sebuah sekolah di Tanjungsakti pada tanggal 1 September 1887 dengan dua ruang yang terpisah. Sebuah berada di Pastoran dan yang satu lagi terletak di rumah seorang bekas zendeling Y.C. Karsten.³⁶

Meskipun ada campur tangan Residen Langen mengenai sekolah tersebut pada tahun 1889, namun jalannya tidak begitu lancar karena masih kekurangan murid yang diperlukan dalam arti hadir tiap-tiap hari.

Pengalaman pahit dialami pula oleh Pastor P.J. van Hoof, yang mana pada tahun 1911 ia berusaha menghidupkan kembali sekolah-sekolah yang pernah ada, sehingga pada tahun 1915 – 1916 membuka dua atau tiga sekolah di Benteng dan Joko Bloot (Simpang Tiga). Setelah suster-suster Belaskasihan tiba di sana, pada tahun 1917 sempat memberikan pelajaran jahit-menjahit dan kerajinan tangan.³⁷

Di samping pos pertama di Tanjungsakti, pada tahun 1925 kota Palembang dijadikan pos kedua oleh SCJ. Untuk meneruskan usaha yang telah dibina oleh mereka sendiri. Untuk lebih memantapkan lembaga itu, maka dibentuklah suatu yayasan yang bernama "Yayasan Xaverius" dengan Akte Notaris Christian Maatus pada tanggal 5 Mei 1930.³⁸

Adapun susunan pengurus yayasan tersebut di antaranya yaitu : Pastor J.J. van der Sangen sebagai Ketua, Pastor A. Hermelink sebagai Sekretaris, Nyonya Ida Maria Gerarda Welhelmina van Peer sebagai Bendahara, dan FPH van Alfen dan JHA. Wiedenhoff sebagai anggota.

Di samping itu perlu juga dicatat nama Pastor HJD. Van Oort SCJ yang pada bulan Maret 1926 mendirikan Karya

³⁶ *Ibid.*, hal. 168.

³⁷ *Ibid.*, hal. 168-169.

³⁸ Stichtingsbrief Xaverius Vereeniging, No. 11, dd. 5 Mei 1930 (Notaris Christian Maathuis).

Melania di Palembang, yang merupakan cabang dari Karya Melania di Nederland. Pada tahun itu juga didirikan Sekolah Theresia, satu buah HIS yang sedianya dikhususkan untuk anak-anak perempuan. Pada tahun 1927 suster-suster Hati Kudus mengambil alih sekolah tersebut yang terletak di belakang kantor Pengadilan lama (Lorong Landrad).

Setelah itu kemudian didirikan Vervolgschool di Lorong Pagar Alam, membuka ELS bagi anak-anak Eropa yang beragama Katholik dan sebuah TK (Taman Kanak-Kanak).³⁹

Karya Melania merupakan Sekolah Rakyat Kelas II, dipimpin oleh Ibu Rosa. Sekolah ini menempati lokasi di Jalan Mayor Ruslan atau Bengkel Melati sekarang. Sedangkan Sekolah Theresia dalam praktiknya mengajar anak laki-laki dan perempuan, yang sebagian besar anak-anak itu berasal dari anak-anak china, Indo-Belanda dan anak-anak KNIL (*Koninklij Nederlandsch Indische Leger*). Pada tahun 1933 sekolah ini terdiri atas kelas nol sampai kelas tujuh. Sekolah tersebut dipimpin oleh Suster Martini yang dibantu oleh Tumeon dan Nyonya Soediro Pranoto.

Pada bulan Agustus 1935 dibuka Sekolah HCS dan satu tahun kemudian Frater-Frater Bunda Hati Kudus datang ke Palembang dan mengambil alih murid laki-laki dari Sekolah Theresia. Setelah itu kedua sekolah tersebut pada tahun 1938 digabungkan menjadi satu dengan nama "Andreas School".⁴⁰

Sementara di Palembang para biarawan dan biarawati mendirikan berjenis-jenis sekolah, maka di Kota Lahat pada tahun 1933 dibuka pula Sekolah Dasar HIS. Sekolah ini dipimpin oleh Pastor Hoogetboom S.C.J. dengan muridnya yang berasal dari bermacam-macam bangsa dan usia.

³⁹ G. Vriens SJ., *Op.cit*, hal. 182.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 182.

Pada tahun 1936 sekolah ini diambil alih oleh suster-suster Carolus Borromeus di bawah pimpinan Suster Cornelianne, yang sebelumnya telah mempunyai posnya di Bengkulu. Pada tahun 1938 sekolah ini berkembang di bawah pimpinan Suster Laurentia dengan membangun sebuah kompleks sekolah di Jalan Gumei, bahkan pada tahun 1939 dibuka pula satu buah Sekolah MULO.⁴¹ Sekolah Katolik di Lahat ini akhirnya dikenal dengan nama Sekolah Santo Yosef.

1.2. Keuskupan Pangkal Pinang

Setelah kota Mentok diresmikan sebagai Stasi dalam tahun 1925 dengan imamnya yang pertama bernama Pastor Meijer. Ia tiba di sana bersama 8 orang Suster Pemeliharaan Illahi dan membuka Sekolah Santa Maria pada tanggal 3 Nopember 1925. Selain HCS dibuka pula Taman Kanak-Kanak dengan muridnya berjumlah 36 orang siswa.

Pada tahun 1927 dibuka MULO, tetapi tidak dapat bertahan lama. Demikian pula Stasi Belinyu dibuka satu buah sekolah dengan asrama atas usaha Pastor Zaat pada tanggal 5 Nopember 1929. Pada tahun 1931, sekolah ini kemudian diserahkan kepada beberapa orang suster. Mengingat Stasi Belinyu mengalami kemunduran, maka Stasi Pangkal Pinang dibuka oleh Pastor Bakker dengan membuka sekolah pada tahun 1931. Ketika bruder-bruder Dongen tiba di sana pada tahun 1934, maka pengelolaan sekolah tersebut diserahkan kepada mereka. Sedangkan Pastor Bakker akan mempersiapkan Sekolah Puteri.

Akhirnya pada tahun 1938 suster-suster yang dinanti-nanti tiba di Pangkal Pinang dan langsung memimpin Sekolah Puteri tersebut. Pastor van Gelder yang tadinya menjadi guru pada sekolah tersebut, mendapat tugas di Sungai Liat untuk membantu Pastor di sana yang telah memulai kegiatannya

⁴¹ *Ibid.*, hal. 184-185.

pada tahun 1937.⁴² Menjelang masuknya Jepang di sana, Sekolah Puteri di Sungai Liat ada 3 kelas.

2. Perguruan Methodist

Sejak tahun 1905 pusat Gereja Methodist di Indonesia berada di Medan. Gereja Methodist ini mengemban tugas gerejani, membina pendidikan dan sosial. Sekolah Methodist di Palembang pertama kalinya dibangun oleh Solomon Pakianathan, seorang kebangsaan India dari Malaysia pada tahun 1908. Semula sekolah ini bernama "*Mission School*" yang terletak di Lorong Basah. Pada awalnya setiap anak dibolehkan memasuki sekolah ini, tetapi kenyataannya yang tertarik hanya orang-orang China, India dan orang-orang yang mampu.

Setelah mempunyai gedung sendiri, sekolah ini kemudian diganti namanya menjadi "*Methodist English School*". Sekolah ini terletak di Jalan Tengkuruk. Adapun guru-gurunya yang mengajar di sekolah ini adalah orang-orang Indonesia, di antaranya yaitu A. Malik. Adapun pimpinannya yaitu Albert Hamel dan Jhon Wesley Day. Ketika Jepang menduduki Palembang, sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan Yayasan Xaverius ditutup/dihapus.

3. Perguruan Kristen

Gereja Kristen di Palembang turut berperan membangun ELS pada tahun 1938 yang berada di bawah naungan Yayasan "Vereeniging Voor Christelijk Onderwijs te Palembang". Pembangunan sekolah ini didasarkan pada Akte No. 88 Badan Hukum No. A43.25/17. Sekolah ini terletak di Jalan Merdeka dan pendirinya adalah van Bosch van Act.

⁴² *Ibid.*, hal. 260-267.

Sekolah tersebut dikenal dengan nama Sekolah *"Beatric School"* yang mempunyai murid campuran. Setelah Jepang masuk Palembang sekolah inipun ditutup, namun setelah Indonesia merdeka, sekolah ini dihidupkan kembali dan dikelola oleh HKBP, GPIB dan Siloan.

D. Kesimpulan

Sebenarnya keberadaan pendidikan di Sumatera Selatan sudah ada sejak zaman Kerajaan Hindu/Budha dan Kesultanan Palembang. Meskipun keberadaan pendidikan tersebut dikelola secara tradisional dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Pada saat Kerajaan Islam Palembang berkuasa dan tetap eksis sampai saatnya Belanda menguasai Sumatera Selatan, pendidikan yang berkembang adalah pendidikan Islam yang dikelola secara tradisional. Lazimnya pendidikan Islam tradisional tersebut dikenal dengan nama Pondok pesantren. Namun setelah Belanda masuk dan menguasai Sumatera Selatan, keberadaan pendidikan Islam tradisional (pondok pesantren) tersebut masih tetap eksis, meskipun Belanda telah memasukkan pendidikan ala Barat. Pendidikan ala Barat ini muncul sebagai respon terhadap kritikan yang mengatakan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Untuk membalas Hutang Budi tersebut, maka Pemerintah Belanda harus melaksanakan Politik Ethis (Trias Politika), di antaranya yaitu memajukan pendidikan, irigasi dan transmigrasi untuk rakyat Bumiputera.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kolonial Belanda kemudian membangun sekolah ala Barat. Sekolah ala Barat yang dibangun pada awal abad XX hingga tahun empat puluhan adalah pendidikan Dasar, Menengah dan Kejuruan. Pendidikan Dasar yang dikelola oleh Pemerintah di antaranya yaitu ELS (*Europesche Lager School*), HCS (*Hollandsch Chinese School*), HIS (*Hollandsch Inlandsche*

School), Sekolah Rakyat (*Volks School*), *Vervolg School*, *Schakel School*. Anak-anak yang boleh masuk ke Sekolah Belanda hanyalah anak-anak bangsawan, mampu dan anak Demang, Pesirah, Kontroleur, Residen dan Asisten Residen. Dalam kenyataannya anak-anak Bumiputera (dari kalangan rakyat jelata) hanya sedikit yang dapat memasuki sekolah Belanda.

Sekolah tingkat menengah yang dikelola oleh Pemerintah Belanda adalah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Sekolah ini merupakan sekolah lanjutan untuk menampung mereka yang telah menamatkan sekolah rendah atau sekolah rakyat, yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. Jenjang pendidikan pada sekolah MULO ini selama 3 sampai 4 tahun untuk anak-anak Bumiputera dan Timur Asing.

Adapun sekolah kejuruan yang dikelola oleh Pemerintah Belanda adalah Sekolah Guru (*Kweekschool*). Sekolah kejuruan ini ada tiga, yaitu *Normaalschool*, *Kweekschool*, dan *Hollansch Inlandsche Kweekschool*. Di samping itu juga terdapat kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Swasta Belanda, terutama lembaga keagamaan, seperti Perguruan Xaverius, Perguruan Methodist dan Perguruan Kristen.

Setelah mereka menamatkan sekolah Belanda (pendidikan Barat), mereka dapat dipekerjakan pada kantor-kantor Pemerintah, sebagai tenaga administrasi, mandor dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat mendukung kepentingan Pemerintah Belanda. Jadi pendidikan yang diselenggarakan hanya untuk memperlancar roda Pemerintahan Belanda.

Di sisi lain, pada awal abad ke XX juga muncul pergerakan dan semangat nasionalisme yang digelorakan oleh para pemimpin bangsa. Maka tidak mengherankan jika di berbagai daerah juga muncul pergerakan dan perjuangan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan asing. Salah

satu cara untuk menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme adalah dengan membentuk organisasi-organisasi perjuangan, seperti partai politik dan pendidikan.

Sebagai respon terhadap berkembangnya pendidikan ala Barat yang hanya untuk kepentingan Kolonial Belanda, maka di Sumatera Selatan juga berkembang Pendidikan Pergerakan Nasional, seperti Taman Siswa, Sekolah Serikat Rakyat dan Kesatrian Instituut. Adapun sekolah-sekolah yang dikelola oleh ummat Islam adalah Sarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Ummat Islam dan Sumatera Thawalib. Untuk Sumatera Thawalib ini memang hanya ada di Padangpanjang Sumatera Barat, tetapi pengaruhnya meluas sampai ke seluruh Sumatera, sehingga banyak putera-puteri dari Sumatera Selatan yang belajar di perguruan Sumatera Thawalib tersebut.

Di samping itu juga ada Pondok Pesantren yang telah eksis sejak Kesultanan Palembang berdiri awal abad XVI hingga runtuhnya kekuasaan Hindia Belanda tahun 1942. Pondok Pesantren yang tetap eksis di antaranya yaitu Pondok Pesantren Marga Madang Suku II, Sekolah Aliah Dinyah, Madrasah Nurulfalah, Madrasah Darul Farun dan Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, Bandung : Refika Aditama, 2007.
- Abdullah M. Amin, *Aspek Epistemologis Filsafat Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Abu Ahmadi, *Sejarah Pendidikan*, Semarang : Toha Putra, 1975.
- Ali, R. Moh., *Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara*, Djakarta : Bhratara, 1963.
- Amir Hamzah Wirjosoekarto, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengadjaran Agama Islam yang Diselenggarakan Oleh Muhammadiyah*, Yogyakarta : Peny. Publikasi Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam, 1962.
- Aziz, *Japan Colonialisme and Indonesia*, Martinus Nijhoff the Hague, 1955.
- Bestor, Arthur., "Dasar-Dasar Pendidikan", dalam *Menggugat Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999
- BP3K, *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.
- Bulletin Muhammadiyah Sumatera Selatan*, Nomor 3, Maret 1980.
- Carrel, Alexis., *Man, The Unknown*, alih bahasa Kania Roesli, Bandung : Remadja Karya, 1987.
- Djumhur dan H. Danusaputra, *Sejarah Pendidikan*, Bandung : CV Ilmu, 1976.

Kementerian Penerangan Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, Palembang : 1954.

Graaf, H. J. De., *Geschiedenis van Indonesia*, Bandung : W. Van Hoeve 'Gravenhage, 1949.

Insiklopedia Umum, Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1973.

Leur, J.C. van, *Indonesian Trade and Society*, Bandung : The Hague, 1955.

Masykuri dan Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Selatan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980/1981.

Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan di Islam Indonesia*, Jakarta : Mutiara, 1979.

M.O. Parlindungan, *Tuanku Rao*, Medan : Tanjung Pengharapan, 1964.

Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.

Pendidikan di Indonesia 1900 – 1940, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.

Pendidikan di Indonesia 1900 – 1974, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

Perintis Kemerdekaan Indonesia, Palembang, Dinas Sosial Daerah Tingkat I Sumsel, 1951.

Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Djakarta : Gunung Agung, 1970.

Satyawati Suleiman, *Concise Ancient History of Indonesia*, Jakarta : Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1977.

Schrieke, B., *Indonesia Sociological Studies I*, Bandung : Sumur, 1960.

Sutari Iman Barnadib, *Pengantar Sejarah Pendidikan I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit FIP-IKIP, 1975.

Soetedjo Bradjanegoro, *Sedjarah Pendidikan Indonesia*, Djakarta : Fasco, 1956.

Vriens S.J.G., *Sejarah Gereja Katholik Indonesia Jilid 3a*, Ende : Arnoldus, 1974.

DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN LAHAT

Efrianto.A

A. Pendahuluan

Kabupaten Lahat merupakan salah satu Kabupaten di propinsi Sumatera Selatan dengan perkembangan dunia pendidikan dengan grafik relatif bergerak ke atas. Indikator yang membuktikan dunia pendidikan di Kabupaten Lahat bergerak maju adalah banyaknya jumlah sekolah baik negeri dan swasta. Di samping itu tingkat minat dan perhatian orang tua terhadap pentingnya pendidikan cukup mengembirakan. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya taraf hidup dan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Lahat.

Perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Lahat, bergerak maju seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Sesuai dengan amanat undang-undang yang mengharuskan penyelenggara negara untuk memberikan anggaran 20 % untuk dunia pendidikan dan perhatian lebih terhadap sektor pendidikan.¹ Amanat undang-undang tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan baik dari jumlah sekolah, maupun dari fasilitas yang dimiliki sekolah. Kondisi ini mendorong dunia pendidikan di Kabupaten Lahat bergerak maju.

Faktor lain yang mendorong dunia pendidikan di Kabupaten Lahat bergerak maju adalah munculnya kawasan industri dan tumbuhnya berbagai sektor ekonomi baru di Kabupaten Lahat terutama yang berbasis kekayaan alam dan pertanian telah mendorong meningkatnya angka partisipasi

¹ Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diambil dari www.dikti.org pada tanggal 25 Maret 2010

masyarakat untuk mengikuti dunia pendidikan. Kondisi inilah yang mendorong munculnya berbagai sekolah baru baik didirikan oleh pemerintah, yayasan dan organisasi keagamaan yang terdapat di Kabupaten Lahat.

Perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Lahat, baik sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama mengalami perkembangan yang sangat menjanjikan. Keterlibatan masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Lahat juga turun memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Lahat. Namun keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Lahat telah memberi warna dan menghadapi persoalan tersendiri dalam memajukan dunia pendidikan.

Yayasan dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam dunia pendidikan di Kabupaten Lahat, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 komponen yaitu sekolah-sekolah yang berada dibawah yayasan nasionalis atau kebangsaan dan sekolah-sekolah yang berada dibawah yayasan keagamaan atau mendapat pengaruh keagamaan. Sekolah yang termasuk kelompok pertama adalah SMP Tunas Bangsa, SMA PGRI dan Lain-lain, sedangkan sekolah yang berada kelompok ke dua sangatlah banyak di Kabupaten Lahat, seperti Muhammadiyah, Santa Yosef, Al Kautsar dan lain-lain.

Perkembangan dan kemajuan yang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang berada di bawah yayasan keagamaan di Kabupaten Lahat sangat tergantung kepada kemampuan yayasan dan pihak pengelola sekolah dalam memanfaatkan fasilitas dan kesempatan yang dimiliki. Dalam konteks itulah tulisan ini ingin menggambarkan tentang bagaimana kondisi lembaga pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Lahat, terutama sekolah yang berada di dalam kompleks perguruan Muhammadiyah.

B. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Muhammadiyah di Kabupaten Lahat tidak bisa dipisahkan dari perkembangan gerakan Muhammadiyah di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H (18 November 1912M).² Berdirinya organisasi ini merupakan respon dari K.H. Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat Islam saat itu.

Kondisi umat Islam Indonesia menjelang lahirnya Muhammadiyah sangat memprihatinkan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun ilmu pengetahuan. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat adanya penjajahan dan gencarnya gerakan *zending* dan *misionaris* dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan semangat untuk menghadapi tekanan dan upaya untuk memajukan umat Islam gerakan Muhammadiyah, secara bertahap berkembang ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Sumatera Selatan dan Kabupaten Lahat.

Muhammadiyah mulai berdiri di Kabupaten Lahat, pada tahun 1925 M. yang bertindak sebagai tokoh pendiri adalah Agus Tjik dan H. Raden Marto. Pada saat berdiri Muhammadiyah berstatus Cabang Lahat dan berada di bawah Wilayah Palembang Bangka. Pada awal berdiri Cabang Lahat disebut Lematang Ulu Tanah Pasamah. Sejalan dengan gerakan dan perkembangan zaman dan kemajuan yang diraih Muhammadiyah maka berdirilah beberapa cabang di Afdelling Lahat.³

² A. Anshori (2010) "Deskripsi Muhammadiyah Sumatera Utara" Hal. 32 www.repository.usu.ac.id diambil pada tanggal 19 Agustus 2010

³ Arsip PDM Lahat "Sejarah Ringkas Muhammadiyah di Lahat" PDM Lahat

Pada awalnya gerakan Muhammadiyah di Kabupaten Lahat banyak mendapat tantangan dan reaksi penolakan dari masyarakat di Kabupaten Lahat, sebab gerakan Muhammadiyah banyak berlawanan dengan tradisi yang telah berkembang selama ini, serta adanya informasi yang salah tentang Muhammadiyah. Kondisi ini menyebabkan banyaknya penolakan dari pamong desa, dengan alasan gerakan Muhammadiyah bertentangan dengan aliran Ahli Sunah Wal Jammah yang dianut sebahagian besar masyarakat di Kabupaten Lahat.⁴

Penolakan yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat ternyata tidak menghalangi kemajuan dan perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Lahat. Kondisi ini disebabkan adanya keyakinan masyarakat di Kabupaten Lahat, bahwa gerakan Muhammadiyah merupakan gerakan Amar ma'ruf Nahi Mungkar. Dampak dari keyakinan masyarakat terhadap Muhammadiyah, bermunculah ranting-ranting Muhammadiyah di Kabupaten Lahat seperti kewedanaan Tebing Tinggi, Tanah Pasemah, Lintang Empat Lawang dan Lain-lain.

Pada tahun 1932 diadakan pertemuan dan konperensi Muhammadiyah yang diikuti oleh karesidenan Palembang, Bangka dan Lampung. Pada waktu itu struktur pemerintahan terdiri dari karesidenan-karesidenan, maka Muhammadiyah mengikuti struktur itu. konferensi Muhammadiyah pertama ini membidani lahirnya Majelis Consul Daerah Lampung, Bangka dan Palembang. Majelis ini diikuti oleh Zainal Abiddin Djambek, kemudian dilanjutkan oleh R. Soebono Poerwowidjito, kemudian oleh RZ. Fanani sampai dengan pendudukan bala tentara Jepang. Di Karesidenan Palembang pada waktu itu telah tercatat adanya Muhammadiyah Cabang Palembang, Talang Balai, Sungai Pinang, Musi, Plaju,

⁴ *ibid*

Baturaja, Pagar Alam, Lahat dan Tanjungpandan. Karesidenan Lampung ada cabang Telukbetung dan Cabang Menggala.⁵

Di bidang pendidikan, Muhammadiyah juga berusaha untuk mengembangkannya. Setapak demi setapak Muhammadiyah mulai membangun sekolah dan panti asuhan. Sekolah yang didirikan mulai dari taman kanak-kanak (Bustanul Athfal) sampai ke sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Di beberapa tempat di Palembang berdiri Madrasah Diniyah, HIS Schakle School, Mu'allimin Muhammadiyah, Wustho Mu'allimin serta Taman Kanak-Kanak (Bustanul Athfal). Di sekolah Muhammadiyah memakai kurikulum seimbang, antara mata pelajaran agama dengan mata pelajaran umum bobotnya hampir sama.⁶

Konferensi Muhammadiyah Cabang Lahat pertama dilaksanakan di Lesung Batu pada tahun 1941. Pada saat konferensi hampir seluruh ranting-ranting Muhammadiyah di Lahat menghadiri acara tersebut. Konferensi pertama ini juga dihadiri juga oleh Konsul Muhammadiyah wilayah Palembang, Lampung dan Bangka yaitu Raden Zainuddin Fanani.⁷

Muhammadiyah adalah suatu perserikatan yang merupakan "Gerakan Islam" yang bermaksud "Dakwah Islam *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*" yang ditujukan pada dua bidang perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan *amar ma'ruf nahi munkar* pada bidang pertama terbagi atas dua golongan, yaitu

1. Kepada yang telah islam, bersifat pembaharuan (*tajdid*, yaitu pengembalian pada ajaran Islam yang murni).

⁵ Seno (2007) Laporan Penelitian "Perkembangan Organisasi Muhammadiyah Palembang tahun 1928 – 1980" Padang : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang

⁶ *Ibid*

⁷ PDM Muhammadiyah Lahat *Op.Cit*

2. Kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam.

Adapun dakwah Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar* yang kedua yaitu ditujukan kepada masyarakat. Bersifat perbaikan, bimbingan dan peringatan yang semua itu dilaksanakan bersama dengan musyawarah atas dasar taqwa dan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam perjuangan melaksanakan usaha menuju tujuan terwujudnya masyarakat yang utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT di mana kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar, yaitu :

1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah SWT.
2. Hidup manusia bermasyarakat
3. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
4. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban ibadah kepada Allah SWT dan ikhsan kepada kemanusiaan.
5. *Ittiba'* kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW.
6. Melancarkan amal usaha dan perjuangan ketertiban organisasi.

Melihat dasar prinsip di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tujuannya, harus berpedoman " berpegang teguh atas ajaran Allah dan

RasulNya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhai Allah SWT.⁸ Secara khusus, pemahaman Islam dalam Muhammadiyah, dapat dikaji dalam pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih yang telah dilakukan dalam menetapkan keputusan, sebagai berikut :

1. Dalam *beristidlal*, dasar utamanya adalah Al Qur'an dan sunah, ijtihad.
2. Dalam memutuskan sesuatu keputusan dilakukan dengan cara musyawarah.
3. Tidak mengikatkan diri pada suatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat imam-imam mazhab dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.
4. Berprinsip terbuka dan toleran, tidak beranggapan bahwa hanya keputusan Majelis Tarjih yang paling benar.
5. Dalam masalah akidah (taihid), hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir.
6. Tidak menolak ijma' sahabat, sebagai dasar keputusan.
7. Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung *ta'arud* digunakan cara *al-Jam'u wat tawfiq*, dan kalau tidak dapat baru dilakukan tarjih.
8. Menggunakan azas "*Sadduz Zara-I*" untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafdasah.

⁸ Haidar Nashir, et.al., *Materi Induk Pengkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Badan Pendidikan Kader Pimpinan Muhammadiyah, 1994), hal.126-127.

9. Menta' lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil Al Qur'an dan sunah sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah.
10. Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum dilakukan dengan cara koprehensif, utuh dan bulat, tidak terpisah.
11. Dalil-dalil umum Al Qur'an dapat ditaksis dengan hadis ahad, kecuali dalam bidang akidah.
12. Dalam mengamalkan agama Islam menggunakan prinsip "At-Tasyir".
13. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuan dari Al Qur'an dan sunah, pemahamannya dapat menggunakan akal sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya.
14. Dalam hal-hal termasuk *al-Umurud Dunyawiyah* yang tidak termasuk tugas para Nabi, penggunaan akal sangat diperlukan untuk tercapainya kemaslahatan umat.
15. Untuk memahami Nash yang musytarak, paham sahabat bisa diterima.
16. Dalam memahami Nash, maka dhahir didahulukan dan takwil dalam bidang akidah.
17. Jalan ijihad yang telah ditempuh meliputi *ijihad bayani*, *ijihad qiyasiy*, *ijihad istishlahiy*.
18. Dalam menggunakan hadis, terdapat beberapa kaidah yang telah menjadi keputusan *majelis tarjih* sebagai berikut :
 1. Hadis *mauquf* tidak dapat dijadikan hujjah.
 2. Hadis *mauquf nang* dihukum marfu' dapat menjadi hujjah.

3. Hadis *mursal sahabi* dapat dijadikan hujjah.
4. Hadis *mursal tabi'l* semata tidak dapat dijadikan hujjah.
5. Hadis-hadis *dha'if* yang kuat menguatkan, tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali jika banyak jalan periwayatannya, ada *qarinah* yang dapat dijadikan hujjah dan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan hadis shahih.
6. Dalam menilai perawi hadis, *jarh* didahulukan dari pada *ta'dil*, setelah adanya keterangan *mu'tabar* berdasarkan alasan *syara'*.
7. Periwatyan orang yang dikenal melakukan *tadlis* dapat diterima riwayatnya, jika ada petunjuk bahwa hadis itu *muttashil*, sedangkan *tadlis* tidak mengurangi keadilan.⁹

Muhammadiyah juga merupakan suatu jalinan 10 (sepuluh) sifat utama yang menjadi *khittah* perjuangan Muhammadiyah, yaitu :

1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.
2. Memperbanyak kawan serta mempersubur rasa *ukhuwah Islamiyah* dan kasih sayang.
3. Lapang dada dan luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam.
4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
5. Mengindahkan segala hukum, perundang-undangan, peraturan-peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah.

⁹ *Ibid.*, hal. 98-100.

6. *Amar ma'ruf nahi munkar* dalam segala bidang serta menjadi contoh teladan yang baik.
7. Aktif dalam azas perkembangan masyarakat dengan maksud *ishlah* dan pembangunan umat sesuai dengan ajaran Islam.
8. Bekerja sama dengan golongan Islam maupun dalam usaha mensyi'arkan dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingannya.
9. Bekerja sama dengan segala golongan serta membantu pemerintah dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan diridhai Allah SWT.
10. Bersifat adil dan kreatif ke dalam dan ke luar dengan penuh kebijaksanaan.⁵²

Muhammadiyah Lahat, diawal-awal berdirinya telah menetapkan sektor pendidikan menjadi ujung tombak dari gerakan dakwah yang mereka lakukan. Ini dibuktikan dengan banyaknya sekolah yang mereka dirikan diawal-awal berdirinya Muhammadiyah Lahat seperti tergambar dalam tabel di bawah ini :

1. SR Muhammadiyah Lahat didirikan 1 Agustus 1932 berdasarkan SK PP Majelis Pengajaran saat itu.
2. SR Muhammadiyah di Lesung Batu Tahun 1935
3. SR Muhammadiyah di Pagar Alam
4. Diiring berdirinya sekolah lain seperti Tanjung Sakti, Ulu Musi, Tebing Tinggi dan Lintang Empat Lawang
5. SMP Muhammadiyah Lahat 1942

¹⁰ Thalhas, *op.cit.*, hal. 85-86.

Gerakan Muhammadiyah Cabang Lahat setelah Indonesia merdeka mengalami perkembangan yang luar biasa majunya dibuktikan dengan banyaknya bermunculan cabang dan ranting-ranting:

1. Cabang Lahat, meliputi Ranting Natal, Ranting Tanjung Menang, Ranting Tanjung Talang, ranting Peranginm Ranting Tanjung Sirih, Tanjung Melak dan Gumai Ulu.
2. Cabang Padang Bindu Kecamatan Mulak Ulu memiliki 6 ranting
3. Cabang Lesung Batu Kecamatan Mulak Ulu Tahun 1939 : 5 Ranting
4. Cabang Pagar Alam : 6 Ranting
5. Cabang Tanjung Sakti : 6 Ranting
6. Cabang Jarai : 5 Ranting
7. Cabang Lingge : 4 Ranting
8. Cabang Karang Dapo : 5 Ranting
9. Cabang Tebing Tinggi : 7 Ranting

Kemunculan cabang-cabang dalam wilayah Kabupaten Lahat mendorong perubahan status dan Muhammadiyah Kabupaten Lahat. Semenjak tahun 1970, Muhammadiyah Lahat, pada awalnya merupakan cabang Muhammadiyah Palembang, berubah status menjadi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PMD) Lahat. Semenjak menjadi PMD Lahat telah memiliki beberapa orang pemimpin yaitu :

1. 1970 – 1975 Kasimudin Asni
2. 1975 – 1980 Bachtiar Effendi
3. 1980 – 1988 HM. Dian Husin, BA
4. 1988 – 1990 Bahrudin MS. BA

5. 1990 – 1995 H. Hamdi Arsal, S.Pd.I
6. 1995 (3 Bln) Dr. Syofyan DJ
7. 1995 – 2000 H. Hamdi Arsal, S.Pd.I
8. 2000 – 2005 Haruddin, BA
9. 2005 – 2010 Syamsul Hadi, S. A¹¹

PDM Muhammadiyah Kabupaten Lahat dalam menghidupi jalannya roda organisasi telah membentuk Amal Usaha yang dibina oleh PD Muhammadiyah daerah Lahat :

1. TK ABA Lahat 1.
Saat ini dipimpin oleh Ibu Mitawati
2. TK ABA Lahat 2
Saat ini dipimpin oleh Ibu Winarsih
3. TK ABA Tebing Tinggi
4. SDM Lahat
Saat ini dipimpin oleh Mini Ratna Jaya
5. SDM Lingge
Saat ini dipimpin oleh ibu Rahma
6. SDM Simpang Perigi
7. MIM Padang Bindu
8. SMP Muhammadiyah Lahat.
Saat ini dipimpin oleh Bapak Nasution
9. SMA Muhammadiyah Lahat.
Saat ini dipimpin oleh Bapak H. Hamdin Arsal, S.P
10. Mesjid Raya 15 Buah
11. Panti Asuhan Budi Mulia Putra tahun 1960
12. Panti Asuhan Sakinah Putri tahun 1991
13. Panti Asuhan Usman Bin Affan Tahun 1995
14. BTM Cabang Muhammadiyah Lahat¹²

¹¹ Arsip PDM Lahat *Op.cit*

¹² *Ibid*

Badan Amal usaha inilah yang digunakan oleh Muhammadiyah Lahat untuk menghidupi roda organisasi mereka. Bidang usaha organisasi Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari media dakwah untuk mencapai maksud dan tujuan persyerikatan yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan bidang usaha Muhammadiyah harus mengarah terlaksananya maksud dan tujuan persyerikatan. Selain itu, pengelola bidang usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah.

Namun dalam perkembangan selanjut sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan Muhammadiyah Lahat cenderung mengalami kemunduran, kondisi ini jelas merupakan sebuah persoalan yang harus diselesaikan oleh Muhammadiyah dan orang-orang yang peduli dengan pendidikan Muhammadiyah.

C. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah¹³

Pendidikan merupakan salah satu bidang usaha organisasi Muhammadiyah dengan tujuan untuk menjadikan dunia pendidikan sebagai media dakwah untuk mencapai maksud dan tujuan persyerikatan yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Oleh karena itu, semua bentuk pendidikan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah harus mengarah terlaksananya maksud dan tujuan persyerikatan. Selain itu, pengelola bidang usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah.

Realisasi misi utama dalam melaksanakan dunia pendidikan Muhammadiyah adalah mendirikan sekolah

¹³ Fokus Kajian ini adalah lembaga pendidikan Muhammadiyah yang berada di dalam Komplek Perguruan Muhammadiyah di jalan Letnan Amir Hamzah II Kota Lahat.

pendidikan mulai dari taman kanak-kanak (*Bustanul Atfhal*) sampai perguruan Tinggi. Berdasarkan laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam muktamar Muhammadiyah ke 43 di Banda Aceh menyampaikan bahwa saat ini Muhammadiyah telah menjadi organisasi yang besar, dengan amal usaha yang menjangkau banyak lapisan masyarakat. Dalam bidang pendidikan formal dasar dan menengah Muhammadiyah telah memiliki 940 Sekolah Dasar, 1114 Sekolah Menengah Pertama, 637 Sekolah Menengah Atas 126 Sekolah Menengah Ekonomi Atas, 63 Sekolah Teknik Menengah, 3 Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga, 1 Sekolah Menengah Industri Kerajinan, 13 Sekolah Perawat Kesehatan, 8 Program Pendidikan Bidan, 1 Sekolah Menengah Farmasi, 1 Sekolah Pendidikan Perkebunan Menengah atas, 17 Sekolah Pertanian dan Peternakan, 5 Sekolah Luar Biasa, 303 Madrasah Diniyah, 1029 Madrasah Ibtidaiyah, 342 Madrasah Tsanawiyah 149 Madrasah Aliyah, 39 Pondok Pesantren.

Dalam bidang pendidikan tinggi, Muhammadiyah memiliki 111 Perguruan Tinggi yang meliputi universitas, Institut Agama Islam Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sekolah Tinggi berbagai bidang ilmu Akademi berbagai bidang ilmu dan Politeknik, kegiatan itu paling tidak melibatkan sejumlah sekitar tujuh juta manusia.¹⁴ Namun dalam konteks Kabupaten Lahat, Muhammadiyah baru berhasil mendirikan sekolah sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Di samping pendidikan sesungguhnya masih banyak badan usaha yang dijadikan oleh Muhammadiyah sebagai media dakwah dalam mencapai tujuan.

Hal ini mendorong seluruh pengurus Muhammadiyah baik yang berada di pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting Muhammadiyah dalam memelopori dan mengembangkan bidang usaha Muhammadiyah mengacu

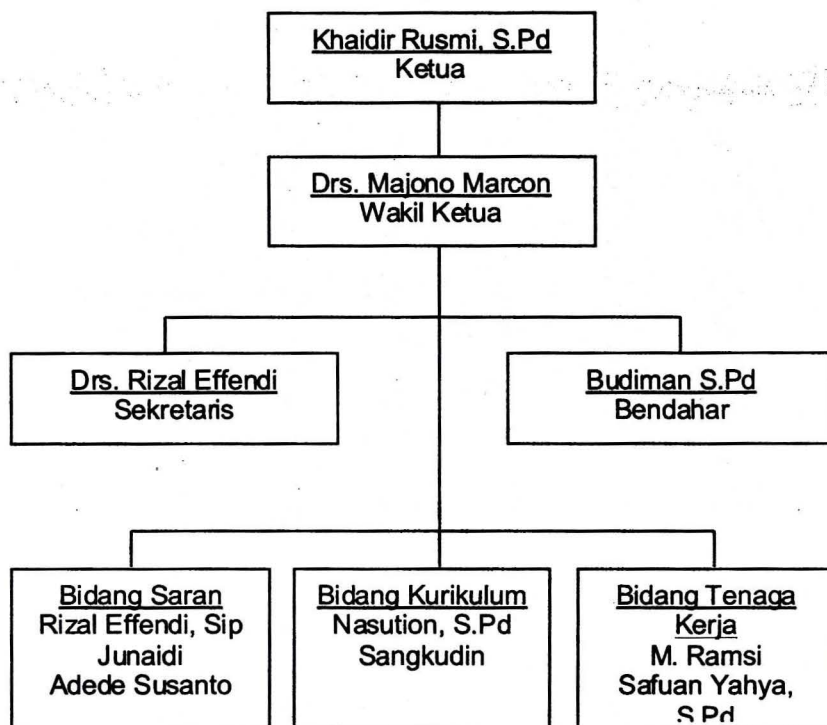
¹⁴ Laporan PP Muhammadiyah periode 1995-2000 kepada Muktamar ke-43 di Banda Aceh

pada *amar ma'ruf nahi munkar*. Sehingga tujuan untuk menjadikan badan usaha Muhammadiyah sebagai sarana untuk mempromosikan islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. SAW dapat diwujudkan

Pemimpin Daerah Muhammadiyah (PDM) Lahat, memiliki berbagai bidang usaha Muhammadiyah sebagaimana telah diungkapkan pada bagian awal tulisan ini. Namun kita fokus untuk mengungkapkan kiprah PDM Lahat dalam sektor pendidikan, sebagaimana diketahui sejak kelahiran Muhammadiyah di Lahat mereka telah menetapkan pendidikan sebagai sarana untuk dakwah. Pendidikan yang dikelola PDM Lahat mengalami perkembangan pesat setelah zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mendukung keberadaan lembaga pendidikan tersebut PDM Lahat, telah memiliki lokasi tersendiri di Jalan Letnan Amir Hamzah tempat bernaungnya sekolah Muhammadiyah mulai dari TK sampai dengan SMA, namun dalam perkembangan selanjutnya dunia pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Lahat mengalami sebuah perubahan yang mesti disikapi.

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi besar telah memiliki sebuah badan khusus yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan dunia pendidikan berbasis Muhammadiyah. Dalam setiap struktur pengurus Muhammadiyah baik, pusat, wilayah dan daerah struktur yang berfungsi untuk itu mengelola dunai pendidikan ke Muhammadiyah selalu ada, seperti tergambar dalam struktur pengurus dunia pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Lahat dibawah ini :

Bagan 1
Struktur Majelis Dikdasmen PDM Lahat
Masa Bakti 2005 - 2010



Struktur diatas menjelaskan, Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang menjadikan dunia pendidikan sebagai sarana dakwah telah memiliki struktur yang diberinama majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Majelis inilah yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memajukan badan usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Majelis Dikdasmen Muhamadiyah Lahat, memiliki beberapa lembaga pendidikan antara lain :

a. Sekolah Dasar Muhammadiyah

Foto 1

SD Muhammadiyah Lahat



Sekolah Dasar Muhammadiyah Lahat berdiri semenjak tahun 1931, pada awal berdirinya SD Muhammadiyah merupakan sekolah alternatif bagi masyarakat Lahat dalam memilih sekolah swasta berbasis Islam. Sekolah ini merupakan sekolah Swasta yang masih mampu bertahan, ditengah kuatnya tekan sekolah negeri, berdasarkan catatan yang ditemukan beberapa SD Swasta telah tutup karena ketidakmampuan mereka untuk menghadapi persaingan seperti SD NU, SD Taman Siswa, SD Kartika Candra Kirana dan Lain-lain.

Faktor utama penyebab sekolah tersebut tutup adalah kurang jumlah siswa yang diawali dari tidak tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap disekolah tersebut. Kondisi yang sama sesungguhnya juga dihadapi oleh SD

Muhammadiyah, sekolah yang didirikan semenjak tahun 1931 ini baru dua kali mendapat bantuan untuk perbaikan gedung yaitu tahun 2005 dan 2006. bantuan itu baru mampu memperbaiki 4 (empat) lokal, sedangkan 3 (tiga) lokal lainnya masalah bangunan lama.

Faktor pendukung yang menyebabkan SD Muhammadiyah masih mampu bertahan adalah letak sekolah yang berada di jantung kota Lahat dan berada satu kompleks dalam perguruan Muhammadiyah Lahat, yang terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA cukup membantu sekolah ini tetap eksis. Namun berdasarkan jumlah siswa, terlihat bahwa siswa yang menuntut ilmu di SD Muhammadiyah mengalami kemunduran atau stangna sebagaimana terungkap dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Siswa SD Muhammadiyah Lahat
4 Tahun terakhir

No	Kelas	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
1	I	42	40	36	46
2	II	38	40	35	35
3	III	38	38	38	35
4	IV	32	36	38	33
5	V	34	37	35	37
6	VI	29	33	37	38
TOTAL		213	241	219	224

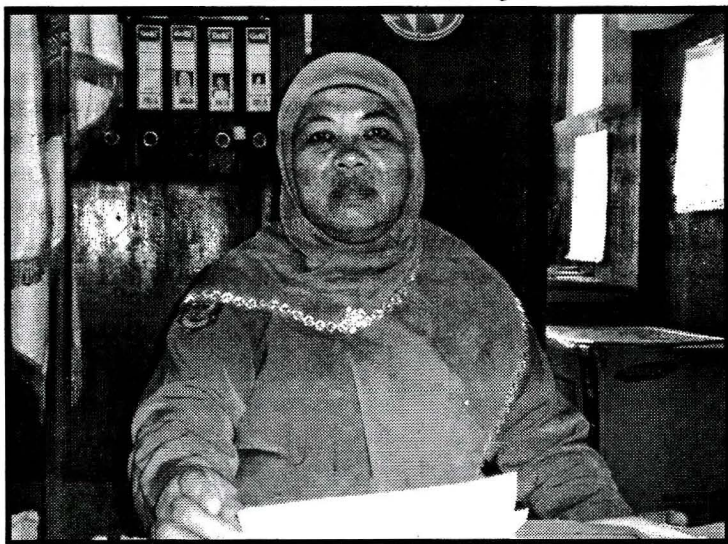
Sumber : SD Muhammdiyah Lahat

Data diatas memperlihatkan bahwa jumlah siswa SD Muhammadiyah relatif stabil, padahal potensi dan letak SD Muhammadiyah memberikan kesempatan sekolah ini

berkembang jauh lebih pesat. Salah satu faktor yang menyebabkan SD Muhammadiyah tidak berkembang dengan optimal adalah kondisi gedung yang kurang layak. Hal ini terungkap dalam laporan kepala SD Muhammadiyah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat menyebutkan bahwa seluruh kelas yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah dalam kondisi kurang dari 50%.

Keterbatasan dan kesulitan yang dihadapi oleh SD Muhammadiyah, tidak menghalangi sekolah ini meraih berbagai prestasi dan penghargaan, namun ironisnya kebanyakan penghargaan yang diraih merupakan sebuah catatan prestasi yang diukir sebelum tahun 2005. Kondisi ini merupakan indikasi bahwa kualitas pendidikan di SD Muhammadiyah mengalami persoalan yang harus diatasi.

Foto 2
Kepala SD Muhammadiyah Lahat
Ibu Mini Ratna Jaya



Keberadaa SD Muhammadiyah bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk dididik menjadi muslim yang paripurna melalui kegiatan pengembangan, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menghindari SD Muhammadiyah dari kebangkuratan, maka pihak pengelola mulai dari Dikdasmen PDM Lahat dan kepala sekolah berusaha bahu membahu untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah. Berdasarkan stratifikasi dunia pendidikan di Indonesia, SD Muhammadiyah masih terkatagori SD dengan nilai akreditasi C, kondisi ini terkait erat dengan fasilitas dan tingkat kemampuan siswa di SD Muhammadiyah

b. SMP Muhamamdiyah

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah merupakan sebuah sekolah Swasta yang berdiri cukup lama di Kabupaten Lahat. Sekolah ini didirikan semenjak tahun 1958, namun baru pada tahun 1978 sekolah ini memiliki surat keputusan pendirian sekolah dengan keluarnya SK No. 719/II-023/SM-S-58/1978. Pada awal berdirinya SMP Muhammadiyah Lahat, berinduk kepada SMP Negeri 2 Lahat, kondisi ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah sekolah negeri di Kabupaten Lahat.

SMP Muhammadiyah Lahat memiliki dinamika tersendiri dalam melakukan aktifitas pendidikan di Kabupaten Lahat. Pada awal berdiri hingga pada dekade tahun 1980-an SMP Muhammadiyah merupakan sebuah sekolah yang diperhitungkan di Kabupaten Lahat. Kondisi ini terlihat dari jumlah siswa dan prestasi yang diraih oleh SMP Muhammadiyah Lahat, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang guru SMP Muhammadiyah Lahat,

"dahulu sekolah ini merupakan tempat berkumpulnya orang – orang dari desa - desa

di sekitar kota Lahat, kondisi ini menyebabkan jumlah muridnya mencapai ratusan, kejayaan sekolah ini ketika dipimpin oleh Drs. Hamdan Sayuti dan Makruf Anwar¹⁵

Ungkap diatas menjelaskan ketika dunia pendidikan di Kabupaten Lahat, belum berkembang seperti saat ini. Siswa-siswa yang belajar di SMP Muhammadiyah banyak berasal dari dusun-dusun yang berada di sekitar Kabupaten Lahat. Berikut nama kepala-kepala sekolah SMP Muhammadiyah Lahat :

1. Arsyad Yakin	1958 – 1965
2. Abbas	1965 – 1967
3. Arsyad Yakin	1967 – 1968
4. Umar Delair	1968 – 1970
5. Mubakir	1970 – 1973
6. Drs. Hamdan Sayuti	1973 – 1975
7. Makruf Anwar	1975 – 1990
8. Nurbaiti Rahim	1990 – 1998
9. Dalidjo	1998 – 2002
10. Asmudah, S.Pd	2002 – 2007
11. Nasution, S.Pd	2007 - 2009

Data diatas memperlihatkan kepala sekolah yang memimpin SMP Muhammadiyah umumnya menjabat dalam waktu yang lama, seperti Bapak Makruf Anwar menjabat selama 15 Tahun, sedangkan kepala sekolah lainnya paling sedikit menjabat 2 tahun. Perkembangan SMP

¹⁵ Wawancara dengan Bapak *Rasyid Najib* di Lahat pada tanggal 28 April 2010

Muhammadiyah setelah era rofermasi mengalami kemunduran yang cukup memprihatikan. kondisi ini terlihat dari jumlah siswa yang masuk SMP Muhammadiyah kurang dari 30 Orang, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

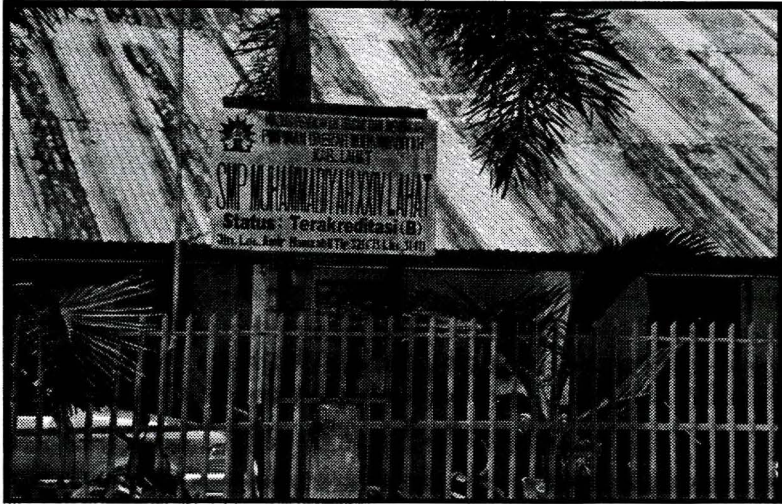
Tabel 2
Jumlah Siswa SMP Muhammadiyah
2000 – 2009

Kelas	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	29	29	35	29	37	20	24	26	26
2	39	23	31	36	25	20	28	30	37
3	48	49	29	27	39	30	28	26	33
Total	116	101	95	92	101	80	80	82	96

Sumber : Database Siswa SMP Muhammadiyah Lahat

Tabel diatas memperlihatkan jumlah murid SMP Muhammadiyah dari tahun ke tahun relatif tidak mengalami peningkatan. Kondisi ini terlihat dari jumlah ke seluruh siswa SMP Muhammadiyah mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, berjumlah kurang dari 100 orang. Namun kemunduran jumlah siswa berbanding terbalik dari tingkat keberhasilan SMP Muhammadiyah dalam meluluskan siswanya dari tahun 2000 hingg 2008 jumlah kelulusan di SMP Muhammadiyah mencapai angka 100%, namun prestasi ini belum mampu menarik minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SMP Muhammadiyah.

Foto 3
SMP Muhammadiyah Lahat



SMP Muhammadiyah dalam melaksanakan aktifitas mengajar dan belajar belum memiliki fasilitas yang memadai. Kondisi ini terlihat jelas dari lokasi SMP Muhammadiyah Lahat berada yang terletak dibahagian belakang kompleks perguruan Muhammadiyah Lahat. Di samping itu ruang belajar yang mereka miliki masih sangat terbatas, namun kondisi ini tidak mempengaruhi penilaian terhadap SMP Muhammadiyah. Berdasarkan standarisasi pendidikan yang dimiliki Indonesia, SMP Muhammadiyah Lahat termasuk dalam kelompok sekolah dengan akreditasi B.

c. SMA Muhammadiyah Lahat

Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Lahat merupakan jenjang tertinggi dunia pendidikan yang dimiliki oleh PDM Lahat. Sekolah ini mulai berdiri semenjak tahun

1974. Keberadaan sekolah ini pada awalnya bertujuan untuk menggantikan fungsi dan peranan dari Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Muhammadiyah Lahat. Ketika SPG dihapuskan oleh pemerintah maka pengurus PDM Lahat merasa perlu untuk mendirikan sebuah sekolah yang sederajat dengan SPG, mendirikan SMA merupakan pilihan yang ditetapkan oleh PDM Lahat.

Pada dekade awal 1950 – 2000-an, siswa yang bersekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah berasal dari daerah di luar Kota Lahat, umumnya mereka pergi dari kampung halaman setamat pendidikan dasar. Para siswa oleh orang tua dititipkan di panti Muhammadiyah dan bersekolah di sekolah-sekolah yang dimiliki Muhammadiyah. Kondisi inilah mendorong pengurus PDM Lahat membentuk SMA Muhammadiyah Lahat pada tahun 1974, ketika SPG Muhammadiyah Lahat tidak lagi bisa dioperasikan.

Pada periode tahun 2000-an – sampai saat ini siswa yang menuntut ilmu di SMA Muhammadiyah Lahat lebih banyak berasal dari warga masyarakat yang berada di Kota Lahat dan tidak tinggal di asrama atau panti. Perubahan ini lebih disebabkan oleh berdirinya beberapa sekolah negeri di ibukota kecamatan, berdirinya sekolah baru merubah keputusan orang tua dalam menyekolahkan anaknya.

Foto 4
SMA Muhammadiyah Lahat



SMA Muhammadiyah merupakan sekolah swasta yang relatif telah lama eksis di Kabupaten Lahat. Diawal berdiri sampai tahun 1982, jumlah siswa SMA Muhammadiyah masih terbatas, namun semenjak tahun 1982 sampai dengan tahun 1992 jumlah murid SMA Muhammadiyah meningkat dalam jumlah yang menjanjikan namun pada semenjak tahun 1992 sampai tahun 2002 jumlah siswa relatif tidak stabil. Namun semenjak tahun 2002 sampai saat ini jumlah siswa di SMA Muhammadiyah terus menunjukkan grafik menurun, seperti tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3
Jumlah Statistik Siswa SMA Muhammadiyah Lahat
1974 – 2009

No	Tahun	Kelas 1		Kelas 2		Kelas 3		Total		Jml
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	1974	13	4					13	4	17
2	1975	6	13	7	3			13	16	29
3	1976	13	15	14	9	41	4	68	28	96
4	1977	18	11	18	12	13	4	49	27	76
5	1978	29	12	24	9	13	13	66	34	100
6	1979	38	18	38	17	32	6	106	43	149
7	1980	39	12	45	19	56	12	139	43	182
8	1981	28	16	37	15	72	26	137	57	194
9	1982	76	37	31	39	45	33	152	99	251
10	1983	129	62	73	35	42	35	244	97	341
11	1984	90	42	98	73	74	36	262	161	423
12	1985	63	52	65	45	95	58	223	156	379
13	1986	43	65	55	45	70	41	168	164	332
14	1987	90	102	41	70	44	51	175	223	398
15	1988	74	98	60	86	41	59	175	243	418
16	1989	45	94	51	74	52	59	158	241	399
17	1990	36	57	45	83	43	71	124	211	335
18	1991	23	37	30	49	39	80	92	166	258
19	1992	26	32	18	36	29	45	73	113	186
20	1993	28	45	21	29	22	40	87	114	203
21	1994	36	35	24	44	17	35	84	124	208
22	1995	44	25	34	42	34	40	112	107	219
23	1996	76	78	38	30	33	36	147	144	291
24	1997	73	65	77	69	35	40	185	167	352

25	1998	51	58	48	71	60	63	159	195	354
26	1999	30	51	41	80	46	58	117	189	306
27	2000	27	52	30	51	41	70	98	184	282
28	2001	63	78	27	52	30	51	120	180	300
29	2002	59	71	35	45	26	40	149	156	305
29	2003	62	77	42	46	51	67	155	190	345
30	2004	60	86	51	51	42	48	154	184	338
31	2005	51	56	33	48	72	77	156	181	337
32	2006	28	55	34	33	42	73	104	151	255
32	2007	32	53	20	17	45	41	97	111	208
32	2008	18	32	23	34	26	38	67	104	171
Total siswa sekolah di SMA Muhammadiyah										9037

Sumber : Database Siswa SMA Muhammadiyah Lahat

Data diatas memperlihatkan bahwa jumlah murid SMA Muhammadiyah diawal-awal berdirinya lebih di dominasi oleh laki-laki namun semenjak tahun 1987 jumlah siswa dominan dikuasai oleh perempuan. Perubahan ini terjadi karena semakin terbuka kesempatan perempuan dari kecamatan di sekitar Kota Lahat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebelum tahun 1987, hanya kaum laki-laki yang memiliki kesempatan untuk meninggalkan kampung menuju kota untuk menuntut ilmu.

Peningkatan jumlah siswa di SMA Muhammadiyah berlangsung semenjak tahun 1983, yang berkaitan erat dengan semakin berkembangnya perekonomian masyarakat di Kabupaten Lahat. Tahun 2002 sampai saat ini merupakan masa kemunduran dari jumlah siswa yang mengikuti pendidikan di SMA Muhammadiyah Lahat. Kemunduran ini disebabkan oleh semakin banyaknya pilihan sekolah di Kabupaten Lahat dan "gagalnya" SMA Muhammadiyah mempertahankan *image* dan prestasi yang mereka peroleh. Dalam sejarah SMA Muhamamdiyah mereka telah mengalami beberapa kali pergantian, berikut nama kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Lahat :

1. Drs.Hamdani Bamit tahun 1974 s/d 1975
2. Rahma Bujad,BA tahun 1975 s/d 1990
3. Drs.Hasanundin tahun 1990 s/d 1992
4. Drs.Jalaludin tahun 1992 s/d 1994
5. Drs.TM.Sultoni tahun 1994 s/d 2003
6. H.Hamdi Arfal,S.pd.i tahun 2003 s/d sekarang

d. Peranan Lembaga Pendidikan Muhammadiyah

Dinamika lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat, memperlihatkan bahwa sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah Lahat mengalami banyak hambatan dalam mempertahankan diri dan meningkatkan eksistensinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Lahat. Banyak persoalan yang menghambat mereka untuk maju dan bersaing dengan sekolah-sekolah lain di Kabupaten Lahat, baik faktor intern dan faktor ekstern sangat menghambat perkembangan lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat.

Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah Kabupaten Lahat, pada tahun-tahun awal berdiri merupakan lembaga pendidikan yang cukup diperhitungkan di Kabupaten Lahat, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Jasrul

“ Dahulu setiap perayaan 17 Agustus, seluruh masyarakat di Kota Lahat, selalu menunggu-nunggu penampilan tim marching band dari SMA Muhammadiyah “

Ungakapan diatas menjelaskan, pada masa jayanya lembaga pendidikan Muhammadiyah sangat diharapkan tampil untuk memeriahkan acara 17 Agustus, tanpa kehadiran mereka acara perayaan 17 Agustus menjadi tidak meriah.

Namun hari ini kondisi jauh berbeda, kiprah dari lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak terdengar lagi.

Cerita diatas menggambarkan prestasi dan kiprah lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat dalam bidang seni budaya. Di bidang ilmu pengetahuan generasi-generasi awal dari lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat banyak menghasilkan orang-orang yang berhasil seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang dan banyak lainnya. Perlahan namun pasti lembaga pendidikan Muhammadiyah bergerak mundur, hal ini mulai terlihat dari prestasi lembaga pendidikan Muhammadiyah di bidang ilmu pengetahuan dan ekstrakurikuler, walaupun dalam beberapa efent yang diikuti, SMA Muhammadiyah Lahat masih mampu bersaing namun secara keseluruhan lembaga pendidikan Muhammadiyah bergerak mundur.

Pada awal-awalnya lembaga pendidikan Muhammadiyah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dipercayai oleh orang tua. Banyak masyarakat dari daerah-daerah yang jauh dari Kota Lahat menyekolahkan anaknya ke Lembaga pendidikan Muhammadiyah. Pada tahun 1980-an sekolah ini harus melakukan seleksi dalam penerimaan siswa, dan melaksanakan sekolah pagi dan sore karena terbatasnya ruang belajar. Namun semua hanyalah kenangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasyid Najib :

"Dulu SMP Muhammadiyah ini pernah punya sisiwa 400 orang, karena tingginya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga Muhammadiyah. Bahkan SMP Muhammadiyah harus melakukan seleksi untuk penerimaan murid dan mengadakan kegiatan belajar mengajar pagi dan sore hari".

Ungkapan itu semakin memperjelas gambaran tentang kejayaan lembaga pendidikan Muhammadiyah pada masa lalu. Namun saat ini lembaga pendidikan Muhammadiyah mengalami kemunduran, kondisi ini tentu sangat disesalkan oleh semua pihak di Kabupaten Lahat.

Kemunduran lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat disebabkan telah bergesernya *output* yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Muhammadiyah didirikan untuk menyatukan dimensi ajaran Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan dimensi ijtihad dan tajdid sosial-keagamaan. Seperti misalnya melalui ijtihad dan tajdid kebudayaannya, Muhammadiyah dengan sengaja meniru dan melaksanakan sistem pendidikan barat yang mengajarkan ilmu pengetahuan secara komprehensif, tanpa meninggalkan ilmu-ilmu agama itu sendiri.

Tujuan pendirian lembaga pendidikan Muhammadiyah diatas menjelaskan bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah akan memberikan materi pelajaran umum dan agama secara bersamaan. Pemberian materi ini diharapkan anak-anak yang didik di lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memiliki kemampuan dan prilaku jauh berbeda dengan anak-anak di sekolah lainnya. Namun dalam kenyataannya sekolah-sekolah Muhammadiyah telah menjadi sekolah swasta kebanyakan, ciri khas ke Muhammadiyahannya tidak terlihat lagi.

Kondisi yang sama ditemukan pada lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat, sekolah-sekolah yang dimiliki gagal mempertahankan cirikhas ke Muhammadiyah. Sebagaimana diungkapkan oleh Nasution :

"kelemahan lembaga pendidikan Muhammadiyah di Lahat adalah kegagalan mempertahankan cirikhas ke Muhammadiyah yang difokuskan ke tiga mata pelajaran yaitu Al Islam, Ke Muhammadiyah dan B. Arab"

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pergesaran dari *output* yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah tidak terkelolanya dengan baik mata pelajaran wajib di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Ironisnya tiga mata pelajaran ini tidak mampu dikelola dengan baik oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat.

Indikator dari kegagalan dalam mengelola mata pelajaran ini terlihat dari penunjukan guru yang mengajar mata pelajaran ini tidak melalui seleksi yang tepat. Kegagalan dalam tiga mata pelajaran ini menyebabkan siswa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak memiliki perbedaan dengan siswa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan lainnya. Sebab tiga mata pelajaran ini merupakan ciri khas yang membedakan sekolah Muhammadiyah dengan sekolah lainnya

Kemunduran lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat, juga disebabkan ketidakmampuan mereka dalam mengaktualisasikan cita-cita pembentukan organisasi Muhammadiyah yang tertata rapi. Di mana sistem kerja orgainsatoris adalah sistem kerja kolektif bersama-sama dan tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi, dengan mengembangkan etos keikhlasan. Konsep ini menggambarkan bahwa Muhammadiyah sebagai sebuah lembaga dakwah lebih mengutamakan semangat kebersamaan dari pada semangat persaingan dan pertentangan.

Organisasi Muhammadiyah yang terseret arus ke dalam "ranah politik" membawa dampak terhadap kekompakan

dalam menyusun dan menggerakkan roda organisasi Muhammadiyah. Sebagaimana diketahui Muhammadiyah terkadang terjebak dalam persaingan politik, sehingga kemampuan mereka dalam mengoptimalkan energi dan sumber daya manusia yang dimiliki untuk kepentingan umat menjadi terkendala. Persaingan politik telah menyebabkan orang-orang Muhammadiyah terkotak-kotak, kondisi tersebut membawa dampak terhadap kehidupan lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Faktor lain yang membuat sekolah –sekolah Muhammadiyah di Lahat, mengalami kemunduran adalah kegagalan sekolah-sekolah meningkatkan fasilitas yang dimiliki, baik dalam bentuk fasilitas belajar mengajar maupun fasilitas penunjang. Hal tersebut terlihat dari ruang belajar mengajar dan gedung sekolah yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat, telah jauh tertinggal dibandingkan dengan sekolah-sekolah favorit di Kabupaten Lahat. Staf pengajar yang selalu berganti, membawa dampak terhadap kualitas pendidikan di sekolah Muhammadiyah Lahat. Lembaga pendidikan Muhammadiyah, dijadikan sarana latihan bagi para guru, setelah mendaftar dan lulus menjadi pegawai negeri sipil (PNS) mereka tidak lagi kembali ke sekolah Muhammadiyah Lahat.

Di samping faktor intern diatas lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat juga dihadapkan dengan persoalan ekstern sehingga lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat menjadi mundur. Hambatan yang berasal dari ekstern adalah berkembangnya lembaga pendidikan lain di Kabupaten Lahat. Semenjak tahun 1990-an, pemerintah melalui Dinas Pendidikan rutin melakukan pembangunan sekolah-sekolah di seluruh daerah di Kabupaten Lahat, mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama. Kondisi ini dengan sendirinya membawa dampak terhadap berkurangnya jumlah siswa di sekolah-sekolah

Muhammadiyah. Sebagaimana diungkapkan oleh Mini Ratna Jaya.

“ sebelum pemerintah membangun Sekolah Dasar Inpres di Pasar Lahat, hampir seluruh masyarakat yang ada di Pasar Lahat, sekolah di SD Muhammadiyah, sebab SD ini merupakan satu-satunya SD di Pasar Lahat “

Ungkapan tersebut jelas menggambarkan bahwa sebelum SD Inpres berdiri SD Muhammadiyah memiliki jumlah siswa yang cukup banyak sebab sekolah mereka satu-satunya di Pasar Lahat. Ketika SD Inpres didirikan, banyak orang tua yang dahulunya menyekolahkan anak di SD Muhammadiyah berpindah ke SD Inpres.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh kepala SMA Muhammadiyah Lahat, sebelum SMA banyak di bangun di desa/kampung. Banyak orang desa/kampung yang sekolah ke SMA Muhammadiyah, seperti orang Gumay, Kikim, dan Merapi. Ketika di daerah mereka telah dibangun sekolah negeri maka orang tua lebih suka menyekolahkan anaknya di kampung masing-masing, dibandingkan harus mengirim mereka sekolah ke Kota Lahat. Kondisi ini menyebabkan anak-anak yang sekolah di SMA Muhammadiyah saat ini, hanya orang-orang dari Kota Lahat dan anak-anak panti yang berada dibawah naungan Muhammadiyah Lahat.

Penghambat ekstern lainnya yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat adalah munculnya sistim penilaian dalam dunia pendidikan di Indonesia yang dikenal dengan nama akreditasi, untuk konteks Kabupaten Lahat, sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi terbaik adalah sekolah negeri. Sistem ini memberi kesempatan kepada siswa dan orang tua untuk mempertimbangkan dimana tempat yang layak untuk

melanjutkan pendidikan. Sistem ini juga memberikan informasi tentang fasilitas dan prestasi yang telah diraih sebuah sekolah. Kondisi ini jelas menghambat sekolah-sekolah swasta untuk bersaing dengan sekolah negeri.

Berkembangnya sekolah-sekolah swasta lainnya di Kabupaten Lahat juga menjadi faktor mundurnya lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Hal ini terlihat dari berkembangnya sekolah dibawah yayasan Tarakanita yang mampu menyaingi sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Lahat. Saat ini di Kabupaten Lahat, sekolah swasta ternama dan diperhitungkan adalah "Santa Yosef yang berada dibawah yayasan Tarakanita. Kondisi ini jelas sebuah tantang yang harus dicarikan solusinya bagi sekolah Muhammadiyah Lahat agar bisa kembali maju dan jaya.

Faktor ekstern lain yang mempercepat lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat mengalami kemunduran adalah tidak adanya lagi semangat untuk membesarkan lembaga pendidikan Muhammadiyah oleh warga Muhammadiyah. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya orang-orang Muhammadiyah yang tidak lagi menyekolahkan anaknya dilembaga Muhammadiyah. Ironisnya kebijakan ini juga diikuti oleh kalangan guru, pengurus dan tokoh-tokoh penting Muhammadiyah Lahat.

Tergambar bahwa kemunduran lembaga pendidikan Muhammadiyah merupakan tanggung jawab dari Dikdasmen Muhammadiyah Lahat, bukanlah tanggung jawab seluruh warga Muhammadiyah Lahat. Keadaan ini jelas merupakan bahaya besar bagi perkembangan lembaga pendidikan Muhammadiyah di masa depan.

E. Pandangan Masyarakat

Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat pada awal berdirinya mendapatkan respon luar biasa dalam

kehidupan masyarakat di Kabupaten Lahat. Kondisi ini disebabkan dikawasan ini semenjak zaman Belanda telah dijadikan pusat perbengkelan kereta api di Sumatera. Kondisi ini menyebabkan banyaknya orang-orang asing yang bermukim dikawasan ini, kedatangan orang asing dengan sendirinya membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Lahat, termasuk dalam dunia pendidikan.

Pendirian Sekolah Dasar Muhammadiyah Lahat tahun 1933, bisa dijadikan indikasi bahwa sekolah itu merupakan respon yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Kabupaten Lahat, atas berdirinya sekolah yang sama oleh orang Khatolik. Pendirian yang memiliki spirit untuk melindungi dan memberikan kesempatan kepada orang Islam untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan akidah mereka. Hal ini tentu saja mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat di Kabupaten Lahat.

Respon luar biasa orang tua terhadap lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat terus berlangsung sampai masa orde lama dan 1980-an keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya pemahaman dari orang tua bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah bertujuan untuk benteng akidah bagi anak-anak mereka. Kondisi ini disebabkan lembaga pendidikan Muhammadiyah mampu mempertahankan ciri khas pendidikan Muhammadiyah yaitu al Islam, kemuhammadiyah dan bahasa arab. Di samping itu indikator keberhasilan yang digunakan oleh orang tua saat itu adalah kemampuan anak dalam memahami ajaran agama dan ketakutan orang tua untuk menyekolahkan anak di sekolah lain serta adanya kepercayaan orang tua akan kemampuan lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Kemampuan lembaga pendidikan Muhammadiyah mempertahankan cirikhasnya menyebabkan output yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah berbeda

dengan sekolah lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Nasution

"mata pelajaran al islam, akan memberikan penampilan dan pemahaman yang berbeda tentang bagaimana tatacara orang Muhammadiyah dalam beribadah, mata pelajaran kemuhammadiyah akan memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengenal lebih jauh Muhammadiyah sedangkan mata pelajaran bahasa arab memberikan kesempatan anak didik untuk mempelajari al quran dan hadis jauh lebih baik"

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa tiga pelajaran pokok yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah bukanlah pelajaran yang bisa di pandang ringan. Sebab pelajaran ini memiliki nilai penting bagi seluruh siswa di lembaga pendidikan Muhammadiyah, kemampuan mereka menguasai tiga mata pelajaran ini akan memberikan nilai lebih terhadap output yang dihasilkan oleh Lembaga pendidikan Muhammadiyah

Ciri khas diatas menyebabkan orang yang berasal dari lingkungan Muhammadiyah dan orang luar memberikan kepercayaan lebih terhadap lembaga pendidikan Muhammadiyah. Ketika di daerah mereka, belum terdapat lembaga pendidikan, maka lembaga pendidikan Muhammadiyah merupakan pilihan utama bagi putra dan putri mereka, dengan harapan anak mereka bisa mendalami dan meningkatkan pengetahuan tentang Muhammadiyah lebih jauh. Sebagaiman diungkapkan oleh Rasyid Najib.

“ dahulu orang-orang Muhammadiyah yang berada di Merapi, Kikim dan kawasan diluar kota Lahat, banyak yang menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan ini, karena mereka sangat percaya terhadap lembaga pendidikan Muhammadiyah”

Ungkapan diatas semakin memperjelas kepada kita bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat mendapatkan respon yang luar biasa dari orang tua ketika mereka mampu mempertahankan ciri khas kemuhammadiyahnya dan indikator keberhasilan yang dimiliki oleh orang tua saat itu adalah nilai-nilai keagamaan serta adanya ketakutan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dilembaga-lembaga pendidikan selain Muhammadiyah. Pada masa inilah lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat menjadi sebuah sekolah yang diperhitungkan dan memiliki peranan dalam dunia pendidikan di Kabupaten Lahat

Perubahan terbesar terjadi ketika lembaga pendidikan Muhammadiyah gagal mempertahankan ciri khas ke Muhammadiyah dan organisasi Muhammadiyah terlibat dalam dunia politik sehingga mereka terpecah-pecah dalam berbagai kelompok dan kepentingan. Kondisi ini membawa dampak terhadap perkembangan lembaga pendidikan Muhammadiyah, itu sendiri. Kondisi kekinian lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat adalah mereka tidak mampu mempertahankan ciri khas mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa orang tua murid “ saat ini mata pelajari yang menjadi cirikhas lembaga pendidikan Muhammadiyah, tidak mampu dikelola dengan baik. Indikasinya adalah guru-guru yang mengajar mata pelajaran tersebut, tidak diseleksi secara maksimal dan mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak di Muhammadiyah”

Kegagalan dalam mempertahankan ciri khas tersebut membawa dampak terhadap *output* yang dihasilkan, yang dipersulit dengan tidak meningkatnya fasilitas dan sarana pendidikan di lembaga-lembaga Muhammadiyah. Di saat lembaga sejenis melakukan perubahan yang radikal, Muhammadiyah relatif jalan di tempat. Kondisi ini menyebabkan perhatian dan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan Muhammadiyah menjadi jauh berkurang.

Perkembangan zaman dan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan paradigma dan orientasi pendidikan, yang membawa dampak terhadap respon orang tua terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan termasuk Muhammadiyah. Saat ini keberhasilan diukur dari prestasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, bukan dari meningkatnya pemahaman agama yang dimiliki. Orientasi pendidikan yang mementingkan penguasaan ilmu pengetahuan umum bukan agama menyebabkan perhatian orang terhadap sekolah bercorak agama menjadi berkurang. Dalam konteks masyarakat Lahat gejala ini telah menjadi kenyataan.

Dunia pendidikan di Kabupaten Lahat berkembang ke arah meningkatkannya jumlah sekolah-sekolah yang berhasil meraih akreditasi terutama untuk penilaian A. Indikator yang digunakan untuk penilaian tersebut adalah fasilitas sekolah, kemampuan guru, prestasi yang diraih sekolah dan keberhasilan lulusan di tingkat selanjutnya. Kondisi ini juga dijadikan indikator oleh orang tua dalam memilih tempat pendidikan anaknya, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang wali murid " *agar anak kita sukses dalam dunia pendidikan, sebaiknya semenjak Sekolah Dasar, dimasukan ke sekolah favorit kalau tak bisa, masuk ke sekolah santa yosef*" ungkapan diatas menjelaskan bahwa dalam pemikiran orang tua saat ini yang terpenting adalah anak sukses dalam

dunia pendidikan, seolah-olah mengabaikan pendidikan agama.

Perubahan paradigma dan orientasi pendidikan membawa dampak terhadap bentuk respon orang tua kepada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Sampai tahun 1980-an respon orang tua terhadap lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah adanya keyakinan bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah akan membantu orang tua dalam memberikan pendidikan umum dan agama secara bersamaan. Namun dekade setelah itu orang tua berkeyakinan bahwa pendidikan agama, tidak harus diraih melalui pendidikan formal sehingga mereka tidak menjadikan sekolah keagamaan sebagai sebuah pilihan utama dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai titik pusat keberhasilan.

Ironisnya respon yang sama juga diberikan oleh kader-kader Muhammadiyah Lahat, mereka tidak lagi mempercayai lembaga pendidikan yang mereka dirikan. Dengan beragam alasan mereka lebih suka untuk menyekolahkan anaknya di tempat lain, bahkan ke sekolah Santa Yosef, padahal keputusan tersebut bukanlah pilihan yang tepat dan bijaksana. Harus diakui lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat telah "gagal" dalam mengikuti perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Lahat, namun sebagai kader dan orang Muhammadiyah, seharusnya berusaha agar lembaga pendidikan yang kita miliki mampu meningkatkan diri dan bersaing dengan sekolah-sekolah sejenis.

Data diatas menjelaskan bahwa respon orang tua terhadap lembaga pendidikan Muhammadiyah saat ini telah jauh berbeda dengan masa lalu. Berubahnya indikator keberhasilan dan "gagalnya" Muhammadiyah dalam mengikuti perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Lahat menyebabkan respon orang tua untuk menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah menjadi berkurang. Ironisnya respon yang sama juga

diberikan oleh kader Muhammadiyah sendiri, bukan berusaha untuk meningkatkan lembaga pendidikan Muhammadiyah, mereka lebih suka menyekolahkan anaknya ditempat lain dengan berbagai alasan dan argumen untuk mendukung keputusan mereka.

E. Penutup

Perkembangan sekolah-sekolah berbasis keagamaan yang semakin banyak, dengan sendirinya menimbulkan persaingan diantara mereka, sehingga beberapa sekolah berbasis keagamaan tidak memiliki murid atau tutup seperti yang dialami oleh sekolah dasar Nahdatul Ulama (SD NU). Persaingan dunia pendidikan yang semakin ketat menyebabkan sekolah-sekolah yang memiliki basis keagamaan menghadapi persoalan dalam mengembangkan diri, sehingga bisa bersaing dengan sekolah negeri atau sekolah sejenis. Ketidakmampuan sekolah mengikuti persaingan, meningkatkan fasilitas dan mempertahankan cirri khas yang dimiliki menyebabkan sekolah-sekolah tersebut mengalami kemunduran atau jalan di tempat.

Kondisi yang sama dialami oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat, sebagai sekolah tertua yang mendapat pengaruh ajaran agama Islam di Kabupaten Lahat, saat ini kondisinya jalan ditempat atau "gagal" bersaing dengan lembaga pendidikan sejenis/negeri. Kegagalan ini disebabkan oleh faktor intern dan ekstern yang gagal dicarikan jalan penyelesaiannya. Faktor intern yang paling menghambat adalah gagalnya kader Muhammadiyah mempertahankan cirri khas dari lembaga pendidikan Muhammadiyah. sebagaimana diketahui lembaga pendidikan Muhammadiyah merupakan lembaga pendidikan yang menggabungkan materi umum dan agama secara bersama sehingga *output* yang dihasilkan sekolah ini jauh berbeda dibandingkan dengan sekolah lain. Namun kondisi hari ini

output sekolah Muhammadiyah tidak berbeda dengan sekolah lain.

Persoalan lain yang menghambat lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat untuk berkembang adalah ketidakmampuan dalam mengaktualisasikan cita-cita pembentukan organisasi Muhammadiyah yang tertata rapi. Di mana sistem kerja organisatoris adalah sistem kerja kolektif bersama-sama dan tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi, dengan mengembangkan etos keikhlasan. Konsep ini menggambarkan bahwa Muhammadiyah sebagai sebuah lembaga dakwah lebih mengutamakan semangat kebersamaan dari pada semangat persaingan dan pertentangan.

Di samping faktor intern, faktor ekstern juga mempersulit lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat untuk berkembang seperti meningkatnya jumlah sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Lahat. Sampai pertengahan tahun 1990-an jumlah sekolah di Lahat masih terbatas, namun saat ini hampir disetiap kecamatan telah memiliki lembaga pendidikan sehingga berpengaruh terhadap jumlah siswa yang sekolah ke lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Faktor ekstern lainnya adalah berhasilnya sekolah-sekolah sejenis dalam meningkatkan fasilitas yang dimiliki, baik ruang belajar, sarana dan prasarana penunjang, menyebabkan orang tua lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke lembaga tersebut. Sedangkan lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak mengalami perubahan yang signifikan sehingga respon orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan Muhammadiyah menjadi berkurang. Ironisnya kebijakan ini juga diikuti oleh kader dan pengurus Muhammadiyah yang lebih suka menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan sejenis di Kabupaten Lahat.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Lahat

menghadapi sebuah persoalan yang harus dicarikan solusi bersama agar lembaga pendidikan Muhammadiyah ini mampu bertahan dan bersaing dengan lembaga pendidikan sejenis/negeri. Ketidakmampuan untuk mengikuti perkembangan dunia pendidikan saat ini akan menyebabkan lembaga pendidikan Muhammadiyah semakin tenggelam, dengan sendirinya akan menggagalkan cita-cita organisasi Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang menjadikan pendidikan sebagai jalan dakwah demi mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Lembaga pendidikan merupakan aset yang paling berharga bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Lahat, terutama bagi kader dan pengurus Muhammadiyah. Kondisi yang berlangsung saat ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Lahat. Secara kelembagaan sekolah-sekolah Muhammadiyah masih ada dan eksis di Kabupaten Lahat. Namun secara organisasi keberadaan sekolah tersebut harus dipertanyakan oleh seluruh kader dan pengurus Muhammadiyah di Kabupaten Lahat, sebab pendirian lembaga pendidikan Muhammadiyah bertujuan untuk menciptakan kader-kader dan orang-orang yang memiliki pemahaman tentang Islam yang baik.

Dunia pendidikan yang semakin berkembang menyebabkan persaingan antar lembaga pendidikan semakin kuat. Untuk menjawab tantangan yang semakin kuat seluruh orang yang terlibat dalam pengelolaan Lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat harus memiliki pemahaman yang sama bahwa lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat telah "gagal" dalam mencapai tujuan dari pendiriannya. padahal lembaga pendidikan ini diciptakan oleh KH. Ahmad Dahlan yaitu sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk kader-kader Muhammadiyah yang andal dan orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang Islam, namun bagaimana saat ini.

Satu hal yang selalu diperdebatkan oleh orang tua tentang lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat adalah *output* yang dihasilkan sekolah ini ternyata tidak jauh berbeda dengan sekolah swasta kebanyakan, padahal sekolah ini memiliki perbedaan dengan sekolah swasta kebanyakan. Semua pihak terkait harus berusaha untuk mempertahankan ciri khas dari dunia pendidikan Muhammadiyah yang tertuang dalam 3 mata pelajaran yaitu al islam, kemuhammadiyah dan bahasa arab. Untuk itu materi dan seleksi guru untuk mengasuh mata pelajari ini harus mendapatkan perhatian lebih dari pihak pengelola lembaga pendidikan Muhammadiyah Lahat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- A. Anshori (2010) "Deskripsi Muhammadiyah Sumatera Utara" Hal. 32 www.repository.usu.ac.id diambil pada tanggal 19 Agustus 2010
- Haidar Nashir, et.al., *Materi Induk Pengkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Badan Pendidikan Kader Pimpinan Muhammadiyah, 1994),
- Puspa Delima Amri, Dampak Ekonomi dan Politik UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, *Makalah* Depertemen Economis CSIS Jakarta
- Seno Laporan Penelitian "Perkembangan Organisasi Muhammadiyah Palembang tahun 1928 – 1980" Padang : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2007.

Arsip

- Arsip PDM Lahat " Sejarah Ringkas Muhammadiyah di Lahat" PDM Lahat.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat "Laporan data Kependudukan Kabupaten Lahat diambil dari webset www.lahatkab.go.id tanggal 30 November 2009.
- Arsip pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat.
- Depertemen Pendidikan Nasional " Rincian Data Nomor Pokok Sekolah Nasional Perpropinsi di Indonesia" diambil dari www.depndinas.go.id pada tanggal 30 November 2009
- NPSN Sekolah di Kabupaten lahut diambil dari www.npsn.jardiknas.org pada tanggal 25 Maret 2010
- Laporan PP Muhammadiyah periode 1995-2000 kepada Muktamar ke-43 di Banda Aceh

PELAKSANAAN HAJI PADA MASYARAKAT MELAYU PALEMBANG

Oleh:

Zusneli Zubir

A. Pendahuluan

Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekkah merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Rukun Islam yang kelima, yaitu "Naik Haji bagi yang mampu". Kemampuan yang di maksud di sini adalah mampu secara ekonomi maupun dari sisi ibadahnya. Sementara itu bagi umat Islam yang belum mampu tidak diwajibkan menunaikan Ibadah Haji ke Mekkah.

Tidak ada catatan pasti sejak kapan umat Islam Nusantara mulai berhaji. Hanya saja menurut perkiraan sejak Islam masuk ke kepulauan yang kini disebut Indonesia, sudah ada orang pergi haji. Mereka berangkat secara perorangan. Baru setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri, penyelenggaraan haji, kemungkinan diselenggarakan oleh pemerintah saat itu, misalnya oleh Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1292 di Aceh.

Ketika kolonial Belanda menduduki Nusantara penyelenggaraan haji diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Terutama sekitar awal abad 20 dengan terbitnya Pelgrims Ordonantie Sataablaad No 698 tahun 1922. Aturan itu diperbaharui lagi pada tahun 1938 dengan lahirnya Pelgrims Verordening. Pada masa kemerdekaan, pada tanggal 6 Februari 1950, Menteri Agama KH Wahid Hasyim mengeluarkan surat edaran yang menunjuk Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI) – bersama Departemen Agama selaku regulator – sebagai satu-satunya lembaga

penyelenggara haji. PPHI adalah lembaga yang dibentuk Badan Kongres Muslimin Indonesia pada 21 Januari 1950. PPHI adalah semacam penerus Komite Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia yang beroperasi sejak masa kolonial.

Pada masa Orde Baru lahir Keppres No 22 tahun 1969 yang mengatur penyelenggaraan haji. Lalu lahir Keppres No 62/1995 yang diperbaiki lagi dengan Keppres No 119/1998. Kini penyelenggaraan haji diatur dengan UU No 17/1999, yang lahir di masa reformasi. Pada masa Orde Baru, pemerintah (Depag) adalah regulator sekaligus operator penyelenggaraan haji, sedangkan sejak Reformasi penyelenggara ibadah haji adalah oleh pemerintah dan masyarakat.

Umat Islam yang melaksanakan kewajiban haji pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20 sudah mencapai 2.000 orang per tahun, bahkan jumlah yang sebenarnya diduga jauh lebih besar dari yang tercatat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.¹ Begitu besarnya animo masyarakat untuk menunaikan Haji, menjadi bukti bahwa kesadaran umat Islam dalam beragama telah tinggi. Di Sumatera Selatan misalnya, kesadaran terhadap kehidupan beragama dapat dirasakan cukup kuat di daerah Ilir dan di Kota Palembang, sementara di bagian Ulu masih banyak terpengaruh pada kepercayaan animisme.² Kenyataan ini diperkuat oleh Jeroen Peeters dalam bukunya *"Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942"*, yang mengatakan bahwa intensitas pertemuan masyarakat dengan pembawa ajaran Islam di daerah Ilir dan Kota Palembang menjadi salah satu faktor yang membuat Islam di

¹ Jacob Vredendregt, "Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia", dalam Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji* (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 3.

² Animisme merupakan sebuah kepercayaan yang mengajarkan tentang adanya sebuah kekuatan terhadap benda, seperti ajaran yang menyembah kepada berhala.

kedua daerah tersebut jauh lebih kuat pengaruhnya bila dibandingkan dengan daerah Ulu.³

Selain dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, penyebab tingginya *animo* masyarakat dalam menunaikan ibadah haji pada kurun waktu awal abad ke-20, ada kaitannya dengan masa transisi masyarakat dalam pandangan pengajaran agama. Bagi mereka Ibadah Haji menjadi penutup yang ideal setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren atau ketika mereka mengakhiri masa remaja dan memasuki masa hidup berumah tangga.⁴

Setelah Indonesia merdeka, terutama pada tahun 1950-an, pelaksanaan haji bagi umat Islam semakin meningkat pesat. Hal itu seiring dengan tumbuhnya anggapan di tengah masyarakat bahwa dengan menunaikan haji berarti sebuah kehormatan.⁵ Di samping adanya anggapan bahwa dengan memiliki "titel Haji" kehormatan mereka akan terangkat, ada pula yang beranggapan keberadaan mereka akan lebih terlegitimasi sebagai golongan yang lebih punya nilai. Kenyataan seperti ini pernah pula terjadi pada zaman raja-raja Banten dan Mataram yang saling berlomba untuk mengirim utusan ke Mekkah untuk mencari pengakuan dari Tanah Suci dan meminta gelar "Sultan". Agaknya raja-raja tersebut beranggapan bahwa gelar yang diperoleh dari Mekkah akan memberi sokongan supranatural terhadap kekuasaan mereka.⁶

³ Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubaan Religius di Palembang 1921-1942* (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 36-38.

⁴ Vredenbregt, *op cit.*, hlm. 45.

⁵ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad ke-20* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1996). hlm. 263.

⁶ Marin van Bruinessen *dalam* Douwes & Kaptein, *op cit.*, hlm. 122.

Fenomena pergeseran tujuan naik Haji yang terjadi pada sebagian masyarakat Indonesia yang terutama banyak terlihat sejak era tahun 1980-an, orang mulai berlomba-lomba naik haji di samping karena dorongan kewajiban, juga didorong oleh keinginan untuk mengangkat prestise atau marwah diri di tengah masyarakat. Untuk lebih jelasnya bagaimana pelaksanaan haji di masyarakat Melayu Palembang, sebelum dan sesudah tahun 1950, akan dikupas lebih lanjut dalam tulisan berikut:

B. Pelaksanaan Haji masyarakat Melayu Palembang

a. Sebelum Tahun 1950-an

Sejalan dengan perkembangan Islam di Palembang, keinginan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci cukup besar pada masyarakat. Sebelum ada kapal laut, umat Islam Palembang pergi haji dengan menggunakan kapal layar mengarungi lautan selama berbulan-bulan, malah ada yang sampai makan waktu dua tahun karena harus berhenti di Bombay, Aden, dan dari sana baru melanjutkan perjalanan menuju Jeddah.⁷

Sejak Belanda menguasai Kepulauan Nusantara dan mengetahui bahwa hasrat umat Islam Palembang dan Indonesia secara umum, untuk menunaikan ibadah haji cukup besar, pemerintah Hindia Belanda kemudian memutuskan untuk ikut campur dalam pelaksanaan perjalanan ibadah haji. Demi kepentingan politiknya di Nusantara, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan berbagai ketentuan yang sifatnya sama sekali tidak menyenangkan dan menjengkelkan umat Islam, khususnya para calon haji. Kekawatiran pemerintah jaman kolonial Belanda dengan adanya kebebasan umat

⁷ Muryidi dan Sumuran Harahap, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia* (MARS – 26, Jakarta, 1984), hlm. 12.

Islam bepergian keluar negeri, baik dalam rangka berdagang dengan bangsa-bangsa Arab, India, dan Cina maupun untuk melaksanakan ibadah haji dimanfaatkan guna mengadakan perhubungan atau persekutuan dengan pihak tertentu untuk menentang pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, untuk lebih membatasi gerak umat Islam tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan berbagai peraturan dan khusus untuk haji dikeluarkan ordonansi pada tahun 1825 yang berisi ketentuan peraturan bahwa tidak boleh seorang umat Islam Indonesia pergi ke Mekkah jika tidak mempunyai pas jalan yang diperoleh dengan membayar seharga F. 110,-.

Pada tanggal 26 Maret 1831 dikeluarkan lagi peraturan yang menyatakan bahwa barang siapa berani pergi ke Mekkah tanpa pas jalan dari pemerintah Hindia Belanda, sepulangnya dari Mekkah orang tersebut akan didenda dua kali lipat harga pas jalan yaitu sebesar F. 220,-. Akan tetapi, peraturan tersebut akhirnya dicabut karena tidak dimuat di dalam *Indische Staatsblad* sehingga pihak *Hoogerëchtshof* tidak bisa mengadakan tuntutan atas pelanggaran ketentuan 1831.

Selanjutnya pada tahun 1859 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ordonansi sebagaimana tercantum dalam *Indische Staatsblad* No. 24 tahun 1859 yang isinya memuat dua pengertian, yaitu;

- a. Barang siapa pergi ke Mekkah harus minta pas jalan. Pas jalan hanya dapat diberikan jika Bupati berpendapat bahwa orang yang memintanya cukup mempunyai ongkos untuk perjalanan haji serta untuk nafkah bagi ahli familinya yang ditinggalkan. Pas jalan itu harus diperlihatkan untuk diketahui di semua tempat perwakilan Belanda yang dilaluinya.
- b. Orang yang telah kembali dari Mekkah harus menempuh ujian lebih dahulu sebelum mereka berhak mengenakan pakaian haji.

Perubahan dan penambahan selanjutnya di dalam peraturan haji banyak dipengaruhi oleh hasil kegiatan dan kepentingan bangsa Belanda terhadap rakyat dan jajahannya.

Hasrat umat Islam yang cukup besar untuk menunaikan ibadah haji itu tidak terlepas dari sasaran tindakan politik pemerintah Belanda, sehingga orang-orang pribumi yang datang dan pergi dari luar negeri ini perlu pengawasan. Pada tahun 1867 pemerintah Hindia Belanda memerintahkan kepada para Bupati untuk mengadakan pendaftaran haji di daerahnya.⁸ Pada tahun 1872 dikeluarkan peraturan yang menyebutkan bahwa pas jalan sebagaimana yang telah diundangkan dalam *Indische Staatsblad* 1859 itu cukup diperlihatkan kepada konsul Belanda di Jeddah saja.

Jika sebelum ada kapal laut, umat Islam yang hendak menunaikan ibadah haji harus menggunakan kapal layar yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan sampai dua tahun, sejak ada kapal laut (bermesin), maka jemaah haji yang berangkat dari Indonesia, termasuk Palembang, harus melalui Singapura. Dari Singapura baru berangkat ke Jeddah. Mereka ada yang menjadi korban penipuan para Syekh di Singapura.⁹ Kadang para calon haji tersebut karena kehabisan perbekalan dan menjadi korban penipuan oleh para syekh tersebut akhirnya hanya sampai di Singapura saja, dan oleh karena ongkos habis akhirnya menetap di Singapura. Oleh karena itulah pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19 dikenal adanya istilah "*Haji Singapura*" karena hanya sampai Singapura saja.

Baru pada tahun 1920 mulai ada kapal yang langsung berangkat dari Indonesia ke Jeddah, yang dilakukan oleh Maskapai pelayaran Belanda, yaitu Nederland, Rotterdam dan

⁸ *Indische Staatsblad* 1867 No. 114)

⁹ Pengertian Syekh di sini adalah agen atau calo tiket kapal dari perusahaan-perusahaan pelayaran milik Belanda dan Inggris. Lihat Muryidi Mr dan Sumuran Harahap, *op. cit.*, hlm. 14.

Semerong Blouw dari Inggris yang tergabung dalam kongsi tiga. Walaupun pelayanannya asal mengangkut saja, calon haji diangkut bersama barang-barang dagangan seperti kopra dan sebagainya dan jatah makan (ransum) hanya dengan ikan asin.

Selain itu calon haji yang akan berangkat ke Jeddah lebih dahulu dikarantina dan diturunkan di Kamerun dekat Yulamlam selama tiga hari. Para calon haji mengalami pemeriksaan dokter, mandi dengan air asin dan makanan yang diberikan sangat tidak layak. Sepulangnya ke Indonesia mereka juga dikarantina lagi, bahkan para haji tersebut mengalami pemeriksaan yang kurang wajar seperti ditelanjangi dan sebagainya. Sehubungan dengan hal inilah maka para ulama Indonesia pada waktu itu sampai mengeluarkan fatwa *"Tidak wajib bagi perempuan pergi haji sehubungan dengan perlakuan yang kurang baik di perjalanan"*. Bagi laki-laki, karena dianggap dalam keadaan darurat perlakuan yang demikian bukanlah merupakan halangan.

Seorang yang telah memiliki pas jalan ia dapat membeli tiket kapal tanpa memperhatikan waktu, apakah musim haji atau bukan. Jika ia mau kapanpun ia dapat berangkat sepanjang ada kapal yang menuju Arab Saudi (Jeddah). Untuk membeli tiket kapal dapat dilakukan langsung pada kantor atau agen dari maskapai pelayaran seperti, Maskapai Blou unnel Line, NV, Stoomvart Maaschhappy "Nederland", Koninklijke Rotterdamche Lloyd. Jika merasa segan, tidak sempat atau tidak tahu tempat kantor maskapai tersebut ia dapat membelinya melalui perantara yang pada waktu itu disebut Syekh. Para Syekh ini oleh maskapai pelayaran diberi imbalan prosentase tertentu yang jumlahnya cukup untuk menjadi perangsang dalam melakukan kegiatannya sehari-hari mencari calon-calon haji untuk

berangkat dengan kapal milik maskapai pelayaran yang bersangkutan.

Pada waktu itu tidak ada peraturan yang menentukan tentang jumlah, volume, atau berat barang bawaan yang boleh dibawa oleh calon haji atau para penumpang kapal itu. Hal ini membuka peluang adanya penipuan, pemerasan, pertengkaran antara penumpang, pencurian dan lain-lain. Hal ini menyebabkan penderitaan calon haji di atas kapal dan menurunkan martabat orang yang akan menurunkan ibadah haji karena yang biasa diangkut dengan cara demikian itu hanyalah barang-barang dagangan atau hewan saja. Keadaan seperti ini berlangsung lama dan dari pihak maskapai pelayaran maupun dari kapten kapal sama sekali tidak ada perhatian untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap para penumpang. Persaingan tidak sehat sering terjadi antara sesama penumpang, walaupun perjalanan tersebut dalam rangka menunaikan ibadah.

Sesampainya di Jeddah calon jemaah haji harus menetapkan tempat di mana ia akan tinggal selama di Makkah dengan menyebut Syekh mana yang ia tuju.¹⁰ Para Syekh ini pun mempunyai agen-agen di Indonesia yang disebut badal Syekh yang masing-masing berusaha menarik langganan atau tamu sebanyak mungkin kepada Syekhnya di Makkah. Para badal Syekh ini pun mendapat imbalan jasa dari Syekh yang banyaknya sesuai dengan jumlah calon haji yang dapat ditarik ke penginapannya.

Selama tinggal di Makkah calon jemaah haji harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di Makkah. Mereka dapat menukar uang bekal yang mereka bawa ke dalam mata uang Real Arab Saudi dengan cara yang mudah. Dalam kehidupan sehari-hari jika berbelanja di pasar atau dalam

¹⁰ Yang dimaksud dengan Syekh di sini adalah pemilik penginapan selama di Makkah dan Muwazir untuk di Madinah

pergaulan di antara jemaah haji sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang pada umumnya disebabkan,

- a. Adanya anggapan bahwa semua orang di Mekkah itu adalah suci sehingga tidak mungkin ada penipuan, kebohongan, dan lain-lain.
- b. Anggapan bahwa jika seseorang kena tipu di Mekkah dan ia mengikhlaskannya, maka hal itu merupakan ibadah.
- c. Kurangnya bekal pengetahuan para calon haji sehingga tidak mampu memahami ajaran Islam secara wajar dan tidak menguasai tata tertib pelaksanaan ibadah haji.

Adanya anggapan yang demikian itu merupakan sumber masalah pelaksanaan haji pada setiap tahun penyelenggaraan pelayanan haji.

Kekecewaan umat Islam di Palembang terhadap urusan haji pada zaman Hindia Belanda sebenarnya berkisar pada empat pokok persoalan,

1. Perlakuan maskapai perkapalan terhadap penumpangnya, baik dalam perjalanan berangkat maupun sepulangnya dari Arab Saudi.
2. Pelayanan para Syekh di Arab Saudi.
3. Kurangnya pengetahuan para calon jemaah haji terhadap ajaran agamanya sendiri.
4. Ekses-ekses dari persaingan bebas dan badal Syekh dalam usahanya mencari calon jemaah haji.

Persoalan-persoalan inilah yang sampai puluhan tahun kemudian masih tetap merupakan sumber masalah utama dalam penyelenggaraan urusan haji.

Sementara itu semenjak perkembangan politik Hindia Belanda, terjadi beberapa perubahan dalam pelaksanaan haji, terutama terkait dengan keamanan dalam negeri. Semenjak intensitas umat Islam dalam melaksanakan haji semakin tinggi, persoalan stabilitas dalam negeri juga mengalami gangguan. Pemerintahan Hindia Belanda beranggapan, semuanya itu akibat interaksi masyarakat yang berhaji dengan berbagai orang dari seluruh dunia, sehingga mendapat pengaruh dari luar. Oleh sebab itu pemerintah Hindia Belanda seolah-olah membiarkan situasi perhajian Indonesia kurang terjamin baik pelayaran maupun ketertiban dalam perjalanannya. Pemeriksaan-pemeriksaan, baik oleh pihak Maskapai pelayaran Belanda yang tergabung dalam Kongsi Tiga dan broker-brokernya yang terdiri dari orang-orang pribumi sendiri, penipuan-penipuan oleh para tengkulak haji serta para Badal Syekh pemerasan secara legal memperoleh perlindungan dari pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1345 Hijriah (12 Juli 1926 sampai 1 Juli 1927) tercatat jumlah jemaah haji terbesar berasal dari Indonesia, yang waktu itu masih disebut Hindia Belanda. Jemaah haji dari Indonesia yang berjumlah 52.412 orang ini adalah 42,6 persen dari keseluruhan jemaah haji tahun itu.¹¹ Ada beberapa penyebab timbulnya gejala ini: Kaum muslimin Indonesia

¹¹ Angka-angka statistik ini bisa dipandang tepat, sebab sejak peningkatan pesat dalam pelayaran Laut Merah setelah dibukanya Terusan Suez tahun 1869, negara-negara Barat yang menjajah negeri-negeri Islam sudah mulai mengawasi masuknya para warga mereka ke Jeddah dengan dalih karantina. Meskipun demikian, kalau kita memperhitungkan orang-orang Indonesia yang mendapat paspor Inggris di Singapura dan mereka yang menyelundup masuk tanpa paspor sama sekali, jumlah jemaah haji Indonesia yang sesungguhnya pastilah jauh lebih besar. Untuk lebih jelasnya lihat Akira Nagazumi, "Pemberontakan Partai Komunis Indonesia dan Pengaruhnya atas Jemaah Haji: 1926-1927" dalam Akira Nagazumi (ed.), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX dan XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hlm. 211.

sedang menikmati ledakan (*boom*) ekonomi untuk pertanma kalinya dan Hari Raya Idul Fitri kebetulan jatuh pada hari yang sangat mujur menurut almanak Islam. Tambahan pula, lebih penting lagi, peperangan di Jazirah Arab sudah berakhir beberapa tahun sebelumnya dengan kemenangan Bani Saud, penguasa wilayah Nejd di daerah pedalaman, atas Bani Hasyim dari wilayah Hejaz di Laut Merah. Begitu Ibnu Saud memasuki Mekkah, Husein dari Bani Husein yang kalah melarikan diri. Setelah menaklukkan Madinah dan Jeddah, pada tanggal 4 Januari 1927 ia pun resmi dinyatakan sebagai raja Hejaz. Semua wilayahnya kemudian diberi nama baru, Arab Saudi, pada bulan September 1932.¹² Sebagai seorang pengikut Wahabi yang gigih, Raja Ibnu Saud mencoba menarik para jemaah dengan mengembalikan perdamaian dan ketertiban di kota suci dan sekitarnya. Perkampungan orang Indonesia dan Malaya yang kesemuanya disebut *Jawah* oleh orang Arab boleh dikata lenyap selama perang saudara. Meskipun demikian, perkampungan *Jawah* ini segera muncul kembali dan menurut laporan tahunan konsul Belanda untuk tahun 1926/1927, jumlah penghuninya mencapai 5.183 orang.¹³

Pada masa pendudukan Jepang, umat Islam Indonesia tidak dapat melaksanakan ibadah haji karena tidak adanya alat angkutan dan ketidakamanan dalam perjalanan. Meskipun demikian, segala peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda masih tetap berlaku berdasarkan Aturan Peraturan Undang-Undang Bala tentang Jepang No.1 tahun 1942 yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda dahulu tetap berlaku, selama peraturan itu tidak

¹² *Ibid.*, hlm. 212.

¹³ *Ibid.*

bertentangan dengan peraturan Bala Tentara Dai Nippon".¹⁴

Pemerintah militer Jepang yang berkuasa sejak tahun 1942 sampai pertengahan tahun 1945 menjalankan juga suatu "politik Islam". Walaupun dasar pengamatan dan landasan pengetahuannya kurang luas dan kurang mendalam seperti pemerintah Hindia Belanda, yaitu negara harus terlepas dari urusan agama. Ajaran Islam harus dipisah antara bidang mu'amalah dan ubudiyah dengan yang politik dan ketatanegaraan. Ajaran Islam di bidang mu'amalah dan ubudiyah diperkenankan tetapi dengan pengawasan.

Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, Belanda kembali berusaha untuk dapat menjajah bangsa Indonesia lagi. Setelah hampir empat tahun umat Islam Indonesia tidak dapat menunaikan ibadah haji karena adanya peperangan dan penjajahan oleh Jepang, maka hal ini dijadikan ide siasat Belanda. Pemerintah Belanda kembali melakukan pemberangkatan haji atas wilayah-wilayah yang berhasil didudukinya dengan Kongi Tiga. Akan tetapi, para ulama pada waktu itu cukup waspada dengan adanya siasat tersebut dan mengatakan bahwa pergi haji pada waktu itu 'alal faur' tidak wajib seketika. Sedangkan membela tanah air adalah sebagian dari pada iman. Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang diketuai oleh Hadratusy Syekh Hasjim 'As'ari kemudian mengeluarkan fatwa sebagai berikut:

"Haram bagi Umat Islam Indonesia meninggalkan tanah air dalam keadaan musuh menyerang untuk menjajah dan merusak agama. Karena itu tidak wajib pergi haji di mana berlaku fardhu 'ain bagi umat Islam dalam keadaan melakukan perang melawan penjajahan bangsa dan agama".¹⁵

¹⁴ Dikutip dari Mursyidi & Sumuran Harahap, *op. cit.*, hlm. 24.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

b. Tahun 1950 – 1970-an

Setelah penyerahan kedaulatan yang dilakukan pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 29 Desember 1949, penyelenggaraan haji kemudian diurus oleh bangsa Indonesia sendiri. Dalam usaha memperbaiki perjalanan haji, beberapa utusan dari Badan Kongres Muslimin Indonesia menghadap Menteri Agama di Jakarta untuk membicarakan tentang pembentukan Panitia Perbaikan Perjalanan Haji dan masalah-masalah yang berkenaan dengan Urusan Haji. Hal ini sesuai dengan Resolusi tentang perbaikan perjalanan haji Indonesia pada waktu kongres pertama Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) yang membuahkan suatu keputusan untuk membentuk suatu Yayasan dengan nama Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia yang terbentuk pada tanggal 21 Januari 1950. Panitia Perbaikan Perjalanan Haji ini merupakan bentuk baru dari *Comitte* Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia yang bergerak pada zaman Kolonial Belanda dan dengan satu misi yang sama. Kemudian Panitia Perbaikan Perjalanan Haji ini dikenal dengan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia atau PHI.

PHI sebagai produk dari pada kesatuan pendapat umat Islam dari berbagai golongan dan aliran maka pengurusnya adalah juga terdiri dari pemuka-pemuka Islam dari berbagai golongan pula, dan kedudukannya di masyarakat benar-benar berakar di hati segenap umat Islam. Anggaran Dasar dan susunan pengurus Yayasan PHI disahkan dengan akta Notaris R. Kadiman Jakarta No. 150 tanggal 23 Februari 1950. Pada waktu itu PHI berkantor di Gambir Utara bersama-sama dengan Kementerian Agama.

Kedudukan Yayasan PHI di dalam penyelenggaraan urusan haji dijelaskan dengan surat Kementerian Agama No. 3170 yang ditandatangani sendiri oleh Menteri Agama KH Wahid Hasjim. Sebelum itu dengan surat keputusan Menteri Agama RIS tanggal 6 Februari 1950 dan surat Edaran Menteri

Agama RI di Yogyakarta No. A III/1/648 tanggal 9 Februari 1950 maka bertitik tolak pada Keputusan Dewan Menteri RIS dalam rapatnya tanggal 8 Februari 1950 masalah haji menjadi kompetensi Kementerian Agama dan menunjuk Yayasan PHI sebagai satu-satunya wadah yang sah yang bekerja di samping instansi-instansi pemerintah untuk mengatur, melaksanakan, dan mengawasi perjalanan haji. Dalam pelaksanaan tugasnya PHI di bawah pengawasan dan atas petunjuk Kementerian Agama serta perlindungan dari pamongpraja.

Gedung-gedung asrama dan kantor-kantor Panitia Haji Indonesia mulai didirikan di kota-kota pelabuhan embarkasi, yaitu Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Medan. Sedang yang di Makasar diterima PHI dari Panitia Haji zaman federal. Sebagian dari gedung-gedung tersebut didapat dari sokongan/bantuan pemerintah cq Kementerian Agama sebaaimana bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan lainnya yang melakukan jasa kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Sejak penyelenggaraan haji diselenggarakan oleh bangsa Indonesia, dalam hal ini Departemen Agama dan PHI maka dapat dikatakan tidak ada lagi keluhan-keluhan jemaah yang berhubungan dengan fasilitas akomodasi di kapal maupun adanya penipuan dan pemerasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti pada zaman kolonial dan para tengkulak haji atau badal syekh, sudah tidak mempunyai ruang gerak lagi.

Kebanyakan paa jemaah haji berasal dari desa-desa dan kurang pengetahuan dalam tata pergaulan dengan sesama. Pada umumnya masyarakat dalam kesalahan-kesalahan mengenai soal haji hanya mengkambinghitamkan kepada penyelenggaraannya tanpa mau melihat keadaan pribadi dari para jemaah haji. Persoalan selanjutnya yang timbul dalam masyarakat khususnya para calon jemaah haji

adalah masalah quotum, sehingga di antara para calon jemaah haji pada masa itu ada yang sampai mengalami apa yang disebut dengan “demam quotum”.

Pada tahun 1950-an sampai 1970-an pemerintah menunjuk Majelis Pembimbing Haji (MPH) untuk memberikan pembinaan kepada calon haji. Yang pernah menjabat sebagai ketua MPH di Palembang di antaranya adalah Drs. Yusuf Azis dan K.H. Sazhili Mustafa. Pada tahun 1950-an sampai 1970-an orang yang ingin menunaikan ibadah haji ditentukan lewat undian. Caranya adalah seseorang yang berniat menunaikan ibadah haji terlebih dahulu mendaftar ke Departemen Agama dengan menyertakan ONH yang telah ditetapkan pemerintah. Semua nama yang telah mendaftar tersebut kemudian diundi (dikenal dengan istilah kuotum). Penyelenggaraan haji ini dikelola oleh PT Arafat. Setelah perusahaan ini gulung tikar pada tahun 1968, penyelenggaraan haji kemudian diambil alih oleh Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat.¹⁶

Proses pengundian yang dilakukan oleh MPH adalah cara mengundang semua yang mendaftar dan dikumpulkan di Kantor Depag Kota Palembang (Djawatan Urusan Agama). Semua nama yang hadir kemudian diundi dengan disaksikan oleh semua calon haji. Nama yang terpilih itulah yang akan pergi menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut. Bagi yang namanya tidak keluar akan diprioritaskan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya. Jalur yang ditempuh oleh jemaah haji asal Palembang yang menggunakan kapal laut pada tahun 1950-an sampai 1970-an adalah Palembang – Johor – Singapura – Jeddah.¹⁷

¹⁶ Pada tahun 1995 penyelenggaraan haji dikembalikan lagi ke Departemen Agama, yaitu pada masa Tarmizi Thaher menjabat sebagai menteri agama. Wawancara dengan K.H. Zainal Bahri Bey, mantan Ka Depag Kota Palembang, tanggal 30 Maret 2007 di Palembang.

¹⁷ Wawancara dengan Mochtar Efendi, mantan Letkol ABRI dan alumni Thawalib Parabek, tanggal 30 Maret 2007 di Palembang.

Pengertian daripada *quotum* itu sendiri yang dalam bahasa Inggrisnya adalah "*inducement*" ialah merupakan jumlah jatah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Wewenang penetapan *quotum* ini ada pada Menteri Agama berdasarkan animo calon haji di masing-masing daerah maupun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan skala prioritas. Berdasarkan banyaknya pelamar calon haji ditetapkan jatah negara-negara bagian. Seterusnya negara-negara bagian menetapkan untuk provinsi, keresidenan, dan kabupaten. Perubahan-perubahan dalam jumlah jatah yang telah ditetapkan wewenanganya hanya ada pada pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan:

- a. Agar tetap mempunyai *overzicht* setiap waktu sehingga dapat dijamin terpakainya semua *quotum* serta terbaginya secara adil kepada semua daerah di negara-negara bagian.
- b. Agar dapat direncanakan secara tepat *schedul* pemberangkatan dari masing-masing pelabuhan yang disesuaikan dengan frekuensi penggunaan *quotum*.
- c. Untuk menjaga jangan sampai terbuangnya *quotum* secara sia-sia karena tidak ketahuan bahwa di satu pihak ada yang kelebihan *quotum* dan di lain pihak kekurangan.
- d. Untuk memudahkan pengontrolan dan pengendalian atas kemungkinan diperjualbelikannya *quotum* haji tersebut.

Adanya sistem kuota yang berlaku pada setiap musim haji di mana pada umumnya jumlah *quotum* yang ditetapkan pemerintah selalu tidak memenuhi jumlah pelamar pada setiap tahun. Pada tahun pertama penyelenggaraan haji dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950, sudah tercatat pelamar calon haji sebanyak 20.135 sedang *quotum* yang

ditetapkan oleh pemerintah sebesar 10.000 dan jemaah haji yang diberangkatkan 9.892 orang. Hasrat pelamar haji yang begitu besar untuk dapat menunaikan ibadah haji itu menyebabkan mereka selalu mengulang pendaftarannya pada setiap tahun penyelenggaraan haji.

Pada tahun 1951 berhubung adanya wabah pes di dekat Arab Saudi dan sehubungan dengan beberapa hal lain maka sebanyak 8.000 jemaah haji tidak dapat diangkut ke Tanah Haji. Berdasarkan anjuran alim ulama maka jemaah sebanyak itu akan diangkut/diberangkatkan pada tahun-tahun berikutnya masing-masing sebanyak 4.000 sehingga quotum haji pada tahun-tahun berikutnya ditetapkan sebanyak 14.000.

Pada tahun 1953 hampir seluruh daerah Indonesia kekurangan quotum. Sedang di beberapa daerah yang pelamarnya sedikit terjadi kelebihan quotum. Untuk mengatasinya dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama No. 5 tahun 1953 tanggal 14 November 1953 kepada penduduknya diperkenankan untuk mendaftarkan sesuai dengan quotum yang ditetapkan di daerah itu ditambah dengan 25 persen pelamar baru.

Selanjutnya dengan Instruksi Bersama Menteri Agama No. 6 tahun 1953 kepada pelamar lama harus didahulukan dan diberikan quotum dan apabila masih ada sisa baru diberikan kepada pelamar baru. Adapun yang dimaksud dengan pelamar lama ialah orang-orang yang telah mendaftar dalam tahun-tahun sebelumnya tetapi tidak diberangkatkan. Sedang pelamar baru ialah yang baru melamar sebagai calon haji pada tahun yang berkenaan.

Untuk perbaikan penyelenggaraan haji yang dinilai buruk pada masa kolonial, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah perbaikan pelaksanaan ibadah haji. Di antaranya adalah dengan membuat peraturan bahwa selain Kongres Tiga sebagai perusahaan perkapalan yang mengangkut jemaah haji Indonesia, juga diberikan

kesempatan kepada INACO, PELNI, dan JAKARTA LLOYD, dan pada tahun 1952 pernah disusulkan pemungutan saham kepada para calon jemaah haji sebesar Rp. 500,- tetapi pungutan tersebut akhirnya dikembalikan lagi kepada para jemaah haji.

Atas prakarsa PHI dibentuk PT. Pelayaran Muslimin Indonesia (MUSI) yang kemudian diserahi tugas sebagai pemegang operasi yang mengkoordinir maskapai-maskapai pelayaran yang mengangkut jemaah haji, di samping mencarter kapal-kapal. Pada masa ini Maskapai Blue Funel Lyn (Semprong Blau) menawarkan kapalnya "Gunung Jati" untuk dibeli oleh PT MUSI, tetapi hal itu ditolak karena dianggap sudah terlalu tua, biaya pemeliharaannya pun terlalu besar sehingga tidak ekonomis. Sementara itu Menteri Pelayaran, Komodor Laut Nazir, menyetujui rencana pembuatan kapal-kapal haji untuk PT MUSI di Jepang dan memasukkannya dalam jaminan pampasan perang.

Yayasan PHI bekerjasama dengan pihak Pamongpraja menertibkan pendaftaran pelamar calon haji dengan sistem KPTPH (Quotum Pelamar Calon Haji) yang diberikan kepada pelamar calon haji sebagai tanda bukti diri sebagai calon haji. Dengan sistem ini juga merupakan alat kontrol untuk mencegah kekeliruan dalam daftar yang dibuat Pamongpraja. Di samping itu juga dapat digunakan sebagai bukti apabila ia terpaksa mengulang pendaftaran.

Pengaturan barang bawaan/uang. Kelebihan uang di Arab Saudi seperti ditegaskan dalam surat Jawatan Bea Cukai tanggal 9 Desember 1952 No. BC. 17/10/10 tentang peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai keberangkatan dan kedatangan jemaah haji, maka apabila seorang jemaah haji di Arab Saudi masih mempunyai sisa uang real harus diserahkan kembali kepada BNI di Jeddah untuk ditukar dengan uang rupiah. Kaqrena berdasarkan peraturan mengenai devizen dengan tidak ada izin dari LAPLN (pada

waktu itu) siapa pun tidak diperbolehkan mengeluarkan/memasukkan alat-alat pembayaran, baik keluar maupun ke Indonesia (Berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Agama tanggal 10 April 1952).

Pada tahun 1953 telah diadakan penyeragaman dan penertiban barang-barang bawaan jemaah haji/sahara, baik mengenai banyaknya, macam, berat (sesuai dengan ketentuan Kongsi Tiga), serta ukuran maupun bungkusannya. Penyeragaman ini sesuai dengan ketentuan Kementerian Perekonomian. Dari 16 macam barang-barang sahara jemaah tersebut, beras 30 kg dibungkus dengan karung, bahan makanan dan lain-lain dimasukkan ke dalam kardus kemudian dimasukkan dalam peti. Di samping itu bagi para jemaah juga disediakan satu lihap dan bantal untuk dipakai selama di kapal maupun selama di rumah-rumah syekh. Selanjutnya lihap dan bantal tersebut menjadi milik jemaah. Kemudian para jemaah dibagikan kupon/kartu lengkap dengan daftar isi untuk mengambil sahara. Kartu/kupon tersebut ditempel dalam paspor dan para jemaah diperbolehkan membawa barang-barang tentengan berupa pakaian, perkakas dapur, dan makanan kering.

Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memutuskan jaring-jaring kegiatan broker haji dan badal-badal syekh yang dianggap sangat merugikan jemaah haji Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah kemudian juga mengadakan perbaikan dan penyempurnaan organisasi, baik dalam lingkungan Kementerian Agama maupun dalam tubuh PHI. Pemerintah juga menunjuk Bank Nasional Indonesia (BNI) untuk melaksanakan pembayaran luar negeri seperti *livingcost*, membayarkan langsung kepada para jemaah haji dan melakukan pembayaran-pembayaran di luar negeri serta pembiayaan keperluan haji oleh KBRI.

Dengan surat Menteri Agama No. E/SU/a/40547 tanggal 17 Maret 1953 memberikan ajuran menabung kepada para pelamar calon haji untuk ongkos haji tahun yang berkenaan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau instansi-instansi lainnya yang bisa menerima uang tabungan itu, misalnya kepada pamongpraja. Simpanan untuk tabungan haji kepada perorangan tidak diperbolehkan sebab pada tahun sebelumnya sering kejadian banyak pelamar haji yang menjadi korban dan akhirnya tidak jadi berangkat. Apabila persediaan ongkos haji itu masih merupakan barang dianjurkan supaya segera dijadikan uang kemudian disimpan di Bank. Dalam hal pelamar calon haji tersebut tidak jadi berangkat supaya dengan segera dikembalikan atau bila ia masih berniat untuk berangkat pada tahun mendatang supaya dititipkan lagi untuk musim haji berikutnya.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan ditempatkannya Atase haji pada KBRI di Jeddah, dan dibentuknya Perwakilan PHI untuk di Jeddah. Untuk penyempurnaan organisasi penyelenggaraan di Jeddah antara PHI dan *Syaichul Masyaich* disusun suatu kerjasama yang memungkinkan PHI untuk mendirikan gedung wakaf pemondokan Haji Indonesia di Arab Saudi. Dalam Rapat Kerja Menteri Agama dengan Seksi Parlemen membicarakan masalah reformasi dan reorganisasi PHI dan dengan instruksi Menteri Agama atas usul PHI dibentuk Komisaris Pemerintah pada PHI.

Berdasarkan surat Menteri Agama No. 209/H/SP/II/10613 tanggal 12 Agustus 1959 tentang tugas Instansi Kemeterian Agama di daerah mengenai penyelenggaraan urusan haji, diatur mengenai masalah muhrim dan peningkatan manasik. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di samping mendaftarkan pelamar calon haji juga melakukan penelitian apakah pelamar tersebut betul - betul sudah cukup pengetahuannya di bidang manasik

haji. Bila sudah cukup diberikan surat keterangan tanda sudah menguasai manasik haji oleh guru manasik yang ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman banyaknya jemaah haji sewaktu di Arab Saudi terlihat banyak yang masih belum menguasai Manasik Haji. Di samping itu bagi calon haji perempuan yang muhrimnya kurang meyakinkan tidak bisa diberangkatkan atau pendaftarannya ditolak.

Kelonggaran untuk pergi haji dengan kapal udara mulai diberikan tahun 1953. Berhubung dengan banyaknya peminat dan agar tidak memakan banyak waktu dalam perjalanan seperti bila dengan kapal laut. Namun keinginan pergi haji dengan menggunakan pesawat udara tersebut akhirnya belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah dikarenakan keadaan devisa RI pada waktu itu. Sedang ongkos pergi haji dengan pesawat udara pada waktu itu harus dibayar dengan uang dollar. Pihak GIA tidak dapat menyediakan pesawat tersebut berhubung masih sedikitnya pesawat yang dimiliki. Adapun *Pioneer Aviation* menyatakan kesediaannya mengangkut jemaah haji Indonesia asal pembayarannya dilakukan dengan dollar. Hal ini tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Dengan pengumuman Pemerintah No. 13 tahun 1953 tanggal 18 Mei 1953 diumumkan pembatalan tersebut namun yang masih berminat dan bisa mengusahakan sendiri secara berdikari dapat diberi kesempatan.

Mulai tahun 1956 diadakan perbaikan akomodasi di kapal yang meliputi penambahan ruangan pada tiap-tiap haji. Semula tiap jemaah hanya mendapat ruangan di palkah seluas 1,5 meter persegi ditingkatkan menjadi masing-masing seluas 2,5 meter persegi, sehingga tidak berjejal lagi. Yang belum terpecahkan adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dalam satu ruangan yang panas di palkah di mana kadang mereka terpaksa membuka bajunya dan kelihatan sebagian auratnya. Juga problem

suami istri di tengah-tengah orang banyak, tidak adanya perlindungan tabir dan sebagainya.

Berdasarkan laporan perjalanan haji tahun 1956, dijelaskan bahwa tiap-tiap kabupaten/daerah disertai dengan satu kepala rombongan, tiap palkah mempunyai satu orang Kepala Palkah dan tiap kepala diatur oleh tiga orang MPH dan satu orang dari PHI. Para jemaah sesampai di Atrab Saudi diserahkan kepada para Syekh yang pada umumnya menganggap para jemaah itu merupakan suatu obyek untuk memperoleh penghasilan. Walaupun ada juga beberapa syekh yang masih mempunyai rasa idealisme untuk menolong dan memimpin para jemaah. Umumnya para jemaah 40 persen terdiri dari orang tua berusia 50 tahun ke atas, bahkan banyak pula yang berusia 80 tahun ke atas. Di samping itu juga terdapat perempuan-perempuan hamil tua enam atau tujuh bulan, bahkan ada yang sudah melahirkan di kapal dalam perjalanan menuju Jeddah, ada pula yang tidak dapat berjalan sendiri. Sejak dari rumah dalam perjalanan sampai di Babbussual mereka masih berada di bawah pengurusan PHI, tetapi sesudah melewati Babussual mereka terlepas dan sepenuhnya berada di bawah pengurusan Syekh. Bherkat hubungan yang baik antara KBRI, Syekh, dan PHI, nasib para jemaah mendapat perhatian dari para Syekh dan sejak tahun 1955 Pemerintah Arab Saudi mengadakan pembongkaran besar-besaran di sekitar Masjidil Haram untuk perluasan.

Sejak tahun 1950 pemberangkatan jemaah haji Indonesia disertai pula dengan Majelis Pimpinan Haji (MPH) dan Rombongan Kesehatan Haji Indonesia (RKHI). Pimpinan MPH terdiri dari seorang pegawai Kementerian Agama sebagai ketua, seorang dari Panitia Haji, pemuda pelajar Islam, alim ulama, wartawan, dan pegawai-pegawai dari instansi yang tugasnya-tugasnya mempunyai kaitan dengan urusan haji. Penetapan sebagai anggota maupun ketua/Koordinator MPH dengan surat keputusan Menteri

Agama. Untuk RKHI ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan. MPH ini berkewajiban selain sebagai penghubung antara jemaah haji selama di kapal dalam perjalanan berangkat maupun pulang juga sebagai pimpinan jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. MPH dan RKHI memperoleh fasilitas komodasi, baik di kapal, di Arab Saudi maupun tiket gratis pulang-pergi.

RKHI yang menyertai pemberangkatan jemaah haji Indonesia sejak tahun 1950 bertugas untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan *nood hospital* di atas kapal, jemaah haji yang tua atau hamil, pemondokan syekh yang tidak memenuhi syarat kesehatan, ambulance, pengiriman obat yang terlambat, serta masalah juru rawat dan dokter dalam menghadapi jemaah.

Ada beberapa masalah pemberangkatan jemaah yang disebabkan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan secara mendadak sehingga terlalu dekat dengan waktu pemberangkatan. Di samping itu peraturan Kementerian Kesehatan hanya membatasi epidemi ordonansi saja sehingga menyebabkan banyak orang lanjut usia, perempuan hamil, penderita TBC, dan sebagainya lolos dari pemeriksaan. Untuk itu maka pada tahun 1957 dikeluarkan ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan ini dengan Siaran Menteri Kesehatan No. 10573/IIISH/ tanggal 4 Februari 1957. Pemeriksaan kesehatan ditentukan sedikitnya satu bulan sebelum waktu pemberangkatan sehingga ada kesempatan melakukan pengobatan bila calon haji mengidap suatu penyakit, syarat-syarat pemeriksaan meliputi umur tidak boleh lebih dari 60 tahun dan tidak boleh kurang dari 18 tahun, tidak menderita penyakit menahun (seperti TBC, Lepra, Chronis, Jantung, Asma, dan sebagainya), harus dapat bergerak sendiri tanpa pertolongan orang lain, tidak sedang hamil atau kehamilan hanya dibolehkan maksimal usia dua bulan, tidak mengidap penyakit menular, kecuali penyakit yang termasuk

dalam epidemi ordonansi. Tiap Jemaah diharuskan memiliki buku kesehatan yang berisi riwayat penyakit, mulai dari pemeriksaan pertama sampai tiba kembali ditanah air.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa kematian jemaah haji Indonesia, baik di Tanah Suci maupun di atas kapal cukup tinggi pada tahun-tahun tersebut. Sebagai contoh pada tahun 1958 jemaah yang meninggal dunia mencapai 119 orang.¹⁸ Dalam perjalanan pulang pun di atas dalam pelayaran ke Indonesia juga meninggal empat orang jemaah haji.¹⁹

Sejalan dengan penyelenggaraan urusan haji yang keseluruhannya telah dilaksanakan oleh pemerintah cq Departemen Agama maka mengalirlah surat-surat dari berbagai pihak agar penyelenggaraan haji dari mulai pendaftaran sampai pembagian paspor dilakukan seluruhnya oleh instansi Departemen Agama, baik di Pusat maupun di Daerah, diajukan kepada pihak yang berkompeten supaya dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 3 tahun 1960 di mana urusan haji adalah menjadi tanggung jawab Menteri Agama sepanjang penyelenggaraannya di dalam negeri.

Dalam usaha meningkatkan kelancaran urusan haji maka dikeluarkan keputusan Menteri Agama Nomor 13 tahun 1961 membentuk Bagian Urusan Haji pada Kantor Urusan Agama Daerah Tingkat I/Pelabuhan Besar seperti Makasar, Surabaya, Semarang, Jakarta, Palembang, Padang, Medan dan Bagian Urusan Haji pada kantor urusan Agama Daerah

¹⁸ Salah seorang jemaah haji yang meninggal yang berasal dari Palembang adalah St. Sinah bin H. Mansjur yang beralamat di 30 Ilir Palembang dengan Paspor no. 21 dan tiket no. 66 yang bertolak dengan kapal Djakarta Raya II dan meninggal dunia di Mekkah *Obor Rakyat*, Kamis 14 Agustus 1958. Nama-nama jemaah haji yang meninggal bisa juga dilihat di *Bintang Obor*, Senin 7 Juli 1958.

¹⁹ *Bintang Obor*, Rabu 30 Juli 1958.

Tingkat II Pelabuhan Besar/Pelabuhan Embarkasi Haji di Ampenan.²⁰

Tugas Kantor Urusan Agama Kota Pelabuhan antara berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1633/H/SU/a/14896 tanggal 7 Desember 1960:

1. Membina hubungan kerjasama dengan instansi-instansi yang mempunyai hubungan dengan tugas penyelenggaraan haji setempat untuk merundingkan/merumuskan persiapan penyelenggaraan haji dan menerima pengiriman Pas Perjalanan Haji (paspor), Buku Kesehatan beserta daftar jemaah dari daerahnya.
2. Mengusahakan tempat penginapan untuk para menunggu pemberangkatan dan menyediakan angkutan, tenaga-tenaga pengangkut.
3. Mengusahakan, mencari kapal/pesawat untuk angkutan jemaah menuju ke pelabuhan embarkasi dan sebaliknya.
4. Melaporkan tentang jumlah jemaah yang akan diberangkatkan kepada Kantor Urusan Agama Besar/Pelabuhan Embarkasi.

Mulai tahun 1960 MPH dibebaskan dari biaya perjalanan dan keperluan nafkahnya selama di Arab Saudi ditanggung oleh Pemerintah. Di kapal mereka disediakan palkah dan tempat makan di salon sehingga mereka benar-benar menjalin hubungan-hubungan dengan pihak kapal dan mengetahui keadaan para jemaahnya, diberikan kartu belanja untuk selama di kapal dan atas biaya sendiri. MPH yang telah ditunjukkan diwajibkan mengirimkan daftar riwayat hidup

²⁰ Berita mengenai kapal-kapal haji yang memabawa jemaah dari masing-masing pelabuhan tersebut dapat dilihat di *Bintang Obor*, Senin 23 September 1958.

lengkap, surat keterangan dari Pamongpraja/Polisi, surat cuti, surat keterangan lulus manasik haji, buku kesehatan haji, empat buah pas foto kepada Bagian Urusan Haji melalui Kantor Urusan Agama setempat. Di samping itu mereka juga harus paham dan berpengalaman tentang keadaan di Arab Saudi.

Perkembangan dan perubahan dalam struktur organisasi penyelenggara haji terus berjalan sesuai dengan perkembangan administrasi pemerintahan. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966 Departemen Urusan Haji berubah menjadi Direktorat Jenderal Urusan Haji di bawah lingkungan dan Koordinasi Departemen Agama. Semula kebijakan penyelenggaraan haji masih berpijak pada Keputusan Menteri Haji No. 16 tahun 1965 yang untuk tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Urusan Haji di Daerah oleh aparat Pemerintah Daerah cq Kepala Staf Urusan Haji. Semua masalah yang berhubungan dengan administrasi dipegang oleh Kementerian Agama/Departemen Agama dan operasionalnya oleh PHI (tahun 1950-1959) dan mulai tahun 1960 keseluruhannya dipegang oleh Departemen Agama sampai dengan tahun 1962. Tahun 1962-1964 oleh P3H dan 1964-1965 oleh Dewan Urusan Haji (DUHA). Sedangkan di daerah pada masa itu tetap dipegang oleh aparat Departemen Agama bersama pamongpraja sampai tahun 1964. Pada masa Dewan Urusan Haji dengan Keputusan Menko *Kompartmen* Kesejahteraan Rakyat No. 08 tahun 1964 maka penyelenggaraan urusan haji di Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (pamongpraja) dan bersifat koordinatif non-struktural.

Kebijakan Menteri Urusan Haji sebagaimana tertuang dalam keputusannya No. 16 tahun 1965 yang kemudian diteruskan oleh Direktur Jenderal Urusan Haji semuanya merupakan lanjutan dari yang telah ditempuh pada masa DUHA di mana penyelenggaraan haji merupakan tugas

nasional dan di daerah sebagai koordinatonya adalah Kepala Daerah, sedang aparat Departemen Agama di daerah merupakan salah satu unsur administrasi yang menunjang operasional di daerah.

c. Tahun 1970 dan Sesudahnya

Pemberangkatan jemaah haji untuk penyelenggaraan haji tahun 1970-an dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kapal laut dan kapal udara. Pemberangkatan jemaah melalui kapal laut dilakukan dengan pengiriman kapal-kapal haji ke suatu pelabuhan haji yaitu di samping dengan memperhatikan sejauh mungkin permintaan kelas dari daerah pelabuhan juga berdasarkan jumlah seluruh jemaah yang akan diangkut yang tidak terlepas dari masalah-masalah teknis perkapalan yang dapat mengakibatkan kekecewaan terutama bagi peminat kelas.

Hal ini disebabkan antara lain karena tidak semua kapal mempunyai akomodasi yang sama, baik jumlah maupun jenis kelasnya. Begitu pula tidak semua kapal mempunyai daya angkut yang sama. Terkadang karena sesuatu masalah teknis suatu pelabuhan yang jemaah hajinya lebih banyak terpaksa hanya disinggahi dengan kapal yang kapasitasnya lebih kecil atau sebaliknya.

Bagi jemaah haji yang datang melalui laut karena selama dalam perjalanan dari Indonesia ke Jeddah sudah memakan waktu yang cukup lama dianggap selama dalam pelayaran itu sudah lewat daerah bebas dari *quarantinable diseases* dan dianggap sudah bersih dari bibit-bibit wabah Eltor dan tidak perlu dikarantina lagi sesampainya di Jeddah. Sedang jemaah haji atau pengunjung lain yang langsung dari Indonesia ke Arab Saudi yang tidak melalui dari *iree from quarantinable diseases* seperti jemaah haji dengan kapal udara diberi kelonggaran dengan ketentuan pada suatu *stool*

culture/ buku kuning ada suatu pernyataan dalam bahasa Inggris "bahwa pemegang sertifikat ini sebelum berangkat telah berdiam selama lima hari di Jakarta yang dinyatakan sebagai suatu daerah *free from quarantinable diseases*.

Penyelenggaraan haji di daerah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Urusan Haji No. 09 tahun 1972. Susunan organisasi penyelenggaraan haji di Daerah Tingkat I koordinasi dipegang oleh Gubernur yang dalam tugasnya sehari-hari dibantu oleh staf Koordinator Urusan haji. Kepala Staf Penyelenggara Urusan Haji diangkat oleh Direktur Jenderal Urusan Haji atas usul dari Gubernur.

Tugas Urusan Haji pada Kantor Perwakilan Departemen Agama di Daerah adalah sebagai pembantu dari Staf Koordinator Urusan Haji. Adapun susunan dari organisasi Penyelenggara Urusan Haji Daerah Tingkat II koordinasi dipegang oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II. Tugas dari aparat kantor agama di Daerah sebagaimana pada susunan untuk Tingkat I di atas.

Penyelenggaraan Urusan Haji khusus bagi anggota ABRI/Veteran dan keluarganya sesuai dengan surat keputusan Menteri Hankam No. KEP/B/522/X/170 tanggal 1 Oktober 1970 diserahkan kepada Badan Koordinasi Urusan Haji Angkatan Bersenjata (BAKUHABRI) Departemen Hankam yang selanjutnya mengadakan peraturan sendiri.

Sementara itu, untuk warga negara asing yang ingin pergi haji ada ketentuannya sendiri yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Urusan Haji No. 13 tahun 1972 di mana setiap warga negara asing yang ingin menunaikan ibadah haji harus mendapatkan izin khusus (dispensasi) dari Menteri Agama atas pertimbangan Ditjen Urusan Haji dan Koordinator Urusan Haji sepanjang yang bersifat peribadatan saja. Mengenai exit permit tetap menjadi wewenang Direktur Jenderal Imigrasi.

Pengasramaan haji setiap tahun diserahkan pelaksanaannya kepada Yayasan PHI. Lamanya pengasramaan untuk masing-masing calon haji adalah selama tiga hari sebelum berangkat dan tiga hari setelah pemulangan/setiba kembali di tanah air. Jemaah haji yang tidak menginap di asrama, baik pada waktu pemberangkatan maupun pemulangan, kepada jemaah tersebut dibayarkan kembali biaya pengasramaannya sebesar Rp. 750,- tiap orang (tahun 1972).

Pelaksanaan pengasramaan calon haji udara oleh karena berlaku ketentuan-ketentuan karantina, maka pelaksanaannya, baik dalam mencari atau penyediaan tempatnya dilaksanakan oleh Ditjen Urusan Haji. Mulai tahun 1972/1973 jemaah haji dengan kapal terbang cenderung naik tiga kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Pemberangkatan dilakukan melalui Kemayoran Jakarta untuk jemaah asal Indonesia bagian Barat dan Ir. H. Juanda Surabaya untuk pemberangkatan jemaah dari Indonesia bagian Timur.

Untuk Jakarta pengasramaannya menggunakan Wisma Gelora Senayan, berkapasitas 600 orang, Wisma Tanah Air (milik Departemen Sosial, Cawang) berkapasitas 225 orang, Wisma Angkasa Puri, Polonia Jakarta berkapasitas 220 orang, dan Asrama Haji milik PHI Cempaka Putih dengan kapasitas 450 orang. Embarkasi Surabaya pengasramaannya menggunakan Asrama Angkatan Laut dekat Lapangan Udara Ir. H. Juanda kapasitas dengan 500 orang.

Suatu langkah maju dalam penyelenggaraan urusan Haji mulai 1973/1974 bahwa pemberangkatan jemaah haji tidak hanya melalui Jakarta dan Surabaya, tetapi juga dari Medan untuk jemaah yang berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Pemberangkatan melalui Jakarta adalah untuk jemaah yang berasal dari Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan

Barat. Daerah-daerah selebihnya di wilayah Indonesia bagian Timur melalui Surabaya.²¹

Calon haji yang sudah menyetor Ongkos naik Haji (ONH) kemudian diharuskan melengkapi bahan-bahan berupa pasfoto, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Kesehatan, dan Paspor yang diurus oleh Djawatan Urusan Agama. Besarnya ONH setiap tahun ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia, karena komponen ONH disesuaikan dengan biaya riil pada tahun yang bersangkutan. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut maka penyetoran dan pendaftaran haji sudah bisa dimulai. Untuk penerimaan penyetoran ONH ditetapkan Bank-Bank setempat yang ditunjuk pemerintah pada tahun 1989 adalah (i) Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 46); (ii) Bank Rakyat Indonesia (BRI); (iii) Bank Eksport Import (Bank Exim); (iv) Bank Dagang Negara (BDN); dan (v) Bank Bumi Daya (BBD).²²

Pada penyelenggaraan haji tahun 1973/1974 sesudah ONH diumumkan terdapat tuntutan kenaikan sewa rumah di Saudi Arabia sampai 100 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan devaluasi Dollar Amerika yang besar sekali pengaruhnya terhadap perhitungan biaya haji di Saudi Arabia di samping terjadi pula kenaikan atas sewa-sewa rumah untuk asrama MPH/RKHI yang mencapai dua kali lipat dari tahun-tahun yang lalu.

Dalam menunaikan ibadah haji, disamping biaya juga diperlukan sehat jasmani dan rohani. Pemerintah sebagai penyelenggara haji senantiasa berupaya mengadakan pemeliharaan dan pengobatan terhadap penyakit para calon haji. Upaya tersebut adalah sebagai berikut:

²¹ Mursidi & Sumuran Harahap, *op. cit.*, hlm. 157.

²² *Bimbingan Manasik, Ziarah dan Perjalanan Haji* (Jakarta: Departemen Agama R.I. Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji, 1990), hlm. 56.

- a. Sebelum mendaftarkan diri, calon haji harus memeriksa kesehatannya. Untuk memeriksakan kesehatan hendaknya memberitahukan lebih dahulu kepada Lurah dan Camat setempat untuk memperoleh surat pengantar ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b. Apabila dokter menyatakan sehat, maka calon haji memperoleh surat keterangan sehat. Akan tetapi, jika tidak maka dia akan diobati sampai sembuh.
- c. Menjelang waktu pemberangkatan, calon haji memeriksakan diri untuk kedua kalinya di asrama haji embarkasi untuk ditentukan sehat atau tidaknya. Jika terbukti tidak sehat maka calon haji jangan memaksakan diri untuk berangkat.
- d. Untuk menjaga kesehatan selanjutnya lebih diperhatikan makanan-makanan yang sehat, misalnya banyak makan buah-buahan, minum susu dan sayur-sayuran serta bahan makanan yang bergizi.
- e. Pemerintah menugaskan Tim Kesehatan Haji Indonsia (TKHI) yang memberikan pelayanan kesehatan, baik di kloter maupun di Balai Pengobatan Indonesia di Makkah, Madinah, atau Jeddah dengan cuma-cuma.
- f. Bagi calon haji perempuan yang kemungkinan terhalang pelaksanaan ibadah hajinya karena mengalami haid dianjurkan agar sesudah wukuf selekas mungkin melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i.
- g. Berdasarkan pertimbangan medis, perempuan hamil tidak boleh disuntik meningitis, karena dapat membahayakan kandungannya. Oleh karena itu, sejak tahun 1988 perempuan hamil tidak bisa naik

haji, karena Pemerintah Arab Saudi mengharuskan setiap calon haji memiliki sertifikat meningitis.

- h. Kebijakan Pemerintah R.I. dalam penyelenggaraan haji tahun 1990, bahwa bagi calon haji usia lanjut di atas 50 tahun, harus mempunyai data kesehatan lengkap, yaitu Foto Thorax, EKG, dan hasil laboratorium (urine, darah, dan sputum).

Seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji diharuskan melakukan pendaftaran yang dilaksanakan di Kantor Koordinator Urusan Haji Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 10 hari setelah pembayaran ONH ke Bank. Syarat-syarat pendaftaran tersebut adalah dengan melengkapi; (i) tanda bukti setor Bank (kuitansi Bank); (ii) Surat keterangan dokter; (iii) Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 19 lembar, 6 x 6 sebanyak 4 lembar, dan 6 x 4 sebanyak 2 lembar. Jumlah keseluruhan pas foto yang diperlukan adalah 25 lembar.

Calon haji yang telah mendaftar, akan menerima secara cuma-cuma berupa (i) Surat Tanda Pergi Haji (STPH); (ii) Buku Bimbingan Manasik, Zirah, dan Perjalanan Haji; (iii) Buku Do'a Manasik, Ziarah, dan Perjalanan Haji; (iv) Buku tanya jawab Manasik Haji; dan (v) Buku tata urutan pelaksanaan perjalanan ibadah haji. Selanjutnya pada waktu yang ditetapkan, calon haji menerima pemberitahuan untuk penataran di daerah Kabupaten/Kota dan Surat Panggilan Masuk Arama Haji Embarkasi.

Penataran calon haji dilaksanakan di kabupaten/Kota selama empat hari. Ada pun materi pokok penataran adalah bimbingan perjalanan haji, manasik haji, dan lain-lain. Penataran ini dilaksanakan oleh panitia dari Departemen Agama setempat. Untuk kepentingan calon haji sendiri setiap calon dianjurkan agar dapat mengikuti penataran tersebut dengan sebaik-baiknya secara penuh.

Di daerah Kabupaten/Kota (sesudah masa pendaftaran ditutup) calon haji dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Regu, terdiri dari 11 orang, termasuk seorang Ketua Regu yang dipilih dari dan oleh anggota regu dengan tugas membimbing dan menjaga keutuhan regu.
- b. Rombongan, terdiri dari lima regu (56 orang), termasuk seorang Ketua Rombongan yang dipilih dari dan oleh anggota rombongan dan bertugas mengkoordinir pimpinan regu dan menjaga keutuhan rombongan.
- c. Kloter (kelompok terbang) terdiri dari 8 – 12 rombongan (lebih kurang 300 – 500 orang), dipimpin oleh Ketua/TPHI Kloter dari daerah yang bersangkutan dan bertugas mengkoordinasikan pimpinan rombongan agar tetap berada dalam satu kloter dan satu maktab atau Muzawir.

Pelayanan perjalanan haji yang sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan kapal laut dan kapal udara, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 10 tahun 1978, jamaah haji tahun 1978 dan seterusnya hanya diselenggarakan dengan menggunakan pesawat udara.²³ Bandar Udara di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat pemberangkatan jamaah haji pada tahun 1978 tersebut adalah:

1. Bandar Udara Polonia Medan bagi calon haji yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.
2. Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta bagi calon haji yang berasal dari Provinsi Sumatera

²³ Mursidi & Sumuran Harahap, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jamaah Haji Indonesia* (Jakarta: Mars – 26, 1984), hlm. 183.

Selatan,²⁴ Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Timor Timur, dan para pendaftar melalui BAKUHABRI.

3. Bandar Udara Ir. H. Juanda Surabaya bagi calon haji yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
4. Bandar Udara Hasanuddin Ujung Pandang (Makasar) bagi calon haji yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.

Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, setiap calon haji di asramakan di Asrama haji embarkasi pada kota bandar udara haji masing-masing. Apabila Gubernur/Koordinator Urusan Haji telah menentukan tanggal keberangkatannya, maka Bupati/Walikota memberikan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) kepada calon haji yang bersangkutan. Dalam SPMA tersebut dicantumkan nama calon haji, tanggal masuk asrama, ketentuan kloter, tanggal pemberangkatan, dan ketentuan untuk membawa tanda lunas pembayaran ONH asli dan lembaran tembusannya (warna biru) serta buku kesehatan haji. Para calon haji diberangkatkan dari Kabupaten/Kota secara berombongan dan berkelompok yang diatur oleh Koordinator Urusan Haji setempat menuju asrama haji embarkasi dengan biaya sendiri.

²⁴ Mulai tahun 2006 jamaah haji asal Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak lagi melalui Embarkasi Jakarta (Bandara Soekarno Hatta), tetapi langsung dari Embarkasi Palembang, yaitu di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II.

Untuk kegiatan pelayanan, ketertiban, dan keamanan calon haji selama di asrama ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Semua calon haji (tanpa kecuali), diasramakan selama ± 30 jam.
2. Selama di asrama haji tersebut calon haji harus mematuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Guna mencegah timbulnya wabah penyakit, calon haji dibatasi membawa ataupun menerima makanan dari luar asrama haji.
 - b. Tidak dibenarkan meninggalkan kompleks asrama haji.
 - c. Diharuskan memakan obat *tetracycline* yang dibagikan oleh dokter badar udara.
 - d. Membantu dan menjaga ketertiban/kebersihan asrama dan keamanan.
 - e. Penerimaan tamu dibatasi.

Di asrama haji setiap calon haji diberi uang bekal untuk keperluan di Arab Saudi yang jumlahnya setiap tahun ditetapkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan haji. Pembagian uang bekal ini dilaksanakan bersama dengan pembagian Pas Perjalanan Haji (PPH). Uang bekal (*livingcost*) telah diperhitungkan cukup untuk biaya hidup selama di Arab Saudi. Demikian pula ketika pulang diberikan uang bekal daerah yang jumlahnya ditetapkan dalam Keppres tentang ONH.

Bagi jamaah haji yang memerlukan penukaran mata uang Real Saudi atau Dollar Amerika pada waktu pemberangkatan, atau mata uang Rupiah pada waktu pemulangan, petugas Bank telah siap memberikan pelayanan di setiap Asrama haji Embarkasi. Nilai tukar (kurs) sesuai

dengan harga yang ditetapkan Bank pemerintah. Selama di Asrama haji, calon haji diberi bimbingan berupa ceramah dan peragaan manasik. Ceramah diadakan di Masjid Asrama Haji Embarkasi setelah Shalat Subuh berjamaah. Setelah selesai ceramah dilanjutkan dengan peragaan manasik haji.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di tanah air dan di Arab Saudi tentang ketentuan umum dan Bea Cukai terdapat beberapa jenis barang yang dilarang dibawa pada waktu berangkat ke Tanah Suci dan pada waktu kembalinya. Barang-barang yang dilarang dibawa ke Arab Saudi ialah (1) Semua jenis makanan, terutama makanan basah; (2) semua jenis penerbitan gambar dan kaset yang bersifat pornografi seperti majalah, koran, buku, dan selebaran; (3) Semua jenis penerbitan dan kaset yang bersifat politik dan perbedaan mazhab seperti komunisme dan syiah; (4) Narkotika, senjata api, dan senjata tajam. Sedangkan barang yang dilarang dibawa kembali ke Tanah Air ialah (1) Semua penerbitan yang bersifat pornografi dan cetakan berbahasa Cina; (2) Obat-obatan terlarang, narkotika, dan obat bius; (3) Senjata tajam dan senjata api; (4) Barang-barang elektronika seperti TV, video, radio, *tape recorder*, dan sebagainya.

Enam jam sebelum berangkat ke bandar udara dilakukan pembagian gelang identitas, PPH, dan uang bekal kepada semua calon haji. 75 menit sebelum upacara keberangkatan dilakukan ceking untuk memastikan bahwa jamaah siap untuk diberangkatkan (oleh THPI/D – TKHI/D). Satu jam sebelum pemberangkatan ke bandar udara, calon haji mengikuti upacara pemberangkatan yang meliputi (1) Ikhtisar THPI/D – TKHI/D; (2) Pidato pelepasan oleh P3H; (3) Doa Pelepasan; (4) Menuju mobil untuk berangkat didampingi oleh masing-masing Ketua Regu/Rombongan.

Para calon haji setelah menerima PPH dan uang bekal, bersiap-siap untuk diberangkatkan menuju bandar udara. Sebelum diberangkatkan diadakan upacara pelepasan

jamaah yang dipimpin oleh petugas P3H. Selesai upacara pelepasan calon haji dipersilahkan naik bus yang akan membawanya ke Bandar Udara. Waktu akan menaiki pesawat, diadakan pengecekan PPH oleh petugas Imigrasi. Jamaah menuju tangga pesawat dengan menunjukkan kartu tempat duduk kepada petugas Garuda. Pramugara atau pramugari akan melayani dan menunjukkan kepada jamaah tempat duduk masing-masing.

Tempat duduk di pesawat udara jenis boeing 747 disediakan sebanyak 544 kursi, dan DC 10 sebanyak 355 dan 380 kursi. Jumlah penumpang sudah disesuaikan dengan jumlah tempat duduk. Oleh karena itu, setiap calon jamaah pasti akan mendapat tempat duduk, sehingga tidak perlu untuk berebut saling mendahului masuk pesawat. Setiap calon haji dianjurkan menempatkan barang-barang tentengannya di tempat yang semestinya (dalam kotak bagasi). Pada waktu pulang, di samping tempat duduk untuk TPHI yang sudah ditentukan, juga disediakan tempat bagi jamaah sakit.

Selama dalam penerbangan disediakan makan pagi, siang, dan malam, serta hidangan ringan yang waktunya disesuaikan dengan masa penerbangan. Penerbangan dari tanah Air ke Jeddah memakan waktu 10 – 13 jam. Oleh karena itu, calon jamaah dianjurkan supaya menggunakan waktu untuk beristirahat sebaik-baiknya dan menghindari percakapan yang tidak perlu.

Kegiatan yang dilakukan oleh calon/jamaah haji dan petugas haji selama di pesawat udara, baik waktu berangkat maupun waktu kembali ke Tanah Air adalah sebagai berikut:

1. Apabila waktu shalat fardu telah masuk, TPHI atau petugas yang ditunjuk, melaksanakan azan.
2. Shalat di pesawat udara dianjurkan supaya dilakukan dengan duduk.

3. Calon jamaah haji dianjurkan menggantikan wudu dengan bertayammum, mengingat terbatasnya persediaan air di pesawat udara.
4. Selama di pesawat udara calon haji pada waktu-waktu tertentu mendapat penjelasan/bimbingan oleh petugas haji.
5. pada penerbangan pemberangkatan, TPHI melakukan tugas penyobekan lembar PPH halaman 37/38. Lembar tersebut diserahkan kepada petugas Bidang Haji KJRI di Airport Jeddah.
6. Pada penerbangan pemulangan TPHI melakukan tugas penyobekan lembar cek Dis-embarkasi pada PPH halaman 29/30. Lembar tersebut kemudian diserahkan kepada petugas P3G setempat.
7. Pada waktu penerbangan pemulangan jamaah haji diwajibkan mengisi formulir daftar barang bawaan (*Custom Declaration*), kemudian diserahkan kepada petugas Bea Cukai di bandar Udara embarkasi.
8. Bagi calon haji yang sakit selama dalam perjalanan, diminta untuk memberi tahu kepada TKHI Kloter, untuk mendapat pengobatan/pertolongan pertama.

Di dalam pesawat selama penerbangan jamaah harus memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan yang telah diatur guna keselamatan perjalanan. Yang harus diperhatikan jamaah di antaranya adalah waktu pesawat akan naik maupun akan turun supaya mengenakan tali kursi yang telah tersedia di tiap-tiap tempat duduk dan sementara itu dilarang merokok. Jamaah dilarang mondar-mandir atau pindah tempat sesuka hati tanpa keperluan. Jika merasa hendak muntah, jamaah

diminta agar mengambil dan menggunakan kantong kertas yang tersedia di sandaran tempat duduk di depan atau memintanya kepada pramugari. Jamaah diminta menjaga kebersihan dan tidak membuang kertas bekas ludah, muntah, dan sebagainya secara sembarangan, tetapi membuangnya ke dalam kantong yang telah disediakan. Selama pesawat berhenti mengisi bahan bakar, jamaah haji diminta agar tetap berada di tempat duduk dan tidak dibolehkan merokok serta keluar dari pesawat. Jamaah haji juga dilarang menaruh barang-barang bawaan di dekat pintu pesawat atau di tempat-tempat yang mengganggu kelancaran pelayanan/keselamatan penerbangan.

Dalam pelayanan umum kepada jamaah, sektor menempati posisi penting yang berada di tengah-tengah pemondokan jamaah, baik di Mekkah maupun di Madinah. Di Mekkah terdapat enam sektor dan di Madinah enam sektor. Di setiap sektor tersedia peralatan pelayanan satu kendaraan ambulance, satu pesawat telepon, satu sprayer besar dan satu kotak obat-obatan untuk pertolongan pertama. Sektor terdiri dari THPI non-kloter, tenaga mahasiswa/musim, aspiran dokter, dan pengemudi. Adapun fungsi sektor adalah:

- a. Menyambut jamaah pada waktu kedatangan di pemondokan dan melepas dari pemondokan pada waktu pemulangan (bagi sektor yang berada di lokasi pemukiman jamaah).
- b. Melayani jamaah sesat serta mengantarkan atau menginformasikannya kepada Maktab atau Muassasah.
- c. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) kepada jamaah sakit dan mengantarkannya ke Balai Pengobatan Haji Indonesia atau ke Rumah Sakit Arab Saudi.

- d. Memberikan informasi tentang kedatangan dan keberangkatan jamaah di wilayah sektornya.
- e. Membantu menyelesaikan masalah atau keluhan jamaah terhadap Maktab dan Muassasah.
- f. Memberikan petunjuk tentang pasar, stasiun bis/taksi, telepon umum, Kantor Pos, Kantor Daerah Urusan Haji Indonesia, Rumah Sakit, dan sebagainya.

Mulai tahun 2006, Bandara Sultan Badaruddin II di Palembang ditetapkan sebagai salah satu embarkasi haji di Indonesia, sehingga pada tahun 2006 embarkasi haji di Indonesia berjumlah sebelas. Embarkasi-embarkasi tersebut dibagi dalam tiga zona, yaitu zona I, zona II, dan zona III dengan alokasi provinsi sebagai berikut:

1. Zona I meliputi embarkasi Banda Aceh, Medan, Padang, dan Batam terdiri dari provinsi:
 - a. Embarkasi Banda Aceh, mengangkut calon jamaah haji Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - b. Embarkasi Medan, mengangkut calon jamaah haji Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Embarkasi Padang, mengangkut calon jamaah haji Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan sebagian Jambi (Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, dan Sarolangun).
 - d. Embarkasi Batam, mengangkut calon jamaah haji Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan sebagian Jambi (Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi).
2. Zona II meliputi embarkasi Palembang, Jakarta, Solo, dan Surabaya terdiri dari provinsi:

- a. Embarkasi Palembang, mengangkut calon jemaah haji Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
 - b. Embarkasi Jakarta, mengangkut calon jemaah haji Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
 - c. Embarkasi Solo, mengangkut calon jemaah haji Provinsi D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Kalimantan Tengah (Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara).
 - d. Embarkasi Surabaya, mengangkut calon jemaah haji Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
3. Zona III meliputi embarkasi Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar terdiri dari provinsi:
- a. Embarkasi Banjarmasin, mengangkut calon jemaah haji Provinsi Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah (Kabupaten Kapuas, Barito, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Barito Timur, Murung Raya, Kotawaringin Timur, dan Kota Palangkaraya).
 - b. Embarkasi Balikpapan, mengangkut calon jemaah haji Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.
 - c. Embarkasi Makassar, mengangkut jemaah haji Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.²⁵

Dalam melaksanakan ibadah haji, jemaah asal Indonesia yang menggunakan pesawat udara bertolak dari bandar udara embarkasi masing-masing menuju bandar udara

²⁵ Tim Republika, *Panduan Haji Aku Penuhi Panggilanmu Yaa... Allah* (Jakarta: Harian Umum Republika, 2006), hlm. 35.

King Abdul Aziz di Jeddah. Sesampainya di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah, jamaah haji turun dari pesawat dan masuk ke dalam gedung Terminal Haji. Di Terminal ini jamaah dilarang memotret. Jamaah selanjutnya berkumpul di ruang tunggu sementara untuk mendapat penjelasan-penjelasan dari petugas haji dan menyiapkan PPH masing-masing. Jamaah kemudian masuk ruang pemeriksaan Imigrasi untuk diperiksa dan distempel tanggal kedatangannya, dengan cara antri laki-laki dan perempuan secara terpisah. PPH kemudian diambil atau diserahkan kembali kepada jamaah haji yang bersangkutan. Dengan cara antri, laki-laki dan perempuan kemudian melewati tempat pemeriksaan badan, terus ke tempat pemeriksaan barang. Ketika menunggu barang dan pemeriksaan bea cukai, jamaah haji dilarang mencoret sendiri kopernya dengan kapur.

Setelah keluar dari Terminal, jamaah haji bersama barang-barang bawaannya kemudian menuju tempat berkumpul untuk dilakukan penempelan stiker Maktab pada kulit PPH oleh Muassasah/KJRI. Jamaah haji selanjutnya selama enam jam beristirahat untuk shalat, makan, dan minum. Selanjutnya berangkat menuju Madinah bagi golongan I, yaitu jamaah haji yang tiba di Jeddah sebelum tanggal 25 Zulqaidah. Bagi jamaah haji gelombang II setiba di Jeddah setelah shalat dan istirahat seterusnya berpakaian ihram, shalat sunat ihram, dan niat ihram umrah, selanjutnya naik kendaraan menuju Makkah.

Jamaah haji gelombang I yang langsung ke Madinah dari Jeddah akan segera menempuh perjalanan sejauh lebih kurang 425 km. Sesampai di Madinah, mereka akan disambut petugas Muassasah. Setelah pemeriksaan PPH di Ambariyah, jamaah langsung menuju rumah pemondokan, untuk menempatkan barang-barang dan beristirahat. Selanjutnya jamaah menuju Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah SAW, Abubakar Assiddiq, dan Umar bin Khattab, kemudian

pulang ke pemondokan atau dilanjutkan dengan shalat berjamaah.

Selama hari ke-1 – 9 di Madinah, jamaah haji melaksanakan shalat berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi dan ziarah ke Masjid Quba, Baqi', Jabal Uhud, dan mengikuti penerangan dan pengajian di Masjid Nabawi. Hari ke-10, jamaah gelombang I kemudian menuju Makkah. Sebelum berangkat shalat sunat dua rakaat di Masjid Nabawi, ziarah wada' ke makam Rasulullah SAW, berihram, kemudian naik kendaraan dan berhenti di Bir Ali untuk niat ihram. Bagi jamaah gelombang II, yang berada di Madinah setelah menunaikan ibadah haji di Makkah, langsung menuju Jeddah untuk kembali ke Tanah Air.

Jamaah gelombang I berangkat menuju Makkah setelah selesai ziarah di Madinah, sedangkan jamaah gelombang II berangkat menuju Makkah langsung dari Jeddah. Sesampainya di Makkah, jamaah haji menuju tempat pemondokan yang berjarak radius 500 – 1500 m dari Masjidil haram, yang telah ditentukan oleh Muassasah (sesuai stiker Maktab). Jarak dari Madinah ke Makkah adalah 498 km. Sedangkan jarak Airport Jeddah ke Makkah 107 km. Mobil berhenti dekat rumah maktab. Mursyid/penunjuk jalan mengantar jamaah ke rumah yang disediakan Maktab/Muassasah. Jamaah kemudian masuk rumah untuk mengatur tempat dan barang-barang, istirahat dan menerima penjelasan dari petugas maktab.

Jamaah haji selanjutnya menuju Masjidil haram untuk emlakukan tawaf, sa'i, dan bercukur yang diatur oleh maktab. Kemudian pulang ke rumah ganti pakaian (bagi haji lfrad dan Qiran tetap dalam ihram dan tanpa potong rambut/tahallul). Jamaah berada di rumah Maktab sampai hari pemberangkatan ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah untuk menjaga kondisi badan, beribadat di Masjidil Haram, mengikuti penerangan, pengajian, dan ziarah. Tanggal 8 Zulhijjah,

Jamaah berangkat ke Arafah dengan membawa pakaian untuk dua atau tiga hari dan *lihab* untuk tidur.

Semua jamaah, baik gelombang I maupun gelombang II diberangkatkan ke Arafah dengan bus-bus yang disediakan oleh Muassasah. Jamaah haji yang mempunyai kesehatan dengan resiko tinggi dan yang sedang dirawat di Rumah Sakit/Balai Pengobatan Haji Indonesia diberangkatkan ke Arafah dengan mobil khusus/ambulance pada pukul 16.00 tanggal 9 Zulhijjah. Setelah berhenti secukupnya di Arafah, jamaah tersebut diberangkatkan kembali ke Rumah Sakit/Balai Pengobatan Haji Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari penderitaan yang lebih parah bagi jamaah tersebut.

Jarak Makkah – Arafah hanya 25 km, namun pada hari menjelang wukuf jalan sangat ramai dan sangat sibuk sehingga perjalanan bus-bus memerlukan waktu lama. Di Arafah, jamaah haji Indonesia ditempatkan di pemusatan jamaah Muassasah Asia Tenggara (rubwatul jawah) dalam kemah maktabnya masing-masing. Di dalam kemah, jamaah memperbanyak membaca talbiyah, tahmid, doa, dan membaca Al-Qur'an.

Pada tanggal 9 Zulhijjah pukul 12.00 dilakukan shalat jamaah atau munfarid (sendirian) Zuhur dan Ashar, wukuf dan membaca doa serta shalat jamaah atau munfarid maghrib dan Isya yang pelaksanaannya boleh dilaksanakan dengan jama' taqdim. Jamaah kemudian bersiap-siap untuk diberangkatkan menuju Muzdalifah sesuai dengan pengumuman petugas Maktab dengan naik bus yang sudah disediakan. Jamaah haji dianjurkan untuk tidak meninggalkan kemah jamaah, apalagi memaksakan diri ke Jabal Rahmah.

Apabila jamaah tersebut sampai di Muzdalifah sebelum jam tengah malam, dianjurkan supaya berhenti menunggu mabit, tetapi apabila sampai di Muzdalifah sesudah tengah malam langsung mabit dan mencari kerikil. Ketika mencari

kerikil jamaah dilarang jauh-jauh dari kendaraan agar tidak ketinggalan.

Jamaah selanjutnya bergerak menuju Mina. Di sini jamaah ditempatkan dan mabit di pemusatan jamaah Muassasah Asia Tenggara, yaitu di Haratul Lisan (jaraknya 2,5 km ke tempat jumrah). Sesampai di kemah, jamaah berangkat melontar jumrah Aqabah (satu jumrah), gunting rambut (tahallul awal) dan boleh ganti pakaian. Di Mina, jamaah mabit selama hari Tasyrik untuk melontar jumrah yang dilakukan secara berombongan agar terhindar dari sesat jalan atau hilang. Jamaah yang mengalami kesulitan dianjurkan melapor kepada petugas haji Indonesia.

Selesai melontar jumrah di Mina, baik nafar awal maupun nafar sani, semua jamaah menuju Makkah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Dengan demikian selesailah pelaksanaan rukun haji. Bagi jamaah haji gelombang I bersiap-siap menuju Jeddah untuk kembali ke Tanah Air, sedangkan jamaah haji gelombang II menunggu di Makkah untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Setelah sembilan hari di Madinah, langsung menuju Jeddah untuk kembali ke Tanah Air.

Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, jamaah haji harus pulang ke negaranya masing-masing. Pemulangan jamaah haji udara Indonesia diatur secara awal bil awal dan akhir bil akhir. Jamaah yang akan berangkat pulang dari Makkah/Madinah diurus oleh Maktab/Muassasah masing-masing dan diberangkatkan ke Jeddah (Madinatul Hujjaj) dengan kendaraan bus. Persiapan selama menunggu pemberangkatan ke Jeddah adalah sebagai berikut; (1) Mengemasi barang bawaan menjelang hari pemulangan; (2) Tawaf wada'; (3) Naik kendaraan menuju Madinatul Hujjaj di Jeddah; (4) Menginap di Madinatul Hujjaj selama $\pm$ 2 hari; (5) Mengemasi barang bawaan untuk diangkat masuk bus (delapan jam sebelum terbang) dibawa ke Airport King Abdul

Aziz , kemudian menimbang barang, menunggu di ruang tunggu sampai waktu naik pesawat; (6) pemeriksaan PPH oleh petugas Imigrasi kemudian menuju pesawat terbang; dan (7) Bertolak ke Tanah Air.

Setelah sampai di bandar Udara Haji di Indonesia, PPH diperiksa oleh imigrasi dan barang-barang bawaan oleh Bea Cukai. Adapun untuk keperluan buang air, mandi, ganti pakaian, dan shalat di terminal embarkasi, disediakan kamar mandi dan ruang shalat khusus. Oleh karena itu, eluruh jamaah haji dianjurkan agar tidak berganti pakaian di ruangan terbuka. Setiap jamaah haji menerima uang bekal daerah yang besarnya ditentukan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. Bagi merka yang meninggal dunia selama melaksanakan ibadah haji, kepada ahli warisnya yang sah dibayarkan santunan kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pembayaran santuan tersebut diatur oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.

Bagi jamaah haji yang ada penjemputnya dapat langsung pulang ke rumahnya, sedangkan yang tidak ada penjemputnya (berasal dari luar kota pelabuhan haji udara dan memerlukan penginapan) disediakan penampungan di Asrama Haji. Setibanya di kampung halaman, jamaah haji tersebut dianjurkan segera menuju masjid/surau yang terdekat untuk melakukan shalat atau sujud syukur.

Keadaan medan di Arab Saudi sangat berat, hawanya sangat panas, jarak yang jauh antara pemondokan dan pusat-pusat peribadatan, lokasi yang berbukit dan berdebu, di samping situasi yang timbul dan terjadi di luar dugaan, maka ada kemungkinan mengalami kelelahan dan stres yang menurunkan daya tahan tubuh selama di Arab Saudi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada setiap jamaah etibanya kembali di Tanah Air dianjurkan segera memeriksakan kesehatannya di kota tempat tinggalnya. Sering terjadi jamaah menderita sakit akut setelah

kembali dari tanah Suci disebabkan terlambat memeriksakan kesehatannya.

C. Animo Masyarakat Melayu Palembang Menunaikan Ibadah Haji

Menurut Jeroen Peeters dalam bukunya *Kaum Tuo – Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, masyarakat Palembang dapat dibagi menurut tiga pembagian ruang yaitu Kota Palembang, Iliran Palembang, dan Uluan Palembang. Dari ketiga pembagian masyarakat ini, tidak sama tingkat tarafnya dalam menaati kewajiban agama. Jika kita melihat gambaran pada abad ke-19, pemerintahan Belanda memperhatikan bahwa elite Kota Palembang memiliki kewibawaan tertentu atas rakyat pedesaan. Pengaruh kota atas masyarakat pedesaan sesudah tahun 1860 makin menarik perhatian pegawai pemerintah, makin beranjak abad ke-19 makin banyak pemberitahuan dalam laporan pegawai mengenai meningkatnya dinamika hubungan kota dan pedesaan.²⁶

Mayoritas penduduk, terutama di Pedalaman menyatakan diri mereka sebagai Muslim tanpa menaati kewajiban agama. Di ibukota kebanyakan orang didorong kemajuan agama Islam. Orang Arab Palembang terus menunjukkan fanatisme dan dengan demikian dapat memperoleh keunggulan tertentu atas penduduk pedesaan yang menetap di ibukota. Jika orang Arab Palembang belum cukup memperluas pengaruhnya, sebenarnya belum ada agama lain, kecuali agama Hindu atau semacam pemujaan berhala, kepercayaan terhadap poyang (leluhur tinggi), yang bahkan pada Toeboean bersemayam dalam tupai.²⁷

²⁶ Jeroen Peeters, *Kaum Tuo – Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942* (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 35.

²⁷ ARNAS, *Memorie van Overgave Ophizen*, 1861, hlm. 21.

Makin meningkatnya komunikasi antara kedua bagian keresidenan, makin banyak perhatian atas proses perubahan kebudayaan dalam laporan kolonial: "ketentuan agama ditaati dengan ketat oleh penduduk ibukota, sedang makin jauh dari kota hal itu makin berkurang. Akan tetapi, bersamaan dengan makin meluasnya perdagangan, makin bertambah ramai dan baik komunikasi dalam kota, sehingga ajaran Islam juga makin meluas.²⁸ Meskipun demikian Islam di pedesaan meningkat, tidak terjadi terobosan dalam struktur ruang dan gambaran lama dapat bertahan melebihi pertukaran abad.

Mengenai penatan kewajiban agama, dapat dikatakan bahwa di Iliran ajaran agama jauh lebih dipatuhi oleh banyak orang dibandingkan di daerah Uluu. Makin dekat ke Palembang, orang kelihatan makin sholeh, juga makin banyak, misalnya jumlah haji yang tampil pada beraneka perayaan.²⁹

Meskipun usaha untuk memisahkan kebudayaan pedesaan Uluu Palembang terus dilakukan oleh pemerintah kolonial, namun interaksi selanjutnya dengan tradisi Islam tetaplah ada, dengan bertambahnya lalu lintas ekonomi, bertambah pula minat naik haji ke Makkah, sedangkan sebaliknya guru agama dari Palembang juga bertolak dalam jumlah yang lebih besar. Rangsangan penting perkembangan ini adalah pembukaan Terusan Suez tahun 1869 yang juga memberi pengaruh baru bagi hubungan pelayaran dengan Timur Tengah. Di Palembang minat masyarakat untuk naik haji juga bertambah banyak. Sebelum tahun 1852, jemaah Haji masih harus membayar pungutan besar sebanyak 11g, 110 untuk paspor ke Makkah. Kebijakan ini menyebabkan hanya orang yang sangat kaya saja yang bisa menunaikan Ibadah Haji. Syarat ini ditambah dengan komunikasi yang sulit dengan wilayah pedalaman, menyebabkan para Haji di Keresidenan Palembang, terutama yang berasal dari lapisan

²⁸ ARNAS, Laporan Politik 1879, hlm. 7.

²⁹ KITCV, *Memorie van Overgave Gunther*, 33), hlm. 36.

atas penduduk kota. Data statistik yang fragmentaris membenarkan kesan bahwa naik haji ke Mekkah terutama merupakan fenomena kota. Selama musim haji antra tahun 1853 dan 1854, masing-masing bertolak 23 dan 26 calon haji dari Palembang dibandingkan dengan 21 dan 18 calon haji dari pedesaan.³⁰

Penurunan biaya naik haji yang disertai dengan meningkatnya keamanan dan kemakmuran, lambat laun minat untuk naik haji bertambah dan pada tahun 1860-an jumlah jemaah haji dari lingkungan pedesaan telah melebihi jemaah haji dari kota.³¹ Terobosan struktural terjadi pada dasawarsa berikutnya, yaitu ketika Palembang disinggahi kapal api dari Singapura dua kali sebulan. Lewat perhubungan ini Kota Palembang memelihara hubungan langsung dengan jaringan kapal api dan kapal layar yang mengadakan perjalanan langsung ke Jeddah. Perusahaan perkapalan terpenting di Singapura adalah Askaf dan Alkaf, yang pada musim haji keduanya memakai lebih dari satu kapal untuk mengangkut jemaah haji ke Jeddah. Sebelum musim haji wakil perusahaan kapal api datang ke Palembang dengan maksud mencari langganan untuk perusahaan mereka. Sistem pengangkutan secara besar-besaran juga berarti penurunan biaya naik haji. Akibat penurunan biaya, jumlah jemaah yang mampu naik haji bertambah pula. Jika sebelumnya hanya puluhan orang yang bertolak ke Jeddah, sesudah tahun 1871 ada beberapa ratus orang Palembang yang naik haji setiap tahunnya.³²

Jika ditinjau asal usul para jemaah, ternyata titik berat geografis para haji di Keresidenan Palembang masih terletak di Iliran. Pada tahun 1881, persentase tertinggi orang yang telah menunaikan ibadah haji tinggal di Palembang yang juga

³⁰ ARNAS, Laporan Tahunan 1853, hlm. 77.

³¹ ARNAS, Laporan Politik, 1865.

³² ARNAS, Laporan Tahunan 1874, hlm. 11-12; Vreden Bregt 1962; hlm. 140-145 dan hlm. 81.

merupakan jumlah absolut. Minat naik haji yang sama juga dapat dilihat di kalangan penduduk Ogan dan Komering Ilir, di mana lebih dari 700 orang telah pergi ke Mekkah. Jika dikumpulkan jumlah di seluruh Iliran Palembang, ternyata lebih dari dua per tiga jumlah haji berasal dari daerah ini. Di Uluhan Palembang, hanya Onderafdeeling Ogan Komering Ulu dan Enim yang memiliki lebih dari 500 jemaah. Daerah Lematang Ulu dan Bersemak Lebah yang memiliki jumlah haji masih di bawah 100 orang.³³

Meskipun minat untuk naik haji meningkat, pada tahap awal pengaruh para haji terhadap penduduk desa tetap terbatas.³⁴ Akan tetapi, setelah tahun 1870-an, semakin nyata perubahan pola kebudayaan agama di berbagai bagian di pedesaan. Jemaah pertama yang berangkat ke Jihaz biasanya langsung kembali sesudah beribadah haji. Namun sesudah tahun 1870, jumlah orang Palembang yang menetap di Mekkah untuk menuntut ilmu setelah menunaikan ibadah haji meningkat dengan cepat. Gejala yang sama, namun pada taraf yang lebih kecil juga didapati dari jemaah yang berasal dari daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan terciptanya saluran untuk menyebarkan kode ritual seperti yang ditetapkan oleh tradisi besar tertulis kepada kalangan rakyat pedesaan.³⁵

Pengaruh ekonomi yang paling mengesankan dari perkembangan agama dapat kita lihat melalui fenomena naik haji. Tahun 1920-an merupakan periode puncak pelaksanaan ibadah haji ke Mekkah. Pada dasawarsa pertama dan kedua abad ke-20 rata-rata setiap tahunnya sebanyak 1.400 jemaah haji bertolak dari Keresidenan Palembang menuju Tanah Suci Mekkah. Rekor jemaah haji dicapai pada tahun 1927 yang mencapai hampir 7.000 orang. Pada periode puncak

³³ ARNAS, Lampiran Laporan Tahunan 1876; ARNAS, lampiran Laporan Tahunan 1880.

³⁴ ARNAS, Laporan Tahunan 1874:9, 12.

³⁵ ARNAS, Laporan Tahunan 1882: 9-11, hlm. 82.

perdagangan karet, harga tiket pulang-pergi Palembang – Jeddah yang sebesar Nlg 250 memungkinkan ribuan jemaah menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima ini. Sebaliknya, pengaruh krisis dunia juga tercermin oleh minat naik haji pada awal tahun 1930-an, ketika jumlah calon haji dari Keresidenan Palembang tidak lebih dari 500 orang saja.

Setelah penyerahan kedaulatan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 1949 yang kemudian disusul dengan persetujuan Komperensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 30 Desember 1950, Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim meletakkan beberapa dasar dalam kebijaksanaan Kementerian Agama Republik Indonesia Serikat (RIS), di antaranya adalah merubah politik keagamaan Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan keagamaan di segala bidang kehidupan masyarakat.

Segala tugas dan tanggung jawab *Eeredient* (soal ibadah) pada Departemen *Onderwijs en Eereidienst* dan Kantor *van de Adviseur voor Inlandsche en Islamitische Zaken* dan penyusunan peraturan-peraturan urusan ibadah haji sesuai dengan derajat bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Maka sejak itu segala urusan mengenai ibadah haji diurus dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dalam struktur organisasi Kementerian Agama ini kemudian pada tahun 1950 dibentuk suatu badan yang khusus mengurus dan menyelenggarakan Urusan Haji, yaitu Bagian Urusan Haji.

Berhubung tahun 1950 adalah merupakan masa peralihan sesudah penyerahan kedaulatan maka penyelenggaraan haji yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan Panitia Haji Indonesia (PHI) menghadapi situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan Penyelenggaraan urusan haji yang melibatkan berbagai pihak (jawatan/instansi) lain memerlukan waktu yang cukup guna

melakukan koordinasi. Kebijaksanaan urusan haji pada masa pemerintahan pro-federal dipegang oleh HVK yang dibantu oleh *para recomba*.

Berhubung adanya Kementerian Agama RIS dan Departemen Agama di beberapa negara bagian maka kebijaksanaan urusan haji berada pada dewan menteri RIS, khususnya Menteri Agama RIS. Pada tahap ini adanya Badal-badal Syekh, Broker Haji, atau Tengkulak Haji yang merupakan perantara antara Kongsi Tiga dengan calon-calon jemaah haji serta bermunculan pula Panitia-panitia Penyokong haji yang sifat pekerjaannya mirip dengan peranan maupun pekerjaan Badal Syekh dan para Broker, hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi. Untuk lebih memantapkan dasar hukum maupun menjaga kewibawaan pemerintah sehubungan dengan kebijakan penyelenggaraan haji, maka dalam susunan Kabinet Sukiman pada tanggal 24 Mei 1951 telah diajukan Rencana Undang-Undang Darurat tentang Perjalanan Haji oleh Menteri Agama, yang pada waktu itu bersamaan pula dengan diajukannya Rencana Undang-Undang Darurat tentang Pencatatan Nikah Talah Cerai Rujuk (NTCR).

Sejak tahun 1950, Pelabuhan Palembang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pelabuhan haji di Indonesia. Jemaah haji yang diberangkatkan dari Pelabuhan Palembang adalah jemaah yang berasal dari Sumatera Selatan dan Jambi. Pada tahun 1961 jumlah jemaah haji kedua daerah tersebut berjumlah 1069 orang yang diberangkatkan dengan Kapal Husni Tamrin dan Setiabudi.³⁶

Jumlah jemaah haji Kota Palembang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi

³⁶ Pada tahun 1961 jumlah jemaah haji dari seluruh Indonesia adalah 11.650 orang yang diberangkatkan dengan empat kapal milik pemerintah, yaitu Tjokroaminoto, Husni Tamrin, Tampomas, dan Setiabudi. Lihat *Obor Rakyat*, Minggu 16 Juli 1961.

masyarakat dan negara. Data mengenai jumlah jemaah haji dari tahun 1981 sampai 1996 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Jemaah Haji Kota Palembang Tahun 1981-1996

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Besarnya Biaya (Rp)	Keterangan
	Laki-laki	Perempuan			
1981	606	861	1.467	1.943.000	353 <i>Waiting list</i>
1982	343	412	755	2.110.000	
1983	321	397	718	3.075.570	
1984	209	262	471	3.128.500	
1985	261	343	604	3.212.000	
1986	412	569	981	3.212.000	
1987	435	543	978	4.560.000	
1988	373	525	898	4.780.000	
1989	340	449	789	5.150.000	
1990	272	454	826	5.320.000	
1991	246	315	561	6.000.000	
1992	390	518	908	6.475.000	
1993	466	638	1.104	6.700.000	
1994	635	915	1.550	6.900.000	
1995	933	1.097	2.030	7.070.000	
1996	733	987	1.720	7.290.000	

Sumber: Data dari Pemerintah Kota Palembang Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Palembang

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa jemaah haji tahun 1995 merupakan yang terbanyak yaitu 2.030 orang. Jumlah ini bahkan masih ditambah dengan 353 orang yang masuk dalam kategori *waiting list* (daftar tunggu karena melebihi kuota). Hal

ini menunjukkan tingginya pertumbuhan ekonomi masyarakat Palembang pada tahun tersebut. Jumlah jemaah haji terendah adalah pada tahun 1984, yaitu hanya sebanyak 471 orang saja. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut perekonomian masyarakat sedikit menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Data mengenai jumlah jemaah haji asal Kota Palembang pada tahun 1998 sampai tahun 2007 berdasarkan kelompok umur, kelompok pendidikan, dan kelompok pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 3, 4, dan 5 berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Jemaah Haji Kota Palembang Menurut Kelompok Umur Tahun 1998-2007

No	Tahun	Kelompok Umur (Tahun)						Jumlah
		... 20	21-30	31-40	41-50	51-60	61 ...	
1	1998	8	46	269	555	638	519	2.035
2	1999	10	26	70	221	158	100	585
3	2000	14	42	266	530	525	335	1.712
4	2001	16	57	233	751	603	436	2.069
5	2002	20	70	272	711	650	581	2.304
6	2003	19	53	260	804	630	526	2.292
7	2004	25	64	278	824	676	640	2.507
8	2005	21	89	284	740	704	575	2.413
9	2006	27	145	478	1.103	1.185	1.056	3.994
10	2007	19	116	385	1.063	1.162	942	3.691

Sumber: Data dari Pemerintah Kota Palembang Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Palembang.

Tabel 4. Jumlah Jemaah Haji Kota Palembang Menurut Kelompok Pendidikan Tahun 1998-2007

No	Tahun	Kelompok Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Diploma	S-1	S-2	S-3	
1	1998	761	292	534	162	261	22	3	2.035
2	1999	211	69	163	48	81	13	-	585
3	2000	570	208	521	108	233	45	27	1.712
4	2001	624	296	636	183	309	38	10	2.069
5	2002	641	335	741	172	370	38	7	2.304
6	2003	638	334	738	171	368	37	6	2.292
7	2004	613	382	839	218	450	4	1	2.507
8	2005	541	352	745	223	465	80	7	2.413
9	2006	1.109	518	1.252	326	677	106	6	3.994
10	2007	932	514	1.170	324	669	76	6	3.691

Sumber: Data dari Pemerintah Kota Palembang Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Palembang

Tabel 5. Jumlah Jemaah Haji Kota Palembang Menurut Kelompok Pekerjaan Tahun 1998-2007

No	Tahun	Kelompok Pekerjaan							Jumlah
		PNS	TNI/ POLRI	Dagang	Petani	Swasta/ BUMN	Rumah tangga	Pelajar/ mhsw	
1	1998	400	48	200	115	400	830	42	2.035
2	1999	109	10	72	47	133	201	13	585
3	2000	314	28	155	115	401	680	19	1.712
4	2001	380	47	225	94	472	844	34	2.069
5	2002	436	49	157	99	638	890	35	2.304
6	2003	471	73	163	87	600	871	27	2.292
7	2004	582	61	144	62	754	865	39	2.507
8	2005	525	69	123	91	743	825	37	2.413
9	2006	868	85	280	183	1.335	1.175	68	3.994
10	2007	618	32	219	111	1.334	1.320	57	3.691

Sumber: Data dari Pemerintah Kota Palembang Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Palembang.

Dari Tabel 3, 4, dan 5 di atas terlihat bahwa jemaah haji pada tahun 1999 jumlahnya paling sedikit, yaitu hanya 585 orang saja. Hal ini disebabkan oleh krisis moneter yang melanda Indonesia mulai akhir tahun 1997 dan baru mulai pulih pada tahun 2000. Tahun 1998 jemaah haji dari Kota Palembang masih banyak jumlahnya karena pada tahun tersebut kurs dollar masih dipatok sesuai dengan kurs pada tahun 1997, karena para calon jemaah haji ini sudah melunasi ongkos naik haji (ONH)-nya pada tahun 1997 tersebut. Kurs dollar yang berkisar antara Rp 9.000,- sampai Rp 10.000,- baru mulai diberlakukan pada calon jemaah haji tahun 1999 sehingga jumlahnya ONH naik tiga kali lipat. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah calon jemaah haji secara drastis. Jumlah calon jemaah haji mulai naik secara perlahan-lahan pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan mulai stabilnya ekonomi Indonesia.

Tahun 2002 calon jemaah haji dari Kota Palembang berjumlah 2.304 orang. Untuk seluruh Sumatera Selatan, tahun 2002 jumlah jemaah haji mencapai 3.942 orang, batal sebanyak 29 orang dengan perincian meninggal (10 orang), sakit (9 orang), hamil (2 orang), dan mengundurkan diri (8 orang). Dengan demikian jumlah jemaah calon haji Sumatera Selatan pada tahun 2003 yang berangkat ke Tanah Suci adalah 3.913 orang, yang terdiri dari sembilan kloter, yaitu delapan kloter penuh dan satu kloter bergabung dengan jemaah dari DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut dua-belas orang meninggal di Tanah Suci, satu orang yang masih tinggal di Arab Saudi karena sakit, dan jumlah jemaah yang kembali ke Tanah Air berjumlah 3.900 orang.³⁷

Pada tahun 2002 ini jemaah haji asal Sumatera Selatan yang berangkat dan pulang menuju Embarkasi Jakarta ada yang menggunakan angkutan darat dan udara. Yang

³⁷ Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1422 H / 2002 M, him. 9.

menggunakan angkutan darat adalah jemaah yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, dan Musi Rawas. Yang menggunakan angkutan udara dengan pesawat Garuda, Merpati, dan Pelita adalah jemaah yang berasal dari Kota Palembang, Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Belitung, dan Musi Banyuasin.³⁸

Tahun 2003 calon jemaah haji dari Kota Palembang berjumlah 2.292 orang. Jumlah jemaah haji seluruh Sumatera Selatan pada tahun tersebut mencapai 3.521 orang, batal sebanyak 43 orang dengan perincian meninggal (1 orang), sakit (1 orang), hamil (1 orang), dan mengundurkan diri (40 orang). Dengan demikian jumlah jemaah calon haji Sumatera Selatan pada tahun 2003 yang berangkat ke Tanah Suci adalah 3.478 orang, yang terdiri dari delapan kloter, yaitu tujuh kloter penuh dan satu kloter bergabung dengan jemaah dari DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut sebelas orang meninggal di Tanah Suci, satu orang meninggal setelah tiba di Tanah Air, dan jumlah jemaah yang kembali ke Tanah Air berjumlah 3.466 orang.³⁹

Pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah asal di berbagai Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ke Embarkasi Jakarta tahun 2003 menggunakan angkutan darat dan udara. Yang menggunakan angkutan darat adalah jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (sebagian), Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, dan Kota Pagar Alam. Yang menggunakan angkutan udara dengan pesawat Garuda Indonesia Airlines adalah jemaah haji yang berasal dari Kota Palembang, Kabupaten

³⁸ *Ibid.*, hlm. 9-10.

³⁹ Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1423 H / 2003 M, hlm. 8

Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir (sebagian), dan Kota Prabumulih.⁴⁰

Pada tahun 2004 M / 1424 H, calon jemaah haji yang berasal dari Kota Palembang 2.507 orang, meningkat sebesar 0,38 persen dibanding tahun 2003 yang hanya berjumlah 2292. Pemerintah Kota Palembang memberikan bimbingan manasik untuk memberi bekal kepada calon jemaah haji tersebut, yang dibuka langsung oleh Walikota Palembang selama empat hari. Hari pertama pembukaan berlangsung di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II (manasik massal), sedangkan pelaksanaan manasik dilaksanakan di kecamatan-kecamatan yang ada dalam wilayah Kota Palembang. Adapun tempat dan waktu pelaksanaan manasik tersebut selanjutnya adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Masjid Taqwa Jl. Talang Semut, untuk jemaah haji yang berasal dari Kecamatan Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, dan Bukit Kecil selama tiga hari yang dimulai hari Selasa sampai Kamis tanggal 29 – 31 Oktober 2003.
2. Mesjid Darul Muttaqin Komplek Pertamina Kelurahan Bagus Kuning, untuk jemaah haji yang berasal dari Kecamatan Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Kertapati dan Plaju selama tiga hari pada hari Senin – Rabu tanggal 9 – 11 Desember 2003.
3. Masjid Baitul Magfiroh Asrama haji Km. 9 Palembang, untuk jemaah haji yang berasal dari Kecamatan Ilir Timur I, Kemuning, dan Sukarami selama tiga hari dari hari Senin 9 Desember 2003 sampai Rabu 11 Desember 2003.
4. Masjid Muhajirin Boom Baru Palembang, untuk jemaah haji yang berasal dari Kecamatan Ilir Timur II, Kalidoni,

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Kantor Departemen Agama Kota Palembang Tahun 2004 M / 1424 H, hlm. 7-8.

dan Sako selama tiga hari dimulai hari Selasa sampai dengan Kamis, yaitu tanggal 10 – 12 Desember 2003.

Selain manasik yang dilaksanakan Pemerintah Kota, manasik haji juga dilaksanakan oleh pihak swasta yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan yayasan lainnya setiap hari Sabtu dan Minggu mulai awal bulan Agustus 2003 sampai dengan akhir bulan Desember 2003. KBIH atau yayasan yang menyelenggarakan manasik haji di Kota Palembang di antaranya adalah KBIH Al Mabruur (154 orang), KBIH Varita (204), KBIH Al-Falah (74), KBIH SKM Albarokah (91), KBIH Miftahussalam (25), KBIH Ahlussunnah wal-Jamaah (80), KBIH Ikhlas Beramal (140), KBIH Ar-Raudhah (148), KBIH Al-Fariz (80), KBIH Al-Ihwan (35), KBIH As-Shofa (72), KBIH Al-Mizab (89), KBIH Al-Mukarromah (105), KBIH Madinah (90), KBIH Ar-Rahmah (141), KBIH Misfalah I (32), KBIH Misfalah II (35), KBIH Ka'bah (59), KBIH Iqro' (45), KBIH Daruna darussalam (20), KBIH Al-Ghazali (40), Kelompok Bimbingan Bisri (124), dan Kelompok Bimbingan Pertamina (264).⁴²

Tahun 2005 / 1425 H, jemaah haji Kota Palembang berjumlah 2.413 orang, turun sebesar 3,75 persen dibanding tahun 2004 yang berjumlah 2.507. Untuk memberi bekal kepada calon jemaah haji, Pemerintah Kota Palembang memberikan manasik haji yang bertujuan untuk memberikan bekal awal dan pengetahuan tentang penyelenggaraan ibadah haji. Bimbingan Massal I dibuka oleh Walikota Palembang pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 pukul 8.0 di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.⁴³

Materi yang disampaikan dalam acara manasik haji tersebut ialah (1) Penjelasan umum tentang perhajian; (2)

⁴² *Ibid.*, hlm. 8-9.

⁴³ Laporan dan Eavaluasi Penyelenggaraan Haji Kantor Departemen Agama Kota Palembang Tahun 2005 M/ 1425 H, hlm. 11.

Kebijaksanaan pemerintah tentang pembinaan haji; (3) Kebijaksanaan pemerintah tentang pelayanan haji dan umrah; (4) Kebijaksanaan pemerintah tentang pelayanan kesehatan haji; dan (5) Pembentukan kelompok bimbingan. Yang bertindak sebagai penyampai materi atau nara sumber dalam acara tersebut terdiri dari; Unsur Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan; Unsur Departemen Agama Kota Palembang; Unsur Dinas Kesehatan Kota Palembang; Majelis Ulama Indonesia; Ikatan Persaudaraan haji Kota Palembang; dan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah haji Sumatera Selatan.⁴⁴

Bimbingan Massal II untuk calon jemaah haji Kota Palembang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 November 2004 pukul 8.00 di Masjid Al-Aqobah I Komplek Pusri Palembang. Acara ini bertujuan untuk memberikan bekal akhir tentang praktik Manasik Haji dan penentuan kloter. Materi yang diberikan dalam acara tersebut ialah (1) Penayangan OHP tentang Manasik Haji; (2) Penjelasan tentang keselamatan penerbangan; (3) penegasan pengelompokan; (4) Penjelasan tentang hak dan kewajiban calon haji; dan (5) Perilaku sebagai calon haji. Yang bertindak sebagai penyampai materi atau nara sumber dalam acara tersebut terdiri dari; Unsur Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan; Unsur Departemen Agama Kota Palembang; Unsur Dinas Kesehatan Kota Palembang; Unsur Dinas Perhubungan Kota Palembang; Majelis Ulama Indonesia; Ikatan Persaudaraan Haji Kota Palembang; dan Forum Komunikasi Kelompok bimbingan Ibadah Haji Sumatera Selatan.⁴⁵

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan manasik haji juga dilaksanakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Yayasan lainnya setiap hari Sabtu dan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 14-15.

Minggu mulai awal Agustus 2004 sampai dengan akhir bulan Desember 2004. KBIH atau yayasan yang menyelenggarakan manasik haji untuk calon jemaah haji tahun 2005 di antaranya adalah KBIH Al Maburr (185 orang), KBIH Varita (84), KBIH Al-Falah (56), KBIH SKM Al-Barokah (90), KBIH Miftahussalam (46), KBIH Ahlussunnah wal-Jamaah (134), KBIH Iklas Beramal (177), KBIH Al-Hikmah (45), KBIH As-Sami'ah (75), KBIH Ar-Raudhah (227), KBIH Al-Fariz (61), KBIH Al-Ihwan (49), KBIH As-Shofa (40), KBIH Al-Mizab (72), KBIH Al-Mukarromah (131), KBIH Madinah (35), KBIH Miftahul Jannah (21), Ar-Rahmah (171), KBIH Misfalah (46), Ka'bah (69), KBIH Bisri (114) KBIH Petro Al Hajj (207), KBIH Nur Indayu (74), KBIH Al-Ghazali (45), KBIH Daruna Darussalam (22), KBIH Al-Arofah (33), KBIH IGM Al-Ikhsaniah (45), KBIH Muhammadiyah (46) KBIH Iqro' (65), KBIH Nurul Qomar (8), KBIH Musdalifah Al-Khoiriyah (36), KBIH Al-Muhajirin (55), dan KBIH An-Nur (47).⁴⁶

Setelah calon jemaah haji membentuk regu dan rombongan, maka kelompok tersebut memilih salah seorang di antara mereka sebagai ketua, selanjutnya regu tersebut dilaporkan ke Kantor Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama kemudian merekapitulasi data mengenai Ketua Regu dan Ketua Rombongan tersebut. Ketua Regu dan Ketua Rombongan tersebut kemudian diberi penataran guna kelancaran tugasnya selaku ketua. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2005 M / 1425 H ini, penataran dilakukan di Aula MAN 3 Palembang pada tanggal 13 Desember 2004 yang diikuti oleh 249 orang Ketua Regu dan 63 orang Ketua Rombongan.

Tujuan yang hendak dicapai dari penataran ini untuk Ketua Regu dan Ketua Rombongan ini adalah supaya peserta dapat memahami tugas pokok Ketua Regu dan Ketua Rombongan agar memiliki ketrampilan dalam melaksanakan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 15-16.

tugasnya, sehingga anggota regu atau rombongan dapat melaksanakan ibadahnya dengan tertib dan lancar sesuai ketentuan syariat dan memperoleh haji mabrur. Materi yang disampaikan dalam penataran tersebut adalah; (1) Kelompok Dasar yang berisi kebijaksanaan pemerintah tentang perhajian; (2) Kelompok Inti yang terdiri dari tugas pokok dan fungsi Ketua Regu dan Ketua Rombongan, dan Manasik Haji; (3) Kelompok Penunjang yang meliputi bimbingan kesehatan, penanganan kasus-kasus, dan adat-istiadat bangsa Arab.⁴⁷

Tahun 2005-2006 M / 1426 H jumlah jemaah haji Palembang sebanyak 3.994. Jumlah ini meningkat sebanyak 65,52 persen dibanding jumlah jemaah tahun sebelumnya yang hanya 2.413 orang. Sama seperti tahun sebelumnya, untuk memberi bekal kepada calon jemaah haji, Pemerintah Kota Palembang memberikan bimbingan manasik yang dibuka oleh Walikota Palembang. Bimbingan Manasik haji ini terdiri dari Bimbingan Massal I dan Bimbingan Massal II.

Bimbingan Massal I bertujuan memberikan bekal awal dan pengetahuan tentang penyelenggaraan ibadah haji. Pelaksanaannya dilakukan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada hari Senin tanggal 26 September mulai pukul 9.00. Acara ini dilanjutkan dengan bimbingan manasik haji untuk calon jemaah haji Kota Palembang tahun 1426 H yang dilaksanakan oleh Pemerintah di empat tempat kecamatan dalam Kota Palembang, yang dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 27-29 September 2005, yaitu:⁴⁸

1. Kelompok I di Masjid Darul Muttaqin Komplek Pertamina di Kelurahan Bagus Kuning Palembang untuk calon jemaah

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 10-11.

⁴⁸ Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2005-2006 M / 1426 H, hlm. 11-12.

haji yang berasal dari Kecamatan Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Kertapati, dan Plaju.

2. Kelompok II di Masjid Taqwa Kelurahan talang Semut untuk calon Jemaah Haji yang berasal dari Kecamatan Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, dan Gandus.
3. Kelompok III di Masjid Baitul Magfiroh Asrama Haji Km 9 Palembang untuk calon jemaah haji yang berasal dari Kecamatan Ilir Timur I, Kemuning, dan Sukarami.
4. Kelompok IV di Masjid Muhajirin Boom Baru untuk calon jemaah haji yang berasal dari Kecamatan Ilir Timur II, Sako, dan Kalidoni.

Materi yang disampaikan pada Bimbingan Manasik di tingkat kecamatan ini adalah (i) Petunjuk perjalanan dan Bimbingan Kesehatan; (ii) Bimbingan Manasik Haji 1, 2, , dan 4.; (iii) Pengenalan adat budaya dan kondisi alam Arab Saudi; (iv) Pemantapan dan pemahaman Manasik Haji; (v) Arahan-arahan penting tentang Manasik Haji dan hal-hal yang berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah haji/umrah; dan (vi) Peragaan Manasik Haji. Adapun penyampai materi atau nara sumber dalam acara tersebut terdiri dari; unsur Departemen Agama Propvinsi Sumatera Selatan; unsur Departemen Agama Kota Palembang; unsur Dinas Kesehatan Kota Palembang; Majelis Ulama Indonesia; Ikatan Persaudaraan Haji Kota Palembang; dan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Sumatera Selatan.⁴⁹

Bimbingan Manasik Masaal Kedua dilaksanakan pada Hari sabtu tanggal 1 Oktober mulai pukul 9.00 di Masjid Sultan Agung Mahmud Badaruddin II Kota Palembang yang sekaligus merupakan penutupan Manasik Haji. Selanjutnya diadakan pula pelatihan ketua regu dan ktua rombongan rombongan yang dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 12.

tanggal 14 dan 15 November 2005 pukul 8.00 – 11.15. Acara ini bertujuan agar peserta dapat memahami tugas pokok ketua regu dan ketua rombongan agar memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga anggota regu/rombongan dapat melaksanakan ibadahnya dengan tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan syariat dan memperoleh jahi mabrur.⁵⁰

Pelaksanaan manasik haji tahun 1426 H ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, juga dilaksanakan oleh pihak swasta. Jumlah pertemuannya 16-22 kali tatap muka yang diselenggarakan KBIH dan Yayasan lainnya setiap hari Sabtu dan Minggu mulai awal Agustus 2005 sampai dengan akhir bulan Desember 2005. KBIH atau yayasan yang menyelenggarakan manasik haji untuk calon jemaah haji tahun 2006 di antaranya adalah KBIH Al Mabrur (295 orang), KBIH Varita (152), KBIH Al-Falah (130), KBIH SKM Al-Barokah (143), KBIH Miftahussalam (153), KBIH Ahlussunnah wal-Jamaah (134), KBIH Iklas Beramal (169), KBIH Al-Hikmah (73), KBIH As-Sami'ah (101), KBIH Ar-Raudhah (267), KBIH Al-Fariz (123), KBIH Al-Ihwan (46), KBIH As-Shofa (106), KBIH Al-Mizab (95), KBIH Al-Mukarromah (163), KBIH Madinah (46), KBIH Miftahul Jannah (39), Ar-Rahmah (305), KBIH Misfallah I (27), Ka'bah (82), KBIH Bisri (139) KBIH Petro Al Hajj (136), KBIH Nur Indayu (235), KBIH Al-Ghazali (73), KBIH Daruna Darussalam (37), KBIH Al-Arofah (20), KBIH IGM Al-Ikhsaniah (106), KBIH Muhammadiyah (42) KBIH Iqro' (71), KBIH Nurul Qomar (20), KBIH Musdalifah Al-Khoiriyah (59), KBIH Al-Muhajirin (77), KBIH An-Nur (49), KBIH Qolbun Salim (34), KBIH An-Namiroh (40), Misfallah II (65), KBIH Masjid Agung (8), KBIH Tawakkal (35), dan KBIH Siti Hhodijah (54).⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 15-16.

Untuk seluruh Sumatera Selatan, jumlah jemaah haji pada tahun 2006 M / 1426 H ialah 6.421 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 55 orang batal berangkat, sehingga jumlah jemaah yang berangkat ke Saudi Arabia sebanyak 6.186 orang, yang terdiri dari 14 kloter penuh, dan 366 jemaah bergabung dengan jemaah asal DKI Jakarta dalam Kloter 57. Jumlah jumlah yang meninggal di Arab Saudi 21 orang, yang tinggal di Arab Saudi karena sakit sebanyak tiga orang, sehingga jemaah yang kembali ke Tanah Air sesuai dengan prosedur jadwal yang telah ditetapkan berjumlah 6.162 orang.⁵²

Pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah asal di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Selatan ke Embarkasi Jakarta menggunakan angkutan darat dan udara. Yang menggunakan angkutan darat adalah jemaah haji yang berasal dari kabupaten Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Sebagian Ogan Komering Ilir/Ogan Ilir, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Pagar Alam. Yang menggunakan angkutan udara adalah jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Sebagian Ogan Komering Ilir/Ogan Ilir, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih.⁵³

Jadwal pemulangan dan pemberangkatan jemaah yang melalui udara dikoordinir oleh Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1426 H/2006 M. Sedangkan yang menggunakan angkutan darat dikoordinir langsung oleh Kepala Staf Kabupaten/Kota masing-masing.

Tahun 1427 H/2006 M, pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji asal Palembang tidak lagi

⁵² Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Prov. Sumatera Selatan Tahun 1426 H / 2006 M, hlm. 3.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 8.

melalui Embarkasi Jakarta, tetapi langsung dari Embarkasi Palembang yang bertempat di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Pada awal pengoperasiannya, Embarkasi Palembang memberangkatkan sebanyak 7.237 jemaah yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 6.321 orang dan Provinsi Bangka-Belitung sebanyak 916 orang.⁵⁴

Pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji dari Embarkasi Palembang tahun 1427 H ini dibagi menjadi 23 kloter. Jemaah calon haji diberangkatkan dari asrama Haji menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan menggunakan Bus Damri dua jam sebelum jadwal penerbangan pesawat. Setiap kloter yang akan berangkat menggunakan sepuluh bus. Jemaah Calon Haji kloter 01 asal Palembang yang juga merupakan kloter perdana di Embarkasi Palembang, pemberangkatannya dari Asrama Haji menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dilepas oleh Gubernur Sumatera Selatan, Ir. Syahril Oesman, MM. Jemaah haji selanjutnya dilepas oleh Walikota/Bupati masing-masing daerah asal jemaah calon haji.⁵⁵

Operasional Pemulangan Haji di Embarkasi Palembang dimulai dengan proses penjemputan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang diawali Tim Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi, dan selanjutnya penyelesaian lainnya di Aula Asrama Haji Palembang. Proses pemulangan Jemaah Haji ini pada prinsipnya dilaksanakan dengan sistem satu atap, dalam arti seluruh proses dilaksanakan di Asrama Embarkasi. Akan tetapi, demi memperlancar proses pelayanan pemulangan Jemaah Haji di lapangan, maka Ketua PPIH mengambil kebijaksanaan untuk melaksanakan proses pemeriksaan oleh Imigrasi dan Pemeriksaan Kesehatan oleh

⁵⁴ Laporan Operasional Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Embarkasi Palembang Tahun 1427 H / 2006 M, hlm. 23.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 17-18.

Tim Kesehatan Pelabuhan dilaksanakan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.⁵⁶

Jemaah Haji yang datang pertama dari tanah Suci dan mendarat di Bandara Sultan Badaruddin II sebanyak 323 orang yang berasal dari Kota Palembang merupakan jemaah haji perdana yang pemulangannya dilaksanakan oleh Embarkasi Palembang. Kedatangannya disambut oleh Gubernur Sumatera Selatan, Ir. Syahril Oesman, MM. Walikota Palembang Ir. H. Eddy Santana Putra, M.T., dan Ketua PPIH di Bandara Sultan Mahmud Bandara II Palembang yang diabadikan oleh segenap *crew* TVRI, Reporter RRI, serta para wartawan harian di Sumatera Selatan. Untuk penyambutan kedatangan kloter selanjutnya dilakukan dengan penyambutan biasa dengan diawali ucapan selamat datang yang dilakukan Seksi Kedatangan Jemaah di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sampai dengan kloter terakhir.⁵⁷

Setelah proses pelayanan kedatangan Jemaah Haji telah selesai di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, maka Jemaah haji diangkut dengan bus ke Asrama Haji untuk penyelesaian akhir. Setelah mengambil barang bawaan, Jemaah Haji kemudian menemui keluarganya/penjemput yang sudah menunggu di luar pagar Asrama Haji. Bagi Jemaah Haji yang transit, mereka tidak langsung pulang tetapi menginap sementara di Asrama Haji sambil menunggu proses kepulangan selanjutnya, yang biasanya diurus oleh petugas daerah masing-masing. Jemaah Haji yang transit adalah jemaah yang berasal dari Ogan Komering Ilir, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Lubuk Linggau, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu, Prabumulih,

⁵⁶ Laporan Operasional Pemulangan Jemaah Haji Debarkasi Palembang tahun 1427 – 1428 H / 2006 – 2007 M, hlm. 1-2.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

Musirawas, Banyuasin, Musi banyuasin, dan dari Provinsi Bangka Belitung.⁵⁸

D. Faktor Pendorong Naik Haji pada Masyarakat Melayu Palembang

Meningkatnya masyarakat Melayu Palembang untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Beberapa faktor yang mendorongnya di antaranya adalah adanya kesadaran pada masyarakat Palembang bahwa Islam mereka belum sempurna kalau tidak naik haji. Walaupun dalam agama kewajiban haji hanya bagi yang mampu, tetapi pada masyarakat Melayu Palembang keinginan untuk naik haji meliputi segala golongan dalam masyarakat, terutama petani, pedagang, dan alim ulama.⁵⁹

Golongan petani yang banyak menunaikan ibadah haji terutama adalah petani karet, petani kopi, dan penebang kayu (panglong kayu). Target mereka menunaikan haji adalah untuk mencari ridha Allah agar rezeki mereka lebih berkah. Golongan pedagang terutama adalah pedagang karet, pedagang kayu, dan pedagang beras dari hulu sampai hilir. Golongan alim ulama menunaikan ibadah haji di samping untuk memenuhi kewajiban agama juga bertujuan sebagai pengukuhan keilmuan mereka dan untuk menambah kepercayaan masyarakat kepada mereka. Beberapa ulama menunaikan ibadah haji dibiayai oleh konglomerat muslim. Sebelum berangkat haji, seorang calon haji di Palembang akan melakukan sedekah, membaca surat Yasin setiap malam Jum'at yang dilakukan oleh pihak keluarga.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵⁹ Wawancara dengan K.H. Zainal Bahri Bey, mantan Ka Depag Kota Palembang, tanggal 30 Maret 2007 di Palembang.
Wawancara dengan Mochtar Efendi, mantan Letkol ABRI dan alumni Thwalib Parabek, tanggal 30 Maret 2007 di Palembang

Menjelang masuk asrama, seorang calon haji akan dilepas oleh keluarganya dengan membacakan doa-doa, surat Yasin, ceramah mengenai perjalanan haji, dan diazankan sebelum meninggalkan rumah oleh Khatib/Imam di masjid lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. Semua keluarga besar dan tetangga hadir dalam pembacaan Yasin di rumah calon haji tersebut. Dalam acara tersebut juga disediakan makanan-makanan kecil.⁶⁰

Masyarakat Melayu Palembang yang pergi menunaikan ibadah haji biasanya membawa kotak (sahara) yang terbuat dari rotan, yang berisi sembilan bahan pokok (sembako), sambal teri, dodol, agar-agar batu, dan ikan asin gabus. Hal ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga jika tidak cocok dengan makanan yang diberikan di Tanah Suci.⁶¹ Makanan lain yang juga biasa dibawa jamaah haji dari Palembang adalah *sagon*, nasi yang dikeringkan, kerupuk ikan, lempuk, dendeng, dan sambal *lingking* yang berisi ikan dicampur dengan kelapa parut, dibubuhi cabai dan bumbu baru ditumis dan kemudian digoreng. Peralatan yang dibawa adalah kompor dan periuk.⁶²

Jamaah haji asal Palembang, setelah kembali dari Tanah Suci, akan dijemput oleh pihak keluarga dan orang kampung untuk diarak ke masjid guna melakukan shalat dan sujud syukur. Selanjutnya juga dilakukan doa selamat yang dihadiri oleh sanak saudara yang dalam acara tersebut mendapat suguhan oleh-oleh dari haji tersebut berupa korma

⁶⁰ Sejak tahun 1995 sudah jarang dilakukan azan untuk melepas jamaah haji. Wawancara dengan K.H. Zainal Bahri Bey, mantan Ka Depag Kota Palembang, tanggal 30 Maret 2007 di Palembang; keterangan yang hampir sama juga didapatkan dari wawancara dengan Djohan Hanafiah, budayawan, tanggal 31 Maret 2007 di Palembang.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Wawancara dengan Mochtar Efendi, mantan Letkol ABRI dan alumni Thawalib Parabek, tanggal 30 Maret 2007 di Palembang dan Djohan Hanafiah, budayawan, tanggal 31 Maret 2007 di Palembang.

dan air zam-zam. Orang yang baru pulang haji tersebut selama empat puluh hari dilarang bepergian jauh-jauh dari kampungnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan supaya lebih berkonsentrasi dalam melakukan ibadah.⁶³

Di samping pihak keluarga, jemaah haji yang baru pulang dari tanah suci tersebut setelah sampai di tanah air juga disambut oleh pembesar-pembesar. Pada tahun 1961, misalnya, rombongan jemaah haji dari Sumatera Selatan dan Jambi yang sampai di Palembang pada tanggal 20 Juli, diterima dalam suatu upacara khusus di Pelabuhan Boom Baru Palembang yang dihadiri oleh Gubernur/KDH Sumatera Selatan dan Jambi, Panglima Dam/IV Sriwijaya, dan Wakil Kepala Dati II se Sumatera Selatan dan Jambi.⁶⁴

E. Kesimpulan

Masyarakat Palembang sebagai bagian dari dunia Melayu merupakan masyarakat yang identik dengan Islam. Boleh dikatakan hampir tidak ada penduduk asli Melayu Palembang yang tidak beragama Islam. Sebagai umat Islam, orang Palembang pun memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan kewajiban mereka, yaitu menunaikan Rukun Islam kelima dengan menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Sebelum ada kapal laut bermesin, umat Islam Palembang pergi haji dengan menggunakan kapal layar mengarungi lautan selama berbulan-bulan, malah ada yang sampai makan waktu dua tahun karena harus berhenti di Bombay, Aden, dan

⁶³ Wawancara dengan K.H. Zainal Bahri Bey, mantan Ka Depag Kota Palembang, tanggal 30 Maret 2007 di Palembang. Lihat juga kisah Haji Murat, warga Palembang yang menunaikan ibadah haji pada tahun 1961 yang dimuat di *Obor Rakyat*, Sabtu 22 Juli 1961.

⁶⁴ *Bintang Obor*, Jum'at 21 Juli 1961; lihat juga *Bintang Obor*, Kamis 27 Juli 1958 mengenai penyambutan rombongan kedua jemaah haji di Pelabuhan Boom Baru Palembang yang datang dengan kapal Thamrin sebanyak 366 orang.

dari sana baru melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Sejak ada kapal laut (bermesin), maka jemaah haji yang berangkat dari Palembang, harus melalui Singapura.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemberangkatan jemaah haji menggunakan kapal laut dan kapal udara. Jemaah haji dari Palembang yang menggunakan kapal udara berangkat dari Embarkasi Jakarta. Mulai tahun 2006 jemaah haji asal Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak lagi melalui Embarkasi Jakarta (Bandara Soekarno Hatta), tetapi langsung dari Embarkasi Palembang, yaitu di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Dengan peningkatan minat masyarakat dalam berhaji ini, juga seiring dengan adanya perubahan-perubahan motivasi berhaji.

Dahulunya orang Palembang berhaji dalam rangka ibadah untuk menunaikan kewajiban, sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah SAW. Disamping itu, tentu saja untuk mencari tambahan ilmu tentang agama, sehingga setelah mereka pulang dari menunaikan haji mereka juga memperoleh ilmu yang dapat dibagikan pada masyarakat.

Selain itu, adapula yang mempunyai motivasi berhaji hanya sekedar untuk meningkatkan status sosialnya di tengah masyarakat. Menurut anggapannya setelah naik haji, mereka akan mendapat penghormatan sebagai seorang ulama yang mengerti akan agama. Pada umumnya masyarakat Palembang awalnya memiliki motivasi berhaji seperti ini, sehingga yang terjadi adalah mereka berlomba-lomba jual tanah hanya untuk sekedar mencari ongkos untuk naik haji.

Perkembangan selanjutnya, orang naik haji bukan hanya sekedar beribadah, menuntut ilmu, demi prestise atau untuk meningkatkan status social, tetapi juga didasari oleh motivasi lain yaitu naik haji sambil berdagang. Jadi pada waktu naik haji mereka juga membawa barang dagangan berbagai jenis barang, sehingga sesampai di Mekkah mereka bisa berdagang sambil melaksanakan haji. Orang seperti ini

perspektifnya terhadap naik haji sudah mengalami perubahan, haji dilihat bukan sekedar untuk beribadah, tetapi juga sebagai sebuah peluang bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

I. Arsip

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Kantor
Departemen Agama Kota Palembang Tahun 2004 M/
1424 H.

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Kantor
Departemen Agama Kota Palembang Tahun 2005 M/
1425 H.

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2005-
2006 M / 1426 H

Laporan Operasional Pemberangkatan Jamaah Calon Haji
Embarkasi Palembang Tahun 1427 H / 2006 M.

Laporan Operasional Pemulangan Jamaah Haji Debarkasi
Palembang Tahun 1427 – 1428 H / 2006 – 2007 M.

Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji Propinsi Sumatera
Selatan Tahun 1422 H / 2002 M.

Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji Propinsi
Sumatera Selatan Tahun 1423 H / 2003 M.

Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Propinsi
Sumatera Selatan Tahun 1426 H / 2006 M.

II. Koran/Majalah

Al-Ihsan 1, 1927

Boemi Melajoe, 5, 26 Februari 1927

Obor Rakyat, Senin, 7 Juli, Rabu, 30 Juli 1958, Sabtu, 12
Agustus 1958, Senin, 23 September 1958, Kamis, 13 ,
Minggu, 16, Jum'at, 21 , Sabtu, 22 , Kamis, 27 Juli 1961.

Pertja Selatan 18, 11 Februari 1928

III. Buku

- Abdullah, Makmum (ed.), *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdiknas dan Jarahnitra, 1984.
- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Ahmad, Memet, *Sejarah Masjid Muara Ogan dan Masjid Lawang Kidul serta Biografi Kiai Muara Ogan*, Palembang: FORKAMM Kota Palembang, 2005.
- Alfian, Teuku Ibrahim, "Tentang Metodologi Sejarah" dalam Teuku Ibrahim Alfian et al., (eds.), *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan Dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Historis Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1994.
- van den Berg, L.W.C., *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, Jakarta: INIS, 1989.
- Bimbingan Manasik, Ziarah dan Perjalanan Haji*, Jakarta: Departemen Agama R.I. Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji, 1990.
- Federspiel, Howard M., *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad ke-20*, Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- HAMKA, *Sejarah Islam di Sumatera*, Medan: Pustaka Nasional, 1950.
- Hanafiah, Djohan, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Heryani, Yenny, & Marlina Sukanti, *Gelar Kebangsawanan Kaitannya dengan Rumah Limas*, Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Selatan, 1994.

van der Hoeven, Pruys, *Vertig Jaren Indische Dients*, Den Haag, 1894.

Jousairi, Hasbullah, *Mamang dan Belanda: Goresan-goresan Wajah Sosial Ekonomi dan Kependudukan Sumatera Selatan Zaman Kolonial dan Refleksinya pada Hari ini*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1996.

Kerchman, F.W.M., *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905-1906*, Semarang: Vereeniging voor Locale Belangen, 1930.

Loka-karya Peningkatan Pelayanan Haji Indonesia 26 s/d 28 Februari 1975 di Jakarta, Jakarta: Dirjen Urusan Haji, 1975.

Marsden, William, *Sejarah Sumatra*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Mursidi & Sumuran Harahap, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jamaah Haji Indonesia*, Jakarta: Mars – 26, 1984.

Nagazumi, Akira., "Pemberontakan Partai Komunis Indonesia dan Pengaruhnya atas Jemaah Haji: 1926-1927" dalam Akira Nagazumi (ed.), *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX dan XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986

Nas, P.J.M., *Colonial City*, Leiden, 1997.

Nidjam, Achmad & Alatief Hanan, *Manajemen Haji*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.

- Noeh, Zaini Ahmad, "Peningkatan Pelayanan Haji di Tanah Suci" dalam *Lokakarya Peningkatan Pelayanan Haji Indonesia*, Jakarta: Dirjen Urusan Haji, 1975.
- Panitia Renovasi Masjid Agung Palembang, *261 Tahun Masjid Agung dan Perkembangan Islam di Sumatera Selatan*, Palembang: Yayasan Masjid Agung Palembang, 2001.
- Peeters, Jeroen, *Kaum Tuo – Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Jakarta: INIS, 1997.
- Pertamina, *Perkembangan Kilang Plaju/Sungai Gerong (Kilang Musi) Kurun Waktu 1895-1995*, Jakarta: Perpustakaan Pusat Pertamina, 1995.
- Purwanto, Bambang, "Minyak dan Ekonomi di Keresidenan Jambi dan Palembang pada Akhir Masa Kolonial", dalam *Lembaran Sejarah*, Vol. I, No. 1, 1997.
- Ratnawati, Latifah, "Kebudayaan Palembang" dalam Achadiati Ikram (ed.), *Jati Diri yang Terlupakan Naskah-naskah Palembang*, Jakarta: YANASSA, 2004.
- van Sevenhoven, I.J., *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, Jakarta: Bharata, 1971.
- Wolters, O.W., "Studying Sriwijaya, dalam *JIBRAS* , Vol. 52 part 2, 1979.
- Woodward, Mark R., *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Tanjung, Ida Liliana, "Palembang dan Plaju: Modernitas dan Dekolonisasi Perkotaan Sumatera Selatan Abad ke-20", *Tesis*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana, 2006.
- Tim Departemen Agama RI, *Panduan Pelestarian Haji Mabruur*, Depag Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jakarta, 2006.

- Tim Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Bimbingan Manasik, Ziarah dan Perjalanan Haji*, Jakarta: Depag, 1990.
- Tim Republika, *Panduan Haji Aku Penuhi Panggilanmu Yaa... Allah*, Jakarta: Harian Umum Republika, 2006.
- Vredenburg, Jacob, "Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia", dalam Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Jakarta: INIS, 19997.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.
- Zed, Mestika, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Zulkifli, *Ulama Sumatera Selatan Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1999.

**Pendidikan dan Nasionalisme Keturunan Arab di Palembang
Pada Awal Abad Ke-20 sampai Berakhimya Kekuasaan Kolonial:
Suatu Tinjauan Sejarah
Oleh Jumhari**

A. Pendahuluan

Permulaan awal abad ke-20 merupakan sebuah zaman baru dalam politik kolonial, yakni diterapkannya politik etis. Lahirnya politik etis tidak terlepas dari kemenangan kaum liberal di negeri Belanda pada tahun 1870. Perubahan konstelasi kebijakan politik pemerintah kolonial memunculkan kesadaran untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pribumi sebagai bentuk pembayaran "hutang budi".¹ Zaman ini meminjam istilah Takashi Shiraisi² disebut sebagai "zaman bergerak" (*the age motion*). Semboyan dari zaman baru ini adalah spirit "kemajuan" yang menjadi simbol kegairahan bagi mereka yang menginginkan perubahan pada masa ini, yang secara eksplisit tercermin dari penggunaan kata-kata yang mengartikulasikan kemajuan seperti *voortgang*, *opheffing* (kemajuan), *ontwikkeling* (perkembangan) dan *opvoeding* (pendidikan) yang dibubuhkan dalam bahasa saat itu bersama *bervoederig van welvaart* (memajukan kesejahteraan). Tak pelak lagi semangat zaman etis adalah "kemajuan menuju modernitas" dalam arti perkembangan dibawah pengawasan Belanda dan "modernitas" seperti ditunjukkan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda dan dipahami sebagai peradaban barat. Dunia

¹ Makmun Abdullah dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Ditjarahnitra, IDSN, 1984/1985, hal.61.

² Takashi Shiraisi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Grafiti, 1997, hal. 35-36.

dan zaman ini sedang bergerak yang ditandai pula beroperasinya trem listrik di Batavia pada awal zaman ini.³

Perluasan dan kesempatan di bidang pendidikan bagi masyarakat pribumi, selain merefleksikan kebijakan politik etis pemerintah kolonial pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain merupakan usaha pemerintah Belanda untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik bagi kepentingan ekonomi dan industri mereka, terutama untuk menjadi tenaga administrator rendahan. Singkatnya meskipun terkesan sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat pribumi, namun tujuan utama yang sebenarnya adalah untuk melancarkan roda administrasi bagi kepentingan pemerintah kolonial semata.

Sebagaimana daerah lain di wilayah jajahan Hindia Belanda, di Palembang juga di buka lembaga pendidikan Barat oleh pemerintah Belanda, seperti ELS (*Europeesche Lagere Schoolen*) untuk masyarakat Eropa, HIS (*Holland-Indlandsche Schoolen*) sekolah untuk bumiputra dengan bahasa pengantar Belanda untuk kalangan bangsawan pribumi serta HCS (*Holland-Chineesche Schoolen*) untuk orang Cina. Pada tahun 1932 di Palembang terdapat 3 (tiga) buah ELS, 3 (tiga) buah HIS serta 1 (satu) buah HCS.⁴ Bagi komunitas keturunan Arab di daerah ini, didirikan *Arabieren Schoolen*, tercatat pada tahun 1902 terdapat 4 (empat) buah sekolah, kemudian berkembang pesat menjadi 23 (dua puluh tiga) buah pada tahun 1903. Sampai tahun 1910, jumlah sekolah tersebut bertahan, kemudian perlahan-lahan menurun pada tahun 1914. Kemunduran tersebut menurut Husni Rahim karena sejak tahun 1909 keinginan orang Arab untuk memasuki HIS cukup tinggi setelah di Palembang gagal dibentuknya sekolah Arab yang

³ *Ibid.*

⁴ Makmun Abdullah dkk, *op.cit*, hal.

menggabungkan kurikulum agama dan umum seperti Jamaitul Khair di Batavia (Jakarta).⁵

Permulaan abad ke-20 dipandang juga sebagai periode bangkitnya kesadaran politik bangsa-bangsa Asia dari imperialisme bangsa Barat. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, membuka mata bangsa Asia bahwa superioritas Barat yang selama ini menjadi mitos bangsa yang paling berkuasa menjadi sirna seketika. Bangkitnya nasionalisme di beberapa Negara Asia seperti India, Filipina serta Indonesia, terlepas dari spirit kemenangan Jepang atas Rusia, hal yang tidak boleh dinafikan dalam konteks terbentuknya nasionalisme di Indonesia adalah pendidikan yang menjadi instrumen penting bagi munculnya kesadaran politik kebangsaan kita.

Lahirnya organisasi kebangsaan Boedi Oetomo yang dirintis oleh beberapa mahasiswa sekolah kedokteran STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Arsten*) dari komunitas elit Jawa, pada gilirannya mengilhami pula bagi munculnya gerakan serupa dari kelompok etnik lain, termasuk mereka yang berasal kelompok Timur Asing, seperti etnik Cina yang melahirkan gerakan politik *Tiong Hoa Hak Tong* (THKK-Perhimpunan Tionghoa) serta PAI (Partai Arab Indonesia).⁶

Dalam konteks lokal- Palembang- kelompok komunitas keturunan Arab disini mendirikan beberapa organisasi sosial seperti Al Ihsan (1907) yang bergerak dalam bidang pendidikan, maupun cabang dari Jamiat Khair dan Al Irsyad yang merupakan organisasi sosial kependidikan yang

⁵ Husni Rahim, *Sistem Otoritas Administrasi Islam, Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial Belanda*, Jakarta: Logos, 1988, hal. 175.

⁶ Jumhari dkk, *Arab Palembang Dari Masa Kesultanan Sampai Kolonial Belanda, Suatu Kajian Sejarah Sosial*, Padang: BKSNT, 2006, hal. 82-83.

berpusat di Batavia (Jakarta).⁷ Munculnya beberapa organisasi kependidikan dalam internal masyarakat keturunan Arab di Palembang tidak terlepas dari adanya fragmentasi dan segmentasi dari kelompok mereka sendiri. Mereka yang menganggap sebagai kelompok *sayid* (bangsawan) dan *non-sayid* memiliki orientasi yang berbeda termasuk dalam kecenderungan orientasi nasionalisme *vis a vis* penguasa kolonial Belanda. Golongan Sayid yang ingin mempertahankan tradisi leluhurnya dan status istimewa mereka dikalangan komunitas keturunan Arab mengeluarkan mereka yang tidak setuju dengan keinginannya dari organisasi Jamiat Khair. Hal ini pada akhirnya mendorong kelompok yang berpandangan berbeda membentuk organisasi baru-Al Irsyad-untuk menampung kegiatan mereka selepas dikeluarkan dari Jamiat Khair. Mereka yang bergabung kedalam organisasi Jamiat Khair cenderung untuk mempertahankan *status quo*, sedangkan kelompok Al Irsyad menginginkan pembaharuan serta akomodatif dengan kepentingan Islam masyarakat pribumi, hal ini yang pada akhirnya mempengaruhi orientasi pemilihan lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka.⁸

Penelitian ini berusaha menelusuri terbentuknya orientasi sosial politik dan nasionalisme komunitas keturunan Arab di Palembang dalam konteks pergerakan nasional yang menjadi ciri umum dinamika masyarakat Indonesia pada permulaan abad ke-20, yang pada gilirannya memberikan corak dan warna tersendiri dalam konteks sejarah nasional maupun lokal. Persoalan seperti bagaimana lembaga pendidikan dan nilai-nilai pengajaran yang berkembang didalamnya memberikan kontribusi bagi lahirnya mentalitas yang bercorak kebangsaan menjadi salah satu isu utama dari penelitian ini.

⁷ Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal. 124-126.

⁸ Uraian mengenai hal ini bisa dibaca dari karya Bisri Affandi, *Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943), Pembaharu dan Pemumi Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999.

Penelitian ini mengambil batasan spasial, kota Palembang dan kawasan sekitarnya, sedangkan batasan temporalnya dari permulaan awal abad ke-20 sampai berakhirnya kekuasaan Belanda. Permulaan awal abad ke-20 dipandang sebagai titik awal bagi lahirnya spirit kemajuan akibat diterapkannya kebijakan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan batasan akhir permasalahan yakni masa berakhirnya kekuasaan Belanda dengan argumentasi bahwa berakhirnya intervensi penguasa terhadap persoalan kemasyarakatan. Akan tetapi batasan temporal tidaklah bersifat kaku, karena fakta dan peristiwa sejarah bagaimanapun merupakan suatu hal yang sifatnya berkesinambungan. Ada beberapa permasalahan yang cukup aktual untuk dibahas dalam kajian ini, antara lain :

- a. Bagaimana hubungan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda bagi terbentuknya orientasi sosial politik dan nasionalisme dikalangan komunitas keturunan Arab di Palembang, khususnya pada lembaga pendidikan dalam konteks pergerakan nasional pada permulaan abad ke-20 sampai berakhirnya kekuasaan pemerintah kolonial?
- b. Bagaimana lembaga pendidikan dan nilai-nilai pengajaran yang berkembang didalamnya memberikan kontribusi bagi lahirnya mentalitas yang bercorak kebangsaan pada masa ini.

B. Politik Etis, Pergerakan Nasional, Organisasi Sosial Politik dan Budaya di Palembang

1. Politik Etis dan Pergerakan Nasional

Tahun-tahun permulaan abad ke-20 ditandai dengan mulai kukuhnya kekuasaan negara-kolonial Belanda setelah

berakhirnya pasifikasi terhadap daerah-daerah koloni luar Jawa serta perekonomian yang berkembang pesat pada periode ini. Dengan ini berarti *Pax Nerlandica* telah berhasil diwujudkan oleh penguasa kolonial, yang diikuti pula dengan perkembangan perdagangan.⁹ Kemakmuran yang diperoleh oleh pemerintah kolonial-Belanda terlihat kontras dengan kemiskinan dan kesengsaraan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat pribumi. Melihat kondisi masyarakat Hindia-Belanda yang memprihatinkan, sebagian golongan intelektual di negeri Belanda mulai menyuarakan tentang perlunya pemerintah kolonial untuk memperhatikan dan melakukan tindakan nyata dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Lahirnya sikap moral dari pemerintah Belanda untuk memperbaiki masyarakat pribumi, yang kita kenal dengan 'politik etis' pertama kali dicetuskan oleh van Deventer, setelah kunjungannya ke Hindia Belanda serta bergabungnya dia dengan Partai Radikal Demokrat pada tahun 1897.¹⁰

Perubahan iklim politik di negeri Belanda semakin mempercepat bagi dorongan untuk merealisasikan politik etis ini, apalagi hasil pemilu tahun 1901 telah mengubah dunia politik di negeri Belanda. Dimana partai Liberal yang selama lima puluh tahun terakhir berkuasa di Belanda mulai mengubah haluan politik untuk lebih mengedepankan perbaikan dengan negeri jajahan sejalan dengan pesan Ratu Belanda yang mengemukakan tentang suatu "kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia Belanda" yang disampaikan dalam pidatonya pada bulan September 1901. Pesan kerajaan ini dilanjutkan dengan pernyataan keprihatinan terhadap keadaan ekonomi yang

⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 37.

¹⁰ Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2009, hal. 54.

buruk di Hindia-Belanda dan meminta agar dibentuk sebuah komisi untuk memeriksa keadaan ini.¹¹

Usaha negara induk (negeri Belanda) untuk menjalankan kebijakan baru, mulai terlihat nyata, ketika pada bulan September 1902 A.W.F. Indenburg ditunjuk sebagai Menteri Urusan Jajahan menggantikan T.A.J Van Asch van Wijk. Indenburg, seorang opsir militer yang baru saja pulang dari Hindia-Belanda, menunjukkan diri sebagai seorang tangguh dan memiliki pemikiran moderat terhadap perluasan usaha misi di daerah jajahan.

Awal abad kedua puluh, selain dipandang sebagai titik awal atau zaman baru dalam politik kolonial. Semangat zaman etis diidentikan pula dengan hal-hal yang berbau "kemajuan" seperti dalam kata-kata yang menandakan kemamnuan seperti *voortgang*, *opheffing* (kemajuan), *ontwikkeling* (perkembangan) dan *opvoeding* (pendidikan). Zaman baru sebagaimana dikemukakan secara cermat oleh Furnivall, merupakan zaman ekspansi, efisiensi dan kesejahteraan. Seluruh wilayah Hindia Belanda yang terbentang dari pulau Sabang sampai Merauke telah berada dibawah dikontrol Belanda dan politik *rust en orde* telah berhasil ditegakkan oleh penguasa kolonial di Hindia Belanda.

Perluasan pendidikan gaya Barat adalah tanda resmi dari politik etis. Pendidikan ini tidak hanya sekedar menghasilkan jenis tenaga kerja yang dipekerjakan oleh negara dan perusahaan swasta Belanda. Akan tetapi juga berperan untuk mengangkat kaum bumi putra dan menuntun mereka menuju modernitas serta 'persatuan antara Timur dan Barat'.¹² Sehingga pada penghujung abad sembilan belas dan

¹¹ *Ibid.*, hal. 55.

¹² Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997, hal. 37.

khususnya dua dekade pertama abad ini, pendidikan gaya Barat berkembang luas.

Pada tahun 1893 telah berdiri dua jenis sekolah dasar untuk masyarakat bumiputra, yang pertama *Eerste Klass Inlandsche Scholen* (Sekolah Bumi Putra Angka Satu) untuk anak-anak priayi dan *Tweede Klass Inlandsche Scholen* (Sekolah Bumi Putra Angka Dua) untuk anak-anak dari kalangan rakyat biasa. *Eerste Klass Inlandsche Scholen* (Sekolah Bumi Putra Angka Satu) terdiri dari dua macam:

- a. Sekolah Cina-Belanda (*Holandsche Chineescheshool*), yaitu sekolah rendah untuk anak-anak keturunan Timur Asing, khususnya keturunan Cina. Lama pendidikan 7 tahun dan mulai didirikan sekolah ini pada tahun 1907.
- b. Sekolah Bumiputra-Belanda (*Holandsche Inlandsche Scholen*), yaitu sekolah rendah untuk golongan penduduk pribumi Indonesia, khususnya dari kalangan bangsawan, pegawai pangreh praja dengan lama pendidikan 7 tahun dan mulai berdiri sekolah ini sejak tahun 1914.

Sedangkan *Tweede Klass Inlandsche Scholen* (Sekolah Bumi Putra Angka Dua) dengan bahasa pengantar bahasa daerah terdiri dari:

- a. Sekolah Bumiputra kelas dua dengan lama pendidikan 5 tahun.
- b. Sekolah Desa (*volkschool*) bagi klangan bumi putra lainnya dengan lama pendidikan 3 tahun dan mulai didirikan pada tahun 1907.

- c. Sekolah Lanjutan (*vervolgsschool*), lama pendidikan 2 tahun dan merupakan lanjutan dari sekolah desa, pertama kali didirikan pada tahun 1914.¹³

Jelasnya selama diberlakukannya politik etis sampai tahun 1920, jumlah sekolah bumi putra baik yang dikelola oleh pemerintah kolonial maupun swasta serta peserta didiknya mengalami perkembangan yang cukup berarti. Terlepas hal ini merupakan keberhasilan politik etis atau merupakan bentuk emansipasi dari masyarakat pribumi untuk mengejar kemajuan melalui lembaga pendidikan, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1. Jumlah Sekolah Bumiputra Angka Dua dan Murid

Jumlah Sekolah				Jumlah Siswa		
Tahun	Negara	Swasta	Total	Negara	Swasta	Total
1900	551	836	1387	64.742	36.431	98.173
1905	674	1.286	1.942	95.075	66.741	161.816
1910	1.021	2.106	3.127	133.425	99.204	232.629
1915	1.202	2.198	3.400	186.300	134.644	320.974
1920	1.845	2.368	4.213	241.414	116.556	357.970

Sumber: Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997, hal. 37.

Perluasan pendidikan gaya barat selain merefleksikan politik etis pemerintah kolonial, juga merupakan usaha penguasa kolonial untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik

¹³ Depdikbud, *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hal. 112-114.

bagi kepentingan ekonomi dan industri serta tenaga administrasi di tingkat rendah. Jelasnya bahwa meskipun politik etis dibungkus dengan dalih untuk kepentingan memperbaiki kesejahteraan masyarakat pribumi, akan tetapi tujuan utama dari kebijakan politik etis adalah untuk melayani kepentingan birokrasi pemerintah kolonial semata.¹⁴

Mulai tahun 1900 '*wijken en passenstelsel*' untuk orang Cina dihapus, penghapusan ini sebagian karena protes keras dari pihak Cina, yang merasa didiskriminasikan dan diberlakukan berbeda dengan orang Jepang yang posisinya disejajarkan dengan orang Barat di Hindia Belanda. Dan sebagian lagi, oleh karena adanya kebutuhan investasi modal Belanda di daerah pedalaman yang membutuhkan orang Cina sebagai perantara.¹⁵

Munculnya politik etis pada awal abad kedua puluh, tidak hanya melahirkan kebijakan pembaharuan di bidang politik maupun ekonomi. Kebijakan ini juga melahirkan sikap perlawanan dari kelompok pribumi seiring dengan meningkatnya perasaan keislaman yang menguat sebagai pengikat identitas kolektif masyarakat pribumi sebagai antitesis dari politik etis yang berfondasikan pada spirit etis agama Kristen Protestan.

Pada tahun 1909 kelompok misionaris dengan cepat meluaskan kegiatan mereka di Kepulauan Nusantara. Misi-misi yang beroperasi dalam ruang lingkup yang luas untuk pengembangan kesejahteraan dan ekonomi di tengah masyarakat pribumi mendapat bantuan dari negara. Pembatasan jumlah dan tempat misi dihapuskan, sehingga daerah baru dari di kepulauan ini pun terbuka bagi kegiatan

¹⁴ Jumhari dkk, *Arab Palembang, dari Masa Kesultanan Sampai Kolonial Belanda, Suatu Tinjauan Sejarah Sosial*, Padang: BKSNT Padang, 2006, hal. 78.

¹⁵ Hamid Algadri, *Islam dan Keturunan Arab Dalam Pemberontakan Melawan Belanda*, Bandung: Mizan, 1988, hal. 154.

misi Kristen. Kelompok misionaris mendirikan lembaga pendidikan, bahkan kemudian lembaga pendidikan yang didirikan kelompok ini diakui oleh pemerintah dan mendapat subsidi pemerintah sebagaimana dengan sekolah yang secara resmi oleh pemerintah kolonial.¹⁶

Islam menjadi bentuk pertahanan masyarakat pribumi dari gempuran politik dan budaya yang dilakukan penguasa kolonial melalui kebijakan politik. Menguatnya perasaan keislaman terhadap politik pengkristenan atas dalih penerapan politik etis memperoleh momentum yang tepat dengan kembalinya kaum cendekiawan muslim yang baru pulang dari Timur Tengah, seperti Haji Ahmad Dahlan yang kemudian merintis organisasi pembaharuan Islam bernama *Muhammadiyah* pada tahun 1912 di Yogyakarta. Bahkan beliau sendiri tidak segan untuk meniru program praktis yang dilakukan oleh kelompok misionaris, seperti mendirikan sekolah dan klinik kesehatan atau lembaga kemanusiaan lainnya.

Momentum kebangkitan Islam memperoleh legitimasi secara luas dikalangan masyarakat pribumi dengan didirikannya Sarekat Islam pada tahun 1912 di Surakarta yang dipelopori oleh H. Samanhudi, seorang saudagar berpengaruh dan berpikiran maju pada periode ini. Sarekat Islam pada tahun-tahun awal berdirinya bersikap frontal terhadap penguasa maupun kepada kelompok Cina yang menguasai perekonomian Hindia Belanda. Sehingga SI pada periode ini, dalam pandangan pemerintah kolonial sering dikaitkan dengan munculnya radikalisme masyarakat pribumi, seperti gerakan kekerasan; perkelahian jalanan dan pemboikotan ataupun menunjukan sikap anti Cina di wilayah Solo.

Ekspansi Sarekat Islam keluar dari wilayah Surakarta ke wilayah lain dipulau Jawa dan kemudian di luar Jawa

¹⁶ Robert van Niel, *op.cit.*, hal. 127.

termasuk Palembang, tidak terlepas dari peran seorang tokoh dan sekaligus pemimpin kharismatik SI, HOS. Cokroaminoto. Pada awalnya propaganda SI dan penyebaran luasan SI dilakukan melalui hubungan pribadi utusan. Kemudian SI mulai mendapat tempat dikalangan pribumi dengan dukungan dari pers lokal seperti surat kabar Sarotomo, Oetosan Hindia Belanda (Surabaya), Sinaar Jawa (Semarang), Kaoem Moeda (Bandung) dan Pantjaran Warta di Batavia yang secara defacto menjadi organ SI. Sehingga perlahan-lahan dibeberapa kota di Jawa, didirikan afdeling SI seperti di Kudus, Surabaya, Bandung dan Batavia.¹⁸ Bahkan ketika SI melakukan pertemuan di Surabaya, organisasi telah memiliki 15 cabang dengan jumlah anggota 80.000 orang. Perluasan SI yang besar ini, pada akhirnya mempengaruhi sikap pemerintah kolonial terhadap SI serta struktur kepemimpinan SI.

Awal abad kedua puluh juga menandai lahirnya semangat nasionalisme, baik dikalangan masyarakat pribumi maupun kelompok masyarakat keturunan Cina dan Arab di Hindia Belanda. Bila dikelompokkan pribumi lahir organisasi kemasyarakatan seperti Saraekat Islam, maka di kalangan Cina kita mengenal *Tiong Hoa Hak Kong* (THHK). Maka dikalangan masyarakat keturunan Arab lahir perkumpulan seperti *Indo Arabisch Verbond* (IAV) yang dirintis oleh seorang keturunan Arab-Ambon, M.B.A. Alimudi.¹⁷

Kemudian masyarakat keturunan Arab di Hindia Belanda yang cenderung lebih dekat dengan organisasi kebangsaan pribumi mendirikan Partai Arab Indonesia (PAI) yang dipelopori oleh A.R. Baswedan. Jika organisasi kepemudaan kita pada tanggal 28 Oktober 1928 mengikrarkan Sumpah Pemuda, maka para pemuda keturunan Arab di

¹⁷ Takashi Shiraishi, *op.cit*, *jal.* 66-67.

¹⁸ Jumhari dkk, *op.cit.*, hal. 83.

Hindia Belanda, mengikrarkan Sumpah yang sama yakni Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab yang bunyinya:

1. Tanah Air Peranakan Arab adalah Indonesia.
2. Karenanya mereka harus meninggalkan kehidupan menyendiri (isolasi).

Kita belum memperoleh informasi yang pasti, tentang sejauh mana pengaruh organisasi ini diluar kota Batavia, kota-kota di pulau Jawa maupun kota-kota lain diluar pulau Jawa, termasuk kota Palembang. Sedangkan bila kita bercermin dari organisasi Islam seperti SI, yang telah masuk ke daerah Palembang pada periode awal abad keduapuluh melalui pemimpin mereka, H.O.S. Cokroaminoto, tentunya fenomena ini saling berkaitan.

Pemimpin kharismatik SI ini datang ke Palembang untuk memperkenalkan organisasinya kepada organisasi masyarakat Palembang, seperti Al Ihsan dan Tjahaya Budiman. Al Ihsan merupakan organisasi perkumpulan sosial milik orang Arab yang bergerak dalam pendidikan dan aktifitas kemasyarakatan yang berdiri pada tahun 1907, sedangkan Tjahaya Budiman adalah organisasi serupa milik masyarakat pribumi.

2. Munculnya Organisasi Sosial Politik dan Budaya di Palembang

Masuknya SI di Palembang menandai kebangkitan semangat keagamaan (Islam) di daerah ini. Pada bulan November 1913 cabang SI telah didirikan di kota ini, yang kemudian secara cepat merambat ke wilayah pedalaman. Selama tiga tahun pertama, SI cukup berhasil menarik simpati masyarakat Islam disini, hal terbukti dari kemampuan para pimpinan gerakan ini untuk memobilisir dengan memakai

simbol-simbol keagamaan. Terbukti pada tahun 1915 dan 1916, mesjid-mesjid di Karesidenan Palembang ramai dikunjungi orang. Bahkan di wilayah *Uluu* Palembang, penduduk desa yang dulu tidak menghiraukan kewajiban ritual, mereka kelihatan ramai mengunjungi mesjid sewaktu shalat Magrib dan Isya.¹⁹

Akan tetapi mobilisasi massa ini tidak berlangsung lama, sebab kekuatan dari pengaruh kebangkitan Islam, belum mampu menerobos dan mengimbangi budaya lokal. Bahkan ketika kegiatan propaganda dan agitasi dari SI berhenti pada tahun 1916, maka minat masyarakat pedesaan untuk melaksanakan ritual berkurang pula. Jika secara politik belum mampu mengubah kebudayaan yang lama, karena dihentikan kebiakan birokrasi kolonial, maka hal ini berbeda dengan kekuatan ekonomi yang ada.

Kekuatan ekonomi pada pada masa ini mampu mendobrak status quo. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pribumi pada tahun 1925 telah mendorong hasrat masyarakat Palembang untuk memperluas pengetahuan keagamaan mereka. Sehingga pada masa keemasan karet (*rubber boom*), kontrolir Ogan Ilir mencatat pengamatannya sebagai berikut:

"Lambat tetapi pasti, kehidupan beragama kelihatan lebih intensif. Misalnya sekolah-sekolah agama lebih ramai dikunjungi, begitu pula mesjid-mesjid, sedangkan naik haji pasti akan dilakukan banyak orang, sekiranya keadaan di Tanah Suci tidak begitu rupa, sehingga praktis tidak mungkin untuk melakukan perjalanan ke sana."

Hal yang menarik fenomena ini adalah tingginya kemampuan ekonomi, ternyata pada saat bersamaan paralel

¹⁹ Jeroan Peters, *op. cit.*, hal. 145.

dengan hasrat untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka. Munculnya fenomena ini, tidak terlepas dari adanya modus imitasi kebudayaan yang telah berkembang dikalangan elit perkotaan sejak abad ke-19 yang berhasil memaksakan kewajiban ritual agama ke pada lapisan sosial bawah. Ternyata dibalik proses Islamisasi di Palembang, uang memegang peran utama sebagai motor penggerak.

Selain itu ada kenyataan sosial lain yang justru bisa menjelaskan munculnya kegairahan yang meluap dari penduduk pribumi untuk memperdalam ke-Islaman mereka, yang ternyata bersumber dalam kebudayaan masyarakat Palembang sendiri. Sebab kekayaan dalam pandangan mereka tidak cukup untuk menjamin prestis sosial. Dalam masyarakat perkotaan yang sepenuhnya didominasi oleh elit Hadramaut (keturunan Arab), uang hanya menjadi lambang sosial, jika modal ekonomi ditransformasikan menjadi modal religius.

Dasar materiil proses ini adalah prasarana agama, seperti mesjid, langgar dan sekolah agama yang didirikan oleh mereka yang kaya. Patronase wakaf ini sepenuhnya bergantung kepada para pedagang elit yang umumnya mereka peka terhadap dinamika zaman. Akibatnya meningkatnya kemakmuran masyarakat Palembang karena hasil perkebunan karet dan kopi menjadi pemacu mereka untuk berlomba-lomba menjadi pelindung agama dengan cara menginvestasikan kekayaan mereka kepada kegiatan keagamaan ini.

Persaingan diantara orang kaya ini di ibukota Palembang menyebabkan perubahan struktural di bidang pengajaran agama. Bila sebelum tahun 1925 pengajaran agama di Palembang masih bersifat tradisional, dimana pola ajaran agama Islam disampaikan di mesjid dan musholla disesuaikan usia murid yang mengikutinya. Para murid diajarkan mengaji Al Qur'an tanpa ditekankan untuk mengetahui bacaan yang benar dan pemahaman isinya.

Setelah tahap ini, para murid (santri) belajar bahasa Arab, terutama kemmapuan untuk menghafal teks atau naskah yang sederhana. Setelah mereka menguasai bahasa Arab, baru selanjutnya mereka diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran kepada ulama terkemuka, yang mempelajari kitab kuning beserta tafsir dalam bahas Melayu.

Mulai tahun 1900-an model pengajaran tradisional mulai dikritik, karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan dikhawatirkan tidak mampu bersaing dengan dengan lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Agar bisa berkompetisi dengan lembaga pendidikan formal kolonial, para guru agama Islam mulai mengajarkan dengan melakukan pembaharuan kurikulum maupun pengajarannya. Sebab pada masa ini, tepatnya pada paruh pertama abad kedupuluh di Jawa dan di Minangkabau telah berdiri madrasah yang memberikan pelajaran dikelas.²⁰

Di lembaga pendidikan dengan sistem baru ini, pelajaran bahasa Arab mendapat perhatian lebih banyak, dan untuk menunjang kebutuhan kelas disediakan pula perlengkapan dan kebutuhan bahan ajar, seperti papan tulis dan bangku kelas. Selain itu lembaga pendidikan baru, juga mengadopsi kurikulum mata pelajaran umum, seperti pelajaran sejarah dan ilmu bumi. Pendidikan dengan sistem baru ini mulai diterapkan, setelah adanya dorongan dari organisasi yang menamakan diri " Perkoempoelan Dagang Islam Palembang (PDIP)" pada tahun 1924.

Organisasi ini, pada pertemuan pertama mereka, menghasilkan keputusan mengenai tujuan pendirian perkumpulan, yakni berusaha memperjuangkan kepentingan ekonomi anggota , sekaligus meningkatkan kualitas

²⁰ *Ibid.*, hal. 146.

pengajaran agama Islam di Palembang.²¹ Pada tahun berikutnya mulai dijalankan usaha pengumpulan dana, dan dengan ini PDIP mulai mendirikan madarasah di kampung Sekanak. Madarasah ini- Madarasah Diniyah Aliyah- menjadi contoh yang baik dari hubungan erat antara perdagangan dan lembaga Islam, akan tetapi memperlihatkan secara nyata dari peranan dan bentuk perlindungan dalam proses Islamisasi, dan persaingan antara pelindung agama yang meningkat pesat selama periode booming ekonomi..

Pada awalnya proyek pendirian madrasah memperoleh respon yang tinggi dan antusiasme dari masyarakat Palembang. Sayangnya semangat mulai memudar, sehingga pembiayaan dan kebutuhan dana sepenuhnya bergantung pada bantuan dari Firma H. Akil, salah seorang pengusaha pribumi yang cukup disegani pada masa ini. Firma H. Akil adalah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan kopi dan karet di Palembang. Bantuan yang besar dari kelompok usaha ini, pada akhirnya mereduksi peran PDIP, sehingga nama PDIP secara perlahan dan halus diganti menjadi "Perkoempoelan Dagang Bangsa Melayoe (PDBM)."²²

Di kalangan komunitas keturunan Arab di Palembang sendiri, usaha untuk mendirikan lembaga pendidikan, mulai dirangsang dan didorong dengan adanya persaingan prestisius mereka dengan kompetitornya, yakni minoritas Cina. Pada tahun 1907, beberapa keluarga keturunan Arab di Palembang mendirikan perkumpulan bernama "Al Ihsan". Perkumpulan ini mendirikan sekolah yang ditujukan untuk kepentingan kalangan sayid. Selain sekolah Al Ihsan, pada tahun 1914 didirikan pula Madrasah Arabiyah di Kampung 13 Ulu, yang mendapat sokongan dari Keluarga Al Munawar, yang termasuk golongan sayid terpandang di Palembang pada masa ini. Mereka yang bersekolah di madrasah ini, pada

²¹ *Ibid.*, hal. 147.

²² *Ibid.*,

umumnya berasal dari kalangan keturunan Arab yang tinggal disekitar Kampung 13 Ulu. Perkembangan dua madraasah ini, pada perkembangannya kurang menarik minat dari masyarakat Palembang, karena metoda pembelajaran yang masih bersifat tradisional.

Selama dua puluh tahun setelah berdirinya Al Ihsan, melihat perkembangan pendidikan yang dirasakan lesu, membuat sekelompok anggota muda dari golongan keturunan Alawiyyin, terutama mereka yang berasal dari bagian Ilir kota membentuk panitia baru untuk memperbaiki model pengajaran yang ada. Mereka mulai menerapkan sistem kelas, berdasarkan kelompok umur, kepada anak laki-laki dan perempuan di tingkat pendidikan dasar (ibtidaiyah). Di bagian Ulu Kota dengan dimotori oleh Sayid Muhammad Almunawar, yang pada tahun yang sama (1927), mulai melakukan reorganisasi terhadap Madrasah Arabiyah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mereka menadatkan guru dari jamiat al Khair dari Betawi serta memasukan pengajaran bahasa Belanda dan Inggris di dalam kurikulum Madrasah Arabiyah.

Meskipun madrasah-madrasah yang didirikan sesudah tahun 1925 berhasil melakukan pembaharuan dibidang pendidikan agama, jika ditinjau dari segi sosial, lembaga ini masih merupakan model lama dari sistem pendidikan yang berkembang lama dari abad sebelumnya (abad 19). Ciri umum dan khas dari lembaga pendidikan ini, yakni orientasi dan kelangsungan hidupnya bergantung sepenuhnya dari adanya pelindung, terutama penyandang dana, seperti terlihat dari beberapa figur menonjol misalnya Sayid Al Munawar.

Bila dikalangan keturunan Arab di Palembang, keluarga Al Munawar menjadi tokoh panutan mereka. Pada tempat yang sama, seorang pedagang pribumi yang sukses seperti Kemas Akib, seorang pedagang karet dan kopi yang memiliki kekayaan dari hasil penguasaan hasil hutan seperti

karet, kopi, damar dan rotan dengan pusat jaringan bisnisnya berpusat di Pasar 16 Ilir. Keterkaitannya dengan bidang pengajaran agama, dimulai pada tahun 1926, ketika H. Akib menyediakan rumahnya untuk pengajaran agama. Melihat animo masyarakat yang besar, H. Akib bersama karibnya Kiagus Toha, seorang komisioner pedagang karet berusaha mengumpulkan dana untuk membangun gedung sekolah. Berkat kerja kerasnya, akhirnya terkumpul 10.000 gulden yang kemudian digunakan untuk pembangunan sekolah ini. Sekolah ini rampung pada tahun 1929, yang diberi nama Madrasah Quraniyah.¹⁴⁵

Untuk menjalankan operasional sekolah baru ini, Madrasah Quraniyah, menunjuk seorang Kiai Muda yang baru pulang dari Mekah, yakni H. Muhammad Yunus, yang sejak tahun 1925 sudah mulai mengajar di langgar Kampung 15 Ilir. Keterlibatan Kyai Muda pada sekolah ini, dipererat dengan perkawinannya dengan salah satu putri Kemas H. Akib. Untuk merekrut murid sekolah, jaringan firma H. Akib berperan aktif dalam hal ini. Madrasah ini terutama dikunjungi oleh para murid yang berasal dari Kampung 15 dan 16 Ilir.

Perubahan struktural di bidang pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada masyarakat perkotaan saja. Karena mulai tahun 1925, di daerah pedesaan juga mulai didirikan sekolah agama dengan model baru. Meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai akibat adanya booming karet dan kopi, pendidikan Islam di pedalaman mengalami kemajuan pesat, yang memiliki dinamika tersendiri, yang berbeda dengan perkembangan yang terjadi di Palembang. Hal yang menarik wilayah Ulu, yang selama ini distigmakan dengan daerah terbelakang, karena kurangnya pengetahuan agama penduduknya, ternyata merespon perubahan ini juga.

²³ *Ibid.*, hal. 149.

Ilustrasi menarik di gambarkan oleh Jeroen Peters dengan mengutip kisah pada salah satu novel karangan Soetan Takdir Alisyabana yang terbit pada tahun 1932 dengan judul "*Dian Jang Ta'Koendjoeng Padam*". Dalam novel dikisahkan bagaimana setting sosial budaya Palembang 1930-an mencerminkan realitas sosial budaya masyarakatnya, dimana ada jarak sosial yang jelas antara masyarakat perkotaan-Palembang- dengan warga pedesaan (Ulu), seperti tercermin dari tokoh Molek, seorang putrid Raden Mahmud yang menjalin cinta dengan Jasin, orang Ulu dari pedalaman Lematang Ilir. Dimana kisah percintaan mereka harus terhalang oleh sebuah tembok yang bernama 'perbedaan status sosial'. Sehingga kenyataan ini terasa pahit bagi orang Ulu, karena sekaya apapun orang Ulu dimata orang Palembang tetap dipandang rendah. Lewat novel ini, diungkapkan secara sarkasme melalui ungkapan tokoh Raden Mahmud, ayah si Molek, yang menolak pinangan si Yasin, seperti terlihat pada bagian isi novel karangan Soetan takdir Alisyabana dibawah ini:

Geli hatikoe memikirkan orang-orang tadi itoe. Bagaimanakah perasaannya. Soenggoeh dalam waktoe yang achir ini orang Oeloen telah banjak jang ta' mengetahoe daratan lagi. Jang bekerdja dikantor memakai badjoe dan tjelana keras, telah merasa dirinja selakoe radja. Jang sekongjong-kongjong kaja karena para ataoe kopi, telah ta' tahoe akan dirinja lagi: seloeroeh doenia ini rasa-rasa akan dapat dibelinja dengan oengnja.

Novel diatas dengan jelas menggambarkan adanya disparitas yang tajam antara masyarakat perkotaan dan pedalaman yang terlihat bersifat asimetris. Konstruksi merepresentasikan adanya perbedaan yang tajam dalam konteks konstruksi kebudayaan. Dimana simbol-simbol modernitas yang mewujud dalam pakaian serta gaya hidup

lainnya menjadi ciri umum dari masyarakat kota, yang kemudian secara perlahan ditransformasikan ke daerah pedesaan yang pada akhirnya melahirkan pertarungan baru dalam konteks budaya. Hubungan ini dengan asimetris terlihat jelas, bagaimana masyarakat pedalaman seperti di Baturaja, Muara Enim, Lahat dan Muara Klingi yang menjadi arena pertarungan budaya menghadapi sikap sinis dari pedagang kota yang menganggap diri mereka lebih tinggi secara sosial. Meningkatnya kesejahteraan penduduk pedalaman akibat booming karet dan kopi, tidak serta mensejajarkan mereka dengan saudara kota mereka dalam konteks konstruksi budaya ini.

Pendirian sekolah-sekolah di daerah pedesaan ini, selain untuk kebutuhan peningkatan angka partisipasi penduduk dalam bidang pengajaran agama Islam. Pada sisi lain terkandung maksud tersembunyi, yakni usaha emansipasi dari penduduk pedesaan untuk menolak superioritas kebudayaan Palembang. Proses ini terutama melalui rekonstruksi pencitraan menyangkut emansipasi masyarakat pedesaan terhadap kemajuan zaman, melalui media massa, misalnya berita tentang pembukaan sekolah-sekolah baru di daerah pedalaman yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kolonial, secara eksplisit hal menolak tesis bahwa masyarakat pedalaman terbelakang.

Sekolah pertama yang dibangun dengan spirit pembaharuan ini adalah Madrasah Islam di Tanjung Raja pada tahun 1925, yang diresmikan oleh kontrolir Ogan Ilir. Pembangunan gedung sekolah ini, yang terdiri dari tiga ruang belajar, bisa terlaksana atas bantuan Pangeran Malian, mantan kepala marga Pegagan Ilir Suku II. Tindakan teladan dari mantan kepala marga ini, pada akhirnya diikuti oleh penduduk lainnya, seperti perkumpulan pedagang pasar Sekayu yang mendirikan sekolah dengan nama yang sama.

Bahkan di daerah terpencil, tidak mau ketinggalan dari perkembangan ini, di daerah Ulu, daerah Pagar Dewa (Muara Dua) didirikan cabang sekolah Al Irsyad pada tahun 1927. Selanjutnya pada tahun 1929 sekolah agama didirikan di Komereng Ulu dan Rawas. Dan pada tahun 1930, lembaga pendidikan agama semacam ini telah berdiri di daerah pedalaman lain, seperti Muara Dua, Lahat, Muara Enim dan Baturaja. Sehingga dengan begitu proses pelembagaan agama sesudah tahun 1925 telah memasuki tahap baru dengan adanya sekolah agama di daerah Iliran maupun Ulu Palembang.²⁴

Palembang merupakan salah satu kota yang menjadi titik pemberangkatan jamaah haji dari Hindia Belanda, selain kota-kota besar lainnya, seperti Makasar, Surabaya, Padang (Teluk Bayur), Jakarta (Tanjung Priok) dan Sabang. Jamaah haji dari daerah Palembang, pasca depresi ekonomi dunia tahun 1930-an perlahan-lahan mengalami penurunan. Pada akhir tahun 1920-an, tepatnya tahun 1927 jamaah haji dari Palembang pernah mencapai 6.921 orang, dibandingkan dengan keadaan pada awal-awal krisis dunia, dimana jamaah haji Palembang hanya tercatat 107 orang pada tahun 1932.

Paralel dengan perkembangan ibadah haji, minat pelajar dari Hindia Belanda untuk menuntut ilmu ke Mekah juga berfluktuansi seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Daerah Palembang merupakan salah satu tempat pengirim pelajar (*mukim*) terbesar ke Mekah setelah daerah Jawa Barat. Palembang tercatat mengirim 872 orang pelajar, Jawa Barat (908 oarang), Pantai Barat Sumatera (314 orang), Jawa Timur (194 orang) serta Bali dan Lombok (148 orang).²⁵

Booming ekonomi dan meningkatnya jamaah haji serta bertambahnya pelajar (*mukim*) dari Palembang yang menuntut

²⁴ *Ibid.*, hal. 151.

²⁵ *Ibid.*, hal. 153-154.

ilmu ke Mekah, berkontribusi pada tingkat penghayatan keagamaan (Islam), sehingga ketika demam pergerakan nasional yang berpusat di tanah Jawa, juga berpengaruh di Palembang. Organisasi besar keagamaan di Jawa seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Sarekat Islam.

Organisasi Muhammadiyah di Palembang, semula berkembang dikalangan kecil orang Jawa, yang datang ke Palembang sebagai bagian luapan dari kolonisasi orang Jawa di Lampung. Orang Jawa yang bermukim di Palembang memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan membuka kebun di tanah talang serta menjual sayuran dan buah-buahan di kota. Sehingga kampung tempat tinggal mereka disebut dengan Talang Jawa. Kampung ini terletak dibagian pinggir daerah Palembang, yang merupakan daerah pertanian pasang surut. Salah seorang perintis dan propaganda organisasi Muhammadiyah di daerah ini ialah H. Ridwan, seorang pedagang yang berasal dari *Kauman*, Kota Gede. Sebagai seorang pedagang yang berhasil, H. Ridwan mencoba memperluas jaringan dagang batik dan peraknya di Palembang. Selain H. Ridwan, aktivis, penyebar faham Muhammadiyah adalah Subono Purwawiyoto yang bekerja sebagai pegawai kantor pos Palembang. Sejak tahun 1928 mereka berkeliling dan mengadakan tabliq di Talang Jawa di salah satu rumah simpatisan mereka.²⁶

Syar Muhammadiyah di Palembang semakin berkembang dengan masuknya kelompok pembaharu lain, terutama dari daerah Sumatera Barat. Sebelum tahun 1920-an, karesidenan Palembang tidak termasuk "alam rantau Minangkabau". Keadaan ini berubah ketika booming karet, sehingga daerah Sumatera Selatan menjadi salah satu tujuan rantau pendatang dan pedagang Minang. Kebanyakan perantau datang ke Palembang melalui Bengkulu, dan sebageian mereka tinggal di dataran tinggi Bukit Barisan,

²⁶ *Ibid.*, hal. 167.

sebelum mereka meneruskan perantauan mereka ke Palembang. Di kota Palembang, mereka menjual barang besi berupa periuk, panci dan jarum. Karena pusat perdagangan di Palembang, yang berada di Pasar 16 Ilir telah dikuasai oleh pedagang Cina dan Arab yang memiliki modal besar. Maka kelompok pedagang Minang yang sebagian besar bermodal kecil, memilih menetap dan menjalankan usaha dagangnya di pasar Bukit Kecil di Kampung 26 Ilir, di pinggir kota Palembang.²⁷

Pelaku dan aktivis tidak hanya datang dari kelompok pedagang Minang saja, orang Minang yang bekerja sebagai pegawai pemerintah dan minyak bumi juga berpartisipasi bagi perkembangan Muhammadiyah, seiring dengan kebutuhan kelompok pekerja profesional dilapangan pemerintahan dan perusahaan minyak bumi. Kader Muhammadiyah terpenting dari Minang yang ikut merintis perkembangan organisasi ini, antara lain Muhammad Rusli (pegawai pos), kemudian yang cukup pengaruh, Zainal Abidin Jambek, putra ulama reformis Djamil Djambek dari Padang Panjang, yang bekerja di industri minyak di Plaju.

Setelah melewati tantangan sulit, termasuk dari kelompok ulama konservatif (golongan tua), maka pada bulan Januari 1931, mereka yang berpikir reformis dari kelompok *kaum mudo* dari Bukit Kecil, Talang Jawa dan 4 Ulu membentuk pengurus Muhammadiyah, dengan Zaenal Djambek ditunjuk sebagai ketuanya. Struktur kepengurusan dan anggotanya mencerminkan komposisi dari tiga kelompok etnik, yakni orang Jawa, Minang dan Melayu Palembang.

Salah satu orang yang ikut mendorong perkembangan organisasi ini adalah H. Anang Soleh, cucu dari H. Akil, salah seorang pengusaha pribumi ternama pada masa ini. Berkat bantuannya, Muhammadiyah berhasil mewujudkan

²⁷ *Ibid.*, hal. 169.

pembangunan HIS di Kampung Kepandean di sisi Ilir kota. Letak sekolah berada disekitar pasar Bukit Kecil, yang merupakan tempat berkumpulnya konsesntersi pedagang dan pengikut dari Minang. Setelah berhasil membangun sekolah di dekat pasar Bukit Kecil, Muhammadiyah membangun lembaga pendidikan yang sama serta mulai memberikan materi ke-Muhammadiyah-an di Kampung 4 Ulu. Selanjutnya komunitas Minang di 27 Ilir dan orang Jawa di daerah Talang Jawa juga mendirikan sekolah pada tahun 1937.

Berbeda dengan organisasi Muhammadiyah di Palembang, yang sejarah pembentukannya melibatkan berbagai kelompok etnik, seperti Jawa, Minang dan Melayu Palembang. Organisasi keagamaan lain, seperti Nahdatul Ulama memiliki sifat yang berbeda, yakni NU lebih lama mempertahankan cirinya sebagai organisasi keagamaan dengan warna kebudayaan Jawa yang lebih kental ketimbang Muhammadiyah.

Meskipun ketenaran organisasi ini di Jawa telah banyak dilaporkan oleh pers, lewat kongres organisasi ini. Akan tetapi ketenarannya tidak langsung menarik orang Palembang untuk masuk ke organisasi ini. Perkembangan organisasi NU diluar Jawa terutama di halangi oleh faktor bahasa. Pilihan bahasa Jawa menunjukan sifat NU yang lebih konservatif, tidak hanya dalam bahasa lisan, tetapi juga dalam bahasa tulisan. Baru pada tahun 1930-an, bahasa Jawa dengan huruf *pegon* (*Arab Gundul*) diganti dengan bahasa Melayu tulisan huruf latin sebagai komunikasi cetak (tulisan) di kalangan NU.

Perubahan bahasa, dari Jawa ke Melayu, merupakan usaha dan ekspansi NU, agar bisa diterima oleh masyarakat di Luar Jawa. Strategi kelompok NU untuk menarik simpatisan dari masyarakat, yakni dengan menyelenggarakan kegiatan organisasi di beberapa tempat yang masih sedikit pengaruh mereka di tempat tersebut. Seperti penyelenggaraan muktamar di Bandung pada tahun 1932, yang terpaksa

menggunakan bahasa Melayu, karena hambatan bahasa Jawa yang tidak dipahami oleh sebagian besar peserta dari budaya Sunda.²⁸

Dengan mengandalkan jaringan ikatan kyai-ulama, hubungan guru-murid dan hubungan kekerabatan, kerja sama antara elit NU, juga satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni adanya sumber legitimasi kewibawaan religius sebagai pengikat kolektif bagi ekspansi geografi NU. Legitimasi kultural dan ikatan berdasarkan faktor keturunan jauh lebih kuat dari legitimasi politik.

Selain Muhammadiyah dan NU, sejarah umat Islam di Palembang antara tahun 1927 dan 1934 tidak lengkap, tanpa menyebut aliran ketiga, yakni Sarekat Islam. Sejak didirikan di Palembang pada tahun 1914, Sarekat Islam cabang Palembang berhasil secara besar-besar memobilisir rakyat Sumatera Selatan dalam satu wadah politik. Selama booming ekonomi di Sumatera Selatan, rakyat lebih tertarik kepada masalah ekonomi ketimbang persoalan politik.

Akan tetapi, setelah masa keemasan konjungtur ekonomi, kegiatan politik mulai mencolok, bersamaan dengan memburuknya keadaan ekonomi tersebut. Petunjuk pertama suhu politik mulai memanas, seperti pemberitaan dalam surat lokal Palembang-harian *Pertja Selatan*- pada bulan Januari 1931, yang memuat berita pembentukan cabang Partai Sarekat Islam Indonesia di Pasar 16 Ilir Palembang. Pendirian PSII yang dibentuk oleh mereka yang terdiri kelompok pedagang kecil, pegawai dan karyawan perusahaan minyak yang paling menderita akibat krisis ekonomi dunia pada masa ini.

Koalisi diantara kelompok ini, disokong pula keinginan politik untuk lepas dari penindasan penguasa kolonial Belanda. Dengan memanfaatkan media seperti film dan surat

²⁸ *Ibid.*, hal. 173.

kabar, yang saat itu berkembang secara luas dalam ruang publik. Rapat PSII yang dirancang oleh pemimpin PSII di Palembang, seperti di gedung bioskop Elit yang memiliki kapasitas untuk 3.000 pengunjung, menjadi pentas para pemimpin kharismatik PSII Palembang, seperti A.S. Macik. Macik adalah seorang orator ulung dan agitator politik yang piawai dalam panggung perpolitikan di Palembang pada masa ini.

Berdasarkan salah satu sumber lisan, Macik berasal dari daerah Musi Ilir, ia belajar dan menuntut ilmu di beberapa madrasah di Jawa, seperti di Cirebon. Dimana ditempat ini, ia berkenalan dengan Bratanata, seorang kampiun pers dan pernah berkarir sebagai pemimpin serikat pekerja. Bratanata, pernah ditangkap dan dipenjarakan karena agitasi politiknya pada tahun 1919, kemudian setelah bebas ia menjadi pemimpin redaksi harian *Pertja Selatan*. Di bawah kendalinya harian ini menjadi corong utama penyebaran ide politik PSII di Palembang. Penting pula untuk diketahui bahwa harian ini mampu bertahan hingga tahun 1942, menjelang berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia.

Munculnya lembaga pers dan partai Islam menjadi tantangan bagi kalangan konservatif (kaum tua) yang sebagian berasal dari kelompok birokrat agama. Sukses PSII yang bersumber dan mengandalkan asosiasi bebas dan media massa, dan bukan atas jabatan dan perlindungan sosial, yang telah menjadi patron kehidupan religius di Palembang, kini menjadi perhatian mereka. Kemudian para pemimpin asosiasi bebas yang sering disebut sebagai "orang luar" merujuk pada figur Bratanata dan Mancik yang dikonotasikan pula sebagai "perantau politik".²⁹

Jika kelompok birokrasi agama, menyandarkan hidupnya pada kemurahan penguasa kolonial, maka kalangan

²⁹ *Ibid.*, hal. 174-175.

pemimpin partai Islam dan pengikutnya menjadi pihak yang menentang penguasa kolonial. Dalam bidang ekonomi, para elit Palembang lebih memosisikan sebagai pemelihara status quo kekuasaan kolonial. Sikap akomodatif terutama didapati di kalangan elit Alawiyin, seperti keluarga Almunawar dan Assegaf, saudagar kaya Palembang pada masa ini. Pada masa ini, kerajaan bisnis Al Munawar di 14 Ulu memiliki usaha dibidang pabrik kayu, penggilingan padi dan rumah asap karet, yang dipimpin oleh Sayid Muhammad Abdulrahman Almunawar. Mereka memelihara hubungan baik dengan pemerintah daerah, sehingga mengalami kesulitan untuk menentukan sikapnya terhadap emansipasi rakyat Indonesia di bidang politik dan agama. Munculnya sentimen anti sayid yang ikut berperan dalam pendirian Madrasah Diniyah Aliyah. Ketegangan antara kelompok sayid dan kaum nasionalis memuncak dengan kunjungan Gubernur Jendral A.C.d de Graeff ke Palembang pada tahun 1929 di madrasah Arabiyah milik keluarga Al Munawar, sempat menyinggung kelompok nasionalis atas tindakan dan sikap keluarga arab kepada penguasa kolonial.

Sikap keluarga Al Munawar pada akhirnya menjadi komoditas politik bagi pers nasionalis, sebagaimana komentar pemimpin redaksi mereka, Bratanata yang terang-terangan menunjukkan sikap anti Arab dengan melukiskan kalangan ini sebagai orang kaya, kompeni guru agam dan sebagai lintah darat. Serangan verbal dan kritik tajam Bratanata yang dimuat pada harian Pertja Selatan pada tanggal 28 Sepetember 1929, tak pelak lagi menyebabkan dia harus mendapat perlakuan tidak mengenakan, ketika Sayid Akil Alhabsyi dan Sayid Idrus bin Muhammad Almunawar memukulinya di depan bioskop Elit.

Meskipun terjadi ketegangan diantara kaum nasionalis dan kaum Alawiyin dari keluarga Al Munawar, namun hal ini tidak sempat menjadikannya sebagai gerakan polarisasi etnik.

Sebab dikalangan komunitas Arab di Palembang sendiri, ada beberapa kelompok atau individu yang menentang sikap keluarga Sayid Al Munawar, yakni mereka yang menyebutnya sebagai "Jong Hadramaut". Kelompok ini menjauhkan diri mereka dari pengaruh mereka dari kekuasaan kolonial, yang bertolak belakang dari kelompok tua mereka. Bahkan salah satu "Jong Hadramaut" yakni Sayid Syekahan bin Alwi Syihab, pada tahun 1930-an menjadi salah satu aktivis muda dalam PSII di Palembang.³⁰

C. Pendidikan dan Nasionalisme Keturunan Arab di Palembang

1. Perkembangan Lembaga Pendidikan

Sebelum masuknya sistem pendidikan Barat, masyarakat pribumi dan orang Arab di Palembang, sebagaimana lazimnya masyarakat Islam di Nusantara menjalankan sistem pendidikan tradisional, yakni pendidikan agama (Islam) mengajarkan penduduk belajar dan membaca Al Qur'an (mengaji).

Dalam *Undang-Undang Simbur Cahaya* Bab Kaum, pasal 15 menyatakan³¹:

"Hendak kaum-kaum mengajar anak-anak di dalam dusun dan mengaji dan menyurat tiada dengan pembayaran, melainkan kasih orang."

Ketentuan tersebut, dikuatkan dengan *Besluit* Residen No. 43 tahun 1832, pasal 4 No. 6 dengan bunyi :

³⁰ *Ibid.*, hal. 176-178.

³¹ Husni Rahim, *Sistem Otoritas Administrasi Islam, Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial Palembang*, Jakarta: Logos, 1998, hal. 169.

"Bilal mesti jaga langgar di dalam kampung dan pelihara orang miskin dan jaga murid-murid di dalam kampungnya".

Berdasarkan ketentuan diatas tampak bahwa tugas mengajar mengaji untuk pengajaran tingkat dasar menjadi wewenang pejabat agama tingkat bawah. Bila si anak sudah menamatkan pada tingkat ini, ia dapat melanjutkan pelajaran pada tingkat pengajian kitab. Materi pelajaran dalam pengajian kitab mencakup pelajaran bahasa Arab, fiqh dan tauhid. Pada tingkat yang lebih tinggi (tingkat dua) yakni berupa pendalaman kitab yang pertama ditambah dengan materi pelajaran tafsir, hadist, tasawuf dan hisab. Pengajian tingkat pertama disampaikan oleh *lebai penghulu* untuk daerah *uluan* dan *khatib* untuk ibukota Palembang.

Kalau di Jawa dikenal *pesantren* sebagai pusat pengajaran Islam di daerah pedesaan serta *kauman* di perkotaan. Maka di dalam khazanah Melayu, kita mengenal institusi pendidikan sejenis yang disebut *Meunasah* (Aceh) atau *Surau* (Minangkabau). Dalam tradisi budaya Melayu, lembaga pendidikan biasanya diintegrasikan dengan denyut kehidupan sosial politik masyarakatnya dan tidak terpisah seperti di Jawa. Sedangkan mengenai pesantren, baru di kenal oleh masyarakat Palembang pada abad ke-20, ketika Kyai Haji Anwar bin Haji Kumpul mendirikan Madrasah Nurul Islam Seri Bandung dengan sistem asrama.

Lahimya politik etis pada awal abad kedua puluh dengan salah satu agenda politiknya, yakni perbaikan kesejahteraan penduduk melalui pendidikan (edukasi). Dalam batas tertentu munculnya politik etis, juga dipandang sebagai awal dari berkembangnya pendirian lembaga pendidikan yang bercorak pada kepentingan etnis tertentu, seperti HCS (*Hollandchs Chineshe School*) untuk orang Cina dan *Holanndsche Arabieren School* (HAS).

Selain HAS, dikalangan masyarakat keturunan Arab sendiri, mereka juga mendirikan organisasi berdasarkan ikatan perpuakan untuk kepentingan pendidikan, seperti Al Jamiat al-Khairiyah yang lebih dikenal dengan Jamiat Khair dan Al Irsyad. Jamiat Khair, organisasi didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905. Perkumpulan ini didirikan oleh Al-Aydarus bin Ahmad bin Shihab, yang para pemimpinnya berasal dari keturunan Arab kaya dan termasuk golongan sayid.³² Organisasi ini terbuka untuk setiap orang Islam, akan tetapi mayoritas anggotanya berasal dari keturunan Arab. Bahkan organisasi ini telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Daftar Anggota dan Rapat Berkala sebagaimana ciri dari sebuah organisasi modern.

Ada dua bidang kegiatan yang menjadi perhatian organisasi ini. Pertama, bidang pendidikan yang merupakan salah satu bidang yang secara intensif dijalankan oleh organisasi ini, melalui pendirian dan pembinaan satu sekolah pada tingkat dasar. Kedua, pengiriman anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pelajaran, akan tetapi bidang kedua ini pada perkembangannya terhambat karena permasalahan biaya dan mulai memudarnya khilafat (negara Turki).³³ Selain mendirikan bangunan sekolah dasar, mereka juga melengkapi fasilitas sekolah tersebut seperti penggunaan kelas, bangku, papan tulis serta telah menggunakan kurikulum.

Pelajaran yang disampaikan tidak hanya meliputi agama, akan tetapi juga pelajaran umum, seperti berhitung, sejarah dan ilmu bumi. Hal yang menarik dari proses pembelajaran di lembaga ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya, meskipun mayoritas siswanya dari keturunan Arab. Bahasa Belanda tidak diajarkan, sebagai

³² Bisri Affandi, *Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943), Pembaharu & Pemurni Islam di Indonesia*, Pustaka Al Kautsar, 1999, hal. 204.

³³ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1991, hal. 68-69.

gantinya bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib. Pada tahun 1908 Jamiat Khair mensponsori organisasi pendidikan pemuda Muslim Indonesia yang dinamakan Sumatera-Batavia-Alkhairiyah.³⁴ Organisasi juga mendukung operasional pers yang mendukung kepentingan Islam dan masyarakat pribumi

Para pengajar Madrasah Jamiat Khair selain mengundang guru-guru dari daerah-daerah lain, juga mendatangkan guru dari luar negeri. Mereka mendatangkan seorang guru dari Padang, Haji Muhammad Mansyur pada tahun 1907. Haji Muhammad Mansyur dipilih menjadi guru, karena kemampuannya di dalam bahasa Melayu dan pengetahuannya dalam bidang agama. Kemudian Pada tahun 1911 mereka mendatangkan empat orang guru dari negara-negara Arab dengan tujuan meningkatkan mutu pengajaran. Keempat orang adalah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan, Syekh Muhammad Tayib dari maroko, Syekh Muhammad bin Abd'al-Hamid dari Mekkah (aslinya dari Sudan) dan al-Hashimi dari Tunisia.³⁵

Setelah kedatangan guru-guru tersebut di Batavia, Jamiat Al Khair akhirnya membuka dua cabang madrasah, satu di Bogor yang dipimpin oleh Muhammad bin Abd'al-Hamid dan satu lagi di Krukut dibawah pimpinan Muhammad Tayyib. Sedangkan Ahmad Skarti, ditunjuk sebagai pengawas seluruh madrasah Jamiat Khair di Batavia. Kemampuan Ahmad Surkati berhasil menyakinkan para pemimpin organisasi ini, dengan rekomendasinya didatangkan lagi guru dari luar negeri. Pada tahun 1912, salah satu saudara Ahmad Surkati, abu al-Fadl Muhammad al-sati al-Surkati dengan ketiga guru lainnya datang ke Batavia. Ketiga guru lainnya yang merupakan teman saudara Ahmad Surkati, semuanya

³⁴ Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2009, hal. 133.

³⁵ Bisri Affandi, *op.cit.*, hal. 204.

berasal dari Sudan, yakni Syekh Muhammad Nur bin Muhammad Khayr al-Ansari, Syekh Muhammad al-Aqib dan Syekh Hasan Hamid al-Ansari. Dengan kedatangan guru-guru baru, maka didirikan madrasah Jamiat Khair di Surabaya yang dipimpin oleh Syekh Muhammad al-Aqib.

Diantara para guru yang didatangkan dari Sudan, yakni Muhammad Nur, yang sebelumnya menjadi guru di Gordon College di Sudan selama tahun 1906-1911, mungkin dipengaruhi oleh teman-temannya yang datang bersamanya ke Indonesia. Hal yang menarik adalah para guru-guru yang berasal dari Sudan juga akrab dengan pemikiran tokoh pembaharuan Islam dari seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Bahkan Muhammad Nur dan Muhammad al-Aqib yang sebelumnya belajar di Al Azhar tak lain dari murid Muhammad Abduh. Sedangkan hubungan antara Ahmad Surkati dan alumni al Azhar ini, pada mulanya terjalin lewat korespondensi yang ia lakukan untuk menambah pengetahuan tentang reformasi Islam.

Pelajaran bahasa Arab menjadi fokus utama pengajaran di Madrasah Jamiat Khair, dimana Ahmad Surkati terlibat. Penekanan pengajaran bahasa Arab penting untuk memahami teks dasar Islam. Penekanan ini sejalan dengan metode Muhammad Abduh yang menyatakan bahasa Arab adalah tuntunan pokoknya untuk "membangkitkan kembali pengetahuan dasar bahasa ini adalah cara untuk mereformasikan agama". Metoda lain yang penting juga adalah mengembangkan secara kritis apa yang diajarkan. Dengan cara-cara ini mereka tidak terjebak metoda belajar hafalan.

Para pengajar dari luar negeri menerapkan kerangka berpikir rasional sebagaimana amanat dari ajaran Islam. Akan tetapi penerapan rasional-kritis ini, bertolak belakang dengan ajaran sayid yang berkembang berabad-abad di Indonesia. Bahwa ajaran mengenai kedudukan semua

manusia sejajar dimata para sayid dianggap dapat mengancam posisi sayid yang diistimewakan di Indonesia, yang kemudian menjadi bibit perpecahan di internal Jamiat Khair.

Sedangkan kedatangan Ahmad Surakti dan guru-guru Jamiat Khair di Indonesia, diundang oleh kelompok keturunan Arab yang berpandangan reformis, seperti Abd Allah bin Abu Bakar al-Habshi, Muhammad bin Abd al-Rahman bin Shihab, Muhammad bin Abd Allah al-Shatari, Ahmad bin Abd Allah al-Saqqaf dan Abd al Mawla bin Yahya.

Perkembangan organisasi Jamiat Khair berjalan lambat, pada awalnya mereka 70 orang anggota. Kemudian pada tahun 1915 anggota Jamiat Khair tercatat 1.000 anggota. Dan pada tahun ini pula sudah terlihat adanya kemunduran, kemungkinan ini karena munculnya organisasi yang jauh lebih reformis, yakni Al Irsyad. Pertikaian dan rivalitas internal di kalangan masyarakat keturunan Arab yang bersumber pada persepsi dan pandangan kelompok ini mengenai kedudukan sayid dalam masyarakat keturunan Arab khususnya, dan umumnya dalam masyarakat Islam.

Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa golongan sayaid mendapat perlakuan istimewa dikalangan bukan sayid dan orang Indonesia. Dengan kemajuan yang dicapai oleh golongan bukan sayid dalam hidup, apalagi di Indonesia dimana mereka berhasil mencapai sukses material dan kepandaian. Sehingga mereka mulai menanyakan persoalan kedudukan yang tinggi yang ditempati oleh kelompok sayid ini. Pemilahan antara golongan sayid dan no-sayid menjadi berita pula, yang disebabkan pemerintah Kolonial Belanda telah mengangkat seorang Arab non-sayid sebagai kepala dari masyarakat keturunan Arab (Kapiten Arab), dimana penguasa kolonial berhubungan dengan masalah menyangkut masyarakat Arab. Dengan sendirinya Kapiten Arab tersebut

juga akan membawahi dan mengatur kelompok orang Arab dari golongan sayid.³⁶

Kemajuan yang diperoleh kelompok Arab bukan sayid, baik dibidang ekonomi maupun politik, lambat laun mereka beranggapan kedudukan sosialnya sederajat dengan golongan sayid. Sikap golongan bukan sayid memperoleh dukungan dari sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Rashid Ridha dari majalah *Al-Manar* Kairo, yang mengemukakan bahwa perkawinan antara seorang Islam bukan sayid dengan dengan sayrifah adalah *jaiz*. Fatwa yang sama juga dikeluarkan oleh Syaikh Ahmad Soorkati di Solo pada tahun 1913, dalam sebuah pertemuan, yang intinya Syaikh Ahmad Soorkati menekankan bahwa Islam memperjuangkan persamaan sesama muslim dan tidak mengakui kedudukan yang mendiskriminasikan berbagai kalangan, disebabkan oleh asal usul keturunan, harta ataupun pangkat.³⁷

Suatu kejadian lain, yang semakin meningkatkan ketegangan antara golongan sayid dan bukan sayid terjadi pula di Batavia, ketika Kapten Arab, Syaikh Umar Manggus tidak mencium tangan seorang sayid yang bernama Umar bin Salim Alatas, ketika mereka bertemu dalam suatu kesempatan. Cium tangan seperti ini, disebut *taqbil*, dianggap sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang bukan sayid bila bertemu dengan seorang sayid, meskipun hal ini tidak mendapat dukungan dari mufti di Baravia pada saat itu, yang kebetulan dari kalangan sayid.

Feodalisme dan kekolotan dikalangan kelompok sayid menyebabkan perpecahan d internal Jamiat Khair. Selain golongan bukan sayid menyadari tentang kedudukan dan kekuasaan mereka, apalagi di kalangan mereka telah muncul orang - orang yang juga dihormati oleh orang-orang Arab

³⁶ Deliar Noer, *op.cit.*, hal. 71.

³⁷ *Ibid.*, hal. 72.

umumnya ataupun oleh orang-orang bukan Arab. Tokoh-tokoh Arab non sayid, seperti Syaikh Umar Manggus, Kapiten Arab di Batavia itu, termasuk pula Syaikh Ahmad Soorkati yang dianggap memiliki pengetahuan luas dan seorang cendekiawan yang mumpuni. Sehingga kelompok bukan sayid memilih keluar dari Jamiat Khair dan membentuk sebuah organisasi yang bernama Jam'iyat al-Islam wal Ersyad al-Arabia disingkat Al-Irsyad pada tahun 1913, serta pengakuan secara resmi dari pemerintah kolonial pada tanggal 11 Agustus 1915.

Semula Syekh Ahmad Soorkati tidak setuju dengan perpecahan ini, sebab fatwa yang disampaikan lebih didasarkan adanya pemahaman bahwa semua memiliki kedudukan yang sama dan bukan berdasarkan kebencian atau ketidak senangan terhadap golongan sayid. Sehingga beliau masih tetap mengajar di sekolah Jamiat Khair untuk beberapa waktu lamanya, sampai pada saat ketika beliau menyadari bahwa kehadirannya tidak disukai oleh kalangan sayid dilembaga ini, seperti tercermin dari pernyataan Syekh Ajmad Soorkati dibawah ini:

"Aneh, bagaimana orang-orang itu berbalik sama sekali, dan berpaling dari aku, setelah adanya pertalian persahabatan; pada waktu mereka mencium bau *al-musawah* (persamaan) yang menumbuhkan perenggangan yang tajam di antara mereka. Itu terjadi di Solo, ketika aku ditanya: 'Apakah boleh perkawinan antara wanita 'Alawiyah dengan lelaki no- Alawi?' Maka aku fatwakan, "Boleh" (bagaimana) kalau saya meninggalkan negeri ini sebelum saya menyempurnakan misi (Islam) saya berdosa, karena Allah telah mengambil janji kepada ahli ilmu (ilmuwan) agar menjelaskan ilmu dan tidak menyembunyikannya.³⁸

³⁸ Bisri Affandi, *op.cit.*, hal. 86.

Berdirinya al- Irsyad tidak bisa dilepaskan dari sosok utama pendirinya, yakni Syeikh Ahmad Soorkati. Tokoh utama Al-Irsyad ini dilahirkan di Dongola, Sudan tahun 1292 H (1872 M). Ayahnya, Muhammad Surkati, yang dikenal memiliki karakter mulia. Ia memperoleh namanya dari tokoh al-Ansari yang masyur, Jabir bin Abd Allah. Berdasarkan dari silsilahnya, ayah Soorkati berasal dari suku Jawabra atau Jawabirah yang memiliki hubungan keturunan dengan Jabir bin Abd Allah yang terdesak ke Dongala selama masa pemerintahan Salim I dari Turki. Ayah Soorkati adalah lulusan Universitas al-Azhar yang memiliki pengetahuan luas.³⁹

Setelah merampungkan pendidikan dasarnya, ia dikirim ke salah satu *hafiz*, penghafal Al Qur'an professional. Sehingga Ahmad Soorkati menguasai Al Qur'an dalam usia relatif muda. Setelah menguasai Al Qur'an bersama ayahnya ia mempelajari *Mabadi al-Fikih wa al-Tawhid* (Dasar-dasar hukum Islam dan Teologi). Pendidikan yang dilalui oleh Ahmad Soorkati tidak berbeda dengan sistem pendidikan tradisional di Sudan, dimana metoda dan kurikulum yang dipakai masih bersifat tradisional. Pada tahap awal, anak-anak diajarkan menghafal Al Qur'an, dimana menurut kepercayaan orang Sudan, bahwa kemampuan ini akan meningkatkan iman dan memberi landasan hingga mudah masuknya doktrin-doktrin Islam. Setelah mempelajari Al Qur'an siswa-siwanya melanjutkan studi dalam bidang *tauhid* (teologi) sesuai mazhab al-Ash'ari dan bidang *fikih* (hukum Islam) sesuai mazhab Ibn Malik.

Karir keilmuan Ahmad Soorkati, tidak sebagaimana ayahnya yang berhasil menyelesaikan studinya di Al Azhar. Sebab setelah meninggal ayahnya, ia justru pergi ke Arab. Ahmad Soorkati tinggal selama empat tahun di Medinah untuk memperdalam kemampuan bahasa Arab pada Ahmad Bazanji, belajar *fikih* pada Syeikh Mubarak al-Nasmat, hadist

³⁹ *Ibid.*, hal. 209.

pada Syeikh Salih dan Umar Hamdan serta memperdalam tafsir pada Syeikh Muhammad al-Khayari dari Maroko.⁴⁰

Kemudian ia melanjutkan studi di Makkah, khususnya untuk mempelajari ilmu *fikih* aliran al-Syafi'i. Salah satu gurunya adalah tokoh Muslim dari Maroko yang terkemuka, Syeikh Shu'ayb bin Musa. Dengan kegigihan dan semangat belajar yang tinggi Ahmad Soorkati memperoleh gelar "alim" pertama di kelasnya. Pada tahun 1906 setelah memperoleh gelar ini, Ahmad Soorkati ia ditunjuk mengajar *fikih* di al-Haram al-Makki selama beberapa tahun. Selama di Makkah, selain mengajar, ia menulis beberapa buku yang diterbitkan mengenai *Mudharat fi al-Tafsir* (studi mengenai beberapa tafsir).

Selama tinggal di Arab, baik di Makkah maupun Medinah, ia tidak pernah berhubungan langsung dengan Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Kecuali dalam biografi singkat Ahmad Soorkati diungkap bahwa selama di Makkah ia mulai mempelajari ajaran Abduh dengan berkorespondensi dengan para pengajar di Al Azhar yang sealiran dengan Muhammad Abduh.

Ketika Jamiat Khair mencari guru-guru lulusan Al Azhar, teman-teman Soorkati mengusulkannya sebagai calon pertama, dengan harapan Soorkati akan melakukan reformasi Islam. Ahmad tidak menolak usulan tersebut, bersama temannya Muhammad Tayyib dari Maroko serta Abd al-Hamid dari Sudan pada tahun 1329 H (1911) ia bertolak dari Makkah menuju Batavia.

Ketika berada di Jamiat Khair, Ahmad Soorkati terlibat dalam konflik internal masyarakat keturunan Arab di Batavia, yakni antara kelompok sayid dan bukan sayid. Keterlibatannya dalam konflik berawal, ketika Ahmad Soorkati mengeluarkan fatwa di Solo yang memperbolehkan perkawinan antara orang

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 210.

non-sayyid dan anak perempuan keturunan sayid, seperti halnya Rashid Ridha mendukung persolaan ini. Ia juga menekankan bahwa Islam mengakui kesetaraan dan persamaan derajat semua Muslim dan tidak mengakui pengistimewaan kelompok berdasarkan keturunan, kekayaan atau status.

Ahmad Soorkati juga menolak keinginan kalangan sayid untuk meminta murid-murid Jamiat Khair dari kalangan non-sayid mencium tangan siswa dari kalangan sayid. Dan ia lebih memilih mengundurkan diri dari jabatannya daripada menganjurkan hal tersebut. Sebelum keluar dari Jamiat Khair, selain mengajar di madarash milik organisasi ini dipagai hari, Ahmad Soorkati mendirikan kursus sore yang dihadiri oleh para pemuda Arab. Kursus ini bertujuan untuk melihat adanya kemungkinan memperbaiki pemahaman Muslim di Indonesia.

Ketegangan yang terjadi dalam konflik internal antara kalangan sayid dan bukan sayid menjadikan Ahmad Soorkati memusatkan perhatiannya dengan membentuk kelompok pengikut setia. Ia mengatur pertemuan-pertemuan dengan tokoh terkemuka non sayid untuk melatih siswa dan pengikutnya. Selama masa transisi ini, beberapa tokoh Arab non-sayid, seperti Syeikh Umar Manggus (pemimpin masyarakat Arab di Batavia), Sa'id bin Salim Mash'abi dan salih Ubayd Abdat (pengusaha dan tokoh terkemuka Arab non-sayid) bergabung dengan Ahmad Soorkati. Mereka ini adalah orang-orang yang mempersiapkan organisasi Al -Irsyad.

Selain itu dukungan untuk Ahmad Soorkati juga dari kalangan tokoh muslim pribumi, seperti dari Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) dan H. Zamzam (pendiri Persis). Al -Irsyad yang dirintis oleh Ahmad Soorkati, juga didukung sepenuhnya oleh beberapa tokoh Arab lainnya, seperti Syekh Umar Manggus, Sa'id Mash'abi, Syeikh Saleh Ubayd Abdat dan Syeikh Salim bin Awad Balwa'l. Pada tahap awal perkembangannya organisasi ini berada dibawah bimbingan

dan pengarahannya dari Salim bin Awad Balwa'l, yang dalam kepengurusannya Syeikh Muhammad Ubayd Abud duduk sebagai sekretaris dan Said bin Salim Mash'abi sebagai bendahara.⁴¹

Mengapa organisasi ini oleh pendirinya di beri nama Al-Irsyad, menurut keterangan Majelis Dakwah Al-Irsyad, nama "Irsyad" mengacu pada nama *Jami'iyat al-Da'wah wal Al-Irsyad* yang didirikan Rashid Ridha di Mesir. *Jami'iyat al-Da'wah wal Al-Irsyad* yang kemudian resmi membuka madrasah di Rodah (Kairo), yang berlangsung pada malam menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pengajaran mulai hari berikutnya, 13 Rabbi'ul Awal 1330 H (3 Maret 1912 M). Pendirian *Jami'iyat al-Da'wah wal Al-Irsyad* adalah usaha Rashid yang menginginkan "agar para Muslim mengabdikan dirinya pada bakti yang termulai, yaitu mendirikan madrasah, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Rashid Ridha dibawah ini:

"Mendirikan madrasah lebih mulia daripada mendirikan mesjid, karena doa seorang yang bodoh di mesjid tidak ada gunanya, sedangkan madrasah akan menghapus semua kebodohan itu. Dengan madrasah semua kegiatan sekuler maupun religius akan dijalani dengan benar."

Madrasah yang didirikan oleh Rashid Ridha dinamakan *Dar al-Dakwah wa Al-Irsyad* itu lebih mengutamakan siswa dari negara Muslim yang jauh, termasuk Afrika, Timur, Afrika Utara, Turki, Turkistan, India, Jawa dan Malysia dan Malaysia.

Organisasi Al-Irsyad berkembang dengan pesat di Batavia dan beberapa kota lain di pulau Jawa. Organisasi bersandar pada lima pilar utama (prinsip-prinsip)⁴², yakni:

⁴¹ *Ibid.*, hal. 212.

⁴² *Ibid.*, hal. 213-214.

1. Untuk meneguhkan doktrin persatuan dengan membersihkan shalat dan doa dari kontaminasi unsur politeisme.
2. Untuk mewujudkan kesetaraan diantara kaum Muslim dan mencari dalil yang sah di al Qur'an dan Sunnah, serta mengikuti jalan yang salaf untuk semua solusi masalah agama yang diperdebatkan.
3. Untuk memerangi *taqlid a'ma* (penerimaan membabi buta) yang berkonflik dengan *aqli* (sesuai akal) dan dalil *naqli* (sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah).
4. Untuk menyiarkan pengetahuan alam sesuai Islam dan menyebarkan kebudayaan Arab yang sesuai dengan ajaran Allah.
5. Mencoba untuk menciptakan pemahaman dua arah antara Muslim Indonesia dan Arab.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas gerakan Al -Irsyad menyusun Anggaran dasar mereka pada tahun 1914, dimana nama gerakan ini muncul pada ayat 1 Anggaran Dasar mereka, yakni: *Jam'iyat al-Isah wa Al-Irsyad al-Arabiyah* (Asosiasi Arab untuk Perbaikan dan Pembimbingan) dengan kantor pusat di Batavia.⁴³ Kemudian pada ayat 2 dari Anggaran Dasar menyebutkan tiga pengembangan organisasi ini di masa depan yakni:

- a. Memperbaiki kondisi religius dan sosio-ekonomi kaum muslim pada umumnya dan Arab pada khususnya dengan mendirikan madrasah, rumah piatu, panti asuhan dan rumah sakit.
- b. Menyebarkan reformasi Islam diantara para muslim melalui tulisan dan publikasi, pertemuan, kuliah, kelompok studi dan misi tertentu.

⁴³ *Ibid.*,

- c. Membantu organisasi lain yang mempunyai kepentingan bersama dengan Al-Irsyad dengan persyaratan mereka tidak menfokuskan diri pada hukum Islam atau pemerintah lokal. Perlu dicatat, Anggaran dasar gerakan Al-Irsyad dapat berubah, karena dimungkinkan adanya penambahan ayat-ayatnya. Namun perubahan tersebut haruslah melalui Kongres Al-Irsyad.

Dalam waktu singkat dukungan terhadap organisasi makin kuat, karena seorang tokoh yang dikenal sebagai guru besar dari suku Hadrami, Ustadz Muhammad Ubayd Abud dan teman-temannya kemudian bergabung dengan Ahmad Surkati. Pada tahun 1913 organisasi ini (Al-Irsyad) telah memiliki beberapa sekolah, yaitu:

1. Madrasah *Awwaliyah* dengan masa pendidikan tiga tahun.
2. Madrasah *Ibtidaiyah* dengan masa pendidikan empat tahun.
3. Madrasah *Tajhiziyah* dengan masa pendidikan dua tahun.
4. Madrasah *Mu'allimin* untuk para calon guru dengan masa pendidikan empat tahun.⁴⁴

Kemudian pada tahun 1915, Al-Irsyad mendirikan pula sekolah tinggi yang disebut *Takhassus*. Perbedaan yang mendasar dengan madrasah Muhammadiyah, madrasah Al-Irsyad menawarkan kurikulum yang bermuatan religius. Bahasa Arab menjadi mata pelajaran penting, yang ditambah dengan mata pelajaran umum seperti sekolah kolonial umumnya. Sebaliknya, madrasah Muhammadiyah menawarkan kurikulum yang serupa dengan sistem pendidikan kolonial ditambah dengan pelajaran agama.

⁴⁴ *Ibid.*,

Kurikulum madrasah Al-Irsyad lebih menekankan kepada pengajaran agama, hal ini ditunjang dengan tersedianya guru-guru yang berkualitas untuk bidang ini. Berdasarkan daftar guru yang disusun oleh Mahmud Junus pada tahun 1913, madrasah Al-Irsyad pertama di Batavia mempunyai 11 orang guru asing dan hanya memiliki satu orang guru pribumi yang mengajar bahasa Indonesia (Melayu), sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Nama Guru dan Asal Perguruan

No.	Nama Guru	Asal Perguruan	Tahun Lulus
1.	Syekh Ahmad Surkati	Dar al-Ulum Makakh	1905
2.	Syekh Muhammad al-Aqib	Al Azhar (Kairo)	1909
3.	Abu al-Fadl	Gordon College (Sudan)	1911
4.	Muhammad al-Hashimi	Kulliyat al-Zaytun (Tunisia)	-
5.	Muhammad al-Attas	Fak Teknik Constantinopel	-
6.	Syekh Abd al-Rahim	Al Azhar (Kairo)	-
7.	Syekh Muhammad Nur	Al Azhar (Kairo)	1906
8.	Syekh Muhammad al-Madani	Al Azhar (Kairo)	-
9.	Abu Zayd al-Misri	Al Azhar (Kairo)	-
10.	Syekh Hasan Abu Ali al-Thiqahm	Dar al-Ulum Makakh	-
11.	Sutan Abdul Hamid	Dari Minangkabau	-

Sumber: Bisri Affandi, *Syaikh Syurkati (1874-1943), Pembaharu & Pemurni Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999, hal. 215. Tanda (-) tidak ditemukan data

Pada tiap jenjang pendidikan, kurikulum madrasah Al-Irsyad memiliki prioritas berbeda serta fokus yang jelas. Pada level madrasah *awwaliyah* dengan masa pendidikan tiga tahun, percakapan bahasa Arab (*muhadathah*) dan baca bahasa Arab (*mutala'ah*) lebih sering diajarkan dari pada pelajaran non agama seperti bahasa Indonesia, ilmu berhitung dan olah raga. Pada jenjang *ibtidaiyah* yang memiliki masa studi empat tahun, mata pelajaran utamanya adalah Al-Qur'an, *fikih*, *nahw* dan *sarf* (tata bahasa dan sintaksis bahasa Arab), *mtala'ah* dan *imla* (diksi bahasa Arab). Dan sebagai mata pelajaran tambahan diajarkan pelajaran sejarah, geografi, bahasa Melayu, ilmu berhitung, menggambar dan olah raga.

Pada tingkat madrasah *tajhiziyah* dengan masa pendidikan dua tahun, mata pelajaran *tuahid*, *fikih*, *tafsir hadits*, bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diajarkan sebagai mata pelajaran utama. Untuk tingkat madrasah *mu'allimin*, pendidikan calon guru dengan masa studi empat tahun diajarkan materi seperti agama Islam, bahasa Arab, pedagogy, bahasa Inggris dan bahasa Melayu, termasuk pula pelajaran tafsir hadist yang bersumber dari *Tafsir al-Manar* yang didalamnya mencakup pula ilmu *mantiq*. Sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi (*Takhassus*) menggunakan sepenuhnya kurikulum dengan muatan religius. Kelas-kelas sore diberikan kepada siswa yang telah lulus ujian materi keseluruhan. Kurikulumnya meliputi *adab al-lughah al-Arabiyyah* (literatur Arab), *mantiq* (logika), *balaghah* (retorika), *fiqh wa usul al-fiqh*, tafsir, hadits, ilmu hadits dan filosofi.⁴⁵

Pada awal perkembangannya gerakan Al-Irsyad terkonsentrasi di Batavia, kemudian setelah berhasil membenahi kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan madrasah baru mendirikan cabang-cabang Al-Irsyad diluar Jakarta. Mulai tahun 1917 Al-Irsyad menjalankan dua

⁴⁵ *Ibid*, hal. 215-216.

program, diantaranya selain membuka cabang Perguruan Al-Irsyad diluar Jakarta, mereka juga berusaha menyebarkan ide-ide reformasi diantara umat Islam Indonesia (Hindia Belanda).

Pembukaan cabang Al-Irsyad diluar Jakarta (Batavia) mulai dirintis sejak tahun ini (1917), yakni dengan mendirikan cabang Al-Irsyad di Surabaya dan Tegal. Madrasah Al Irsyad di Surabaya didirikan dan dipimpin oleh saudara laki-laki Syekh Ahmad Surkati (Abu al-Fadl al -Ansari) bekerja sama dengan seorang lulusan sekolah Al-Irsyad di Jakarta yakni Abd Allah bin Salim. Madrasah ini mendatangkan dua orang guru dari Mesir, yakni Muhammad Mursidi dan Abd al-Qadir al-Muhanna yang kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Dan pada tahun 1922, Abd al-Qadir al-Muhanna digantikan oleh Umar bin Salim Hubays, lulusan Al Irsyad Jakarta.

Al Irsyad cabang Tegal didirikan dan dipimpin oleh murid Ahmad Surkati lainnya, seperti Abd Allah bin Salim al-Attas al-Alawi bersama dengan Sayyid Ali Harharah (lulusan Al Irsyad Jakarta) dan Syekh Muhammad Nur al-Ansari dan Syekh Abu al-fadl. Kemudian pada tahun 1918-1919 tiga cabang Al Irsyad dibuka di Pekalongan, Cirebon dan Bumiayu. Madrasah Al Irsyad di Pekalongan dipimpin oleh Umar Sualyman Naji (lulusan Al Irsyad Jakarta) serta dikenal luas sebagai penulis terkemuka masalah Al Irsyad dan ketua Departemen Pendidikan Al Irsyad.

Meningkatnya peminat pendidikan pada lembaga yang didirikan Al Irsyad, mendorong Syekh Ahmad Surkati untuk melakukan beberapa perubahan, untuk itu beliau mengajukan beberapa usulan (proposal) penting, antara lain:

- a. Al Irsyad harus mempunyai penyelia untuk mengawasi seluruh madrasah-madrasah nya. Penyelia ini harus berada di madrasah tertentu selama satu minggu untuk mengawasi dan mendiskusikan masalah pendidikan.

- b. Al Irsyad harus menyamakan programnya hingga semua cabang memiliki kurikulum yang sama.
- c. Buku-buku baru di madrasah-madrasah Al Irsyad harus secepatnya disusun, karena buku-buku yang tersedia berasal dari Timur Tengah dan disiapkan untuk siswa-siswa berbahasa Arab.
- d. Al Irsyad harus mempunyai perpustakaan yang dapat digunakan para siswanya untuk dilatih menulis pendapat mereka sendiri.
- e. Al Irsyad seharusnya menerbitkan buletin berkala untuk menyebarkan ide-ide reformasi di kalangan muslim Indonesia.
- f. Rapat pengurus dilaksanakan setiap empat bulan sekali untuk mengantisipasi perkembangan pendidikan.
- g. Al Irsyad seyogyanya meluluskan siswa-siswa yang berkualifikasi sebagai pegawai negeri. Pertimbangan ini terutama bagi mereka yang berasal dari penduduk pribumi.
- h. Selain bahasa Arab, siswa-siswa diharapkan bisa berbahasa Indonesia dan Belanda.⁴⁶

Proposal Ahmad Surkati tidak memperoleh respon dari organisasi Al Irsyad, karena minimnya sumber dana untuk menjalankan programnya. Apalagi dukungan dana dari simpatisan dan anggotanya mulai menurun akibat lesunya kegiatan ekonomi, karena adanya Perang Dunia I (1914-1918). Untuk usulan poin pertama, Ahmad Surkati sendiri ditunjuk sebagai pengawas Madrasah Al Irsyad. Tak lama kemudian setelah cabang-cabang Al Irsyad mulai menghasilkan lulusan, maka pada tahap pertama (1913-1930)

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 217-218.

dibuka tiga cabang lagi, yakni di Banyuwangi (1927), Bondowoso (1923) dan Bogor (1928). Sebagian besar guru-guru yang mengajar di tiga cabang ini adalah lulusan madarash Al Irsyad dari cabang Surabaya dan Pekalongan.

Berbeda dengan sistem pendidikan di pesantren, yang lebih menekankan penghafalan teologi dan hukum, sekolah Al Irsyad juga membekali siswanya dengan ajaran yang lebih komprehensif. Sekolah Al Irsyad juga menekankan pentingnya pengajaran bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan basis dari ilmu pengetahuan yang berasal dari ilmuwan Islam. Apalagi teks-teks sumber keilmuan, seperti al Qur'an dan Hadist ditulis dalam bahasa Arab. Yang membedakan lainnya, bahwa sekolah Al Irsyad tidak hanya diperuntukan untuk kalangan keturunan Arab, tetapi untuk setiap muslim.

Al Irsyad mengambil spirit kemajuan para pemikir Islam, seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Sehingga karya-karya pemikir-pemikir tersebut, seperti *Tafsir al-Manar* dan *Risalah al-Tawhid* merupakan bacaan wajib bagi siswa-siswa yang belajar di madrasah milik Al Irsyad. Al Irsyad lebih memilih karya kedua pikir ini, karena hal ini merupakan cara terbaik untuk menghidupkan kembali Islam. Dengan mengikuti konsep-konsep reformasi yang dijelaskan oleh kedua tokoh ini, Al Irsyad menyakini bahwa revitalisasi Islam akan terjadi, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pengikut Al Irsyad Sulayman Naji dengan mengatakan:

Madrasah pusat Al Irsyad yang pertama di Jakarta yang cukup berhasil dibawah kepemimpinan Syekh Ahmad Surkati adalah penyebab utama perkembangan sosial dan kebudayaan.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 219.

Al Irsyad tidak hanya berhasil memenangkan persaingan dengan kelompok Jamiat Khair, akan tetapi juga berhasil memperoleh simpati dan dukungan, baik dari kelompok muslim dari dalam negeri, seperti organisasi Muhammadiyah serta dari muslim luar, seperti kelompok reformis dari Mesir. Bahkan dalam berkala *Adil* yang merupakan corong informasi dan publikasi milik Muhammadiyah secara resmi dan terbuka mengakui bahwa munculnya kesadaran tentang arti pentingnya pendidikan di Indonesia, tidak lepas dari peran Al Irsyad. Bahkan menurut berkala ini, keunggulan Al Irsyad adalah keberhasilan mereka mencajak ulama yang terkenal dan mumpuni. Guru-guru Muhammadiyah pun lulusan Al Irsyad. Karena itu Muhammadiyah bisa dikatakan berguru pada Al Irsyad. Bahkan ijazah yang dikeluarkan oleh Al Irsyad diakui setara dengan ijazah keluaran dari *Tsanawiyah* Al Azhar.

Keberhasilan Al Irsyad dalam memajukan pendidikan muslim di Indonesia, tidak lepas dari figur pendirinya, yakni Syekh Ahmad Surkati serta strategi dan pendekatan yang dipergunakan oleh gerakan ini dalam menghadapi kebijakan politik kolonial Belanda. Kegiatan Al Irsyad yang menfokuskan diri hanya pada masalah *ubudiyah* (ibadah) dan tidak menyentuh masalah-masalah politik, maka pemerintah Belanda tidak banyak ikut campur tangan. Model pendidikan dan kurikulum pendidikan yang berbedar dari model klasik pesantren menjadi salah satu daya tarik lembaga ini. Dengan ide-ide reformasi dalam konteks pembaharuan Islam, Al Irsyad menjadi gerakan terdepan dalam mencerdaskan kaum muslim Indonesia.⁴⁸

Di Palembang sendiri, sejauh ini kami belum menemukan informasi yang lengkap mengenai organisasi ini dan sejauh mana kiprah dalam bidang pendidikan. Akan tetapi bila kita melihat bahwa mayoritas pendukung dan pendiri yang

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 219-221.

berasal dari keturunan Arab, tentunya mereka punya pengikut dikalangan masyarakat keturunan Arab dimanapun mereka tinggal di Indonesia, termasuk di Palembang. Bahkan pada tahun 1920-an di Palembang pernah didirikan *Arabieren School* (sekolah Arab), yang jejaknya salah satunya berada di kampung 13 Ulu Palembang. Mengenai data berapa jumlah sekolah dan murid sekolah Arab di Palembang bisa ditemukan dalam *Algemeen van het Versalg van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch* tahun 1902-1914, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Jumlah Sekolah Arab (*Arabieren Schoolen*) di Palembang Tahun 1902-1914

No.	Tahun	Sekolah	Murid
1.	1902	4	256
2.	1903	23	350
3.	1904	4	559
4.	1905	9	320
5.	1907	8	185
6.	1908	9	192
7.	1909	1	38
8.	1910	4	282
9.	1911	2	80
10.	1914	2	36

Sumber : *Algemeen van het Versalg van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch* tahun 1902 terbitan Batavia Landrukkerij tahun 1885-1916 dalam Husni Rahim, *Sistem Otoritas Administrasi Islam, Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Logos, 1998, hal. 175.

2. Relasi antara Lembaga Pendidikan dan Orientasi Nasionalisme

Permulaan awal abad kedua puluh, selain dipandang sebagai era baru dalam konteks kebijakan politik pemerintah kolonial-politik etis, juga fase baru bagi tumbuh dan berkembangnya spirit kebangsaan dikalangan penduduk pribumi maupun masyarakat keturunan Arab ataupun Cina. Tumbuhnya lembaga pendidikan baik yang bercorak dan berorientasi pada kepentingan etnis tertentu maupun lembaga pendidikan kolonial menjadi tempat persemaian semangat kebangsaan dan sekaligus penyumbang terbesar bagi munculnya kelompok intelektual.

Lembaga pendidikan seperti HIS, HCS, HAS dan lembaga pendidikan yang didirikan oleh kalangan masyarakat pergerakan seperti Muhammadiyah atau sekolah yang didirikan oleh masyarakat keturunan Arab, seperti Jamiat Khair dan Al Irsyad memiliki relasi bagi munculnya sikap kebangsaan dalam konteks orientasi politik. Masyarakat keturunan Arab di Indonesia sebagaimana masyarakat keturunan Cina tidaklah bersifat homogen, mereka berbeda baik dari asal-usul maupun stratifikasi sosialnya. Sehingga hal ini pada gilirannya berpengaruh pada sikap dan afiliasi pilihan politik antara mempertahankan status quo (penguasa kolonial) ataupun mendukung gerakan nasionalisme kaum pribumi.

Pada masyarakat keturunan Arab pemisahan tersebut, tampak dari pembedaan keturunan Arab dari kelompok *sayid* dan bukan *sayid*, yang pada titik tertentu mempengaruhi pula pilihan mereka dalam menentukan lembaga pendidikan kepentingan anak serta sikap politiknya. Hal tercermin dari lahirnya Jamiat Khair serta Al Irsyad. Semula organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam lapangan pendidikan seperti Jamiat Khair menjadi wadah bagi seluruh masyarakat keturunan Arab. Akan tetapi setelah adanya perbedaan sikap menyangkut pandangan budaya antara masyarakat keturunan

Arab dari golongan *sayid* dan bukan *sayid*, maka organisasi Jamiat Khair terbelah, mereka yang berasal dari masyarakat keturunan non-*sayid* mendukung pendirian Al Irsyad yang dirintis oleh Ahmad Surkati.

Perbedaan sikap politik terlihat jelas, ketika kalangan masyarakat Arab yang pro pada pergerakan nasional bangsa Indonesia mendirikan Partai Arab Indonesia (PAI), dimana mereka juga menyampaikan ikrar seperti Sumpah Pemuda, yakni Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab seperti disinggung pada bab sebelumnya. Bahkan PAI dalam pandangan salah seorang tokoh nasional kita, Ki Hajar Dewantara merupakan organisasi politik yang memiliki semangat dan sepek terjang yang paralel dengan cita-cita kebangsaan kita. Bahkan organisasi ini berupaya menjembatani perbedaan pendapat diantara kelompok keturunan Arab di Indonesia, yakni antara orang yang bergabung dalam gerakan Al Irsyad dan Ar-Rabitah. Tidak kalah pentingnya dari usaha PAI yakni adanya pengakuan bahwa Indonesia sebagai tanah air mereka, yang tentunya mempertegas posisi keturunan Arab, tidak sebagai orang Islam, akan tetapi sebagai nasionalis.⁴⁹

Dalam konteks Palembang, kelompok keturunan Arab disini juga mengalami friksi, antara kelompok yang mendukung status quo dan mereka yang cenderung bersikap pro nasionalis pribumi. Harian *Pertja Selatan* mewartakan bagaimana perdebatan dan pertentangan antara kelompok internal keturunan Arab di Palembang. Berawal dari peresmian Madrasah Arabiah milik orang Arab di kamoung 13 Ulu oleh Gubernur Jendral A.C. De Graff pada bulan September 1929, sebagaimana diberitakan oleh harian ini pada tanggal 24 September 1929 dengan kutipan berita sebagai berikut:

⁴⁹ Hamid Algadri, *Islam dan Keturunan Arab Dalam Pemberontakan Melawan Belanda*, Jakarta: Mizan, 1996, hal 170-171.

"...Lebih djaoeh dinjatakan terang2an kesoekaan dan keinginan bangsa Arab menoerot oetjapannya si pembitjara, biarlah selamat sentosa kekoeasaan Keradjaan Belanda disini oentoek bemaengnya bangsa Arab, sedang rakjat Indonesia mengharap dan berdaja akan dapat mengibarkan bendera Pemerintah Indonesia Raya..."

Kemudian Pertja Selatan juga menerbitkan sejumlah komentar singkat yang bernada anti Arab pada beritanya tanggal 1 Oktober 1929, sebagaimana kutipan dibawah ini:

"...Tetapi bangsa Arab terkenal dalam kalangan *Indonesiers* hanya kaja, lebih dari sekoempeni goeroe2 agama sadja...(maaf Toe'an Arab, saja mae bilang teroes terang...*terwille van uw belang*)..tukang *menderengnja* [pe; maksudnya pemberi pinjaman uang dengan bunga pinjaman sangat besar atau 'rentenir'.⁵⁰

Kutipan diatas memperlihatkan bahwa dalam masyarakat keturunan Arab sebenarnya juga terdapat benih-benih perbedaan sikap terhadap pergerakan nasional. Bahkan salah seorang keturunan Arab yang bernama Said Syekh Alwie Sjahab atau Al Gathmyr, dengan menggunakan nama samaran "Jong Hadramauter" menyerukan agar komunitas Arab di Palembang mengambil jarak kepada mereka yang memihak Belanda. Hal ini disampaikan menanggapi pidato Kepala Sekolah Madrasah Arabiah, Muhammad bin Alimunar yang memuji pemerintah kolonial Belanda dalam pidatonya tersebut.

⁵⁰ Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hal 144.

Bahkan keluarga Alimunar menjadi marah, serta menyediakan dana sebesar f.500 untuk memburu orang dengan nama samaran "Jong Hadramauter" ini. Memang kelompok keturunan Arab di Palembang sebagian besar lebih memilih sikap aman, dan tentu lebih pragmatis dengan memihak kepada kepentingan kolonial. Hal ini tidak berarti dilingkungan internal mereka sendiri, mendukung sikap ini, seperti diperlihatkan oleh fenomena "Jong Hadramateur" tersebut. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan Al Irsyad serta PSII (Partai Syarekat Islam Indonesia) menjadi institusi pendidikan yang melahirkan kader nasionalis pada periode ini.

Muhammadiyah dan PSII menjadi corong utama kaum modernis Islam dalam menghadapi kelompok kaum tua yang banyak didukung oleh pemerintah kolonial. Seperti halnya dua organisasi diatas, Al Irsyad yang bergerak dalam lapangan pendidikan juga mendirikan madrasah di daerah Ranau pada tahun 1927 dan mendirikan koperasi *Kemadjoean Kaoem Moeslimin*, koperasi yang sama juga didirikan di daerah Tubuhan dan Ogan Ulu satu tahun kemudian.

Al Irsyad di Ranau didirikan oleh Ahmad Rivai, seorang guru agama yang telah beberapa tahun belajar di Batavia. Ketika kembali ke Pagar Dewa, Ahmad Rivai dengan dukungan masyarakat sekitarnya mendirikan sekolah ini. Bahkan pada peresmian sekolah ini pada tanggal 31 Juli 1927, pembukaan sekolah ini mendapat perhatian ratusan orang termasuk kontrolir dan demang Moera Doea.⁵¹

Demikian juga dengan Muhammadiyah yang melakukan kegiatan pendidikan di daerah pedalaman, yakni di pasemah dengan pusatnya di Pagar Alam yang sebagian besar digerakkan oleh pendatang dari Padang. Sekolah

⁵¹ Jeroen Peters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Jakarta: INIS, 1997, hal. 222.

Muhammadiyah yang didirikan ditempat ini dikepalai oleh Kiagus H. Moh Hasan (ulama dan guru agama) dibantu oleh Ahmad Djamiun dan Sutan Siri yang berasal dari Minangkabau. Muhammadiyah Pagar Alam juga mendirikan koperasi dengan nama *Sarikat Tolong Menolong* dan sebuah *Studieclub* LONA (*Laat ons niet achterblijven*, jangan biarkan kami terbelakang). Hal yang sama juga didirikan di Sungai Ramok, Lematang Ulu. Organisasi sosial seperti ditemukan di beberapa tempat dengan meniru model organisasi induknya di Palembang.⁵²

D. Penutup

1. Kesimpulan

Permulaan awal abad ke-20 merupakan fase baru dalam kehidupan sosial politik dan budaya masyarakat Hindia Belanda, yakni diterapkannya politik etis. Lahirnya politik etis ini menandai fajar baru dalam konteks kebijakan politik kolonial. Bahkan dengan makna yang lebih halus, politik etis dipandang sebagai cara penguasa kolonial dalam membayar "hutang budi" kepada masyarakat pribumi. Zaman ini meminjam istilah Takashi Shiraisisebagai "zaman bergerak" (*the age motion*). Merujuk pada munculnya kegairahan masyarakat Hindia Belanda akan perbaikan nasib kehidupan mereka, yang secara eksplisit tercermin dari penggunaan kata-kata yang mengartikulasikan kemajuan seperti *voortgang*, *opheffing* (kemajuan), *ontwikkeling* (perkembangan) dan *opvoeding* (pendidikan) yang dibubuhkan dalam bahasa saat itu bersama *bervoeding van welvaart* (memajukan kesejahteraan).

Dalam batas tertentu semangat zaman etis adalah "kemajuan menuju modernitas" dalam arti perkembangan dibawah pengawasan Belanda dan "modernitas" seperti

⁵² *Ibid.*, hal. 147

ditunjukkan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda dan dipahami sebagai peradaban barat. Pendidikan menjadi isu utama dari kebijakan politik etis kolonial, selain irigasi.

Dalam konteks pendidikan, Palembang sebagaimana daerah lain di wilayah jajahan Hindia Belanda, mulai didirikan lembaga pendidikan barat, seperti ELS (*Europeesche Lagere Schoolen*) untuk masyarakat Eropa, HIS (*Holland-Indlandsche Schoolen*) sekolah untuk bumiputra dengan bahasa pengantar Belanda untuk kalangan bangsawan pribumi serta HCS (*Holland-Chineesche Schoolen*) untuk orang Cina. Pada tahun 1932 di Palembang terdapat 3 (tiga) buah ELS, 3 (tiga) buah HIS serta 1 (satu) buah HCS.

Bagi komunitas keturunan Arab di daerah ini, didirikan *Arabieren Schoolen*, tercatat pada tahun 1902 terdapat 4 (empat) buah sekolah, kemudian berkembang pesat menjadi 23 (dua puluh tiga) buah pada tahun 1903. Sampai tahun 1910, jumlah sekolah tersebut bertahan, kemudian perlahan-lahan menurun pada tahun 1914. Kemunduran tersebut menurut Husni Rahim karena sejak tahun 1909 keinginan orang Arab untuk memasuki HIS cukup tinggi setelah di Palembang gagal dibentuknya sekolah Arab yang menggabungkan kurikulum agama dan umum seperti Jamaitul Khair di Batavia (Jakarta)

Selain itu komunitas keturunan Arab di Palembang juga mendirikan beberapa organisasi sosial seperti Al Ihsan (1907) yang bergerak dalam bidang pendidikan, maupun cabang dari Jamiat Khair dan Al Irsyad yang merupakan organisasi sosial kependidikan yang berpusat di Batavia (Jakarta). Munculnya beberapa organisasi kependidikan dalam internal masyarakat keturunan Arab di Palembang tidak terlepas dari adanya fragmentasi dan segmentasi dari kelompok mereka sendiri, yakni golongan *sayid* (bangsawan) dan non-*sayid*

Kelompok *sayid* (bangsawan) dan non-*sayid* memiliki orientasi yang berbeda termasuk dalam kecenderungan orientasi nasionalisme *vis a vis* penguasa kolonial Belanda. Golongan *Sayid* yang ingin mempertahankan tradisi leluhurnya dan status istimewa mereka dikalangan komunitas keturunan Arab, yang hal tentu saja ditentang oleh mereka yang bukan dari golongan *sayid*. Sehingga organisasi Jamiat Khair yang semula menaungi semua kelompok keturunan Arab di Hindia Belanda, pada akhirnya hanya menjadi organisasi terbatas untuk kalangan Arab *sayid*. Hal ini pada akhirnya mendorong kelompok yang berpandangan berbeda membentuk organisasi baru-Al Irsyad- untuk menampung kegiatan mereka selepas dikeluarkan dari Jamiat Khair. Mereka yang bergabung kedalam organisasi Jamiat Khair cenderung untuk mempertahankan *status quo*, sedangkan kelompok Al Irsyad menginginkan pembaharuan serta akomodatif dengan kepentingan Islam masyarakat pribumi, hal ini yang pada akhirnya mempengaruhi orientasi pemilihan lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka.

2. Saran

Terlepas dari hasil penelitian yang masih jauh dari harapan kita semua, yang disebabkan oleh karena adanya berbagai kendala seperti minimnya sumber data serta keterbatasan waktu penulis. Pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari kajian ini, yakni bahwa pemahaman terhadap kelompok etnik tertentu baik itu keturunan Arab maupun Cina tidak bisa dilihat dari kacamata tunggal, melainkan harus diletakan dalam perspektif yang lebih proporsional sesuai dengan jiwa jamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Makmun dkk, *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, Jakarta: Depdikbud, Proyek IDSN, 1984/1985.
- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Affandi, Bisri, Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943), *Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999.
- Asih Putriana Taim, Eka, *Pemukiman Tepi Sungai di Kota Palembang Dari Masa Ke Masa*, dalam Jurnal Arkeologi Siddhayarta Volume 7 N0.2, Palembang: Balai Arkeologi Palembang, 2002.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Akar Pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Bigalke, Terry, "The Oral History Methode", dalam *Sejarah Lisan*, Jakarta: Lembaran Berita Arnas, No.9 Oktober, 1982.
- Jumhari dkk, *Arab Palembang Dari Masa Kesultanan Sampai Kolonial Belanda, Suatu Kajian Sejarah Sosial*, Padang: BKSNT, 2005.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terjemahaan Noegroho Notosoesto, Jakarta: UI Press, 1986.
- Hanafiah, Johan, *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Iskandar. T, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka, 1986.

- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Koentjaraningrat, "Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu" dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Lohanda, Moha, "Studi Minoritas Dalam Spektrum Kajian Sejarah Indonesia", dalam (HenryChamber-Loir & Hasan Muarif Ambary ,ed), *Panggung Sejarah, Persembahan kepada Prof.Dr. Denys Lombard*, Jakarta: Ecole francaise d'Extreme-Orient, Pusat Penelitian Arkenas & Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Mujib, *Pemukiman Masyarakat Asing di Palembang pada masa Kesultanan*, dalam Majalah Arkeologi Kalpataru , Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004, hal 35-39.
- Purwati, Retno, *Sejarah Perkembangan Pemukiman Masyarakat Cina di Palembang*, Palembang: Jurnal Arkeologi Balar Palembang, 2002.
- Rahim, Husni, *Sistem Otoritas Administrasi Islam, Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Penerbit Logos ,1998.
- Salim Peter dan Yani Salim, *Kamus Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1995.
- Taim, Eko Asih Putriana, *Pemukiman Tepi Sungai di Kota Palembang*, Palembang: Jurnal Arkeologi Balar Palembang, 2002.
- Van den Berg, L.W.C, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, Jakarta: Seri Terjemahan INIS, 1989.

Van Sevenhoven, J.L, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, diterjemahkan oleh Sugarda Purbakawatja, Jakarta: Bhratara, 1971.

Wolters, O.W, *The Fall of Sriwijaya in Malay History*, Singapura: Oxford University Press, 1970.

Zed, Mestika, *Kepialangan Politik dan Revolusi, Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003.

-----, "The Dualistic Economy of Palembang in Late Colonial Period, Thomas J. Linblad (ed), *Historical Foundation of National Economy in Indonesia, 1890s-1990s*, North-Hollands Akademie van Wetenschappen Verhandeling, Afd Letterkunde, Nieuwe, dell 167, 1996.

SYAFEI IBRAHIM
Dinamika Perjuangan dan Pengabdian
Oleh : Ajisman

A. Pendahuluan

Dalam ungkapan dikatakan “bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya”. Pahlawan adalah orang yang telah berjasa demi kepentingan bersama untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan kedamaian. Mereka berprestasi dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem pembaharuan dan mempertahankan kemanan, pendidikan, ilmu pengetahuan, keolahragaan dan sebagainya.¹

Pahlawan muncul karena adanya kebutuhan kultural masyarakat. Masyarakat merindukan sosok yang membuat jalan mereka di masa kini makin mantap dan masa depan makin terang. Sejarah itu bukan saja “diingat”, tetapi juga “ditemukan”. Diingat peristiwanya dan ditemukan makna dibalik peristiwa.

Kata pahlawan memiliki banyak definisi dan makna, tetapi figur seorang tokoh biasanya merupakan bagian dari makna pahlawan, akan tidak semua tokoh adalah pahlawan, walaupun pahlawan adalah tokoh, baik nasional maupun lokal. Pahlawan sejati adalah seorang yang telah melewati ujung panah, detak mariani dan mengalami perang. Mereka yang telah tewas di medan perang disebut sebagai anumerta.²

Penulis biografi tokoh Bengkulu masih merupakan hal yang langka, lebih khusus lagi biografi tokoh pejuang Bengkulu. Selama ini, Bengkulu kurang mengenal para

¹ Suardi Syafi'i. *“Menulis Biografi”, dalam Pemikiran Biografi dan Kesejarahan: Suatu Kumpulan Prasaran pada Berbagai Lokakarya*. Jilid II. Jakarta: Depdikbud, 1984, hal. 97.

² Bambang Utomo. *“Kepahlawanan Yang Kreatif”*. Kompas, 10 November 1987.

pahlawan dan tokohnya, baik bagi masyarakatnya maupun generasi muda atau generasi penerus. Hal ini dikondisikan karena terbatasnya buku-buku tentang kepribadian dan peranan tokoh dalam menentang kehadiran bangsa asing, terutama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan di Bengkulu.³

Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan. Mereka yang memiliki pengalaman masa revolusi tidak sampai direkam ingatannya. Kita seakan kehilangan jejak sejarahnya. Meski begitu, kita masih dibantu dengan adanya literatur tentang sejarah perjuangan rakyat Bengkulu yang ditulis oleh orang-orang dari berbagai latar belakang profesi.⁴ Bagi sejarawan tentu kondisi tersebut masih merupakan lahan yang luas untuk dikaji, khususnya kajian sejarah.

Secara formal sudah ada dua orang tokoh asal Bengkulu yang diangkat sebagai pahlawan nasional, yaitu Prof. Dr. Hazairin (1999) dan Fatmawaty Soekarno (2001). Selanjutnya, diusulkan oleh Badan Pembina Pahlawan Daerah Bengkulu kepada pemerintah, dua orang lagi yakni M. Hasan dan Ir. Indera Tjaja.⁵ Dan tidak tertutup kemungkinan tokoh pejuang lainnya. Kebutuhan akan perlunya pengakuan secara nasional terhadap kiprah pejuang Bengkulu agaknya akan makin menguat disela-sela derasnya hembusan angin otonomi daerah.

Salah satu diantara tokoh yang berveran penting dalam perjuangan rakyat Bengkulu adalah Syafei Ibrahim. Ia

³ Nawawi Manaf. *Perjuangan Kemerdekaan di Bengkulu*, dalam munaskrip. Bengkulu: tidak diterbitkan, 1997, hal. 1.

⁴ Mereka yang telah menulis Sejarah Perjuangan Rakyat Bengkulu, antara lain Abdullah Sidik, M.Z. rani dan Zakaria Kamidan. M.Z. Ranni, *Perlawanan Terhadap Penjajahan dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka), 1990.

⁵ Lihat Badan Pembina Pahlawan Daerah Provinsi Bengkulu, "Daftar Riwayat Hidup, Riwayat Pekerjaan, dan Riwayat Perjuangan Ir. Idera Caya". Bahan pengusulan Calon Pahlawan Nasional Provinsi Bengkulu, Juni 2002.

lahir dalam suasana revolusi yang ditandai oleh ketidakpastian dan suasana yang terus berubah dengan cepat. Syafei Ibrahim berhasil mengimpun rakyat bersama tentara bersatu melawan penjajah. Syafei Ibrahim adalah seorang tokoh pejuang dengan karimnya sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Bengkulu yang sejati.

Gebrakan yang dilakukan oleh Syafei Ibrahim bersama tokoh lainnya dengan membentuk barisan-barisan perjuangan antara lain Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Angkatan Baru (PAB), Gyugun, Heiho dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Syafei Ibrahim bersama teman seperjuangannya pernah di penjara di Muara Padang, akibat aktivitasnya dalam melawan tentara Jepang dan sekutu. Semangat Syafei Ibrahim dalam melawan penjajah sangat tinggi karena mendapat dukungan dari para tokoh pejuang yang juga sama diasingkan di Penjara Muara Padang.

Syafei Ibrahim adalah seorang tokoh pemberani, dengan segala keterbatasan mampu membawa "suara lokal" kedalam bilik pergerakan kebangsaan secara keseluruhan. Sepanjang pengetahuan penulis, penulisan Biografi Syafei Ibrahim yang lebih utuh belum dilakukan, kecuali bagian dari biografi kolektif dan tulisan lepas yang terserak di media massa. Disamping itu para tokoh pejuang di Bengkulu kondisi fisik dan pikiran dari para tokoh tersebut sudah semakin sedikit, karena telah banyak yang meninggal dunia. Jika ada diantara mereka yang masih hidup kondisi mereka sudah sangat memprihatinkan, karena sulit berbicara, kurangnya pendengaran, dan kelemahan fisik lainnya, karena rata-rata mereka sudah lanjut usia. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian dan penulisan Biografi mengenai tokoh "Syafei Ibrahim: sebagai tokoh pejuang yang terlupakan sangat perlu dilakukan.

B. Selayang Pandang Kota Bengkulu

Kota Bengkulu,⁶ ibukota Provinsi Bengkulu berada di tepi Pantai Barat pulau Sumatera, diantara 102° 16 Bujur Timur 2° 48 Lintang Selatan. Daerah ini berada diantara laut dan garis pantai sepanjang 500 m. Dengan demikian, daerah tersebut wilayah Bengkulu menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1967 adalah 19.978,87 km², dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0-20 meter.

Secara astronomis, kota Bengkulu terletak 3° 45' - 3° 59' Lintang Selatan dan 102° 22' bujur Timur. Dengan letaknya yang seperti demikian, daerah tersebut banyak mengalami cuaca panas yang ditandai dengan tingginya curah hujan di atas 300 mm/bulan. Kota Bengkulu berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah Barat, Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah Timur, kabupaten Bengkulu Selatan di sebelah Selatan, dan Kabupaten Bengkulu di Utara di sebelah Utara.

Jarak kota Bengkulu ke ibukota Provinsi yang lain, yaitu ke Padang sejauh 977 km ke Palembang 560 km dan ke Jambi 470 km. kota Bengkulu membujur dari utara ke selatan. Relief permukaan tanahnya relatif bergelombang dengan daratan pantai dan daerah yang berbukit-bukit. Rata-rata suhu udara berkisar antara 21°C - 31°C. Kota Bengkulu terbagi ke dalam empat kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Gading Cempaka, dan Kecamatan Muara Bengkulu.

⁶ Menurut *Memorie van overgave dan offredende Residen van Berkulen* L. C. Westenek, sebagaimana dikutip A.B. Lopian dan Suwadji Syafei (1984: 1), Keresidenan Bengkulu memiliki Luas: 24.400 km². provinsi Bengkulu dahulu merupakan wilayah keresidenan Bengkulu tanpa Kroei (Lampung) dan Tanjung Sakti (Sumatera Selatan).

Kota Bengkulu kaya dengan peninggalan bangunan bersejarah dan budaya. Apa bila memasuki kota Bengkulu, terutama di tempat-tempat strategis, sekarang banyak dijumpai tugu tabot⁷ dimana-mana seperti di persimpangan jalan yang ada di tengah kota Bengkulu. Tugu tabot merupakan identitas kota yang memiliki nilai historis dan budaya. Harapan untuk selalu melestarikan nilai budaya di tengah masyarakat, sampai sekarang tabot selalu dirayakan setiap tahun pada bulan Muharram selama sepuluh hari, tanggal satu sampai sepuluh. Tradisi tersebut diwarisi secara turun turun temurun oleh keluarga tabot, kepada keturunannya.

Bengkulu juga dikenal dengan Benteng Marlborough. Benteng ini masih berdiri dengan megah dan melambangkan bahwa Bengkulu pernah dijajah oleh Inggris, disamping itu juga melambangkan perlawanan rakyat Bengkulu terhadap penjajah. Selain Benteng Marlborough.⁸ Ada juga bangunan bersejarah yang lainnya, seperti Tugu Tomas Parr.⁹ Tugu Robert Hemilton,¹⁰ rumah bekas kediaman Bung Karno,

⁷ Sampai sekarang upacara tabot tetap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat Bengkulu. Masyarakat Bengkulu menerima budaya tabot dari orang Sipahi (India) pada masa penjajahan Inggris. Mereka bekerja sebagai buruh. Upacara tersebut menggambarkan gugurnya Hasan-Husen cucu Nabi Muhammad SAW.

⁸ Benteng Marlborough adalah Benteng terbesar kedua dibangun Inggris setelah India. Benteng Marlborough pernah ditinggalkan Inggris akibat sengitnya perlawanan Pangeran Sungai Limau bersama orang Pondok Kelapa.

⁹ Tugu Thomas Parr berada dekat Taman Makam Pahlawan. Thomas Parr tewas di Istana Felix akibat serangan Depati Pagar Dewa dan Sukarni. Ia ditembak dengan meriam ke tengah laut dari Benteng Marlborough.

¹⁰ Tugu tersebut berupa makam Robert Hemilton yang berada di Tebek. Ia adalah Kapten Angkatan Laut Inggris yang memimpin armada Inggris kawasan selatan di Timur Jauh.

Makam Sentot Ali Basyah, Masjid Jamik dan masih banyak lagi.¹¹

Penduduk kota Bengkulu terdiri dari berbagai macam etnis atau suku bangsa. Pada umumnya mereka mendiami daerah perkotaan. Sedangkan penduduk asli Bengkulu yang terdiri dari 4 suku, yaitu Serawai, Lembak, Basemah, dan Rejang, sudah agak sulit ditemukan di kota Bengkulu. Kebanyakan mereka bermukim di kampung-kampung pedalaman Provinsi Bengkulu. Selain suku bangsa tersebut, juga terdapat suku bangsa pendatang dari wilayah Indonesia lainnya, yaitu Padang, Jawa, Bali, Sunda, Bugis, Batak, Ambon, dan Palembang, yang kemudian tinggal menetap menjadi penduduk asli Bengkulu dengan berbagai motivasi dan profesi. Ada yang datang sebagai pedagang, sebagai stramigran (terutama di Bengkulu Utara). Kemudian datang juga orang-orang Cina mereka sebagian besar tinggal di kota-kota sebagai pedagang. Sedangkan yang tinggal di desa hanya sebagian kecil saja dan hidup sebagai petani kebun.¹²

Diperkirakan, penduduk asli Bengkulu yang mendiami kota Bengkulu adalah suku Melayu , karena pada awalnya yang ditemui oleh para pendatang adalah suku Melayu. Yang cukup menguatkan pendapat tersebut adalah sejak awal hingga kini yang mendiami dan menguasai kantong-kantong ekonomi di kota Bengkulu adalah suku Melayu ini.

Sebagian besar penduduk kota Bengkulu beragama Islam. Umumnya warga taat menjalankan perintah agama. Perubahan sosial yang terjadi menyebabkan mereka mengalami komplik agama dengan realita sosial dalam kehidupannya. Selain itu ada juga sebagian kecil penduduk yang menganut agama Kristen dan Budha. Kesenian saerah

¹¹ Lebih lanjut Lihat Ajisman dkk, *Bangunan Bersejarah di Kota Bengkulu*. Laporan penelitian BKSNT Padang 2003.

¹² A.B. Lopian dan Suwadi Syafe'i. *Sejarah Sosial Daerah Bengkulu*. Jakarta: IDSN Depdikbud. 1984, hlm. 52.

hidup bersamaan dengan kehidupan adat istiadat leluhur. Kesenian daerah tumbuh bersamaan dengan adat dan upacara tradisional yang terpelihara. Pola hidup gotong royong mewarnai kehidupan masyarakat. Kesatuan dan kerukunan hidup dalam keluarga terbina dengan baik. Hal ini tampak dalam sistem kerabat dan berbahasaan (sapaan, panggilan, julukan, gelar) yang membudaya di tengah-tengah masyarakat.

Sejarah dan perkembangan kota Bengkulu cukup sulit untuk ditelusuri. Karena arus sejarah bergerak secara terus menerus sulit untuk memberikan pijakan awal dimana pertumbuhan kota-kota dimulai. Tetapi sebelum itu, akan digambarkan sedikit mengenai asal-usul penamaan "Bengkulu".

Ada beberapa versi yang berhubungan dengan nama "Bengkulu". Versi pertama diangkat dari cerita rakyat. Kata yang empunya cerita, nama Bengkulu berhubungan dengan peristiwa penyerangan Kerajaan Aceh ke Kerajaan Sungai Serut. Pada saat itu sekitar abad ke 16 para pedagang dari Aceh datang ke Bandar sungai Serut. Mereka bermukim di sebuah bukit tidak jauh dari pantai (Sekarang bukit itu disebut bukit Aceh). Mereka membeli lada dan hasil bumi lainnya. Suatu ketika putra Sultan Aceh bertemu dengan putrid Gading Cempaka. Putra Sultan Aceh terpesona dengan kecantikannya putri Gading Cempaka, maka ia kepingin meminangnya. Sultan Iskandar muda, menyetujui keinginan anaknya. Karena hal itu dapat mendukung pengaruhnya di kawasan itu. Pinangan itu ternyata ditolak menta-menta oleh raja Anak Dalam, penguasa Kerajaan Sungai Serut. Raja Anak Dalam adalah kakak dari Putri Gading Cempaka. Penolakan tersebut menimbulkan kemarahan Sultan Aceh.

Mereka mengatakan perang dengan kerajaan Sungai Serut dengan mengirim pasukan dibawah pimpinan panglima laut.¹³

Dalam perjalanan menuju laut Sungai Serut, tentara Aceh mengalami kesulitan. Pihak kerajaan Sungai Serut menghanyutkan potongan kayu dari hulu. Usaha tersebut dimaksudkan untuk menghambat pasukan Aceh. Strategi tersebut dikenal dengan slogan “empang ke hulu” artinya hambat ke hulu. Dengan taktik tersebut pasukan Aceh berhasil dipukul mundur. Slogan tersebut begitu populer dikalangan rakyat Bengkulu hingga sekarang. Kata “Empang ke Hulu” bergeser penyebutannya menjadi “Bengke Hulu”. Bengke Hulu, hingga lama kelamaan menjadi “Bengkulu”.

Pendapat kedua mengatakan nama Bengkulu dengann Kerajaan Banten. Kabarnya, kata Bengkulu berasal dari kata “Banten Kulon”, yaitu bagian negeri Banten yang berada di sebelah Barat (Kulon). Dari istilah tersebut kemudian berubah menjadi “Bengkulu”.

Pendapat lain juga mengatakan bahwa kata “Bengkulu” berasal dari “Abang Kulon” yang berarti sinar merah (abang) diseelah barat (Kulon). Pernamaan tersebut diberikan oleh orang yang bermukim di daerah pedalaman. Karena pada waktu sore mereka melihat sinar merah matahari yang terbenam di sebelah barat. Secara formal nama “Bengkulu” baru muncul pada paruh akhir ke 17, pegawai komponi Inggris menggunakan kata itu ketika mereka mulai mengunjungi pantai Bengkulu. Sumber Protugis yang ditulis Tome Pires menyebutkan adanya sebuah kerajaan yang bernama Andalas yang terletak antara Periaman, Palembang dan Tulang Bawang. Melihat posisinya itu, tentu kerajaan Andalas mengacu kepada Bengkulu.

¹³ Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu 1500-1900*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 45.

Sejak abad ke-16 daerah yang sekarang, disebut sebagai kota Bengkulu merupakan penghasil lada atau merica. Keadaan ini mengundang suku bangsa dan kerajaan lain datang ke Bengkulu. Mereka bukan saja berdagang, melainkan juga mencoba menanamkan pengaruh kekuasaan daerah ini. Kerajaan Banten misalnya, sejak berkuasanya Sultan Hasanuddin sampai dengan Sultan Ageng Tirtayasa, daerah ini merupakan sekutuh yang dipengaruhi.

Inggris kemudian menguasai Bengkulu hingga tahun 1824-1942. Pada masa kolonial Belanda, luas kota Bengkulu sekitar 18 km. Pada kenyataannya wilayah pengaruh dan operasi lingkungan perkotaan meluas sekitar 142 km. Perluasan itu meliputi batas pelabuhan Selebar Selatan dan ke daerah kerajaan Sungai Limau di Utara. Adapun kerajaan yang terkenal di daerah ini adalah kerajaan Selebar di sebelah selatan dan Kerajaan Sungai Limau di sebelah utara kota. Raja yang terkenal adalah Ratu Agung sebagai raja besar yang disebut-sebut dalam tradisi lisan Tambo Bengkulu.

c. Selintas Syafei Ibrahim

a. Putra Daerah Yang Lahir di Rantau

Ayah Syafei Ibrahim adalah seorang pegawai pemerintah Belanda *Schoolopschiener* (Penilik Sekolah), yang bernama Ibrahim. Ibrahim termasuk orang yang beruntung karena ia dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang terpandang. Seorang *ambtenaar* tentu pada dasarnya ia cukup berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Selain karena ia memiliki pretise dimata masyarakat, tentu ia juga memiliki akses pada pemerintah kolonial Belanda. Ibu Syafei bernama Kamalia. Syafei merupakan anak tertua, masing-masing Syagab, Syarifuddin, Nurul Aini Gatam, Hayati, Lukman, Asnawi, Ulfa, Fauzan dan Azizah Faulin.

Menurut keterangan dari Burmawi Manan, keturunan Syafei Ibrahim dari pihak Ibu berasal dari Sulit Air Solok

Sumatera Barat. Berikut ia mengungkapkan “Nenek moyang kami yang pertama kali datang ke Bengkulu ini dulunya bernama Sutan Khatib Bertua. Ia terkenal sebagai penyebar agama Islam sambil berdagang di Bengkulu ini. Menurut sejarahnya penyebar agama Islam di daerah Bengkulu ini disamping saudagar dari Jaw juga pedagang dari Sumatera Barat, namun tidak didapat keterangan tahun berapa nenek moyang kami itu datang ke Bengkulu ini”.¹⁴

Ayah Syafei Ibrahim berasal dari Bengkulu Selatan dan lahir di kota Mana. Tidak didapatkan keterangan dimana ayah dan Ibu Syafei bertemu pertama kalinya. Hanya disebutkan bahwa Ibrahim pernah berhasil menamatkan sekolah *Kweekschol* (Sekolah Pendidikan Calon Guru) di Bukittinggi pada tahun 1921.¹⁵ Kemudian Ibrahim diangkat sebagai guru sekolah HIS (*Hollandsch School*) di Teluk Betung Suamtera Selatan.

Sebagai guru HIS di Teluk Betung, Ibrahim termasuk deretan *ambtennar* (Pegawai Pemerintahan Kolonial Belanda) Selama di Teluk Betung itulah Ibrahim dan isterinya, Kamaliah dikaruniai oleh Allah SWT seorang anak laki-laki yang diberi nama Ahmad Syafei. Ahmad Syafei lahir pada tanggal 10 Januari 1922.¹⁶

Ada suatu radisi dari sebagian masyarakat yang sengaja memberikan salah satu waisan dengan cara melekatkan nama orang tua di belakang nama anak-anaknya. Tanpaknya tradisi tersebut diterapkan juga oleh Ibrahim dalam keluarganya. Oleh sebab itu, nama Ahmad Syafei kemudian menjadi lebih dikenal dengan nama Syafei Ibrahim, bahkan dikalangan masyarakat Bengkulu nama itu terus melekat sampai sekarang.

¹⁴ Wawancara dengan Burmawi Manan, tanggal 22 Maret 2007 di Bengkulu

¹⁵ Wawancara Agus Setyanto dengan Syafei Ibrahim Bengkulu, Mei 2001

¹⁶ Wawancara Agus Setyanto dengan Syafei Ibrahim, Bengkulu, Mei 2001

Ahmad Syafei yang masa kecilnya dipanggil "Fi'i" ia lahir dalam Susana ketika perjuangan kemerdekaan sedang mencapai puncaknya. Pada periode ini pula telah lahir ideologi perjuangan yang disebut nasionalisme. Harapan kemerdekaan bukan lagi semacam angan-angan akan tetapi telah menjadi gugatan terhadap kepongahan penjajah. Pada permulaan abad ini tekanan terhadap kolonialisme sudah semakin kuat.

Ayah Syafei Ibrahim sering berpindah-pindah tugas, pekerjaannya sebagai penilik sekolah yang membuat ia berpindah-pindah tugas ke pelosok daerah. Pada suatu ketika Syafei masih kecil baru berumur 40 hari terpaksa dibawa ke Bengkulu, karena ayahnya dipindah tugaskan sebagai guru HIS ke tempat asalnya. Sebagai salah seorang *ambtennar*, Ibrahim diminta untuk selalu loyal kepada pemerintah kolonial Belanda.¹⁷

b. Masa Pendidikan yang Berpindah-Pindah.

Syafei Ibrahim sebagai seorang anak *ambtenaar* (pegawai Belanda) merasa sangat beruntung, karena dapat menikmati pendidikan formal pada zaman kolonial Belanda. Bagi kaum *inlander*, untuk dapat masuk Europeeschool (Sekolah Eropa), harus melalui seleksi yang sangat ketat. Struktur sosial di Hindia Belanda dibangun kolonial menurut bentuk pyramidal. Pada lapis yang paling atas ditempati kaum kolonial, pembesar pada lapis kedua *oosterlingen* (Timur Asing) yang terdiri dari Cina, Arab dan sebagainya. Pada lapis terbawah ditempati oleh kaum *inlander*. Pelapisan sosial yang distrukturkan kolonial juga berpengaruh terhadap akses sosial, politik dan ekonomi. Tidak semua kalangan pribumi dapat masuk sekolah Eropa. Hanyalah anak-anak orang kaya, *ambtenaar*, dan elit pribumi. Lagi pula untuk masuk "sekolah elit" ditentukan dengan jumlah gaji orang tua. Jika tidak

¹⁷ Wawancara dengan Yurmawi Manna, tanggal 23 Maret di Bengkulu.

mencukupi, tentukan ditolak. Berdasarkan ketentuan pemerintah (staatsblad 1914 No. 359), ada empat kemungkinan kaum bumi putera dapat masuk sekolah HIS, yaitu status sosial, jabatan, kekayaan dan pendidikan orang tua.¹⁸

Dengan posisi Ibrahim (ayah Syafei Ibrahim) sebagai *ambtenaar*, maka Syafei Ibrahim memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan disekolah Belanda. Pendidikan dualistic kolonial ternyata seperti pedang bermata dua. Disatu sisi, keperluan pemerintah Hindia Belanda untuk mengisi lowongan administrasi melalui tenaga peribumi sangat dibutuhkan. Disisi lain, sekolah telah menciptakan anak-anak pribumi yang berfikir maju. Pikiran tersebut menjelma menjadi suatu kesadaran baru, yakni keinginan menjadi suatu bangsa yang merdeka.

Pada tahun 1928, Syafei Ibrahim dimasukan ke sekolah HIS (*Hollandsch School*).¹⁹ di Teluk Betung oleh orang tuanya. Karena pada saat itu orang tua Syafei masih bertugas di Tanjung Karang. Syafei termasuk anak yang patuh kepada orang tua. Seluruh nasehat dari orang tuanya dilaksanakan dan diturutinya. Karena Syafei Ibrahim tidak mau mengecewakan kedua orang tuanya. Disamping itu Syafei Ibrahim sangat menyadari bahwa dengan jabatan ayahnya sebagai pegawai Belanda, kesempatan baginya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Dada tahun 1933, ayah Syafei Ibrahim pindah tugas ke Muara Bungo Jambi, namun Syafei di suruh melanjutkan sekolah HIS di Bengkulu. Akhirnya Syafei Ibrahim dapat

¹⁸ Sartono Kartodirdjo (ed) *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm 146.

¹⁹ HIS merupakan sekolah Dasar berbahasa Belanda untuk Bumiputera, sekolah ini pada awalnya merupakan sekolah dasar *de Eerste Klasse*. Lama belajarnya tujuh tahun, dan yang dapat diterima bukan lagi anak-anak pembesar dan kalangan atas. Lihat Porakirti.T. Sembolan, *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 213

menamatkan pendidikannya di HIS Bengkulu pada tahun 1937. Bekas gedung HIS di Bengkulu, sekarang menjadi SMP Negeri 1 Bengkulu.²⁰ Selanjutnya Syafei Ibrahim melanjutkan pendidikannya ke sekolah MULO (*Meer Uitgebreid Ondewijs*)²¹ di Jakarta. Pada saat itu, sekolah MULO belum berdiri di Bengkulu.

Menurut penuturan Yurmawi Manan "Pada saat sekolah MULO di Jakarta itulah ia pernah duduk sekelas dengan pahlawan Revolusi Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Di Jakarta Syafei Ibrahim tinggal di rumah keluarganya yaitu, MR. Sidik, karena sring sakit-sakitan, maka Syafei Ibrahim kemudian dipindahkan lagi ke Magelang oleh orang tuanya. Di Magelang Syafei juga pernah satu kelas dengan Ratmini Gandasubrata (isteri almahum Sudjatmoko) dan Sunyata mantan Rektor UNIB yang pertama."²²

Syafei Ibrahim telah digariskan untuk menjalani pendidikan dengan berpindah-pindah tempat. Setelah di Magelang ia pindah lagi ke Jakarta. Meskipun ia melalui pendidikan dengan berpindah-pindah tempat, namun akhirnya Syafei Ibrahim berhasil juga menamatkan pendidikannya di MULO. Dengan membawa bekal pengalaman dan pengetahuan yang ia dapatkan, Syafei Ibrahim kembali lagi ke daerah asalnya di Bengkulu.

Pada masa pendudukan Jepang di Bengkulu, Syafei Ibrahim sudah menjadi pemuda yang matang dalam bertindak. Oleh karena itu ia bersama lima orang temannya pernah dikirim oleh Jepang untuk sekolah *officier oftraining College* (sekolah latihan prawira) di Singapura selama sembilan bulan.

²⁰ Wawancara dengan Yurmawi Manan, tanggal 24 Maret 2007 di Bengkulu.

²¹ MULO merupakan sekolah lanjutan untuk ELS, yang pada tahun 1903 disebut "Kursus Mulo". Bagi mereka yang melanjutkan ke MULO. Lama belajarnya tiga tahun adalah semua lulusan sekolah rendah, kecoalai sekolah desa.

²² Wawancara tanggal 21 Mei 2001 di Bengkulu

Pada tahun 1943, Syafei Ibrahim bersama putra-putri daerah lainnya mendapat kesempatan memasuki pendidikan militer *Gyugun*, yaitu pendidikan/latihan yang dicadangkan sebagai calon perawira Jepang. Untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh pemerintah Jepang di kota Pagar Alam.²³ Di Pagar Alam itulah Syafei Ibrahim dan kawan-kawan seperjuangannya dilatih baik fisik maupun mentalnya. Hasil pendidikan tersebut kelak menjadi tokoh-tokoh pejuang yang dapat diandalkan.

C. Perjuangan dan Pengabdian

a. Berjuang Di Garis Depan

Perjuangan generasi 1940-an lebih memilih jalur diplomasi dengan tekanan-tekanan intelektual untuk membentuk opini masyarakat, daripada jalan kekerasan dan berperangan. Sementara itu, generasi 1940-an adalah generasi yang tidak sabar. Menurut mereka, kemerdekaan tidak hanya melalui jalan perundingan akan tetapi juga aksi militer.²⁴ Aksi-aksi itulah yang menjadi gerakan revolusi. Mereka lebih percaya pada cara-cara perjuangan bersenjata dari pada teori-teori politik mengenai cita-cita kemerdekaan.

Kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan mendapat ujian yang berat. Ujian pertama datang dari Jepang, yang masih bersenjata lengkap dan Belanda yang hendak berkuasa. Republik yang masih sangat muda belum memiliki perangkat pertahanan yang memadai. Meskipun demikian, kondisi yang memperhatikan itu tidak

²³ M.Z. Rani, *Perlawanan Terhadap Penjajah dan Perjuangan Menegakan Kemerdekaan di Bumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka. 1990, hlm. 43

²⁴ Todiruan Dyo, *Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G 30 S/PKI*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1991. hlm. 26

sepenuhnya membuat bangsa yang baru dimerdekakan tidak memiliki organisasi pertahanan sama sekali.

Perlu diketahui, bahwa pemerintahan militer Jepang di Bengkulu telah membubarkan pasukan *Heiho* dan *Gyugun* setelah menderita dan menyerah tanpa syarat kepada tentara Sekutu. Pembubaran *Heiho* dan *Gyugun* itu sendiri tanpa diketahui oleh para tokoh pejuang dan masyarakat Bengkulu bahwa Republik Indonesia sesungguhnya sudah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Menurut catatan tertulisannya Nawawi Manaf (komandan BKR wilayah Bengkulu), disebutkan bahwa pasukan *Heiho* dan *Gyugun* yang ada diwilayah Bengkulu pada waktu itu berjumlah sekitar 3.000 orang.²⁵ Para pemuda yang pernah dilatih oleh Jepang inilah yang mengerti tentang ilmu mempertahankan tanah air. Kalau tidak demikian barang kali Bengkulu akan segera direbut oleh Belanda kembali.

Untuk mempertahankan kemerdekaan rakyat dan bekas *Heiho* dan *Gyugun* Bengkulu terlibat secara aktif dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, di daerah-daerah mulai pertempuran seperti di Kepahiyang, Curup dan Manna. Bangunan- bangunan pemerintah Hindia Belanda, seperti gedung-gedung dan jembatan dihancurkan. Hal itu terpaksa dilakukan guna menghambat pasukan Belanda yang hendak menjajah kembali. Sebagai akibat taktik bumi hangus tersebut, daerah Bengkulu semakin terisolasi, baik antar daerah Bengkulu sendiri maupun terhadap dunia luar, karena semuanya telah dihancurkan dan tidak dapat segera dibangun kembali.²⁶

Para tentara bekas *Gyugun* dan *Heiho* melakukan musyawarah di Manna Bengkulu Selatan pada tanggal 30

²⁵ Nawawi Manaf, *Perjuangan Kemerdekaan di Bengkulu*, Bengkulu: Pantia Anjangasa Menyelusuri Tapak-Tapak Perjuangan 45, 1979. hlm. 5

²⁶ Abdullah Sidik, *Sejarah Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 139

Agustus 1945. Mereka memandang perlunya kesatuan langkah dalam perjuangan. Musyawarah tersebut menyepakati pembentukan organisasi Pembela Tanah Air. Buldani Masik dan Merahnuddin diangkat sebagai ketua dan wakil ketua organisasi tersebut. Selanjutnya diputuskan juga membentuk suatu organisasi yang diberi nama BRI (Barisan Republik Indonesia). Nur Arifin dan Mukhtar Latif ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua.

Situasi yang masih memanas benar-benar dimanfaatkan oleh para pemuda untuk membentuk barisan-barisan. Syamsul Bahrun dan kawan-kawan mempelopori barisan sebagai berikut: di Bintuan. Ismail, Alihanafiah, Nahip dan Kenadsi di Masmabang. Di daerah Tais Husen, Abu Hanafiah di Kerkap. Amin Kaum, Sofyan Abu Hurairoh dan Umrar Harun di daerah Lais. Sementara di daerah lainnya, di Lebong Tandai oleh Usman Makrup. Di daerah Sebelat oleh Abu Razali, di Muko-muko oleh Saidina Ali, di Tabah oleh Sualaiman Wahab dan R. Sulaiman. Di daerah Muara Aman oleh A. Razik dan Bakhtiar S. Baharudidin Nasution, dan di Kebawetan oleh M.Arif. M.Hud, M.Nur Sasdi dan I Singe.²⁷

Dengan terbentuknya barisan-barisan di masing-masing daerah, maka kelompok-kelompok barisan segera melakukan konsolidasi dan membentuk lasykar perjuangan. Mereka menyadari bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan merupakan usaha kolektif dari seluruh anak bangsa. Atas inisiatif M. Arif di Perkebunan Kebawetan dibentuk Lasykar Buruh yang berhasil menghimpun 150 orang anggota.²⁸

Dengan direkrutnya paraburuh perkebunan, maka selanjutnya mereka berinisiatif mengambil alih perkebunan

²⁷ M.Z. Rani, *Perlawanan Terhadap Penjajah dan Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Bumi Bengkulu*. Jakarta: 1990, hlm. 52

²⁸ *Ibid*

atau nasionalisasi sehingga menjadi milik pemerintah Indonesia. Rakyat dari berbagai tingkatannya, pelajar, para pemuda, bekas *Gyugun*, petani dan seterusnya berjuang untuk menegakkan kemerdekaan. Perjuangan tersebut tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota saja, akan tetapi juga di dusun-dusun atau marga. Seluruh rakyat secara keseluruhan terlibat dalam usaha mempertahankan kemerdekaan.

Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan Jepang maupun Sekutu, pada tanggal 6 September 1945 di Bengkulu dibentuk sebuah Angkatan Pemuda Indonesia (API) Yang menghimpun para pemuda pejuang Bengkulu yang dipimpin oleh Nawawi Manaf. Angkatan Pemuda Indonesia ini mengemban tugas untuk menyedarkan masyarakat yang belum mengetahui Indonesia telah merdeka. Anggota API ini sebagian besar terdiri dari para pemuda termasuk Syafei Ibrahim. Syafei Ibrahim bertugas untuk menyuruh masyarakat agar bendera merah putih tetap berkibar diseluruh wilayah Bengkulu. Termasuk di kantor-kantor pemerintah dan rumah-rumah penduduk, maupun digedung-gedung sekolah seperti Taman Siaswa dan Jamiatul Khair.

Sebagai kelanjutan dari API, pada tanggal 10 September 1945 di rumah Maria Rani di Pasar Pengantungan Bengkulu, dibentuk Barisan Pemuda Indonesia (BPI). Yang hadir ketika itu, antara lain Nawawi Manaf, Syafei Ibrahim, A. Rusdi, Hadis Lani, Zahari Tani, Inuh Mustafah, Ismail, Tarmizi Zikri, Zainal Ghafur, Hamid, Hamid Amat, Razali Hadi, Rivai Aris, Umar Kader, Razak Ishak. M.Z. Rani, Kiagus, M. Thoha, R. Hadi dan lain-lain.²⁹

Dalam pertemuan tersebut juga disusun kepengurusan BPI di daerah - daerah. BPI di kota Bengkulu dipimpin oleh

²⁹ *Ibid*, hlm, 50

Nawawi Manaf, M. Z. Rani dan Syafei Ibrahim.³⁰ Tidak berapa lama kemudian tepatnya pada tanggal 20 september 1945, Angkatan pemuda Indonesia (API) dilebur menjadi BKR (Barisan Keamanan Rakyat), dibawah pimpinan Nawawi Manaf, sedangkan Syafei Ibrahim dipercaya sebagai komandan pasukan.³¹

Sebagai untuk meningkatkan keamanan, pada tanggal 17 Oktober 1945 dibentuklah Penjaga Keamanan rakyat (PKR). Sekolah Taman siswa di tengah Padang yang menjadi tempat pendaftaran dipenuhi para pemuda. Setiap pendaftar mendapat kartu pengenalan PKR. Nawawi Manaf dan Syafei Ibrahim mengambil sumpah anggota baru. Acara pengambilan sumpah ini dihadiri oleh beberapa perawira eks *Gyugun*. Tiap-tiap anggota baru wajib mengucapkan sumpah atas nama merah putih, jiwa raganya menjadi milik Republik Indonesia. Konsistensi perjuangan merupakan suatu keharusan. Pada teks sumpah dikatakan "kalau anggota PKR mungkir dari kewajibanya untuk setia kepada tanah air, maka Tuhan akan mengutuk dirinya beserta keturunannya".³²

Sebagian anggota PKR masih berusia sangat muda, beberapa diantaranya duduk dibangku sekolah rendah. Bahkan ada juga diantara mereka yang sebetulnya dapat dikatakan belum sanggup menerima tanggungjawab yang demikian besar. Namun karena keadaan mereka menjadi matang secara kejiwaan untuk menjadi orang dewasa yang berkewajiban untuk mempertahankan tanah airnya. Pada saat itu semangat perjuangan para pemuda Bengkulu menggelora dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia

³⁰ Hasyim Kim *Catatan*, 1999. NKRI: PTT BKL 29-08-1945, tanpa tahun

³¹ Wawancara Agus Setyanto dengan Syaifi Ibrahim, Bengkulu 23 Mei 2001

³² M. Ikram dan Achmad Dalip "Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1950) Daerah Bengkulu". Laporan Penelitian. Jakarta : Proyek IDKP Depdikbud, him. 52

yang sangat didambakan itu. Pasukan keamanan Rakyat menjadi pusat revolusi perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.

Selain itu, ada juga gerakan-gerakan spontan seperti gerakan Pemuda Hizbullah yang berasal dari Muhammadiyah yang dipelopori antara lain Rasyid Tahib. Kemudian ada Pemuda Sosialis (Pesindo) yang dipimpin Neng Saufi dan R. Sabri. Pemuda yang tergabung dalam PTT juga membentuk barisan dan Lasykar Merah yang dipimpin oleh Achmad Bugis. Gerakan spontan tidak saja menjadi di kota Bengkulu, juga di dusun-dusun atau marga-marga.

Gerakan barisan-barisan perjuangan sangat mengelora. Di tempat masing-masing mereka melakukan tindakan pengamanan. Kesemuanya dilakukan untuk mengamankan Republik. Meskipun demikian, seluruh komponen masyarakat dengan latar belakang ideologi yang berbeda turun berjuang mempertahankan kemerdekaan. Meskipun terdapat perbedaan, hubungan antar sesama barisan perjuangan jarang sekali terjadi benturan. Mulai dari yang berideologi Islam sampai komunis menghadapi musuh bersama, yakni penjajah.³³

b. Memimpin Pertempuran di Jembatan Pasar Bengkulu

Sebagai komandan pasukan, Syafei Ibrahim melakukan tugasnya dengan sepenuh hati. Bahkan termasuk salah seorang pejuang pemrani dan tidak takut menghadapi segala resiko yang akan terjadi. Baginya mempertahankan Republik Indonesia lebih berarti dari pada harus berkompromi dengan penjajah.

Keberanian Syafei Ibrahim dapat teruji ketika terjadi peristiwa pencegatan tiga orang kapten Belanda dan Inggris

³³ Wawancara dengan H. Arif, Bengkulu 18 Maret 2007

yang datang ke Bengkulu pada tanggal 3 Nopember 1945. mereka adalah: 1) Kapten Belanda, Ir. Trevoro, bekas karyawan tambang emas Lebong Tandai, 2) Kapten Belanda, Smit, 3) dan satu orang kapten Inggris, Mc Crea.³⁴ Mobil sedan yang membawa ketiga orang tersebut dihentikan di Curup. PKR Curup segera menghubungi PKR Bengkulu yang dipimpin oleh Syafei Ibrahim. Para pejuang menanyakan perihal kedatangan ketiga orang kapten tersebut. Namun keesokan harinya ketiga orang kapten tersebut menghadap Residen Ir. Indra Caya mereka datang bermaksud hendak pergi ke tambang emas Lebong Tandai.³⁵

Tanggal 5 Nopember 1945 Ketua PKR Bengkulu memerintahkan pada Syafei Ibrahim, yang ketika itu Syafei menjabat pimpinan umum pasukan TKR untuk menghalangi ketiga orang tersebut untuk pergi ke Lebong Tandai. Kedatangan mereka sangat dicurigai, ditambah lagi mereka datang dengan sikap yang arogan. Disamping itu mereka tidak mau menyebutkan apa keperluannya ke Lebong Tandai.

Dengan gelagat yang demikian, maka pemimpin PKR segera menyiapkan rencana untuk menghadang ketiga orang asing itu. Pada saat Syafei Ibrahim menghadap Residen Bengkulu, untuk membicarakan hal selanjutnya, tiba-tiba sedan yang ditopabngi ketiga orang tersebut melaju dengan cepat menuju Pasar Bengkulu. Pada awalnya para pemuda dan pejuang tetap akan menempuh pendekatan yang lebih santun, namun kenyataannya suasana langsung memanas.

Pada saat dihadang, salah seorang penompang di atas sedan membuka pintu dan lansung menodongkan senjata pada Syafei Ibrahim. Pimpinan PKR berkata kepada M. Daud, salah seorang anggota PKR yang masih muda, dengan nada

³⁴ Zakaria Kamidan, *Harga Diri: Sekelumit Sejarah Perang Dunia Asia Timur Raya/Pacific dan Perjuangan di Derah Bengkulu tahun, 1945*, Catatan, 1995, hlm. 61

³⁵ *Ibid*, hlm 63

keras “mana tombak”. Mendengar ucapan itu dikirah perintah menyerang, maka pemuda yang sudah semakin memanas langsung berteriak “tombak”, akhirnya puluhan tombak melayang kearah sedan dan satu orang keluar dari mobil, sedangkan dua orang langsung tewas di tempat.³⁶ Seorang dari mereka luka berat dan karena kerumunan massa yang begitu banyak, ia berhasil melarikan diri ke pelabuhan lama tempat pos Jepang dengan cara berenang, ia segera melapor kejadian tersebut.

Atas hasil perjuangan pasukan PKR di bawah pimpinan komandan Syafei Ibrahim yang berhasil menggagalkan niat orang Belanda dan Inggris ke Lobang Tandai. Diperkirakan mereka datang adalah untuk menjeput harta karun emas peninggalan Belanda yang masih tertinggal. Belanda tidak sempat membawa emas tersebut, karena begitu cepatnya pasukan Jepang tiba. Dari peristiwa tersebut telah disita tiga buah senjata api *jungle rifle*, dan beberapa kotak peluru, serta beberapa blok kain berwarna merah, biru dan putih termasuk mobil sedan yang dipergunakannya.³⁷

3. Menentang Ultimatum

Insiden tewasnya para perwira Belanda dan Inggris itu ternyata berbuntut panjang. Angkatan laut Inggris melalui orang-orang Jepang memberikan ultimatum kepada para pemimpin rakyat Bengkulu termasuk Syafei Ibrahim selaku pimpinan umum PKR, agar menyerahkan para pejuang yang terlibat insiden tersebut, beserta senjata yang dirampasnya.

Batas ultimatum itu ditetapkan tanggal 8 Nopember 1945 sampai jam 12 malam. Apabila sampai batas waktu belum juga diserahkan, maka Jepang akan melakukan

³⁶ Wawancara dengan M. Asun, tanggal 23 Maret 2007 di Bengkulu.

³⁷

penggeledahan dan penangkapan para pejuang. Menghadapi ultimatum tersebut, Syafei Ibrahim selaku komandan bersama kawan-kawan seperjuangan tidak merasa takut, akan tetapi malah menimbulkan semangat juang yang menggelora. Syafei Ibrahim memerintahkan kepada para pemuda dan para pejuang untuk siap siaga dan mengosongkan rumah-rumah, bagi peria agar bergabung dengan PKR terdekat.

Tentara Jepang melakukan berbagai cara agar pelaku peristiwa Pasar Bengkulu diserahkan pada Jepang untuk diadili. Mulai dari memberi ultimatum sampai ajakan untuk berdamai. Bahkan tentara Jepang melakukan taktik yang licik dengan mengecoh pejuang dengan menyerbu asrama-asrama TKR dan langsung menangkap pewiranya. Antara alain Mayor Nawawi Manaf, Kapten Syafei Ibrahim, Lettu Sofwan Kasim, Letnan Asikin, dan serma Amir Anas. Sedangkan pemuda yang ditangkap diantaranya Ilyas Jambek. Para pemuda yang belum tertangkap yang diduga terlibat peristiwa Pasar Bengkulu disendera keluarganya dan diancam akan dibunuh bila tidak menyerahkan diri.³⁸

4. Masuk Penjara Muara Padang

Dengan menggunakan berbagai taktik dan kelicikannya, tentara Jepang akhirnya berhasil menangkap para pejuang dan pemuda Bengkulu. Syafei Ibrahim termasuk salah satu diantara sepuluh orang pejuang yang ditangkap Jepang. Penangkapan para pejuang ini di dilakukan dengan cara mengancam keluarganya, dengan ancaman jika tidak menyerahkan diri keluarganya akan dibunuh, akhirnya dari pada keluarga yang ditangkap lebih baik menyerahkandiri.

³⁸ Wawancara dengan M. Asun, tanggal 24 Maret 2007 di Bengkulu

Mereka yang tertangkap diperiksa beberapa hari dan beberapa malam secara terus menerus. Sementara kapal perang Inggris sudah dipersiapkan di pelabuhan Bengkulu. Dengan mata tertutup akhirnya semua tahanan di naikan satu persatu ke atas kapal dan para tahanan sebelumnya tidak dikasih tahu kemana tujuan kapal perang tersebut. Setelah berlayar selama satu hari satu malam, pada waktu tengah malam kapal itu berhenti. Mereka diturunkan dari atas kapal satu persatu, kemudian dinaikan ke atas truk. Selama dalam perjalanan mereka hanya dikasih air minum saja.³⁹

Setelah mereka diturunkan dari atas truk, baru kemudian tutup matanya dibuka, Syafei Ibrahim sudah mengetahui bahwa ia dan tahanan lainnya dibawa ke Penjara Muara Padang. Mereka mulai dimasukan ke sel-sel penjara. Setelah lebih dari 24 jam mereka dalam sel itu, baru dikasih air dan makan, sebagian tahanan tidak dapat bangun karena sudah terlalu letih. Lama kelamaan secara beransur-ansur keadaan kesehatan para pejuang Bengkulu yang menjadi tahanan sudah mulai membaik.

Walaupun selama dalam tahanan perlakuan terhadap para tahanan cukup baik, namun Inggris dan Belanda sepaham, bahwa mereka ditahan bukanlah sekedar tahanan politik, tetapi adalah penjahat-penjahat yang harus diperhitungkan. Inggris tidak toleran dalam memberikan hukuman terhadap pembunuh perwira-perwira Inggris dan Belanda. Hukuman yang akan diberikan kepada para tahanan pejuang Bengkulu mengarah kepada hukuman mati.

Hukuman yang diberikan kepada para pembunuh di Penjarah Padang tanpa kompromi, keputusan-keputusan mati dilaksanakan eksekusi tanpa diadakan upacara. Seorang pemuda yang bernama Syarif dari Padang, yang dituduh

³⁹ Wawancara Agus Setyanto dengan Syafei Ibrahim, Bengkulu, 23 Mei 2001

membunuh beberapa orang Belanda, pada suatu pagi dia dipanggil keluar sel. Kemudian dia disuruh berdiri di pinggir tembok lalu ditembak. Dengan memperhatikan kejadian itu, para tahanan dari Bengkulu mulai menyusun rencana untuk melarikan diri dari penjara.

Beberapa tahanan yang terancam dengan hukuman mati, mulai mengatur siasat untuk melarikan diri dari dalam penjara. Orang-orang Padang dan Bengkulu yang terancam hukuman mati dikumpulkan lalu disatukan dalam satu sel. Namun sangat disayangkan, dua orang teman Syafei Ibrahim tidak mau melarikan diri. Mereka hanya pasrah yaitu Ilyas dan Yunus.

Tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1946 pada tengah malam, Nawawi Manaf, Syafei Ibrahim dan tahanan lainnya dari kamar No 25 berjumlah 18 orang dapat melarikan diri dari dalam penjara. Mereka dapat keluar dari arah laut. Namun disayangkan salah seorang teman Nawawi ketinggalan yaitu Asyikin, karena baru berada di atas atap, ketahuan oleh pegawai penjara mereka ditangkap. Tetapi setelah perjanjian Linggar Jati tahanan yang dari Bengkulu dibebaskan antara lain Asyikin, Ilyas, Anas, Yunus dan Daud.

e. Perjuangan Belum Selesai

Setelah Syafei Ibrahim dapat meloloskan diri dari penjara Muara Padang, maka ia kembali ke Bengkulu kemudian bergabung lagi dengan para pejuang yang lainnya. Pada suatu ketika Syafei Ibrahim mendatangi Kolonel Berlian selaku komandan Batalion Divisi Garuda I yang berkedudukan di Tanjung Enim. Disanalah Syafei Ibrahim dipercaya sebagai kepala bagian Pendidikan Divisi Garuda I dan diberi pangkat kapten oleh Panglima I Mayor Jenderal Suhardjo Hardjo

Wardojo melalui komandan Divisi I Letnan Kolonel Berlian.⁴⁰ Dengan pangkat Kapten, maka Syafei Ibrahim membentuk sekolah calon Bintara dan sekolah calon perwira di Kebawetan, dan beliau sendiri menjabat sebagai Direktur Sekolah Pendidikan Perwira Divisi Garuda VIII di wilayah Bengkulu.

Selama klas I hingga klas II, Syafei Ibrahim aktif berjuang memimpin pasukannya. Pada klas I Syafei Ibrahim mendapat tugas untuk membentuk Front Utara yang garis pertahanannya di mulai dari Kepayiang sampai Tanjung Raya. Karena wilayah Bengkulu terutama bagian selatan memerlukan pertahanan yang lebih kuat, maka Syafei Ibrahim di tarik ke Bengkulu untuk mempersiapkan pertahanan hingga Tais atau Bengkulu Selatan.⁴¹ Namun tidak beberapa lama kemudian Syafei Ibrahim ditarik lagi ke daerah Curup untuk mewakili komandan Batalyon Sub Toritorial Bengkulu. Selama klas II Syafei Ibrahim dan kawan- kawannya melancarkan operasi perang gerilya dibawah komandan Batalyon XXVI. Daerah operasi yang dipimpin Syafei Ibrahim adalah sektor utara yang dimulai dari pinggir utara sampai pasar Bengkulu dan ke Muko-muko.

Perjuangan Syafei Ibrahim yang tanpa mengenal lelah dalam mempertahankan kemerdekaan telah diakui oleh teman-teman seperjuangannya. Ketika diadakan gencatan senjata untuk wilayah Sumatera tanggal 14 Agustus 1949 yang disusul oleh instruksi agar seluruh kesatuan dari Batalyon XXVI ditarik mundur untuk diistirahatkan, namun

⁴⁰ Wawancara Agus Setyanto dengan Syafei Ibrahim, Bengkulu 24 Maret 2001

⁴¹ Wawancara dengan Yumawi Manan, tanggal 244 Maret 2007

Syafei Ibrahim masih menjaga wilayah Lebong Tandai, mewakili Nawawi Mananf.⁴²

Setelah klas II, tahun 1949, Syafei Ibrahim ditunjuk sebagai Instruktur bagian rekrutmen Batalyon bersama latnan satu Mahtan. Selanjutnya Syafei Ibrahim diminta untuk menggantikan komandan Batalyon Idham Donal. Batalyon ini akan diprogramkan untuk dikirim ke Republik Maluku Selatan (RMS) oleh karena merasa tidak mengenali orang-orang dibatalyon Idham Dona, maka Syafei Ibrahim menolaknya.⁴³

Tangga 14 Pebruari, Sayfei Ibrahim mengakhiri karirnya di TNI AD, ia mengundurkan diri melalui surat resmi. Untuk mengisi sisa-sisa hidupnya ia berwiraswasta. Disamping beliau berwiraswasta ia masih aktif di berbagai organisasi terutama organisasi Legiun veteran Bengkulu. Tahun 1982 sampai tahun 1987, Syafei Ibrahim dipercaya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tingkat I Provinsi Bengkulu, mewakili Fraksi Karya Pembangunan.

Selan menjadi anggota DPR Tangkat I Provinsi Bengkulu, Syafei Ibrahim juga dipercaya memegang jabatan ketua Dewan Ekonomi Veteran Indonesia Cabang Bengkulu. Karena sebelumnya Syafei Ibrahim memang telah berkecimpung dalam kewiraswastaan. Dengan demikian tidaklah begitu sulit bagi Syafei Ibrahim mengelolah usaha okonomi Veteran Indonesia Cabang Bengkulu. Selama hidupnya Sayfei Ibrahim cukup banyak jasanya terhadap Negara sehingga bliau mendapat dua penghargaan 1) Bintang Bertian I dan II dari Suekarno, 2) Bintang GOM (Gerakn Operasi Merdeka) dari Maluku tahun 1950. Syafei Ibrahim meninggal dunia di Jakarta.

⁴² Nawawi Mananf, *Perjuangan Kemerdekaan di Bengkulu, Bengkulu: Panitia Anjang Sana Penyelusuran Tapa-Tapak Perjuangan* 45. 1979, hlm 17

⁴³ Wawancara dengan Yurnawi Manan, tanggal 23 Maret 2007 di Bengkulu

D. PENUTUP

Penelitian mengenai tokoh Bengkulu, baik tokoh pejuang, pendidik dan tokoh lainya perlu terus dilakukan untuk mengingatkan memori kita akan makna historis yang terkandung didalamnya. Segala bentuk pengorbanan dan perjuangan mereka dapat direkam dan disosialisasikan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk buku sebagai publikasi tertulis maupun dalam bentuk audio visual yang dapat diakses oleh para pelajar dan masyarakat umum secara lebih mendalam.

Pubikasi dalam bentuk buku sudah banyak dilakukan, sedangkan dalam bentuk audio visual masih sangat jarang, bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, kepada pemerintah, sejarawan, peminat sejarah khususnya dan masyarakat umum yang punya kepedulian terhadap publikasi tersebut mau tidak mau diharapkan dapat memberikan dukuangan baik moril maupun materil.

Selanjutnya, secara khusus, kepada pemerintah Pusat melalui pemerintah Daerah, dalam hal ini Departemen Sosial, agar dapat dipertimbangkan tokoh Syafei Ibrahim diusulkan untuk diangkat sebagai tokoh nasional. Hal ini perlu dilakukan mengingat perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan Syafei Ibrahim layak dijadikan alasan untuk diangkat sebagai tokoh nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1994. *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3S
- Badan Pembina Pahlawan daerah Provinsi Bengkulu, *Daftar Riwayat Hidup, Riwayat Pekerjaan, dan Riwayat Perjuangan Ir. Indra Caya*. Badan Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Provinsi Bengkulu, Jui 2002
- Burhan, Firdaus. 1988. *Bengkulu Dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Seni Budaya Nasinal Indonesia.
- Catatan dari Nurul Aini S. Gatam "Sekilas kesan/Perjuangan S. Ibrahim". Jakarta 2007
- Depatemen Perindusaterian. *Sekelumit Sejarah dan Seni Kerajinan Bengkulu*, Bengkulu Depatemen Perindusterian
- Ikram, M dan Acmaddin Dalib. 1980. *Sejarah RevolusiKemerdekaan (1945-1950) Daerah Bengkulu*. Laporan Penelitian. Jakarta: Proyek IDKD Depdikbud
- Leirissa, R. Z dan M. Soenjata Kartadarmadja. 1984. *Pemikiran Biografi dan Kesejarahan Suatu Kumpulan, Prasaran pada berbagai Lokakarya*, Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Seajarh Nasional.
- Gottschalk, Lois. 1969. *"Mengerti Sejarah"* Terjemahan Nograho Noto Susanto Edisi ke -2. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Syafe'i, Suadji. 1984. "Menulis Biografi", , *Dalam Pemikiran dan Kesejarahan: Suatu Kumpulan Prasaran pada Berbagai Lokakarya, Jilid III*, Jakarta: Depdikbud

Sidik, Abdullah *Sejarah Bengkulu 1500-1900*. Jakarta: BalaiPustaka

Rani,M.Z.1990. *Perlawanan Terhadap Penjajah dan Perjuangan Menegakan Kemerdekaan di Bumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka.

Toderuan Dydo. 1991. *Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G 30 S/PKI*. Jakarta: Golden Terayon Press.

Manaf, Nawawi 1979. *Perjuangan Kemerdekaan di Bumi Bengkulu*. Panitia Anjangsana Menyulusuri Tapak-Tapak Perjuangan 45. Bengkulu: Belum diterbitkan

Kamidan, Zakaria. 1994. *Harga Diri: Sekelumit Sejarah Perang di Asia Timur Raya/Pasific dan Perjuangan di daerahBengkulu*

WAWANCARA

1. Agus Setyanto, Bengkulu, 22 Maret 2007
2. Yurmawi Manan, Bengkulu, 23 Maret 2007
3. M. Ali Hanafiah, Bengkulu, 24 Maret 2007
4. H. Arifin, Bengkulu, 18 Maret 2007
5. M. Asun, Bengkulu, 23 Maret 2007
6. Aminuddin, Bengkulu 25 Maret 2007
7. M. Ikram, Bengkulu, 26 Maret 2007

**BPSNT Padang
Press**



(Anggota IKAPI Sumbar)
Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji
Padang Sumatera Barat
Telp/Fax: 0751-496181
Website: www.bpsnt-padang.info

ISBN
978-602-87



978-602-8742-26-9

**Perpustakaan
Jenderal**